BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 29 TAHUN
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD)

KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2020

BAPPELITBANGDA
KAB. SOPPENG

KATA PENGANTAR

Syukur yang tak terhingga marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Pemerintah Kabupaten Soppeng dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ini disusun sebagai salah satu instrument dalam upaya untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

Setelah Tiga tahun perjalanan Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan H. Andi Kaswadi Razak, SE, telah banyak dihasilkan perbaikan dan perubahan sebagaimana Visi dan Misi Daerah Kabupaten Soppeng. Pemerintah Kabupaten Soppeng terus menerus berupaya meningkatkan Kinerja Pemerintah, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, oleh sebab itu berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2018, maka didapat gambaran target-target yang telah terlaksana, target-target yang belum optimal, maupun target-target yang belum terlaksana. Hasil evaluasi selanjutnya dipakai dasar menyusun RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020. Dalam RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Soppeng berupaya melengkapi capaian kinerja yang belum tercapai dan mempertahankan capaian kinerja yang telah baik sebagaimana ditetapkan dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 memperhatikan materi dan hasil telaah tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan RPJPD, kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan-kebijakan provinsi, dokumen RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Kabupaten Soppeng, RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, dokumen RTRWN, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten Soppeng, dan capaian kinerja Kabupaten Soppeng tahun 2018 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2019. Dokumen RKPD memuat kondisi dan permasalahan pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Dengan selesainya Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Soppeng mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan RKPD tersebut. Mudah-mudahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran sehingga arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Soppeng lebih terarah menuju Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik kedepannya.

Watansoppeng, 27 Juni 2019

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR	.....	i
DAFTAR ISI	.....	iii
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOPPENG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020	.....	1
BAB I PENDAHULUAN	.....	I - 1
1.1. Latar Belakang	.....	I - 1
1.2. Landasan Hukum	.....	I - 5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	.....	I - 9
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	.....	I - 6
1.5. Maksud dan Tujuan	.....	I - 11
1.5.1. Maksud	.....	I - 11
1.5.2. Tujuan	.....	I - 12
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN .... CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	.....	II - 1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	.....	II - 1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	.....	II - 1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	.....	II - 8
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		II - 8
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	.....	II - 18
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	.....	II - 21
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	.....	II - 23
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	.....	II - 23
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan	.....	II - 70
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	.....	II - 73
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	.....	II - 73
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah	.....	II - 74
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	.....	II - 75
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	.....	II - 75
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai .. Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	.....	II - 86
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	.....	II-162
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	.....	II-148
2.5.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	.....	II-149
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN	....	III - 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	.....	III - 1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan ..... Tahun 2019	.....	III - 2
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 dan Tahun 2020	.....	III - 6

3.2. Kerangka Pendanaan ..... III - 10
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III - 10
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III - 12
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III - 14

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .... TAHUN 2020 ..... IV - 1
4.1. Prioritas Pembangunan Daerah ..... IV - 5
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV - 26
4.2. Perencanaan Pembangunan Konsep Kewilayahan ..... IV - 30

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..... V - 1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... VI – 1

BAB VII PENUTUP ..... VII - 1

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 29 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021, sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 81);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP, RKPD Provinsi yang memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

7. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 (satu) atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal termasuk jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.
(2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
    a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2020.
    b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah.
(2) Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

(1) Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun 2020 Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menggunakan dokumen RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2020.

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

Pasal 5

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah melakukan singkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan RKPD Tahun 2020.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal : 27 Juni 2019

BUPATI SOPPENG,

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal : 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 29 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 JUNI 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021 serta sudah mengacu kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2019, dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan priode ke IV dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Soppeng tahun 2005-2025. Sedangkan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan tahun ke lima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2016–2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2020 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah, dijabarkan mengenai tujuan, arah dan sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah wajib dilaksanakan oleh pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua aturan tersebut mengemukakan bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek (satu tahun) adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2020 tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini sejalan dengan pasal 258 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal (2) yang menyatakan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2020 berisi evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun 2018, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Substansi dalam RKPD Kabupaten Soppeng berkaitan satu sama lain,sehingga, terdapat konsistensi antara capaian kinerja pembangunan tahun lalu dengan kerangka dan kebijakan ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan prakiraan pagu indikatif tahun berjalan.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun 2018 merupakan landasan pembangunan tahun 2020. Hal tersebut mengingat perencanaan pembangunan perlu mempertimbangkan hasil dan capaian pembangunan yang telah terlaksana serta permasalahan yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Begitu pula dengan prakiraan pendapatan yang diperoleh dan pagu rencana kerja tentunya mempertimbangkan kondisi tahun sebelumnya dan menyesuaikan dengan kerangka dan arah kebijakan ekonomi daerah.

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari evaluasi permasalahan pembangunan, analisis kondisi daearah dan kondisi ekonomi keuangan daerah serta penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang dimulai dari Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten maupun forum SKPD. Forum penjaringan aspirasi masyarakat tersebut merupakan bentuk pola perencanaan partisipatif yang berfungsi untuk menyusun skala prioritas dalam pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2020 yang disesuaikan dengan program dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Soppeng selain itu penyusunan rencana kerja pemerintah daerah telah menggunakan system perencanaan berbasis E-Planning.

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng tahun 2020 berpedoman pada Permendagri No 86 tahun 2017 dengan menggunakan berbagai pendekatan perencanaan. Beberapa pendekatan tersebut yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. *Pendekatan Teknokratis* (strategis dan berbasis kinerja) mengemukakan bahwa perencanaan dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, yang merupakan suatu proses pemikiran strategis. Pendekatan ini tercermin dari: a) Evaluasi menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu; b) Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah masa kini; c) Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang

mempengaruhi penyusunan RKPD; d) Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan; e) Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah); f) Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja; g) Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan; h) Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya; i)Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran. Melalui pendekatan ini rencana yang disusun mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Pendekatan Partisipatif menekankan pada peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan dimaksudkan agar diperoleh gambaran aspirasinya serta dapat menciptakan rasa memiliki. Pendekatan demokratis dan partisipatif diwujudkan dalam RKPD berupa Forum musrenbang yang merumuskan: a) Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan disetiap tahapan penyusunan RKPD; b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan; c) Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan; d) Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal; e) Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD; f) Pelibatan media; g) Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif; h) Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan serta prioritas program; i) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah telah menggunakan E-Planning yang dilaksanakan muali di tingkat pelaksanaan Musrenbang sampai dengan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pendekatan Politis mencerminkan perencanaan yang disusun merupakan amanat RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan merupakan wujud penjabaran tahunan dari RPJMD tahun ke empat dan juga arahan umum RPJPD Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025 yang merupakan bentuk konsekuensi politik yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah terpilih. Pendekatan politis tercermin pada RKPD ini berupa: a) Rapat Koordinasi Kepala Daerah dengan kepala SKPD membahas hal-hal strategis yang berkembang baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang dapat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2020; b)Keterlibatan aktif DPRD dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil serap aspirasi masyarakat serta keterlibatan anggota DPRD pada Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kelurahan , Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten/RKPD; c) Kedudukan RKPD sebagai Peraturan Bupati mengikat semua pihak untuk menjadikan RKPD sebagai acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan termasuk RAPBD.

Pendekatan *Top Down* merupakan perencanaan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan

kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin pada RKPD berupa adanya: a) Sinergi dengan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi Sulawesi Selatan, RKP dan Renja Kementerian/Lembaga; b) Konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Soppeng; c) Konsisten dengan RTRW Kabupaten; d) Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem; e) Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan sebagainya.

Pendekatan *Bottom Up* dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Pendekatan perencanaan ini tercermin dari adanya: a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih; b) Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah; c) Mempertimbangkan hasil Forum SKPD.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum-APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta APBD Tahun Anggaran 2020. RKPD juga merupakan acuan bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD berupa program/ kegiatan SKPD dan/ atau lintas SKPD.

Pemerintah Kabupaten Soppeng terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan pada segala aspek pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik. Kabupaten Soppeng sebagai daerah pertanian dan peternakan mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah dengan menyeimbangkan antara aspek ekonomi, aspek sosial serta lingkungan. Meskipun saat ini Kabupaten Soppeng memiliki banyak kemajuan pesat di segala bidang, namun Pemerintah Kabupaten Soppeng masih melakukan pembenahan dan perbaikan seperti masalah permukiman, kegiatan ekonomi informal secara berlebihan di sejumlah titik hingga persoalan lingkungan hidup.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120);
25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 harus memperhatikan dokumen perencanaan baik ditingkat pusat (RKP Tahun 2020) maupun ditingkat provinsi (RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020). Hal tersebut dimaksudkan agar program dan kegiatan yang direncakan pada tahun 2020 sesuai dengan tujuan di tingkat provinsi maupun nasional dalam aspek sektoral maupun aspek kewilayahan.

Disamping itu, RKPD juga perlu mempertimbangkan RPJMD, agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah dalam rangka

pencapaian tujuan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten. Keterkaitan antara RKPD Kabupaten Soppeng dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainn

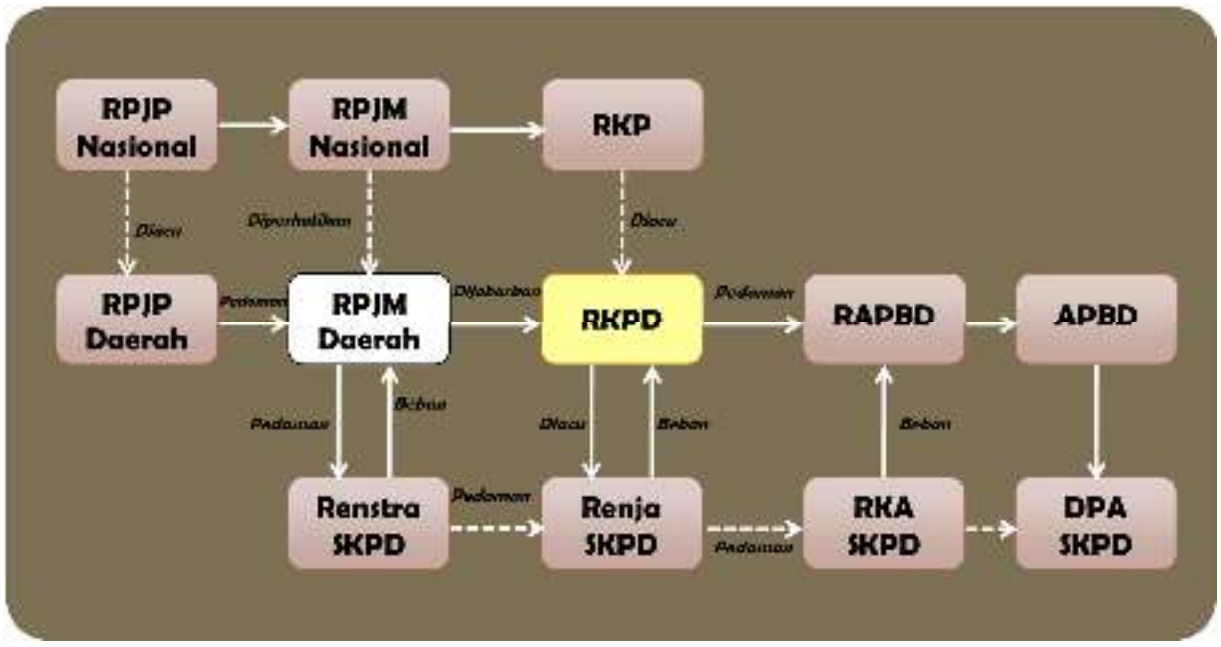

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kab.Soppeng.

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

a. Tujuan yang dikehendaki;
b. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
c. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;
e. SKPD yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaannya.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan pedoman dasar dalam penyusunan Rancangan APBD dengan mengacu RKP dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan serta menjabarkan RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Selain itu, konsistensi RKPD juga diperlukan dalam penyusunan kerangka pendanaan tahunan, dimanafungsinya sebagai arah serta pedoman dalam

penyusunan Renja SKPD Tahun 2020 dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana Pembangunan tahunan daerah untuk tahun 2020, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2020.

Proses penyusunan didahului dengan Penyusunan Rancangan Awal Penyesuaian RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disampaikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai bahan untuk Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan sebagai bahan dalam Musrenbang Kabupaten. Draf RKPD disempurnakan dengan bahan masukan dari hasil forum SKPD dan hasil Musrenbang Kabupaten serta melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir melalui penginputan Aplikasi E Planning. Selanjutnya dirumuskan RKPD untuk ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati . Secara sistematis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagai berikut :

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 mengikuti sistematika penulisan dan kaiodah peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng, landasan hukum perlunya penyusunan RKPD, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, maksud dan tujuan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Dalam Bab II, diuraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah dan permasalahan pembangunan.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKANGKA PENDANAAN

Pada bab ini, termuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan (arah dan kebijakan ekonomi daerah), yang antara lain mencakup indicator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab prioritas dan sasaran pembangunan daerah mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan dan pokok-pokok pikiran DPRD. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat yang merupakan hasil dari musrenbang. Sehingga, program dan kegiatan yang direncanakan bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada Bab ini menjelaskan tentang Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan pada dasarnya hanya melakukan penyesuaikan program kegiatan sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk yang mana penyesuaian tersebut dilaksanakan secara paralel dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah .

Penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan

dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2020. Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 ini juga dimaksudkan untuk merangsang dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta sisten pengawasan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng.

Selain itu Maksud penyusunan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan arahan umum RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2016-2021 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu stategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2019.
2. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan.
3. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang akan dijadikan salah satu kekuatan pembangunan.
4. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Secara lebih sistematis adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi acuan dalam arah kebijakan pembangunan bagi masyarakat, maupun seluruh SKPD Kabupaten Sampang dalam penyusunan Renja SKPD.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintah;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
5. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kab. Soppeng Tahun 2020;
6. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
7. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
8. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2020 Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Soppeng;
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak diantara 40 060 000 - 40 320 000 Lintang Selatan 1190 420 180 - 1200 060 130 Bujur Timur dan berada sekitar 180 km di sebelah utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Soppeng tercatat 1.500 Km². Kabupaten Soppeng merupakan daerah daratan dan perbukitan, dengan luas daratan 700 Km² berada pada ketinggian rata-rata kurang lebih 60 M diatas permukaan laut dan perbukitan yang luasnya 800 Km² berada pada ketinggian rata-rata 200 M diatas permukaan laut.

Secara administratif Kabupaten Soppeng terbagi atas 8 Kecamatan, 21 Kelurahan, 49 Desa, 39 Lingkungan, 124 Dusun, 438 Rukun Kampung, dan 1.163 Rukun Tetangga dengan Ibukota Kabupaten Soppeng yaitu Kota Watansoppeng. Adapun batas wilayah Kabupaten Soppeng terdiri dari:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sidenreng Rappang dan Wajo,
- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Bone,
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Barru

Di Kabupaten Soppeng terdapat beberapa gunung dan gunung tertinggi adalah Gunung Nene Conang dengan ketinggian 1.463 m dpl. Seluruh gunung tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri sebagai jenis gunung berapi. Ketinggian masing-masing gunung tersebut adalah sebagai berikut:

- Gunung Nene Conang + 1.463 m dpl
- Gunung Sewo + 860 m dpl
- Gunung Lapancu + 850 m dpl
- Gunung Bulu Dua + 800 m dpl
- Gunung Paowengeng + 760 m dpl

Puluhan sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Soppeng yang cukup banyak berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian di sekitarnya. Sungai-sungai tersebut antara lain :

- Sungai Langkemme, berhulu di Gunung Lapacu bermuara di Sungai Walannae.
- Sungai Soppeng, berhulu di Gunung Matanre dan bermuara di Sungai Walannae.

- Sungai Lawo, berhulu di Gunung Lapancu dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Paddangeng, berhulu di Gunung Malemping dan bermuara di Danau Tempe.
- Sungai Lajaroko, berhulu di Gunung Addeppungeng dan bermuara di Danau tempe.

Ditinjau dari kondisi jenis tanah, jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Soppeng antara lain Litosol, Gromusol, Mediteran Coklat, Regusol, Alluvial, Litosol Coklat Tua; dengan variasi penyebaran jenis tanah pada setiap kecamatan ; sebagai berikut :

- Kecamatan Marioriwawo: Litosol, Gromusol dan Mediteran Coklat;
- Kecamatan Liliriaja, Citta, Ganra: Gromusol/ Kelabu Tua, Mediteran Coklat dan Regusol;
- Kecamatan Lilirilau: Aluvial, Coklat Kelabuan, Gromusol/ Kelabu Tua Kekuning-kuningan
- Kecamatan Lalabata: Aluvial Hidromorf, Gromusol, Coklat Tua Rensina, Litosol, Mediteran Coklat, Regusol dan Litosol
- Kecamatan Marioriawa dan Kec. Donri-Donri: Aluvial Hidromorf Kelabu Tua, Mediteran Regusol dan Litosol

Temperatur udara di Kabupaten Soppeng berada pada kisaran ± 24° sampai dengan ± 30° dan keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika curah hujan rata-rata pada tahun 2012 sekitar 180 mm dan 15 hari hujan/bulan. Jumlah hari hujan tertinggi yaitu pada bulan Juli sebanyak 25 hari hujan, sedangkan terendah pada bulan Desember yaitu 5 hari hujan.

2.1.1.2. Potensi Pembangunan Wilayah

Kabupaten Soppeng memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif. Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Soppeng (RTRW Kabupaten Soppeng 2012-2032) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032. Arah pengembangan wilayah Kabupaten Soppeng sebagai berikut:

1. Kawasan peruntukan pertanian sebagai berikut:
   - ✓ Kawasan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 46.491 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
   - ✓ Kawasan pertanian hortikultura seluas kurang lebih 21.549 ha yang terdapat tersebar di seluruh kecamatan;

     Kawasan perkebunan terdiri atas:
     - kawasan perkebunan kakao dan kelapa terdapat tersebar di seluruh kecamatan;
     - kawasan perkebunan kopi, terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
     - kawasan perkebunan cengkeh, terdapat di di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, dan Citta;
     - kawasan perkebunan lada terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri;
     - kawasan perkebunan aren terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata,

Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;

- kawasan perkebunan jambu mente terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
- kawasan perkebunan kemiri terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, Citta;
- kawasan perkebunan tembakau terdapat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa;
- kawasan perkebunan kelapa sawit terdapat di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri; dan
- tanaman murbei tersebar di Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri

2. Kawasan peruntukan perikanan sebagai berikut:
   - ✓ Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di Kecamatan Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Ganra, Citta dan Marioriawa;
   - ✓ Kawasan peruntukan budidaya perikanan tersebar diseluruh wilayah kecamatan;
   - ✓ Kawasan pengolahan ikan ditetapkan dan dikembangkan diseluruh wilayah Kecamatan;
   - ✓ Kawasan pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) ditetapkan akan dikembangkan di BBI Ompo Kecamatan Lalabata, BBI Lajoa Kecamatan Liliriaja dan BBI Citta Kecamatan Citta.
3. Kawasan peruntukan industri sebagai berikut:
   - ✓ Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas industri penggilingan padi tersebar di setiap Kecamatan, industri pemintalan sutra alam di Kecamatan Donri-Donri dan industri tembakau di Kecamatan Lilirilau;
   - ✓ Peruntukan industri rumah tangga terdiri atas industri pembuatan gula merah tersebar di Kecamatan Lalabata, Marioriwawo, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, Marioriawa, industri pertenunan di Kecamatan Donri-Donri, Lilirilau, Marioriawa, Lalabata.
4. Kawasan peruntukan pariwisata sebagai berikut:
   - ✓ Peruntukan pariwisata budaya atau sejarah terdiri atas :
     - Villa Yuliana atau Museum Latemmamala, Kawasan Makam Kuno Jera Lompoe, Kompleks Istana Datu Soppeng, Makam Syekh Abdul Majid (Tuang Uddungeng), Makam Petta Bulu Matanre, Situs Megalitik Lawo, Tinco, Sewo dan Umpungeng, Makam Petta Seppang, Kompleks Makam Datu Soppeng, Makam Tuang Uddungeng, Gereja Khatolik Patung Bunda Maria, Rumah Tradisional Batu Laiya, Kompleks Makam Jera'Caddie, Menhir Latemmamala, di Kecamatan Lalabata;
     - Makam Petta Sering, Situs Tomanurung Sanyili, Makam Petta Abbaraningnge, Makam Petta Balubue, Bulu Bottingnge, Appejenge di Kecamatan Donri-Donri;
     - Makam Datu Mario, Makam Petta Jangko, Kompleks Sao Mario, Situs

Tampaning, Makam Kuno Padali, Makam Petta Kajuara di Kecamatan Marioriawa;

- Makam Kuno Datu Lompulle, Kompleks Makam Pakka Saloe, Makam Petta Sara'e, Makam Sullewatang dan Petta Karame, di Kecamatan Ganra;
- Museum Calio, Situs Kecce, Marale, dan Situs Paroto, Kompleks Makam Datu Salaonro, Makam Arung Baringeng, Makam Abbanuange, Situs Megalitik Samoling, Situs Paleolitik Jampu di Kecamatan Lilirilau;
- Situs Talepu, Lonrong, Lenrang, Kompleks Makam Abbanuangnge, Kompleks Makam Datu Pattojo, Benteng Pattojo, Saoraja Seng, Gua Lakaroci di Kecamatan Liliriaja;
- Situs Paleolitik Lakibong, Makam Datu Citta di Kecamatan Citta;
- Makam Kalokoe Watu, Makan Lato Garimpang, Situs Goarie, Situs Megalitik Madenra, Sumur Tua Tettikenrarae, Makam Arung Sekkang, Rumah Arrajang di Kecamatan Marioriwawo;

✓ Peruntukan pariwisata alam berupa Taman Wisata Alam (TWA) meliputi : TWA Lejja, TWA Danau Tempe (Kecamatan Marioriawa), TWA Citta (Kecamatan Citta), TWA Lereng Hijau Bulu Dua (Kecamatan Marioriwawo), Goa Coddong (Kecamatan Citta), Populasi Kelelawar di pusat kota Watansoppeng (Kecamatan Lalabata), dan Kawasan Pesutraan Alam (Kecamatan Donri-Donri);

✓ Peruntukan pariwisata buatan di Kawasan Wisata Ompo;

✓ Peruntukan wisata agro di Desa Mariorilau dan Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.

5. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas:
   ✓ Kawasan strategis perkotaan dan pusat pemerintahan ditetapkan di Kecamatan Lalabata;
   ✓ Kawasan strategis simpul transportasi dan perdagangan ditetapkan di Kawasan Cabenge Kecamatan Lilirilau;
   ✓ Kawasan strategis pengembangan lahan pertanian dan kawasan agropolitan ditetapkan di Kecamatan Liliriaja, Marioriwawo, Ganra;
6. Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas;
   ✓ Kawasan Danau Tempe di Kecamatan Marioriawa
   ✓ Kawasan wisata alam Lejja di Kecamatan Marioriawa; dan
   ✓ Kawasan hutan lindung yang meliputi Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Liliriaja, Lilirilau, Donri-Donri, Citta.

Dari potensi pengembangan wilayah, maka pengembangan wilayah yang sesuai dengan penataan ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan konsisten dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang ada.

2.1.1.3. Rencana Rawan Bencana

Dengan kondisi topografis Kabupaten Soppeng yang bergunung-gunung dan memiliki wilayah dataran rendah serta bentang wilayah yang luas selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana berupa banjir, longsor, dan putting beliung. Wilayah rawan bencana di Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Kawasan rawan banjir terdapat di Daerah Aliran Sungai Walanae meliputi Kecamatan Lilirilau, Liliriaja, Donri-Donri, Marioriawa, Citta dan Ganra;
2. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di di Desa Gattareng kecamatan Marioriwawo, Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, Desa Citta Kecamatan Citta;
3. Kawasan rawan putting beliung terdapat di Desa Pajalesang, Desa Tetewatu, Desa Palangiseng, Desa Paroto Kecamatan Lilirilau;desa Donri-donri. Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata; Desa Pattojo Kecamatan Liliriaja; Desa Limpomajang, Kelurahan Kaca, Kelurahan Attang Salo, Kelurahan Batu-batu Kecamatan Marioriawa.

Penanganan daerah rawan bencana, memerlukan rekayasa perencanaan lintas sektor dalam penanganannya sehingga tidak menjadi bencana yang sifatnya rutin setiap tahun.

2.1.2. Aspek Demografi

Aspek demografi suatu daerah menggambarkan secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi dan distribusi penduduk dan serta perubahan-perubahannya dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan Penduduk merupakan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/ kontinyu. Dewasa ini perencanaan pembangunan baik nasional maupun regional, penduduk merupakan salah satu faktor strategis dikarenakan penduduk bukan hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

Keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada penduduknya, terlebih jika didukung oleh jumlah penduduk yang besar, berkualitas dan produktif yang dapat menjadi sumber potensi dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi, jumlah penduduk yang besar tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan jika tidak didukung oleh perencanaan program-program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas penduduknya. Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat diperlukan data-data kependudukan yang akurat untuk mendukung setiap program peningkatan kualitas agar potensi penduduk dalam suatu wilayah dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mendukung pembangunan.

Berdasarkan data KTP-El Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng kurun waktu 2015-2016 mengalami peningkatan dari 251.102 di tahun 2015 menjadi 252.677 di tahun 2016, dan pada tahun 2017 turun menjadi 241,430. Penurunan jumlah penduduk tersebut disamping disebabkan adanya mutasi penduduk juga karena adanya pembersihan data sehingga data penduduk ganda ataupun data penduduk yang telah meninggal dikeluarkan dari database kependudukan. Perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
Perkembangan Penduduk Kab. Soppeng tahun 2015-2017

TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN	LAJU PERTUMBUHAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
2015	121.617	129.485	251.102	93.92	0.04
2016	122.360	130.317	252.677	93.89	0.35
2017	116.447	124.983	241.430	93.17	-4.66
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng					

Komposisi Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 241.430 jiwa terdiri dari 116.441 jiwa penduduk laki-laki dan 124.983 jiwa penduduk perempuan atau 48,23% penduduk laki-laki dan 51,77% penduduk perempuan. Sedangkan penyebaran penduduk Kabupaten Soppeng tahun 2017 di dominasi Kecamatan Marioriwawo sebanyak 20,96 % yang merupakan kecamatan dengan jumlah desa dan kelurahan terbanyak. Sebaran terbanyak kedua sebesar 20,13 % berada di Kecamatan Lalabata yang merupakan ibu kota Kabupaten atau pusat pemerintahan. Sedangkan distribusi penduduk yang paling rendah di Kecamatan Citta sebesar 3,45 %. Dengan luas wilayah sebesar 1.500 Km², kepadatan penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 161 jiwa/Km². Kecamatan Liliriaja merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 297 jiwa/Km², sementara kepadatan terendah berada di Kecamatan Marioriawa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 92 jiwa/Km². Rata-rata kepadatan Penduduk Kab. Soppeng Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2
Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

Kecamatan	Luas	Penduduk		
	Area	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Marioriwawo	300	24.658	25.938	50.596
Liliriaja	96	13.588	14.886	28.474
Lilirilau	187	18.738	20.674	39.412
Lalabata	278	23.804	24.785	48.589
Marioriawa	320	14.348	15.189	29.537
Donri-Donri	222	11.832	12.969	24.801
Ganra	57	5.519	6.182	11.701
Citta	40	3.960	4.360	8.320
TOTAL	**1.500**	**116.447**	**124.983**	**241.430**

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Potensi tenaga kerja dapat dicermati dari komposisi penduduk menurut umur karena umur seseorang sangat mempengaruhi kemampuan fisiknya sehingga akan menentukan produktivitasnya. Penduduk dengan usia yang sangat mudah (umur 0-14 tahun) umumnya belum produktif karena selain kemampuan fisiknya yang masih kurang, juga karena mereka pada umumnya masih sekolah dan belum bekerja. Begitu pula penduduk yang berusia lanjut (umur 60 tahun ke atas), produktivitasnya sudah menurun dan bahkan sebagian dari mereka sudah tidak bekerja lagi. Bila di hitung jumlah penduduk pada kelompok usia produktif (15-59 tahun) yaitu sebesar 153.245 jiwa maka dapat diketahui bahwa pada umumnya

penduduk Kabupaten Soppeng masih dalam usia produktif. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Soppeng Tahun 2017

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Laki-Laki + Perempuan
	Laki-Laki	Perempuan	
0 – 4	6.755	6.209	12.964
5 – 9	8.912	8.414	17.326
10 – 14	9.964	9.284	19.248
15 – 19	11.056	10.550	21.606
20 – 24	9.812	9.331	19.143
25 – 29	7.820	7.867	15.687
30 – 34	7.641	7.712	15.353
35 – 39	8.190	8.640	16.830
40 – 44	8.190	8.964	17.154
45 – 49	9.022	9.829	18.851
50 – 54	6.861	8.084	14.945
55 – 59	5.932	7.744	13.676
60 – 64	4.760	6.111	10.871
65 – 69	4.075	5.300	9.375
70 – 74	3.064	4.328	7.392
75+	4.393	6.616	11.009
Jumlah	116.447	124.983	241.430

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Soppeng

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Selanjutnya Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s/d 2017 atas dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kab. Soppeng

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1.329.292,90	29,1	1.427.348,20	29,3	1..450.643,7	28,3	1.617.206,50	29,12	1.761.123,29	29,29
2	Pertambangan & Penggalian	138.273,80	3	151.299,20	3,1	58.534,50	3,1	175.714,50	3,16	189.228,39	3,15
3	Industri pengolahan	444.352,60	9,7	496.639,80	10,2	529.141,10	10,3	564.498,30	10,16	621.778,83	10,34
4	Pengadaan Listrik, & Gas	5.879,50	0,1	6.500,10	0,1	6.206,70	0,1	7.244,90	0,13	7.651,92	0,13
5	Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3.031,10	0,1	3.063,50	0,1	3.079,40	0,1	3.155,10	0,06	3.391,54	0,06
6	Konstruksi	597.977,90	13,1	610.299,80	12,5	644.797,60	12,6	670.755,90	12,08	726.283,66	12,08
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	627.616,20	13,7	670.911,20	13,8	718.737,90	14	788.531,90	14,2	863.541,26	14,36
8	Transportasi & Pergudangan	126.452,90	2,8	138.291,20	2,8	150.806,40	2,9	165.273,70	2,98	172.636,33	2,87
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	69.934,50	1,5	76.102,10	1,6	80.319,10	1,6	86.675,10	1,56	95.635,99	1,59
10	Informasi & Komunikasi	163.680,10	3,6	164.739,40	3,4	181.925,90	3,6	201.083,80	3,62	225.201,28	3,75
11	Jasa Keuangan & Asuransi	131.892,10	2,9	144.534,80	3	151.983,50	3	169.524,70	3,05	174.714,38	2,91
12	Real Estate	224.420,00	4,9	252.757,50	5,2	272.687,50	5,3	280.586,90	5,05	290.107,21	4,83
13	Jasa Perusahaan	10.194,80	0,2	10.692,10	0,2	11.316,40	0,2	12.291,80	0,22	13.248,44	0,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	322.637,30	7,1	328.909,00	6,7	350.616,70	6,8	351.264,30	6,32	369.224,46	6,14

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
15	Jasa Pendidikan	260.258,10	5,7	274.026,40	5,6	289.837,30	5,7	317.755,90	5,72	342.203,37	5,69
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	80.318,90	1,8	87.095,20	1,8	95.081,70	1,9	103.499,80	1,86	113.580,04	1,89
17	Jasa Lainnya	31.774,40	0,7	33.543,30	0,7	36.103,40	0,7	38.990,60	0,7	42.575,34	0,71
	PDRB	**4.259.539,20**	**100**	**4.567.987,10**	**100**	**4.876.752,80**	**100**	**5.131.819,00**	**100**	**6.012.125,73**	**100**

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2018

Sementara Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s/d 2017 atas Dasar Harga Berlaku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Soppeng

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.624.249,90	30,07	1.868.525,00	30,26	1.943.945,60	28,47	2.396.900,50	30,2	2.737.431,56	30,6
2	Pertambangan & Penggalian	186.531,20	3,45	241.563,20	3,91	286.945,40	4,2	362.460,50	4,57	384.274,79	4,29
3	Industri Pengolahan	509.342,80	9,43	639.306,10	10,35	728.525,00	10,67	822.548,30	10,37	936.725,33	10,47
4	Pengadaan Listrik, dan Gas	5.179,80	0,1	5.616,40	0,09	5.567,70	0,08	6.096,40	0,08	7.449,31	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.085,30	0,06	3.084,60	0,05	3.233,60	0,05	3.553,30	0,04	4.050,12	0,05
6	Konstruksi	721.771,60	13,36	797.349,60	12,91	883.337,50	12,94	961.744,90	12,12	1.126.405,11	12,59

No	Lapangan Usaha	2013		2014		2015		2016		2017	
		Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%	Juta (Rp)	%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	702.571,10	13,01	756.925,10	12,26	862.811,30	12,64	995.641,10	12,55	1.130.293,69	12,63
8	Transportasi dan Pergudangan	148.888,60	2,76	186.941,40	3,03	220.087,50	3,22	266.121,40	3,35	273.810,84	3,06
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82.604,30	1,53	95.310,20	1,54	103.983,50	1,52	113.746,10	1,43	128.335,83	1,43
10	Informasi dan Komunikasi	175.946,80	3,26	177.822,10	2,88	185.991,40	2,72	218.035,40	2,75	261.882,19	2,93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	186.325,20	3,45	213.134,10	3,45	234.857,60	3,44	277.034,00	3,49	295.267,61	3,3
12	Real Estat	283.950,30	5,26	335.697,00	5,44	384.530,30	5,63	444.364,40	5,6	491.969,00	5,5
13	Jasa Perusahaan	11.012,60	0,2	12.046,50	0,2	13.540,70	0,2	15.896,00	0,2	17.835,64	0,2
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	385.095,30	7,13	422.869,10	6,85	502.593,80	7,36	521.439,50	6,57	561.179,30	6,27
15	Jasa Pendidikan	251.835,50	4,66	278.642,90	4,51	308.564,40	4,52	344.565,70	4,34	379.408,45	4,24
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86.967,80	1,61	99.776,40	1,62	111.467,50	1,63	128.931,50	1,62	145.963,14	1,63
17	Jasa Lainnya	35.772,90	0,66	41.305,90	0,67	48.440,20	0,71	56.708,30	0,71	64.825,10	0,72
	PDRB	**5.401.131,00**	**100**	**6.175.915,60**	**100**	**6.828.423,00**	**100**	**7.935.787,20**	**100**	**8.947.107,05**	**100**

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa struktur ekonomi Kab. Soppeng pada tahun 2013 sampai dengan 2017 masih didominasi oleh sektor pertanian, dimana selama periode tersebut berdasarkan data PDRB harga berlaku tahun dasar 2010 sektor ini rata-rata

berkontribusi sebesar Rp.2.114.210.510.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng. Selanjutnya yaitu sektor Konstruksi yang rata-rata berkontribusi sebesar Rp.898.121.790.000,-. Sementara itu yang paling sedikit berkontribusi selama periode tersebut adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dimana pada periode 2013-2017 sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar Rp.3.401.380.000,- terhadap ekonomi Kab. Soppeng.

Selanjutnya perkembangan Kontribusi masing-masing Sektor dalam PDRB kurun-waktu 2013-2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 6
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Soppeng

Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	29,1	30,07	29,3	30,26	28,3	28,47	29,12	30,2	29,29	30,6
Pertambangan & Penggalian	3	3,45	3,1	3,91	3,1	4,2	3,16	4,57	3,15	4,29
Industri Pengolahan	9,7	9,43	10,2	10,35	10,3	10,67	10,16	10,37	10,34	10,47
Pengadaan Listrik, & Gas	,1	,1	,1	09	,1	08	13	08	13	08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,1	0,06	0,1	0,05	0,1	0,05	0,06	0,04	0,06	0,05
Konstruksi	13,1	13,36	12,5	12,91	12,6	12,94	12,08	12,12	12,08	12,59
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	13,7	13,01	13,8	12,26	14	12,64	14,2	12,55	14,36	12,63
Transportasi & Pergudangan	2,8	2,76	2,8	3,03	2,9	3,22	2,98	3,35	2,87	3,06
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,5	1,53	1,6	1,54	1,6	1,52	1,56	1,43	1,59	1,43
Informasi & Komunikasi	3,6	3,26	3,4	2,88	3,6	2,72	3,62	2,75	3,75	2,93
Jasa Keuangan & Asuransi	2,9	3,45	3	3,45	3	3,44	3,05	3,49	2,91	3,3
Real Estate	4,9	5,26	5,2	5,44	5,3	5,63	5,05	5,6	4,83	5,5
Jasa Perusahaan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,22	0,2	0,22	0,2
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	7,1	7,13	6,7	6,85	6,8	7,36	6,32	6,57	6,14	6,27
Jasa Pendidikan	5,7	4,66	5,6	4,51	5,7	4,52	5,72	4,34	5,69	4,24
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,8	1,61	1,8	1,62	1,9	1,63	1,86	1,62	1,89	1,63
Jasa Lainnya	0,7	0,66	0,7	0,67	0,7	0,71	0,7	0,71	0,71	0,72
PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2018

Dilihat dari kontribusi sektoral yang menggunakan tahun dasar 2010

menunjukkan bahwa sektor tersier berkontribusi paling besar dibanding sektor yang lain. Pada periode 2013-2017 berdasarkan distribusi PDRB Tahun Dasar 2010 nilai rata-rata sektor ini sebesar 42,82%. Walaupun rata-rata pada periode tersebut sektor ini berkontribusi paling besar terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng, tetapi pada tahun 2017 kontribusi sektor ini menurun dibanding tahun 2016 yaitu 42,61% menjadi sebesar 41,91% pada tahun 2017. Selanjutnya sektor yang paling berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor primer dengan nilai rata-rata 29,92% selama periode 2013-2017. Dan sektor terakhir yang berkontribusi pada struktur ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sektor sekunder dengan kontribusi sebesar 27,26%, meskipun berkontribusi paling sedikit dibanding sektor lain tetapi pada tahun 2017 kontribusi sector ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 dimana pada tahun 2016 sebesar 27,18% meningkat menjadi 2748% pada tahun 2017. Penurunan kontribusi sektor tersier pada tahun 2017 diakibatkan oleh bergesernya struktur perekonomian ke sektor sekunder dan primer yang mengalami peningkatan, seperti tergambar pada tabel rata-rata Pertumbuhan Kontribusi Sektor atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013 s/d Tahun 2017 :

Tabel 2. 7
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013-2017 Atas Dasar Harga Berlaku Kab. Soppeng

No	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb %	Hk %
1	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	29,02	29,92
2	Pertambangan & Penggalian	3,10	4,08
3	Industri Pengolahan	10,14	10,26
4	Pengadaan Listrik, & Gas	0,11	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,08	0,05
6	Konstruksi	12,47	12,78
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	2,87	12,62
8	Transportasi & Pergudangan	2,87	3,08
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,57	1,49
10	Informasi & Komunikasi	3,59	2,91
11	Jasa Keuangan & Asuransi	2,97	3,43
12	Real Estate	5,06	5,49
13	Jasa Perusahaan	0,21	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	6,61	6,84
15	Jasa Pendidikan	5,68	4,45
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,85	1,62

No	Sektor	Pertumbuhan	
		Hb %	Hk %
17	Jasa Lainnya	0,70	0,69

Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan masing-masing sektor PDRB Kab. Soppeng kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 atas dasar harga berlaku terlihat bahwa sektor yang pertumbuhannya cukup tinggi adalah Pertanian, Kehutanan, & Perikanan sebesar 29,02 persen dan yang terendah adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang sebesar 0.08 persen. Demikian pula rata-rata pertumbuhan masing-masing sektor PDRB atas dasar harga konstan sektor yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Pertanian, Kehutanan, & Perikanan sebesar 29,92 persen dan yang terendah adalah juga sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang sebesar 0.05 persen.

2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang dihasilkan suatu daerah pada tahun tertentu dibandingkan nilai PDRB tahun sebelumnya, dengan menggunakan nilai PDRB Harga Konstan. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan serta sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perncanaan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng lima tahun terakhir tumbuh positif dengan besaran yang fluktuatif, diakibatkan oleh peranan sektor pertanian yang memberikan kontribusi selama lima tahun terakhir yang juga mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng dengan tahun dasar 2010 tercatat sebesar 7,23%. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 8,34% meningkat dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 8,14%. Dan jauh meningkat dibanding tahun 2015 yang melambat yaitu 5,11%.

Bagan 2. 1

Pertumbuhan Ekonomi Kab. Soppeng (%) Tahun 2013-2017

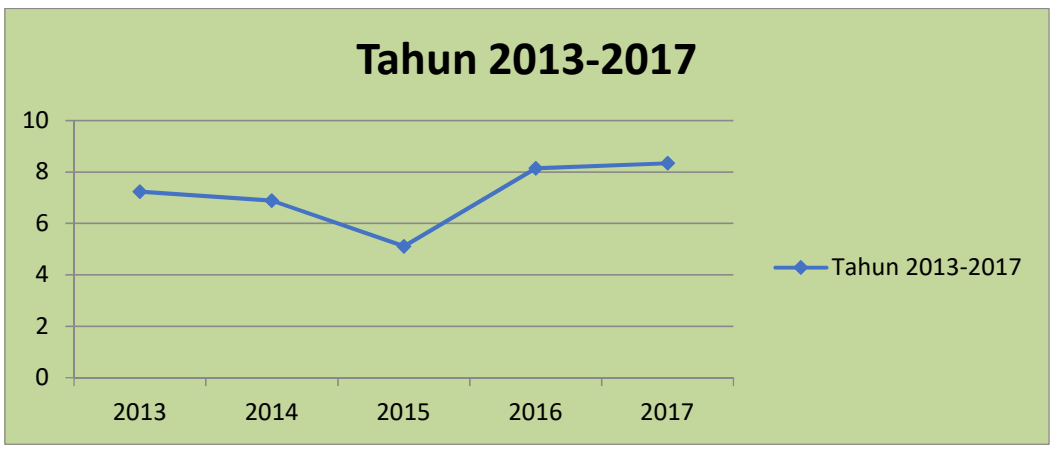

Sumber : BPS Kab. Soppeng

2.2.1.3. Inflasi

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan tentang perkembangan harga dan perubahan nilai yang dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi makro atau mikro, baik fiskal maupun moneter. Pada tingkat mikro, rumah tangga/ masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap.Pada tingkat korporat angka inflasi dapat dipakai untuk perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Inflasi merupakan indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting.

Bagan 2. 2
Preview Perkembangan Inflasi Kab. Soppeng Tahun 2014-2017

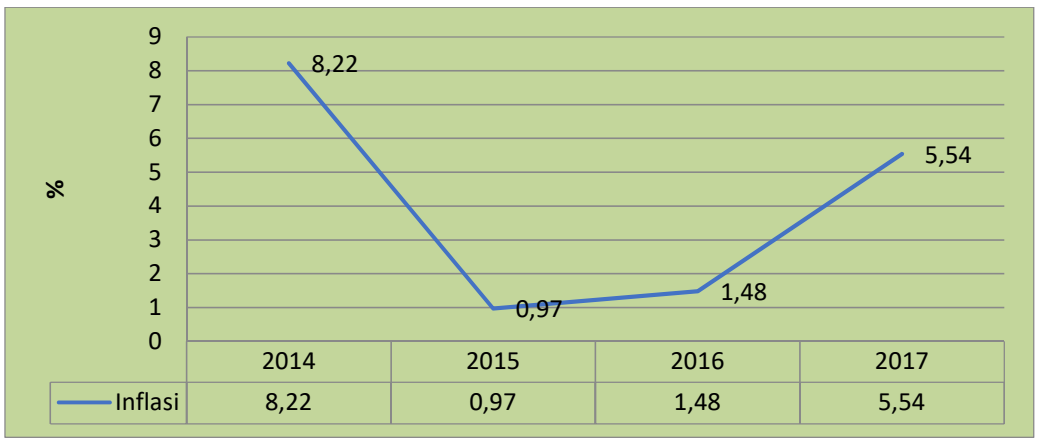

Sumber : BPS Kab. Soppeng

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi Kabupaten Soppeng selama tahun 2015 adalah sebesar 0,97 persen,lebih rendah dibanding inflasi pada tahun 2014 yang sebesar 8,22 persen. Sedangkan pada tahun 2016 inflasi Kabupaten Soppeng sebesar 1,48 persen. Kestabilan harga yang tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga di Kabupaten Soppeng dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), , yang berupaya menjaga stabilitas harga dan inflasi di Kabupaten Soppeng. Secara periodik TPID telah melakukan pemantauan inflasi, mengeluarkan rekomendasi rekomendasi kebijakan, dan melakukan langkah-langkah antisipatif-preventif dalam rangka mengendalikan kenaikan harga dan inflasi.

Data-data PDRB, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Soppeng sampai pada tahun 2017 dalam kondisi yang cukup kondusif yang ditandai dengan karakter pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Soppeng adalah wilayah yang berpotensi sebagai aktivitas investasi para investor baik dari dalam maupun luar wilayah untuk menanamkan modalnya dalam berbagai sektor ekonomi. Melihat perkembangan ekonomi makro tahun-tahun sebelumnya, dapat diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara keseluruhan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 menunjukkan kondisi yang kondusif, dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang terkendali.

2.2.1.4. PDRB Perkapita

PDRB PerKapita atau pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama satu periode tertentu. Pendapatan Per Kapita juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai indicator kesejahteraan suatu daerah, standar pertumbuhan kemakmuran daerah, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi, dan pembanding tingkat kemakmuran antar daerah.PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

Selama periode 2013-2017 PDRB perkapita Kabupaten Soppeng terus mengalami peningkatan. PDRB perkapita Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 ADHB telah mencapai Rp.39.508.000,- atau meningkat sebesar 39,38% dibanding pada tahun 2013 yang hanya sebesar Rp.23.950.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2017 tiap penduduk di wilayah Kabupaten Soppeng mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara ekonomi sebesar 39,60 juta rupiah.

Nilai PDRB perkapita Kabupaten Soppeng secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB Perkapita ADHK yang pada tahun 2017 mencatatkan kenaikan sebesar 23,72% dibanding tahun 2013 atau dari nilai PDRB Perkapita sebesar 20,25 juta rupiah pada tahun 2013 menjadi 26,54 juta rupiah pada tahun 2017. Meskipun demikian pada kenyataannya kenaikan PDRB perkapita menunjukkan adanya peningkatan harga barang dan jasa terutama yang dikonsumsi oleh public, baik secara langsung maupun tidak langsung kenaikan harga-harga tersebut pasti dirasakan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan perlunya kemampuan yang lebih terutama dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2.2.1.5. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang/rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik untuk makanan maupun non makanan. Kemiskinan dapat dilihat dari dua ukuran makro yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Data kemiskinan absolut adalah data kemiskinan yang merefleksikan suatu standar seperti kebutuhan pokok minimal. Kemiskinan absolut diukur berdasarkan indikator bersifat uang (garis kemiskinan)

dengan pendekatan kebutuhan dasar.

Sumber utama lahirnya kemiskinan disebabkan masalah kesejahteraan sosial masyarakat. Sejatinya kemiskinan berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan merupakan masalah pokok daerah yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berikut tabel Angka Kemiskinan Kab. Soppeng Tahun 2013-2017 :

Tabel 2. 8
Angka Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	21,300	19,800	18,880	19,100	18,706
Persentase Penduduk Miskin	9.43	8.76	8.36	8.45	8.27
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)	202,666	207,084	213,164	220,192	225,936

Sumber : BPS Kab. Soppeng

Pada kurun 2013-2017, angka kemiskinan Kabupaten Soppeng relatif mengalami penurunan. Pada tahun 2013 angka kemiskinan sebesar 21.300 jiwa (9.43%), pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 19.800 jiwa (8.76%). sedangkan pada tahun 2017 angka kemiskinan di Kabupaten Soppeng terus mengalami penurunan sebesar 18.706 jiwa (8,27%) dari tahun 2016 sebesar 19.100 (8,45%) Penurunan merupakan implikasi dari peaksanaan kebijakan yang pro poor dan pro seperti program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin, Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin, dan beberapa program lainnya.

Meskipun jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun garis kemiskinan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin ternyata cenderung mendekati garis kemiskinan. Sehingga perbaikan tingkat pengeluaran penduduk miskin harus terus dioptimalkan meskipun pada kenyataannya masalah yang dihadapi sangat kompleks. Pada tahun 2017 garis kemiskinan di Kabupaten Soppeng sebesar Rp.225,936,- meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp.202.666,-.

Kompleksitas masalah kemiskinan ini tentu tidak bisa dijawab melalui program pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan (Pro Poor) dan penciptaan lapangan kerja (Pro Job). Penciptaan lapangan kerja inilah yang akan menggerus tingkat pengangguran di Kabupaten Soppeng. Pengangguran mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan dengan tidak adanya pekerjaan yang dimiliki maka tidak ada pula pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan kemiskinan pada masyarakat. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi di suatu wilayah. Untuk melihat indikator TPT dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Bagan 2. 3
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Soppeng
Tahun 2012-2017

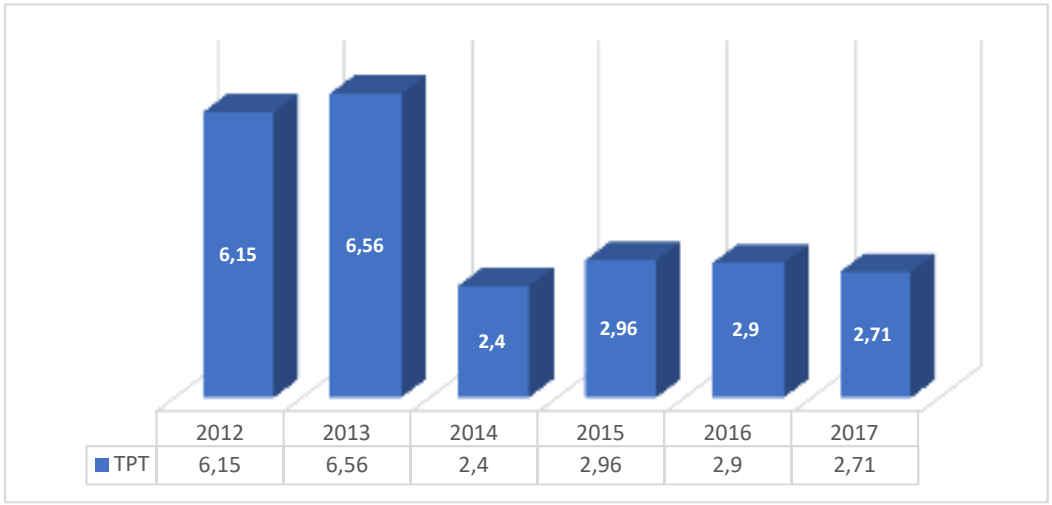

* Sumber : BPS Kab. Soppeng, 2018

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2017, TPT di Kabupaten Soppeng sebesar 2,71% yang mana mengalami penurunan yang signifikan apabila dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 6,15%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penyerapan angkatan kerja penduduk usia kerja di Kabupaten Soppeng mengalami peningkatan cukup signifikan.

2.2.1.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Beberapa indikator yang dapat mengambarkan partisipasi angkatan kerja yaitu: 1). *General Economic Activity Ratio* (Rasio Aktifitas Ekonomi Umum), rasio ini khusus untuk penduduk usia kerja, atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja. Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kab. Soppeng Tahun 2016-2017 pada tabel berikut :

Tabel 2. 9
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2021

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penduduk Angkatan Kerja	171.434	164.116
2	Jumlah penduduk usia kerja (15-64 Tahun)	199.796	191.892
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	86%	86%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial dilakukan antara lain terhadap angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

1. Indeks Pembangunan Manusia

Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun selalu meningkat. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli. Rata-rata kenaikan IPM Kab. Soppeng periode 2012-2016 sebesar 0,31 poin per tahun. Rata-rata angka pengeluaran perkapita selama periode 2010-2014 sebesar 644.402 rupiah, rata-rata lama sekolah 6,88 tahun, rata-rata harapan lama sekolah 11,39 tahun, dan rata-rata angka harapan hidup selama 68,25 tahun.

Tabel 2. 10
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Soppeng Tahun 2013-2017

Komponen	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (tahun)	68.37	68.42	68,52	68,62	68,72
Harapan Lama Sekolah	11,42	11,45	11.81	12.20	12,33
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6.93	7.04	7,05	7,06	7,42
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (000 Rp PPP)	646.38	654.81	608.03	896.50	903.50
IPM	64.43	64.74	65.33	65.95	66.67

Sumber : BPS Kab. Soppeng

Angka capaian IPM Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan IPM ini disebabkan karena mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan komponen daya beli. Rata-rata kenaikan IPM Kab. Soppeng periode 2013-2017 sebesar 0,72 poin per tahun. Jika dibandingkan capaian IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan maka pada tahun 2017 posisi IPM Kabupaten Soppeng berada pada peringkat 19 dari 24 Kabupaten/Kota. Peringkat tersebut diharapkan pada tahun yang akan mengalami perubahan sehingga Kabupaten Soppeng dapat masuk 10 besar peraih IPM terbaik, mengingat poin IPM Kab/Kota relatif perbedaannya kecil. Melihat kinerja pembangunan yang telah dilakukan pada tahun 2017 yang diestimasi akan tumbuh 66.67 Poin, IPM Kab. Soppeng akan turut mengalami peningkatan secara signifikan.

Capaian komponen pembentukan IPM dijelaskan sebagai berikut :

- Angka Harapan Hidup

  Angka harapan hidup yaitu rata-rata lama hidup (dalam tahun) penduduk, yang menurut BPS dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Asumsinya, semakin panjang angka harapan hidup maka kesejahteraan penduduk semakin tinggi, khususnya berdasarkan aspek kesehatan. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kabupaten Soppeng :

Tabel 2. 11
Usia Harapan Hidup Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Usia Harapan Hidup	68,62	68,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Penduduk Kabupaten Soppeng secara umum memiliki angka usia harapan hidup 68 tahun atau lebih. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang cenderung semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan pun ditunjang oleh berbagai jaminan kesehatan, yaitu berupa Jaminan Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, mendorong kesadaran masyarakat untuk berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit.

- Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 mencapai 12,20 dan di tahun 2017 menjadi 12,33 tahun, angka harapan lama sekolah tersebut masih dibawah angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 13,28 tahun.
- Rata-rata lama Sekolah, Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah 7,42 meningkat 0,36 point dibanding tahun 2016 yaitu 7,06. Angka rata-rata lama sekolah tersebut masih dibawah angka rata-rata lama sekolah provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,95.
- pengeluaran perkapita di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar Rp.8.965.000,- mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi Rp.9.035.000,- namun masih dibawah pengeluaran perkapita penduduk di Sulawesi-Selatan sebesar Rp 10.489.000,-

2. Persentase Balita Gizi Buruk

Berdasarkan data Dinas Kesehatan jumlah balita penderita gizi buruk pada tahun 2016 adalah 3 atau, 0,022 persen dari total jumlah balita dan pada tahun 2017 jumlah balita gizi buruk adalah 2 balita atau 0,015 persen dari jumlah total balita sebanyak 13.132 balita.

Tabel 2. 12
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2016 s/d 2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah balita gizi buruk	3	2
2	Jumlah balita	13.465	13.132
	% Balita Gizi Buruk	0,022	0,015

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

3. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi kurang adalah gangguan kesehatan yang diakibatkan kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan, aktifitas berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan gizi kurang, terjadi pada anak usia kurang

dari lima tahun. Berdasarkan data Dinas Kesehatan jumlah balita penderita gizi kurang pada tahun 2016 adalah 142 atau, 1,05 persen dari total jumlah balita sebanyak 13.465 dan pada tahun 2017 jumlah balita gizi kurang turun menjadi 14 balita atau hanya 0,011 persen dari jumlah total balita sebanyak 13.132 balita.

Tabel 2. 13

Prevalensi Balita Gizi Kurang Tahun 2016 s/d 2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Banyaknya balita gizi kurang	142	14
2	Jumlah balita	13.465	13.132
	Prevalensi Balita Gizi Kurang	1,05	0,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

4. Cakupan Desa Siaga Aktif,

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, *surveillance* berbasis masyarakat, yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya PHBS dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk, tabel berikut menunjukkan Cakupan Desa Siaga Aktif:

Tabel 2. 14

Cakupan Desa Siaga Aktif Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah desa siaga aktif	69	70
2	Jumlah desa siaga yang dibentuk	70	70
	Cakupan Desa Siaga	98,57	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Terlihat bahwa cakupan desa siaga di Kab. Soppeng telah mencapai 100 persen meningkat dibanding tahun 2016 yang baru mencapai 98,35 persen

5. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang perbandingan antara penduduk yang merupakan angkatan kerja (15 tahun ke atas) dengan penduduk yang usia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kab. Soppeng tahun 2016 adalah 85,89, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 143,42 %. Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kab. Soppeng Tahun 2016-2017 pada tabel berikut :

Tabel 2. 15

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Angkatan kerja 15 tahun ke atas	171.140	334.607

2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	199.246	233.298
	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	85,89	143,42

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab.Soppeng

6. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal seperti kebutuhan akan spiritual pangan, sandang, papan kesehatan dan KB sementara yang dimaksud dengan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal tetapi belum dapat kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, Interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 di Kab. Soppeng pada tahun 2017 adalah 9.019 atau 12,85% dari jumlah keluarga yang ada yaitu 70.205 keluarga.

Tabel 2. 16
Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Tahun 2016 s/d 2017
Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	NA	9.019
2	jumlah keluarga	NA	70.205
	% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	NA	12,85

Sumber ; Dinas PP&KB Kab.Soppeng

7. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah, semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah secara tidak langsung menunjukkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan penerimaan dengan memanfaatkan potensi-potensi pendapatan yang dimiliki, tabel berikut menunjukkan persentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah :

Tabel 2. 17
Persentase PAD terhadap Pendapatan Tahun 2016 s/d 2017
Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	PAD	83.286.049.912,00	115.309.170.743,00
2	Jumlah pendapatan daerah	1.236.893.800.959,00	1.131.991.996.848,00
	% PAD Terhadap Pendapatan	7%	10%

Sumber : BPKD Kab.Soppeng

8. Opini BPK

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kab. Soppeng telah mendapat perbaikan sejak tahun 2012 dan bahkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 telah mendapat predikat opini WTP.

9. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan yang telah berhasil dicapai pada Tahun 2017 sebesar 96.47 di bawah target skor PPH yang ditetapkan sebesar 88 dengan capaian tingkat realisasi sebesar 84.9%. Meskipun masih di bawah target yang ditetapkan namun terjadi kenaikan konsumsi energi masyarakat di Kab. Soppeng dikarenakan terjadinya kenaikan konsumsi semua kelompok pangan terutama kelompok sayur, buah, pangan hewani, umbi-umbian dan gula. Tingkat pencapaian Skor Pola Pangan Harapan selama Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2. 18
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

KELOMPOK PANGAN	TAHUN 2016					TAHUN 2017				
	% AKG	BOBOT	SKOR RIIL	SKOR MAKS	SKOR PPH	% AKG	BOBOT	SKOR RIIL	SKOR MAKS	SKOR PPH
Padi-padian	52,4	0,5	26,2	25,0	25	53,5	0,5	26,75	25,0	25
Umbi-umbian	3,15	0,5	1,6	2,5	1,6	1,7	0,5	0,85	2,5	0,8
Pangan Hewani	10,05	2,0	20,1	24,0	20,1	9,1	2,0	18,2	24,0	18,2
Minyak Nabati	8,8	0,5	4,4	5,0	4,4	8,2	0,5	4,1	5,0	4,1
Buah/biji berminyak	1,8	0,5	0,9	1,0	0,7	1,2	0,5	0,6	1,0	0,6
Kacang-kacangan	3,1	2,0	6,2	10,0	6,2	2,1	2,0	4,2	10,0	4,2
Gula	4,2	0,5	2,1	2,5	2,1	3,9	0,5	1,95	2,5	1,95
Sayur dan buah	7,1	5,0	35,5	30,0	30	7,6	5,0	38	30,0	30
Lain-lain	2,5	0	0	0	0	2,2	0	0	0	0
Jumlah	93,1		96,98	100	90,1	89,5		94,65	100	84,85

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

10. Penguatan Cadangan Pangan

Pada Tahun 2017 tingkat pencapaiannya belum terealisasi dimana belum adanya cadangan pangan pemerintah sebesar 100 ton untuk kabupaten/kota sehingga belum terealisasi. Untuk menyikapi hal tersebut maka pada Tahun 2017 telah ditargetkan pengisian cadangan pemerintah sebesar 24 ton dengan memperhatikan kemampuan anggaran kabupaten/kota.

Tabel 2. 19
Penguatan Cadangan Pangan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah cadangan pangan kabupaten/kota	10 ton	10 ton
2	Penguatan Cadangan Pangan	10 ton	10 ton

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

11. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan Sampai Tahun 2017 tingkat pencapaiannya masih nihil. Hal ini disebabkan akibat kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Soppeng cukup tahan pangan dimana belum ditemukan adanya indikasi gejala-

gejala kerawanan pangan di 8 kecamatan baik yang sifatnya kronis maupun temporer sehingga belum ada penanganan secara dini daerah rawan pangan.

12. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap Total PDRB

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran Sektor Pertanian dalam struktur PDRB Kab. Soppeng. Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kab. Soppeng mencapai ***27,53%***, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi ***27,74%***. Kontribusi tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Tingginya kontribusi tersebut terutama didukung oleh Sub Sektor Tanaman Pangan dan Sub Sektor Perkebunan, sebagai sub sektor terbesar dalam sektor pertanian yang ada di Kab. Soppeng. Berikut gambaran kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Kab. Soppeng tahun 2016-2017 (PDRB atas dasar harga berlaku).

Tabel 2. 20
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap Total PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/ perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
2	Jumlah PDRB (Juta Rupiah)	7.935.787,23	8.947.107,05
	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap Total PDRB (%)	***27,53%***	***27,74%***

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Soppeng

13. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dengan komoditi utama berupa Padi dan Palawija. Khusus untuk Palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah Jagung dan Kedelai, disamping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 21
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija) (Juta Rupiah)	359.149,60	277.531,85
2	Jumlah PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap Total PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan (%)	16,44%	11,18%

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

14. Produksi sektor pertanian

Produksi sektor pertanian/perkebunan adalah Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar, produksi masing-masing komoditi pada tabel berikut :

Tabel 2. 22
Produksi sektor pertanian pertanian/perkebunan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	*Produksi Sektor Pertanian (Ton)*		
	a. Padi (Ton)	280.905,00	309.816,00
	b. Jagung (Ton)	93.131,10	84.759,00
	c. Kedelai (Ton)	2.497,20	1.319,00
	d. Kacang Tanah (Ton)	900,30	145,00
	e. Kacang Hijau (Ton)	100,90	54,00
	f. Ubi Kayu (Ton)	287,50	465,00
	g. Ubi Jalar (Ton)	73,30	123,00
JUMLAH (TON)		*377.895,30*	*396.681,00*

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

15. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan

Selain sub sektor Tanaman Pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kab. Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut gambaran kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2017 :

Tabel 2. 23
sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (Tanaman Keras) (Juta Rupiah)	611.046,10	700.881,50
2	Jumlah PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	***27,97%***	***28,24%***

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

Dari tabel tersebut diatas, tergambar bahwa tahun 2016 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian sebesar 27,97% dan mengalami peningkatan menjadi 28,24% pada tahun 2017. Adanya peningkatan lebih pada faktor harga jual produk hasil perkebunan (tanaman keras) yang cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya, karena dari sisi produksi, sebagian besar tanaman keras mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut merupakan komoditi ekspor yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

16. Produksi sektor perkebunan

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2016-2017.

Tabel 2. 24
Produksi Sektor Perkebunan Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Produksi Sektor Perkebunan		
	a. Kelapa Dalam (Ton)	2.933,22	2.386,59
	b. Kelapa Hibrida (Ton)	73,90	64,31
	c. Kopi Robusta (Ton)	65,88	64,74
	d. Cengkeh (Ton)	-	56,75
	e. Kakao (Ton)	12.361,31	10.015,79
	f. Jambu Mete (Ton)	221,10	568,95
	g. Lada (Ton)	3,92	3,92
	h. Kemiri (Ton)	593,15	678,79
	i. Aren (Ton)	153,96	153,96
	j. Tembakau (Ton)	126,50	99,50
	JUMLAH (TON)	***16.532,94***	***14.093,30***

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

17. Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2016-2017.

Tabel 2. 25
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton)	280.905,00	309.816,0
2	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)	280.905,00	309.816,0
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap Total Produksi di Daerah	***100,00%***	***100,00%***

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

18. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Sektor kehutanan adalah salah sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kab. Soppeng, pada tahun 2016 Sektor Kehutanan berkontribusi 5,70 persen dan pada tahun 2017 menjadi 5,42 persen. Kontribusi sektor kehutanan pada tabel berikut :

Tabel 2. 26
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (ton)	4.523,6	4.853,7
2	Jumlah PDRB (Juta Rupiah)	7.935.787,23	8.947.107,05
	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	*5,70%*	*5,42%*

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

19. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kab. Soppeng, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Pariwisata dalam struktur PDRB Kab. Soppeng, walaupun nilainya tidak signifikan. Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Pariwisata terhadap total PDRB Kab. Soppeng hanya mencapai 1,01%, dan pada tahun 2017 menjadi 1,90%.

Tabel 2. 27
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata (Juta)	80.319,14	80.319,14
2	total PDRB (Juta)	7.935.787,23	8.947.107,05
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	1,01	1,90

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

20. Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kab. Soppeng, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan peran Sektor Kelautan dan Perikanan dalam struktur PDRB Kab. Soppeng,. Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap total PDRB Kab. Soppeng adalah 2,61%, dan pada tahun 2017 menjadi 3,80%.

Tabel 2. 28
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Kelautan dan Perikanan (juta rupiah)	207.499,50	250.844,70
2	Jumlah PDRB (Kab. Soppeng) (juta rupiah)	7.935.787,23	8.947.107,05
	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)	2,61	3,80

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

21. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Capaian kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB selama kurun waktu 2 tahun (2016-2017) menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016 capaian 9,54% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 11,13%. Perdagangan sangat besar kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi, utamanya Perdagangan besar dan eceran.

Tabel 2. 29
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri (Juta)	756.952,10	995.641,14
2	total PDRB (Juta)	7.935.787,23	8.947.107,05
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	9,54	11,13

Sumber Dinas PPK & UKM Kab.Soppeng

22. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri dibagi jumlah total PDRB x 100 %, Kontribusi sektor industri untuk tahun 2016 menunjukkan persentase 9,36% dan tahun 2017 meningkat menjadi 10,37%. Capaian realisasi merupakan dukungan dari beberapa sektor industri olahan pangan yang semakin berkembang. Industri olahan pangan sangat besar kontribusinya bagi PDRB perkapita di Kabupaten Soppeng.

Tabel 2. 30
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri (Juta)	639.306,10	822.548,35
2	total PDRB (Juta)	7.935.787,23	8.947.107,05
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	8,06	9,19

Sumber : Dinas PPK dan UKM Kab. Soppeng

2.2.3. Fokus Seni Budaya

Kinerja Pembangunan daerah dibidang Seni dan Budaya diukur dari Indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga. capaian perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2. 31
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2016 s.d 2017
Kabupaten Soppeng

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017
1	Jumlah group Kesenian per 10.000 penduduk	0	0
2	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	0	0
3	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	3,80	3,98
4	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk	0,04	0,04

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng

Di Kabupaten Soppeng terdapat 96 club olahraga yang tersebar di 8 Kecamatan, atau dengan perbandingan 3,80 per 10.000 penduduk. Sementara untuk gedung Olahraga terdapat 1 gedung olahraga yang merupakan milik pemerintah daerah yaitu Gedung KONI dengan perbandingan 0,04 per 10.000 penduduk. Angka ini belum

termasuk gedung olahraga yang dikelola pihak swasta yang tersebar di berbagai tempat di setiap kecamatan.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada aspek Daya Saing Daerah, dapat diukur dari pengeluaran konsumsi RT, nilai tukar petani, pengeluaran konsumsi non pangan, produktivitas total daerah, desa berstatus swasembada, Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) Angka kriminalitas yang tertangani, Rasio ketergantungan. Aspek daya saing daerah Kabupaten Soppeng dalam kurun Tahun 2016 dan Tahun 2017 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 32
Aspek Daya Saing Daerah

	INDIKATOR ASPEK DAYA SAING DAERAH	SATUAN	2016	2017
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	552.856	607.629
2	Nilai tukar petani	%	*100,97*	*101,81*
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	47,28	45,27
4	Produktivitas total daerah			
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6,12	6,12
6	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)		-600399	-473692
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum			
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR			
9	Angka kriminalitas yang tertangani		17,3	11,93
10	Rasio ketergantungan		0,47	0,47

2.3.1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Pada Tahun 2017 konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Soppeng adalah 607.629 meningkat di banding tahun 2016 sebesar 552.856

2.3.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan petani. Nilai tukar petani di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2017 pada tabel berikut.

Tabel 2. 33

Nilai Tukar Petani Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Indeks yang diterima Petani	101,83	102,93
2	Indeks yang dibayar Petani	100,85	101,10
	Nilai Tukar Petani	***100,97***	***101,81***

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng

2.3.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi di luar pangan oleh semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Pada tahun 2017 persentase pengeluaran konsumsi non pangan Penduduk di Kabupaten Soppeng adalah 45,27 menurun dibanding tahun 2016 yaitu 47,28, hal ini berarti pengeluaran untuk konsumsi masih lebih besar dibanding pengeluaran konsumsi non pangan.

2.3.4. Persentase Desa Berstatus Swasembada

Desa Swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain. di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 jumlah desa yang berstatus swasembada adalah 3 desa dari jumlah desa sebanyak 49 desa atau baru 6,12 persen.

2.3.5. Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Untuk meningkatkan daya saing daerah salah satunya diukur dari kemampuan daerah dalam penanganan tindak kriminal. Pada tahun 2017 tindak kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk adalah 11,93 atau 298 kasus .

2.3.6. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan, (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Pada tahun 2017 ratio ketergantungan di Kabupaten Soppeng adalah 0,47 menunjukkan perbandingan antara penduduk usia kurang 15 tahun ditambah dengan usia di atas 64 tahun (bukan usia produktif) sebanyak 77.314 orang dengan penduduk usia produktif 15-64 tahun sebanyak 164.116 orang. Hal ini menunjukkan jika penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 masih didominasi penduduk dengan usia produktif.

2.4. Aspek Layanan Umum

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.4.1.1 Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Kinerja layanan urusan wajib, diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

1. Pendidikan

Tabel 2. 34
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Pendidikan

NO	INDIKATOR	Satuan	2016	2017
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	50,28	51,99
1.2	Angka partisipasi kasar			
	SD/MI/Paket A	%	86,28	85,07
	SMP/MTs/Paket B	%	72,12	70,12
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan			
1.4	Angka Partisipasi Murni			
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	84,86	86,97
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	69,01	74,18
1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C		Kewenangan Provinsi	
1.5	Angka partisipasi sekolah			
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	84,5	86,97
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B			
1.5.3	Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C		Kewenangan Provinsi	
1.6	Angka Putus Sekolah:			
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0,09	0,03
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0,34	0,12
1.6.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA		Kewenangan Provinsi	
1.7	Angka Kelulusan:			
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI		99,34	99,95
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100	99,98
1.7.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA		Kewenangan Provinsi	
1.8	Angka Melanjutkan (AM):			
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		73,67	87,6
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		81,83	-
1.9	Fasilitas Pendidikan:			
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	-	89,54
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik			
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar			
1.11	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah			

NO	INDIKATOR	Satuan	2016	2017
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		-	11,73
1.13	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah		-	-
1.14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		-	-
1.15	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata			
1.16	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar		-	-
1.17	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)		99,70	99,64
1.18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		88,31	91,31

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Soppeng

||Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut" Pada tahun 2017 jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak adalah 5.378 atau 51,99 persen dari jumlah anak yang berusia 4-6 tahun sebanyak 10.345

|| Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. **Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A di Kabupaten Soppeng adalah 86,28 dan pada tahun 2017 turun menjadi 85,07,** Sementara **untuk APK pada jenjang pendidikan SMP/Mts/Paket B pada tahun 2016 adalah 72,12 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,12.** Tabel menunjukkan APK di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2017.

Tabel 2. 35
Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2017

No.	Jenjang	2016		2017
1.	SD/MI	86,28		85,07
2.	SMP/MTs	72,12		70,12

Sumber : data kemendikbud.go.id

||Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7 – 12 tahun untuk SD/MI dan 13 – 15 tahun untuk SMP/MTs) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Murni pada jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A adalah 84,86 persen, meningkat menjadi 86,97 persen pada tahun 2017, angka ini menunjukkan bahwa siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 tahun mencapai 86,97 persen dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Sementara APM pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B tahun 2106 adalah 69,01 persen dan meningkat menjadi 74,18 persen. Berikut Tabel yang menunjukkan angka partisipasi murni di Kabupaten Soppeng tahun 2016 – 2017

Tabel 2. 36
Angka Partisipasi Murni menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2017

No.	Jenjang	2016	2017
1.	SD/MI/Paket A	84,86	86,97
2.	SMP/MTs/Paket B	69,01	74,18

Sumber : Dinas Pendidikan

|| Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun. Angka putus sekolah merupakan perbandingan antara jumlah murid putus sekolah dengan seluruh jumlah murid dalam jenjang pendidikan tertentu. Hasil perhitungan angka putus sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi angka putus sekolah maka semakin banyak siswa yang tinggal kelas. Pada tahun 2016 Angka Putus Sekolah di Kabupaten Soppeng pada jenjang Pendidikan SD/MI (usia 7-12 tahun) adalah 0,09 persen, turun menjadi 0,03 persen pada tahun 2017. Sementara APS pada jenjang usia 13-15 pada tahun 2106 adalah 0,34 persen, dan pada tahun 2017 turun menjadi 0,12 persen.

|| Angka Kelulusan

Angka kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berdasarkan data, angka kelulusan SD/MI dan SMP/MTs di Kab. Soppeng dalam kurun waktu 2016 – 2017 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 angka kelulusan

pada jenjang Pendidikan SD/MI 99,34 dan meningkat menjadi 99,95 persen pada tahun 2017. Sementara untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2016 adalah 100 persen dan menjadi 99,98 persen di tahun 2017. Kecenderungan yang meningkat untuk kelulusan pada tingkatan sekolah dasar mengindikasikan kualitas pendidikan di Kab. Soppeng yang semakin baik. Faktor dari guru, murid, orang tua, dan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan berperan dalam meningkatkan angka kelulusan. Sementara untuk jenjang SMP/MTs tingkat kelulusannya harus diusahakan agar dipertahankan pada 100 persen.

|| Angka Melanjutkan (AM)

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2016 Angka Melanjutkan (AM) jenjang SD/MI/ ke SMP/MTs adalah 73,67 persen dan meningkat menjadi 87,6 persen pada tahun 2017.

|| Angka Melek Huruf

Angka melek huruf adalah angka menunjukkan jumlah penduduk usia penduduk di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis dari total jumlah penduduk usia di atas 15 tahun, Angka melek huruf di Kab. Soppeng pada tabel berikut:

Tabel 2. 37
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 s/d 2017 Kabupaten Soppeng

No.	Uraian	2016	2017
1.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	199.098	197.290
2.	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun	199.693	197.997
3.	Angka Melek Huruf	99,70	99,64

Sumber : Dinas Pendidikan

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka melek huruf di Kabupaten Soppeng tahun 2017 mencapai 99,64 persen yang juga berarti dari 197.997 orang jumlah penduduk usia di atas 15 tahun hanya 0,36 persen diantaranya yang belum mampu membaca dan menulis

|| Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV merupakan perbandingan antara jumlah guru yang berijazah minimal S1/D-IV dengan total seluruh guru yang ada. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/DIV tentu akan memiliki kompetensi dan pemahaman tentang materi yang lebih baik. Kemampuan materi seorang guru akan bertambah seiring dengan latar belakang pendidikan yang diterima, dengan pendidikan yang lebih tinggi maka pemahaman akan materi pendidikan akan menjadi lebih baik. Pada tahun 2016 persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah 88,79 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 91,31 persen atau dari 3.151 jumlah guru yang

memenuhi kualifikasi S1/DIV dari jumlah guru secara keseluruhan sebanyak 3.551 orang.

2. Kesehatan

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Kesehatan digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel 2. 38
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		3,51	3,50
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi		99,65	99,65
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		3,16	1,40
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		10,18	9,79
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		1,05	1,05
2.6	Rasio posyandu per satuan balita		24,29	24,90
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk		0,24	0,25
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0,004	0,004
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk		0,218	0,298
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,898	0,990
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	64,55	71,93
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	88,48	95,82
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	91,43	92,86
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100
2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	2,43	2,49
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	96,16	90,77
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		-	-
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani		36,84	22,67
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	39,95	62,55
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		87	126
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		2,37	3,31
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	39,95	62,55
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	18,56	43,3
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100
2.25	Penderita diare yang ditangani	%	100	100
2.26	Angka kejadian Malaria	%	5,3	4,42
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,0032	0,0033
2.31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir		-	-
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS		0	0
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	18,38	26,27
2.34	Cakupan kunjungan bayi	%	100	93,5
2.35	Cakupan puskesmas	%	212,5	212,5
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	%	62,86	62,86
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	82,62	87,97
2.38	Cakupan pelayanan nifas	%	89,1	90,9
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	43,17	45,43
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	%	52,85	62,27
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	100	100
2.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	89,58	113,61
2.44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100
2.45	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Soppeng

|| Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Berdasarkan tabel terlihat bahwa AKB per 1000 kelahiran di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 adalah 3,51 sementara di tahun 2017 adalah 3,50.

Tabel 2. 39

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	10	10
2	Jumlah Kelahiran Hidup	2.849	2.860
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,51	3,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Angka kelangsungan hidup bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2017, pada tabel berikut :

Tabel 2. 40
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2016-2017
Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun)	10	10
2	Jumlah Kelahiran Hidup	2.849	2.860
	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	99,65	99,65

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Dari tabel di atas tergambar, bahwa Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Soppeng sangat tinggi, pada tahun 2017 mencapai angka 99,65 persen atau dari 2.860 bayi yang lahir hidup hanya 10 bayi diantaranya yang meninggal berumur kurang dari 1 tahun. Kondisi yang sama juga terjadi di tahun 2016.

|| Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita merupakan upaya penekanan jumlah kematian terhadap anak dibawah lima tahun, Realisasi diperoleh dari data kasus kematian Balita yang berumur dibawah lima tahun pada tahun 2017 berjumlah 1.4 jiwa dalam 1.000 Balita lebih baik dari tahun 2016 dengan kematian 3.6 jiwa dalam 1.000 balita.

Tabel 2. 41
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 5 tahun)	9	4
2	Jumlah Kelahiran Hidup	2.849	2.860
	Angka Kematian Balita	3,16	1,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatus merupakan upaya penekanan jumlah kematian terhadap neonatal yang terjadi pada bayi baru lahir yang berumur 0 sampai 28 hari, Angka Kematian Neonatus mempunyai target 27 kasus, dan realisasi mencapai 27 kasus, dengan demikian capaian adalah 100%. Realisasi diperoleh dari data kasus kematian bayi yang berumur 0 sampai 28 hari tahun 2017. Dan angka Kematian Bayi mempunyai target 12 kasus, sedangkan realisasi mencapai 10 kasus, dengan demikian capaian adalah 120%. Realisasi diperoleh dari data kasus kematian bayi 0-59 Bulan. Pencapaian melebihi target yang diharapkan (target 13 kasus) . .

Tabel 2. 42

Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan)	29	28
2	Jumlah Kelahiran Hidup	2.849	2.860
	Angka Kematian Neonatal	10,18	9,79

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator kesehatan ibu yang dapat teratasi, angka kematian ibu pada tahun 2017 telah mengalami penurunan rangka kematian Ibu dari tahun 2016, namun telah sesuai dengan target pada tahun 2017 yaitu 2 kasus, sehingga perlu berbagai upaya yang berkelanjutan untuk mempertahankan capaian tersebut hingga tahun 2021.

Tabel 2. 43

Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas	3	3
2	Jumlah kelahiran hidup	2.849	2.860
	Angka Kematian Ibu	1,05	1,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Rasio posyandu per satuan balita

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Berdasarkan data pada tahun 2017 rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Soppeng 24,90 yang artinya setiap 1000 balita dilayani 24 posyandu, ratio tersebut sama di tahun 2016.

Tabel 2. 44

Rasio posyandu per satuan balita Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah posyandu	327	327
2	Jumlah balita	13.465	13.132
	Rasio Posyandu	24,29	24,90

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Rasio puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap

puskesmas. Rasio puskesmas, klinik, dan Pustu per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 adalah 0,25 hal ini berarti dari 61 puskesmas jangkauan layanannya adalah 1 puskesmas dapat menjangkau 3.958 penduduk.

Tabel 2. 45

Rasio puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah puskesmas, poliklinik, Pustu	61	61
2	Jumlah penduduk	252.677	241.430
	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu	0,24	0,25
		1 : 4,142	1 : 3,958

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan keperawatan yang berkesinambungan Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, sehingga rumah sakit memiliki peranan penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan berupa rumah sakit terhadap jumlah penduduk di wilayah tertentu. Data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 yaitu 0,004 sama dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya, karena sampai saat ini Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Soppeng hanya 1 yaitu RSUD La Temmamala.

Tabel 2. 46

Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rumah sakit	1	1
2	Jumlah penduduk	252.677	241.430
	Rasio Rumah Sakit	0,004	0,004
		1 : 252,677	1 : 241,430

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Rasio dokter per satuan penduduk

Dokter umum dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kabupaten Soppeng, baik berstatus PNS maupun bukan. Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah dokter tercatat 72 orang yang bertugas di Rumah sakit dan Puskesmas, dengan demikian jika dibanding dengan jumlah penduduk pada tahun 2017, maka rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Soppeng adalah 0,298, meningkat sedikit dibanding tahun 2016 dimana dokter yang tercatat adalah 55 orang atau dengan rasio 0.218. Masih rendahnya rasio dokter tersebut salah satunya disebabkan karena keterbatasan pemerintah daerah dalam rekrutmen.

Tabel 2. 47
Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah dokter	55	72
2	Jumlah Penduduk	252.677	241.430
	Rasio Dokter	0,218	0,298
		1:4594	1:8082

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Tenaga medis yang dimaksud merupakan tenaga yang memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah tenaga medis memiliki rasio 1 tenaga medis terhadap 1.113 jiwa masyarakat memiliki rasio lebih besar dibanding dengan tahun 2016 dengan rasio 1 tenaga medis dalam 1.010 jiwa masyarakat. Hal tersebut dikarenakan jumlah tenaga medis yang berkurang dengan adanya tenaga medis yang pensiun.

Tabel 2. 48
Rasio tenaga medis per satuan Penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah tenaga medis	227	239
2	Jumlah Penduduk	252.677	241.430
	Rasio Tenaga Medis	0,898	0,990
		1:1113	1:1010

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Komplikasi kebidanan merupakan kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravida rum, perdarahan per vaginal, hipertensi dalam kehamilan (preeclampsia, eklampsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah. Komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeclampsia, eklampsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan premature, kehamilan ganda. Komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeclampsia, eklampsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Tabel 2. 49
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif	437	451
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	677	627
	Cakupan Komplikasi Kebidanan	64,55	71,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan

definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK). Penanganan definitif adalah penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap kasus komplikasi kebidanan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional.

|| Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Komplikasi dan kematian ibu maternal dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa di sekitar persalinan, hal ini disebabkan pertolongan tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan (profesional). cakupan persalinan dengan pertolongan tenaga kesehatan sebesar 95.82 %. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan tertinggi adalah Puskesmas Batu-Batu sebesar 112.82 % dan terendah adalah Puskesmas Citta sebesar 59,81%

Tabel 2. 50
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	2.858	2.867
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	3.230	2.992
	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	88,48	95,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) merupakan upaya peningkatan kesehatan melalui imunisasi lengkap dasar yang diberikan kepada bayi/balita Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi mempunyai target 80%, Realisasi 91,43%, Capaian 114,29%.

Tabel 2. 51
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	64	65
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	70	70
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91,43	92,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi diperoleh dari perhitungan Jumlah desa/kelurahan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (64 desa/kel) dibagi jumlah seluruh desa/kelurahan (70 desa/kel), sehingga dicapai persentase sebesar 91,43% yang melebihi target 80% Hal ini dapat dicapai karena kesadaran masyarakat khususnya para orang tua anak balita membawa anaknya ke Posyandu untuk mendapatkan Imunisasi dasar lengkap.

|| Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Balita Gizi Buruk merupakan faktor anak terlahir dengan BBLR dan adanya penyakit yang menyertai sejak lahir (Kelainan bawaan). %. Hal ini dapat dicapai karena dicapai karena meningkatnya upaya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini pada petugas kesehatan atau sarana kesehatan yang tersedia sehingga anak dapat terlahir dengan sehat dan atau mencegah terjadinya kelahiran dengan BBLR sebagaimana diketahui menjadi faktor utama terjadinya Gizi Buruk. Target Prevalensi Balita Gizi Buruk adalah <2%, Realisasi sebesar 0,015%, maka dari itu capaian adalah 100%.

Tabel 2. 52

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan	3	2
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	3	2
	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Realisasi Prevalensi Balita Gizi Buruk dihitung dari jumlah kasus balita buruk dalam dibagi jumlah seluruh balita dalam kurun waktu yang sama. Capaian tahun 2017 dengan jumlah balita gizi buruk sebanyak 2 kasus dibagi jumlah seluruh balita sebanyak 12.132 balita dikali 100% (seratus persen) sehingga Realisasi prevalensi balita gizi buruk tahun 2017 sebesar 0,015%.

|| Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)

Kalori adalah satuan unit kandungan panas atau energi. Akan tetapi, lebih tepatnya kalori adalah jumlah energi yang Anda dapatkan dari makanan dan minuman, atau energi yang kita bakar melalui aktivitas sehari-hari. Sederhananya, kalori adalah energi yang dibutuhkan tubuh agar bisa beraktivitas dan menjalankan fungsinya dengan baik. Standar proporsi kalori yang di tetapkan di indonesia sebesar 2.100 Kkal/Kapita/hari. Namun di Kabupaten Soppeng masyarakat dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum sebesar 2,43% di tahun 2016 dan 2,49% di tahun 2017. Hal tersebut membuktikan bahwa asupan kalori yang diterima masyarakat Soppeng tinggal sedikit yang belum menerima asupan kalori dibawah standar. Namun tetap perlu mendapatkan perhatian pemerintah melalui petugas kesehatan.

Tabel 2. 53

Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari)	327	327
2	Jumlah balita	13.465	13.132
	Proporsi Penduduk	2,43	2,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Penyakit Campak adalah suatu infeksi virus yang sangat menular, yang ditandai dengan demam, batuk, konjungtivitis (peradangan selaput ikat mata/konjungtiva) dan ruam kulit. Penyakit ini disebabkan karena infeksi virus campak golongan *Paramixovirus.* Sehingga salah satu cara untuk mencegah penyakit campak maka perlu dilakukan imunisasi campak. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2016 sebanyak 96,16% dan pada tahun 2017 sebanyak 90,77%. Namun perlu perhatian khusus terhadap pelayanan imunisasi campak oleh petugas kesehatan.

Tabel 2. 54
anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak	2.958	2.792
2	Jumlah anak usia 1 tahun	3.076	2.076
	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak	96,16	134,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Definisi kasus AFP adalah kelumpuhan flaccid (layuh) tanpa penyebab lain pada anak kurang dari 15 tahun. Flaccid paralysis terjadi pada kurang dari 1% dari infeksi poliovirus dan lebih dari 90% infeksi tanpa gejala atau dengan demam tidak spesifik. Kejadian Polio AFP di Kabupaten Soppeng di tahun 2016 dan tahun 2017 tidak ada. Hal ini disebabkan keberhasilan petugas kesehatan, terutama petugas imunisasi yang memberikan pelayanan imunisasi polio pada bayi dan balita.

Tabel 2. 55
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan	0	0
2	jumlah penduduk < 15 tahun	-	-
	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan balita pneumonia yang ditangani

Jumlah kasus Balita dengan Pneumonia ditangani di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 192 kasus dan semua mendapatkan pelayanan dari tenaga medis. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat serta menjauhkan anak- anak dari perokok, mengingat pneumonia masih merupakan permasalahan yang perlu penanggulangan yang serius mengingat dampak yang timbul sangat mempengaruhi derajat kesehatan terutama pada kelompok umur balita.

Tabel 2. 56
Cakupan balita pneumonia yang ditangani Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	312	192
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita	847	847
	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani	36,84	22,67

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mempunyai target 100%, Realisasi sebesar 100% dengan capaian 100%. Realisasi Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB didapat dari perhitungan dengan jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun sejumlah 232 orang dibagi orang dengan TB diwilayah kerja pada kurun waktu yang sama sejumlah 232 orang dikali 100% (seratus persen).

Tabel 2. 57
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	167	304
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	418	486
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	39,95	62,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Realisasi pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai karena Para Petugas Kesehatan yang terkait dengan program TB pada umumya sudah terlatih dan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk bersama- sama menekan dan atau mencegah terjadinya penyakit TB. Hal ini dapat dicapai karena adanya partisipasi semua Stakeholders termasuk Petugas kesehatan, Masyarakat termasuk lingkup dinas kesehatan untuk memprogramkan pertemuan dan pelatihan petugas yang terlibat pelayanan TB sehingga semua Petugas sudah terlatih dan setiap pendamping dan keluarga penderita TB dilakukan konseling.

|| Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Tingkat prevalensi Tuberkulosis di kabupaten Soppeng pada tahun 2016 sebesar 87 dari 100.000 penduduk dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 126 dari 100.000 penduduk. Hal ini dapat dicapai karena adanya partisipasi semua Stakeholders termasuk Petugas kesehatan, Masyarakat termasuk lingkup dinas kesehatan untuk memprogramkan pertemuan dan pelatihan petugas yang terlibat pelayanan TB.

Tabel 2. 58
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	220	304
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	252.677	241.430
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	87	126

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Mortalitas karena TB adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh TB pada orang dengan HIV negatif sesuai dengan revisi terakhir dari ICD-10 (international classification of diseases). Penemuan pasien merupakan langkah pertama dalam kegiatan tatalaksana pasien TB. Penemuan dan penyembuhan pasien TB menular, secara bermakna akan dapat menurunkan kesakitan dan kematian akibat TB, penularan TB di masyarakat dan sekaligus merupakan kegiatan pencegahan penularan TB yang paling efektif di masyarakat.

Tabel 2. 59
Tingkat kematian karena Tuberkulosis per 100.000 penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Pasien TB yang meninggal	6	8
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	252.677	241.430
	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	2,37	3,31

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Angka kematian karena Tuberkulosis di kabupaten Soppeng sebesar 2,37 per 100.000 penduduk dan meningkat di tahun 2017 sebesar 3,31 per 100.000 penduduk. Sehingga itu perlu pencegahan dan penanganan terhadap penyakit TB.

|| Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

Perkiraan jumlah semua kasus TB merupakan insiden dalam per 100.000 penduduk dibagi dengan 100.000 dikali dengan jumlah penduduk. Misalnya: perkiraan insiden di suatu wilayah adalah 200 per 100.000 penduduk dan jumlah penduduk sebesar 1.000.000 orang maka perkiraan jumlah semua kasus TB adalah (200:100.000) x 1.000.000 = 2.000 kasus.

Tabel 2. 60
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	167	304
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada	418	486
	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	39,95	62,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Di kabupaten Soppeng proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2016 sebanyak 39,95% dan meningkat di tahun 2017 sebesar 62,55%. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kinerja petugas dalam penanganan penyakit Tuberkulosis.

|| Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Dengan demikian angka ini merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan semua kasus dan angka pengobatan lengkap semua kasus. Angka ini menggambarkan kualitas pengobatan TB. Angka kesembuhan semua kasus pada tahun 2016 sebesar 18,56 % dan meningkat pada tahun 2017 sebesar 43,3%. hasil pengobatan lainnya tetap perlu diperhatikan, meninggal, gagal, putus berobat (*lost to follow up),* dan tidak dievaluasi.

Tabel 2. 61

Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	31	84
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati	167	194
	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	18,56	43,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyakit DBD merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue melalui Vektor nyamuk, Jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 35 kasus atau sebesar 15 per 100.000 penduduk/ status KLB. Seluruh wilayah kecamatan terkena kasus DBD, kasus tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Lalabata (Puskesmas Salotungo sebanyak 6 kasus, Puskesmas Malaka sebanyak 4 kasus dan Puskesmas Sewo 2 kasus). Jumlah ersebut telah dilakukan penanganan dengan baik sehingga tidak terjadi kematian akibat penyakit DBD.

Tabel 2. 62

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	471	35
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	471	35
	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Penderita diare yang ditangani

Jumlah kasus penyakit diare di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 7.051 kasus ,mengalami penurunan dibanding tahun 2016 sebanyak 10.008 kasus. Kualitas lingkungan yang sehat, pola hidup bersih serta pemanfaatan jamban keluarga dapat membantu menurunkan angka kesakitan terutama penyakit diare.

Tabel 2. 63
Penderita Diare yang Ditangani Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader	10.008	7.051
2	Jumlah perkiraan penderita diare	12.220	12.220
	Penderita Diare yang Ditangani	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Angka kejadian Malaria

Penyakit malaria merupakan penyakit yang menular yang disebatkan oleh vektor nyamuk anopheles. Jumlah penderita malaria (pemeriksaan sediaan darah positif) di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 10 kasus, meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 12 kasus. Kasus tertinggi terdapat di Puskesmas Tanjonge sebanyak 5 kasus, dan Puskesmas yang tidak mempunyai kasus yaitu Puskesmas, Takalala, Goarie, Pacongkang, Cangadi, Baringeng, Cakkuridi, Batu-Batu, dan Citta.

Tabel 2. 64
Angka Kejadian Malaria Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Penduduk yang menderita malaria	12	10
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	226.305	226.305
	Angka Kejadian Malaria	5,30	4,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Tingkat kematian akibat malaria

Berdasar dari kejadian malaria di Kab. Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 10 kasus, meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 12 kasus, namun tidak terjadi kematian, hal tersebut di karenakan adanya upaya yang sigap yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam menangani kejadian penyakit malaria.

Tabel 2. 65
Tingkat Kematian Akibat Malaria Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kematian tersangka malaria	0	0
2	Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun	226.305	226.305
	Tingkat Kematian Akibat Malaria	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida

Kejadian malaria merupakan hal yang wajib diwaspadai, untuk itu perlu dilakukan penanganan pencegahan penyakit malaria, salah satu cara yang dilakukan yaitu penggunaan kelambu berinsektisida. Namun di kabupaten Soppeng kejadian malaria bukanlah endemic, melainkan kejadian yang diperoleh dari kunjungan masyarakat dari luar daerah terutama dari Papua. Sehingga penularan penyakit malaria di kabupaten Soppeng tidak dianggap sebagai endemic dan suplay kelambu berinsektisida sudah tidak ada.

Tabel 2. 66
Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur menggunakan kelambu yang sudah diproteksi dengan insektisida	0	0
2	Jumlah Balita	0	0
	Proporsi Anak Balita yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat

Kejadian malaria di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebanyak 10 kasus, meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 12 kasus yang dimana penanganan dengan pemberian obat anti malaria diberikan dengan tepat terutama terhadap balita dengan demam dengan terduga malaria.

Tabel 2. 67
Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penderita diobati dengan ACT	12	10
2	Jumlah penderita positif	12	10
	Proporsi Anak Balita Dengan Demam yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria yang Tepat	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi

Prevalensi HIV/AIDS yang diperoleh terhadap penanganan HIV/AIDS karena adanya partisipasi semua Petugas untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat baik yang beresiko terinfeksi HIV/AIDS ataupun yang sudah terinfeksi HIV/AIDS termasuk pelatihan bagi Petugas pada sarana RS, VCT, CST dan Petugas Laboratorium, serta sudah terlaksananya layanan VCT dan CST di RSUD Latemmamala.

Tabel 2. 68
Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS	8	8
2	Jumlah penduduk	252.677	241.430
	Prevalensi HIV/AIDS (Persen) Dari Total Populasi	0,0032	0,0033

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir

Penggunaan kondom merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk

mencegah penyakit HIV/AIDS. Namun dari data yang diketahui terhadap pengguna kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir tidak dapat di ketahui. Karena tidak adanya pemantau penggunaan kondom yang dilakukan petugas saat ada hubungan seks.

Tabel 2. 69
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	-	-
2	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukan hubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir	-	-
	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS

Pemberian pengetahuan tentang HIV/AIDS pada usia 15-24 tahun harus dilakukan sebagai upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS di masyarakat. Namun data terhadap proporsi jumlah penduduk usia 15-24 yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS belum dapat disimpulkan. Karena petugas kesehatan melakukan penyuluhan HIV/AID terhadap siswa SMP dan SMA telah maksimal namun masih banyak usia 15 -24 tahun tidak mengenyam pendidikan yang lebih baik atau tidak sekolah.

Tabel 2. 70
Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Berisiko Tinggi Terakhir
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS	0	0
2	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun	226.305	226.305
	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Masyarakat miskin perlu mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal merupakan tujuan pokok upaya kesehatan dengan meningkatkan pemerataan dan mutu upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat. tersedianya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, baik oleh pemerintah maupun swasta yang didukung oleh pesatnya kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Tabel 2. 71
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana	25.155	40.439

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
	Kesehatan Strata 1		
2	Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten	136.844	153.940
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	18,38	26,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Capaian rujukan terhadap masyarakat miskin pada tahun 2016 18,38 %, sedangkan pada tahun 2017 rujukan yang diberikan meningkat sebanyak 26,27% hal ini dikarenakan adanya peningkatan pemanfaatan rujukan yang dilakukan masyarakat miskin yang diberikan.

|| Cakupan kunjungan bayi

Cakupan Kunjungan bayi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam memantau tingkat kesehatan bayi lahir. Jumlah Bayi Lahir Hidup pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng sebanyak 2.850 dan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 2.631 (92,32%). Puskesmas tertinggi adalah Puskesmas Panincong sebesar 100,60% dan Puskesmas terendah adalah Puskesmas Tanjonge sebesar 74,11%.

Tabel 2. 72
Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	2852	2673
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	2852	2860
	Cakupan Kunjungan Bayi	100	93,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan dan inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas memiliki fungsi sebagai : 1) pusat pembangunan berwawasan kesehatan; 2) pusat pemberdayaan masyarakat; 3) pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer; dan 4) pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Pada tahun 2017 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng sebanyak 17 (Tujuh Belas) unit terdiri dari 6 (Enam) Puskesmas Rawat Inap, 11 (Sebelas) Puskesmas Non Rawat Inap.

Tabel 2. 73
Cakupan Puskesmas Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah puskesmas	17	17
2	Jumlah seluruh kecamatan	8	8

	Cakupan Puskesmas	212,5	212,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan pembantu puskesmas

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Soppeng sebanyak 17 (Tujuh Belas) unit terdiri dari 6 (Enam) Puskesmas Rawat Inap, 11 (Sebelas) Puskesmas Non Rawat Inap, dengan Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 44 (empat Puluh Empat) unit yang menjadi layanan kesehatan di Desa/Kelurahan dari 70 Desa/Kelurahan. Dan ditunjang dengan Poskesdes sebanyak 68 (Enam Puluh Delapan) unit dengan pelayan KIA/KB.

Tabel 2. 74
Cakupan Pembantu Puskesmas Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pembantu puskesmas	44	44
2	Jumlah seluruh desa	70	70
	Cakupan Pembantu Puskesmas	62,86	62,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Sedangkan K4 adalah gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar serta paling sedikit empat kali kunjungan, dengan distribusi sekali pada tri semester pertama, sekali pada Trimester ke-2 dan dua kali pada Trimester ke-3.Angka ini dapat dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Melalui ANC (K4) diharapkan deteksi dini dan perawatan kehamilan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas. Dengan demikian komplikasi yang terjadi pada saat kehamilan dapat dicegah sehingga kematian pada ibu hamil dan janinnya dapat juga dicegah. Cakupan Pelayanan K1 di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 95,76 %, dan Cakupan Pelayanan K4 sebesar 87,97% telah mencapai target SPM, hal ini berarti akses pelayanan kepada sasaran ibu hamil sudah baik.

Tabel 2. 75
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	2.796	2.757
2	Jumlah sasaran ibu hamil	3.384	3.134
	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	82,62	87,97

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan pelayanan nifas

Cakupan Pelayanan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2. 76
Cakupan Pelayanan Nifas Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar	2.878	2.721
2	Jumlah seluruh ibu nifas	3.230	2.992
	Cakupan Pelayanan Nifas	89,1	90,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal sebanyak 3 kali dengan distribusi waktu: 1) kunjungan nifas pertama (KF1) pada 6 jam setelah persalinan sampai 3 hari; 2) kunjungan nifas ke-2 (KF2) dilakukan pada minggu ke-2 setelah persalinan; dan 3) kunjungan nifas ke-3 (KF3) dilakukan minggu ke-6 setelah persalinan. Cakupan Pelayanan ibu nifas di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017 sebesar 90.9%.

|| Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Jumlah Ibu hamil pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng sebanyak 3.134 ibu hamil dengan perkiraan neonatal reaaelanopsti sebanyak 427. Jumlah neonatal resti dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 194 atau 45,43%. Cakupan Neonatal dengan komplikasi semua ditangani oleh tenaga kesehatan. Puskesmas tertinggi adalah Puskesmas Malaka sebesar 76,00% dan Puskesmas terendah adalah Puskesmas Ganra sebesar 4,55%.

Tabel 2. 77
Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani	199	194
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	461	427
	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani	43,17	45,43

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan balita. Jumlah perkiraan sasaran anak balita pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng sebanyak 17.878 dan yang mendapatkan pelayanan sebanyak 11.132 (62,3%). Puskesmas tertinggi adalah Puskesmas Batu - Batu sebesar 79,3% dan Puskesmas terendah adalah Puskesmas Cabenge sebesar 38,7%.

Tabel 2. 78
Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	11.714	11.132

2	Jumlah seluruh anak balita	22.164	17.878
	Cakupan Pelayanan Anak Balita	52,85	62,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. Pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng jumlah bayi berumur 0-6 bulan sebanyak 1.172 anak dan yang diberikan ASI Eksklusif sebanyak 967 bayi (82,5%).

Tabel 2. 79
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 - 24 Bulan Keluarga Miskin Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	36	179
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	36	179
	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6 -24 Bulan Keluarga Miskin	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat dilakukan pada semua murid SD/setingkat yang duduk di kelas I. Pada tahun 2017 di Kabupaten Soppeng tercatat 8.901 siswa SD/ setingkat kelas I dan semua diperiksa kesehatannya melalui kegiatan penjaringan (100%).

Tabel 2. 80
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih	276	275
2	Jumlah murid SD dan setingkat	276	275
	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat diharapkan mampu mengatasi sebagian besar masalah kesehatan masyarakat. Berbagai pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan. Maka pelayanan kesehatan dasar terhadap masyarakat miskin dilakukan 100% dengan fasilitas JKN.

Tabel 2. 81
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	122.586	174.884
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	136.844	153.940
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	89,58	113,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)

Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pada tahun 2017 jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kabupaten Soppeng sebanyak 1 (satu) unit dengan pelayanan gawat darurat level 1.

Tabel 2. 82
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Pelayanan gawat darurat level 1	1	1
2	Jumlah RS	1	1
	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

|| Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Tabel 2. 83
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani > 24 jam	1	3
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi	1	3
	Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Penanganan KLB dengan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dilakukan

dengan baik oleh petugas kesehatan baik yang dilakukan oleh Puskesmas maupun Dinas Kesehatan sebagai upaya penanganan penyakit. Hal tersebut dibuktikan dengan 100% penyelidikan epidemiologi terhadap KLB.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 84
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
3.1	PEKERJAAN UMUM			
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	0,37	0,33
	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4			
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	37,29	32,61
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)		-	-
	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		-	-
	Persentase rumah tinggal bersanitasi		83,29	90,84
	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar		-	-
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat		-	-
	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun			
	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		-	-
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	72,57	74,53
	Rasio Jaringan Irigasi		-	-
	Persentase penduduk berakses air minum	%	85,84	90,46
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	95,79	90,03
	Persentase areal kawasan kumuh	%	NA	NA
	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		NA	NA
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	%	-	15,58
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	1,73	1,94
3,2	PENATAAN RUANG			
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	38,34	38,34
	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	Ha	1.651,05	1.651,05

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	11,34	12,2
	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	NA	NA
	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	NA	NA
	Ketaatan terhadap RTRW	%	NA	NA

Sumber : Dinas PU-PR

Berdasarkan tabel di atas, tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Konsep dari realisasi pembangunan secara fisik yang tepat adalah pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur, terutama akses jalan. Karena dengan demikian, maka pembangunan di bidang lain akan berkembang dengan sendirinya. Sejalan dengan kebijakan tersebut Pemerintah Kab. Soppeng terus berusaha untuk meningkatkan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, pada tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 37 persen dihitung dari panjang jalan kondisi baik 293,136 km dibagi dengan panjang jalan keseluruhan yaitu 898,881 km, selanjutnya pada tahun 2017 porsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menjadi 33 persen turun dibanding tahun 2016 kondisi ini terjadi karena adanya perubahan data dasar, dimana data panjang jalan kondisi baik yang digunakan tahun sebelum masih menggunakan data tahun 2012.

Tabel 2. 85
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Panjang jalan kondisi baik	335,065	293,136
2	Panjang jalan seluruhnya	898,456	898,881
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	37,29	32,61

Sumber : Dinas PU-PR

|| Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)

Infrastruktur merupakan urat nadi bagi perekonomian. Tanpa didukung infrastruktur maka akan sulit mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dukungan dari infrastruktur jalan. Dengan tersedianya jalan yang dalam kondisi baik, akses masyarakat dalam kegiatan mobilisasi yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian sangat banyak memberi dampak positif seperti memangkas waktu dan jarak tempuh yang otomatis mengurangi biaya operasional. Selain itu ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai merupakan faktor utama dalam menyelenggarakan pelayanan pariwisata. Akses jalan yang memadai merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi wisatawan untuk datang berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di

Kabupaten Soppeng. Sebagai dukungan untuk hal tersebut di atas di Kabupaten Soppeng persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40km/jam) pada tahun 2016 mencapai 37,29 persen dihitung dari panjang jalan kondisi baik 293,136 km dibagi dengan panjang jalan keseluruhan yaitu 898,881 km, selanjutnya pada tahun 2017 persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40km/jam) menjadi 32,61 persen turun dibanding tahun 2016 kondisi ini terjadi karena adanya perubahan data dasar, dimana data panjang jalan kondisi baik yang digunakan tahun sebelum masih menggunakan data tahun 2012.

Tabel 2. 86
Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Panjang Jalan Kab. Dalam kondisi baik	335,065	293,136
2	Panjang Seluruh Jalan Kabupaten	898,456	898,881
	Persentase Jalan Kab. Dalam Kondisi Baik (≥ 40 Km/Jam)	37,29	32,61

Sumber : Dinas PU-PR

|| Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Pembangunan infrastruktur dasar lainnya yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Soppeng adalah lingkungan pemukiman. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah Pusat mencanangkan program 100-0-100 yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak, yang harus dicapai oleh Kabupaten/kota pada Tahun 2019. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah untuk memperhatikan rumah tangga kumuh sehingga target nasional tercapai 0% kawasan kumuh di Kab. Soppeng. Sehingga hasil yang dicapai pada Tahun 2017 sebanyak 90,84% rumah tinggal yang bersanitasi.

Tabel 2. 87
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	48354	53008
2	Jumlah rumah tinggal	58055	58353
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	83,29	90,84

Sumber : Dinas PU-PR

|| Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Jaringan irigasi sangat berperan dalam mendukung produksi pertanian, karena dengan keberlanjutan aliran air irigasi ke lahan-lahan pertanian akan menentukan tingkat produksi yang dicapai. Mengingat Kabupaten Soppeng merupakan penyuplai gabah ke beberapa daerah lain di wilayah Indonesia, Pemerintah sangat memperhatikan mengenai pemeliharaan irigasi kabupaten. Hal ini berdampak pada capaian realisasi yang dicapai 74,53 persen pada Tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 yaitu 72,57 persen.

Tabel 2. 88
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	7045	7235
2	Luas irigasi kabupaten	9708	9708
	% Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	72,57	74,53

Sumber : Dinas PU-PR

|| Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Terkait pelayanan air minum, dari data terlihat bahwa cakupan persentase penduduk berakses air minum pada Tahun 2017 semakin meningkat yakni 90,46%, dibanding tahun 2016 yang mencapai 85,84%, namun dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan air minum tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pelayanannya. Saat ini masih sering dijumpai banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan air minum yang belum lancar distribusi maupun keluhan terhadap kualitas air yang dihasilkan. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah sebagai bagian dari upaya pemenuhan dan pengoptimalan sarana prasarana dasar permukiman yang berkualitas.

Tabel 2. 89
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Penduduk berakses air minum	216.890	218.407
2	Jumlah penduduk	252.677	241.430
	% Penduduk Berakses Air Minum	85,84	90,46

Sumber : Dinas PU-PR

|| Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan

Terkait infrastruktur permukiman pemerintah berkomitmen untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dengan target mengurangi hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Berdasarkan data, 51.267 dari 57.309 atau 90.03% rumah tangga yang ada di Kabupaten Soppeng telah masuk kategori rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng menunjukkan komitmen yang tinggi terkait dengan target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 2. 90

Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan	60.135	51.598
2	Jumlah Rumah Tangga seluruhnya	62.775	57.309
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	95,79	90,03

Sumber : LPPD Kab. Soppeng Tahun 2016-2017

|| Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan Penduduk

Jenis-jenis RTH ada beberapa macam diantaranya pemakaman umum. Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenasah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Tempat pemakaman Umum TPU sebagai salah satu fasilitas sosial yang berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi masyarakat yang meninggal dunia. Berdasarkan data pada Kabupaten Soppeng, untuk Tahun 2017 rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk dihitung dari jumlah TPU yang ada sebanyak 37.605 unit dan jumlah penduduk sebanyak 241.430 sehingga rasionya pada kisaran 15.58%.

|| Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah menunjuk pada perbandingan luas ruang terbuka hijau terhadap luas seluruh lahan yang di berikan HPL/HGB. Indikator ini merupakan indikasi kemampuan suatu daerah untuk menyediakan dan menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang sehat bagi penduduk di daerah. Dari hasil perhitungan realisasi yang tercapai sebesar 38.34%. Hal ini menunjukkan rasio RTH pada Kabupaten Soppeng telah melampaui target rasio RTH secara nasional yakni 30%.

|| Luasan RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan RTH di kawasan perkotaan dapat didasarkan pada : luas wilayah, jumlah penduduk dan kebutuhan fungsi tertentu. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Luas RTH publik di Kabupaten Soppeng adalah 1.651,05 m^2 .

|| Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Pemberian IMB dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan umum serta pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut retribusi sebagai salah satu sumber PAD. Selain itu IMB ditujukan untuk menjaga ketertiban, keselarasan, kenyamanan

dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungannya. Hal inilah yang menjadi alasan Pemerintah Kabupaten Soppeng mensyaratkan perizinan IMB kepada masyarakat sebelum melaksanakan suatu pekerjaan suatu bangunan. Namun ketidaksadaran masyarakat untuk kepengurusan IMB masih sangat rendah sesuai data yakni 62.733 bangunan hanya 7.652 yang ber-IMB atau sebesar 12.2%

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 91
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
1	Rasio rumah layak huni		82,98	79,46
2	Rasio permukiman layak huni			
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni		NA	NA
5	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		NA	NA
6	Persentase pemukiman yang tertata			
7	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0,0006	0,0007
8	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		NA	NA
9	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		NA	NA
10	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		NA	NA

Sumber : Dinas Perumahan & Pertanahan

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan umum, layanan wajib dasar, yang diukur dari berbagai indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

|| Ratio Rumah Layak Huni

Rumah bisa dikatakan layak huni apabila memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan para penghuninya. Berdasarkan data pada tahun 2016 rumah layak huni di Kab. Soppeng mencapai 48.964 atau 02,98 persen dari jumlah seluruh rumah sebanyak 59.009 rumah. Dan pada tahun 2017 turun menjadi 47.588 rumah atau 79,46 persen dari jumlah rumah seluruhnya yaitu 59.889 rumah.

Tabel 2. 92
Rumah Layak Huni Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rumah layak huni	48.964	47.588
2	Jumlah seluruh rumah	59.009	59.889
	Rumah layak huni	82,98	79,46

Sumber : LPPD Kab. Soppeng Tahun 2016 & 2017

|| Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh

Pemukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh pada tabel berikut :

Tabel 2. 93
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Tahun 2016-2017

NO	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Luas lingkungan permukiman kumuh (Km2)	0,00949	0,01060
2	Luas wilayah (Km2)	1.500,00	1.500,00
	% Lingkungan Pemukiman Kumuh	0,0006	0,0007

Sumber : LPPD Kab. Soppeng Tahun 2016 & 2017

5. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Kinerja urusan Ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2. 94
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Ketenteraman, ketertiban umum

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	38,3	68,49
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	N/A	71,23
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	35,33	58,88
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	59,09	71,43
5	Persentase Penegakan PERDA	%	N/A	100

Sumber : Dinas Pol.PP & Damkar

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan umum, layanan wajib dasar Ketenteraman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas, yang diukur dari berbagai indikator yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

|| Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)

Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Mengacu ke target SPM maka Linmas setiap RT adalah 1 orang. Berdasarkan data yang ada, Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kab. Soppeng, yang dihitung dari jumlah petugas Linmas di Kabupaten dibagi dengan 1 Wilayah kerja Kabupaten (jumlah RT) pada tahun 2017 adalah 68,49 % jauh meningkat dibanding tahun 2016 yaitu 38,3 persen, namun belum dapat memenuhi target 1 RT= 1 Linmas.

Tabel 2. 95
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Petugas Linmas di Kab/Kota daerah pemekaran baru	406	726
2	1 Wilayah Kerja Kab/Kota (Jumlah RT)	1060	1060
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (%)	38,30	68,49

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

|| Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan. pada tahun 2017 jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan adalah sebanyak 104 kasus atau 71,23 persen dari jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat sebanyak 146.

Tabel 2. 96
penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Pelanggaran K3 yang terselesaikan	N/A	104
2	Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat	N/A	146
	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	N/A	71,23

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

|| Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.

Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 adalah sebagai berikut:

- WMK dibentuk oleh pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan sistem alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK.
- WMK ditentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan data Satpol PP & Damkar, pada tahun 2017 Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran Kab. Soppeng adalah 58,88 % meningkat dibanding tahun 2016 yang baru mencapai 35,33 %.

Tabel 2. 97
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kab/Kota Tahun 2016-2017
Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran	529,89	883,15
2	Luas Wilayah Kab/Kota	1.500	1.500
	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kab/Kota (%)	35,33	58,88

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

|| Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Tabel 2. 98

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu Maks.15 Menit	13	20
2	Jumlah Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	22	28
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	59,09	71,43

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

Pada Tahun 2017 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kab. Soppeng adalah 71,43% meningkat dibanding tahun sebelum sebesar 59,09 %. Hal ini menunjukkan jika dari jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK belum seluruhnya dapat tertangani dalam batas waktu maksimal 15 Menit.

|| Persentase Penegakan PERDA

Penegakan Perda adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh Anggota Satpol PP.

Tabel 2. 99

Persentase Penegakan PERDA Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	NA	20
2	Jumlah Pelanggaran PERDA	NA	20
	Persentase Penegakan PERDA	NA	100

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar

Penyelesaian pelanggaran Perda oleh Satpol PP dilakukan sesuai dengan SOP yaitu tindakan preventif non yustisial, dan apabila pelanggaran Perda mengandung unsur pidana dapat meneruskan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data, Persentase penegakan Perda oleh Satpol PP pada tahun 2017 adalah 100 persen.

6. Sosial

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 100

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Dasar Sosial

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	97,82	99,20
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	97,82	99,20
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	97,82	99,20
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100	0
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	100
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	67	155
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	0	0
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	0	54

Sumber : Dinas Sosial Kab.Soppeng

Berdasarkan tabel diatas, tergambar pencapaian Kinerja Pelayanan pada Urusan Sosial, yang diukur dari capaian indikator kinerja:

|| Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial,

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, 2atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan. Data Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial pada Tabel berikut :

Tabel 2. 101

Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	66305	66294
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	67780	66828
	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	97,82	99,20

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

|| Persentase PMKS yang tertangani

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan persentase jumlah PMKS yang ditangani terhadap jumlah PMKS yang ada. Data menunjukkan bahwa, persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2016 adalah 97,82 persen yang dihitung dari jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan sebanyak 66.305 dibagi dengan jumlah PMKS yang ada sebanyak 67.780 orang. Dan pada tahun 2107 persentase PMKS yang tertangani adalah 99,20 persen dari 66.828 PMKS yang ada. Hal ini menunjukkan kondisi yang membaik untuk tahun mendatang PMKS dapat tertangani sepenuhnya. Masih banyaknya jumlah PMKS di Kab. Soppeng mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial yang perlu penanganan dan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

Tabel 2. 102
Persentase PMKS yang Tertangani Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PMKS yang tertangani	66305	66294
2	Jumlah PMKS yang ada	67780	66828
	Persentase PMKS yang Tertangani	97,82	99,20

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

|| Persentase PMKS skala Kab. yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

Berdasarkan data Dinas Sosial pada tahun 2016 % PMKS Skala Kab. yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar adalah 99,29 persen. persentase tersebut dihitung dari Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun sebanyak 66.305 orang dibagi dengan Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh Bansos. Sementara untuk tahun 2017 % PMKS Skala Kab. yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar adalah 99,20 persen.

Tabel 2. 103
Persentase PMKS Skala Kab. yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PMKS yang memperolah bantuan sosial dalam 1 tahun	66305	66294
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperolah bantuan sosial	66780	66828
	% PMKS Skala Kab. yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan dasar	99,29	99,20

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

|| Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial dihitung dari Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dibagi dengan Jumlah panti sosial dalam 1

(satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial Panti Sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial adalah sebanyak 5 panti.

Tabel 2. 104
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	5	5
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	5	5
	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

|| Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di Kab. Soppeng yaitu 1 WKBSM atau 100%.

Tabel 2. 105
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial	0	1
2	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial skala	0	1
	% Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	0	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

|| Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat pada tahun 2016 adalah 66,7 persen. Yang dihitung dari jumlah korban yang menerima bantuan sebanyak 20 korban dibagi dengan jumlah korban yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 30 orang. Dan pada tahun 2017 mencapai 155,3 persen. yang dihitung dari jumlah korban yang menerima bantuan sebanyak 205 korban dibagi dengan jumlah korban yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sebanyak 132 orang.

Tabel 2. 106
Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	20	205

2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	30	132
	% Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	66,7	155,3

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

2.4.1.2. Urusan Wajib Pemerintahan Non Pelayanan Dasar

Kinerja layanan urusan wajib Non Pelayanan Dasar, diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan wajib yang berkaitan dengan Non pelayanan dasar terdiri dari:

1. Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 107
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	0
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	14,46	30,61
4	Keselamatan dan perlindungan	%	1,80	4,06
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	0,28	1,30
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100	0
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	0,60	1,11
8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	100	100
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	100
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100	22,22
11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100	50
	Rasio lulusan S1/S2/S3			

Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab.Soppeng

Berdasarkan tabel diatas, tergambar pencapaian Kinerja Pelayanan pada Urusan Sosial, yang diukur dari capaian indikator kinerja:

|| Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan dihitung dari Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dari Total Jumlah pencari kerja yang terdaftar, Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 108
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Tahun 2015-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	35 Orang	135 Orang

2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	242 Orang	441 Orang
	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan	14,46	30,61

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng

|| Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan Perlindungan adalah indikator untuk mengukur seberapa banyak perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keselamatan dan perlindungan terhadap karyawan, dihitung dari jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dari total jumlah seluruh perusahaan di Wilayah Kab. Soppeng. Data keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja di Kab. Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2. 109

Keselamatan dan Perlindungan Tahun 2015-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	9	11
2	Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten	499	271
	Keselamatan dan Perlindungan	1,80	4,06

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng

|| Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek menunjukkan seberapa besar jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK dari total jumlah buruh/pekerja. Data Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2. 110

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Tahun 2015-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pekerja/buruh JAMSOSTEK	392	1752
2	Jumlah pekerja/buruh	141.534	135.278
	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	0,28	1,30

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng

|| Besaran pemeriksaan perusahaan

Besaran pemeriksaan perusahaan menunjukkan jumlah perusahaan yang telah diperiksa dari total jumlah perusahaan yang terdaftar. Data besaran pemeriksaan perusahaan di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2. 111

Besaran pemeriksaan perusahaan Tahun 2015-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah perusahaan yang telah diperiksa	3	3
2	Jumlah perusahaan yang terdaftar	499	271
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	0,60	1,11

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng

|| Besaran pengujian peralatan di perusahaan

Besaran pengujian peralatan di perusahaan menunjukkan jumlah peralatan yang telah diuji dari jumlah peralatan di perusahaan yang terdaftar. Data besaran pengujian peralatan perusahaan di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut:

Tabel 2. 112

Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan Tahun 2015-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah peralatan yang telah diuji	3	3
2	Jumlah peralatan yang telah terdaftar	3	3
	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng

|| Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dilatih dari jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi. Data Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2. 113

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2015-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	20	40
2	Jumlah Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	20	40
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng

|| Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dilatih dari jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat. Data Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2. 114

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat Tahun 2015-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	120	20
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis masyarakat	120	90
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	100	22,22

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng

|| Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dilatih dari jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan. Data Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Soppeng pada tabel berikut :

Tabel 2. 115

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Tahun 2015-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	140	60
2	Jumlah pendaftar pelatihan kewirausahaan	140	120
	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	100	50

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Soppeng

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 116

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	10,94	11,61
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20	20
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta		89,06	88,39
4	Rasio KDRT		0,0064	0,0035
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur		N/A	N/A
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	96,97	98,12
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit		N/A	N/A
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	N/A	40
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	11,11	45,45
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		N/A	N/A
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		N/A	N/A
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		91,57	92,5
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		1,01	1,31
16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		1,15	1,1
17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		N/A	N/A
18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		4,77	2,57
19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	%	48,71	52,89

Sumber : Dinas PPPA Kab.Soppeng

Berdasarkan tabel diatas, tergambar pencapaian Kinerja Pelayanan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diukur dari capaian indikator kinerja :

|| Persentase perempuan di lembaga pemerintahan

Persentase perempuan di lembaga pemerintahan, menunjukkan persentase jumlah perempuan di lembaga pemerintah dari jumlah pekerja perempuan secara keseluruhan, pada tahun 2016 tercatat 3.878 pekerja perempuan di lembaga pemerintah atau 10,94 persen dari total jumlah pekerja perempuan sebanyak 35.455, selanjutnya di tahun 2017 persentase perempuan di lembaga pemerintah meningkat menjadi 4.616 orang atau 11,61 persen dari jumlah pekerja perempuan sebanyak 39.775. peningkatan tersebut disebabkan adanya penerimaan kontrak per tahun di lembaga pemerintahan.

Tabel 2. 117
Persentase perempuan di lembaga pemerintahan Tahun 2016-2017Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3.878	4.616
2	Jumlah pekerja perempuan	35.455	29.775
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	10,94	11,61

Sumber : Dinas PPPA

|| Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, menunjukkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dari total jumlah pekerja perempuan, pada tahun 2016 jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta tercatat sebanyak 31.577 orang atau 89,06 persen dari jumlah pekerja perempuan sebanyak 35.455 orang. sedangkan pada tahun 2017 jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta tercatat sebanyak 35.159 orang atau 88,39 persen dari jumlah pekerja perempuan sebanyak 39.775 orang. Secara persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan di banding kondisi tahun 2016, namun secara umum dapat dikatakan bahwa kesempatan perempuan di Kabupaten Soppeng untuk berpartisipasi di lembaga swasta terbuka karena bertumbuhnya lembaga – lembaga swasta didaerah yang membutuhkan tenaga kerja baik perempuan maupun laki – laki. Dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja.

Tabel 2. 118
Partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2016-2017Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	31.577	35.159
2	Jumlah pekerja perempuan	35.455	29.775
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	89,06	88,39

Sumber : Dinas PPPA

|| Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD menunjukkan jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan dari jumlah total kursi di keanggotaan DPRD pada tahun 2016 jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan adalah sebanyak 6 kursi atau 20

persen dari jumlah total kursi keanggotaan DPRD sebanyak 30 kursi . Begitu pula di tahun 2017 tetap 6 kursi atau 20 persen dari jumlah kursi keanggotaan DPRD. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD karena kurangnya pemahaman pemilih perempuan untuk memilih perempuan serta kurangnya kualitas perempuan yang menjadi calon legislatif.

Tabel 2. 119

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Tahun 2016-2017Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	5	6
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	30	30
	Proporsi Kursi yang diduduki perempuan DPRD	20	20

Sumber : Dinas PPPA

|| Ratio KDRT

Ratio KDRT menunjukkan jumlah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari total Jumlah Rumah Tangga, pada tahun 2016 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah 4 kasus atau 0,0064 dari jumlah seluruh Rumah Tangga dan tahun turun menjadi hanya 2 kasus atau 0,0035 dari jumlah seluruh rumah tangga sebanyak 58.353. Penurunan kasus KDRT tersebut, karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini tidak terlepas dari pemerintah dalam hal pembinaan dan penyadaran melalui sosialisasi.

Tabel 2. 120

Ratio KDRT Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah KDRT	4	2
2	Jumlah Rumah Tangga	62.775	57.309
	Ratio KDRT	0,0064	0,0035

Sumber : Dinas PPPA

|| Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur pada dinas DPPPA belum ada data pada tahun 2016 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan tidak menjadi salah satu indicator kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

|| Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, menunjukkan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dari total jumlah angkatan kerja perempuan, pada tahun 2016 jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Soppeng sebanyak 35.455 atau 96,97 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 36.563. dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 39.775 orang atau 98,12 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 40.539 orang.

Tabel 2. 121
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2016-2017Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	35455	39775
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	36.563	40.539
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	96,97%	98,12%

Sumber : Dinas PPPA

|| Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum menunjukkan jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum dari total jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum, pada tahun 2016 jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum adalah 25 korban atau 100 persen dari jumlah korban dan pada tahun 2017 jumlah korban yang mendapatkan bantuan hukum adalah 21 korban atau 100 persen dari jumlah korban.

Tabel 2. 122
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2016-2017Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	25	21
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	25	21
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100%	100%

Sumber : Dinas PPPA

|| Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, menunjukkan jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial dari jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial, pada tahun 2017 jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial adalah 2 korban atau 40 persen dari jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial sebanyak 5 korban. Penanganan korban tersebut dapat dilakukan karena adanya koordinasi yang cukup dengan pihak yang terkait dalam penanganan kasus Perempuan dan Anak korban kekerasan serta terlatihnya SDM yang ada di ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meskipun belum seluruhnya dapat tertangani. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman terhadap petugas yang menangani hal tersebut.

|| Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan

jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan, pada tahun 2016 jumlah yang diputuskan pengadilan sebanyak 1 perkara atau 11,11 persen dari jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan sebanyak 9 perkara. pada tahun 2017 jumlah yang diputuskan pengadilan sebanyak 5 perkara atau 45,45 persen dari jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan sebanyak 11 perkara.

Tabel 2. 123

Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Tahun 2016-2017Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	5
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	9	11
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	11,11%	45,45%

Sumber : Dinas PPPA

|| Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, menunjukkan jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum, dari jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum. Pada tahun 2016 jumlah korban yang layanan bantuan hukum sebanyak 25 korban dan seluruhnya mendapatkan layanan atau 100 persen. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2017 dari 21 korban yang membutuhkan bantuan hukum seluruhnya mendapatkan layanan bantuan hukum.

|| Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD menunjukkan perbandingan APMD SD Perempuan dengan APM SD Laki-Laki, pada tahun 2017 ratio APM Perempuan/Laki-Laki adalah 92,50 angka ini penunjukkan Angka Partisipasi Murni perempuan dibanding laki-laki mencapai 92-93 . Kondisi ini tidak jauh berbeda dibanding tahun 2016 yaitu 91,57 % dengan perbandingan 10.040 APM Perempuan dan APM SD Laki-Laki adalah 10.964.

Tabel 2. 124

Ratio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Tahun 2016-2017Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	APM-SD Perempuan	10.040	9.896
2	APM-SD Laki-Laki	10.964	10.698
	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	91,57%	92,50%

Sumber : Dinas PPPA

|| Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP menunjukkan perbandingan APMD SMP Perempuan dengan APM SMP Laki-Laki.

Tabel 2. 125

Ratio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP Tahun 2016-2017Kabupaten Soppeng

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	APM-SMP Perempuan	6.334	7.797
2	APM-SMP Laki-Laki	6.223	5.941
	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	101,78%	131,24%

Sumber : Dinas PPPA

Pada tahun 2017 ratio APM Perempuan/Laki-Laki adalah 131,24 angka ini penunjukkan Angka Partisipasi Murni perempuan dibanding laki-laki mencapai 131, eningkat dibanding tahun 2016 yaitu 101,78 dengan perbandingan 6.334 APM Perempuan dan APM SMP Laki-Laki adalah 6223.

|| Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA

Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA menunjukkan perbandingan APMD SMA Perempuan dengan APM SMA Laki-Laki, pada tahun 2017 ratio APM Perempuan/Laki-Laki adalah 115,5 angka ini penunjukkan Angka Partisipasi Murni perempuan dibanding laki-laki mencapai 115 . dan pada tahun 2016 sedikit mengalami penurunan yaitu 110,3 % atau dengan perbandingan 5.038 APM Perempuan dan APM SD Laki-Laki adalah 4.363.

|| Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 14-24 Tahun

Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-Laki pada Kelompok Usia 14-24 Tahun, menunjukkan perbandingan AMH 15-24 perempuan dengan AMH 15-24 Laki-Laki, pada tahun 2016 perbandingan AMH 15-24 perempuan adalah 4,77 atau 124 berbanding 26, sementara pada tahun 2017 perbandingannya adalah 108 berbanding 42 atau 2,57. Hal ini disebabkan adanya kesadaran masyarakat khususnya perempuan pentingnya pendidikan.

|| Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sector Non Pertanian

Kontribusi Perempuan Dalam Pekerjaan Upahan di Sector Non pertanian, dihitung dari banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian dari total banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian, pada tahun 2016 jumlah pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian adalah 23.714 orang atau 48,71 persen dari jumlah pekerja upahan di sektor non pertanian sebanyak 48.689 pekerja. Dan pada tahun 2017 jumlah pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian adalah 28.034 pekerja atau 52,89 persen dari jumlah pekerjaan upahan di sektor non pertanian sebanyak 53.009 pekerja.

3. Pangan

Tabel 2. 126

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pangan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Ketersediaan pangan utama	%	2,72	3,03
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kpt	621.922,75	671674,55
		Protein per Kpt	14.560,75	15.725,57

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	42,86	45,45

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

|| Ketersediaan pangan utama

Persentase Ketersediaan Pangan Utama dihitung dari Rata-rata jumlah pangan utama per tahun (kg) dibagi dengan jumlah penduduk, pada tahun 2016 % ketersediaan pangan utama di Kab.Soppeng adalah 52,88 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,02.

Tabel 2. 127
Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)	133.606,00	169.060,00
2	Jumlah penduduk	252.677,00	241.430,00
	Ketersediaan Pangan Utama (%)	52,88	70,02

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

|| Ketersediaan energi dan protein perkapita

Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita pada Tahun 2017 adalah Ketersediaan Energi 8.539 dan Ketersediaan Protein perkapita 201,25. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat Ketersediaan Kalori dan Ketersediaan Protein pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 128
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Ketersediaan pangan/kapita/hari	-	-
2	Kandugan Kalori	-	-
3	Kandugan Protein	-	-
4	BDD	-	-
	Ketersediaan Energi Perkapita	8.539,00	54.291,00
	Ketersediaan Protein Perkapita	201,25	476,70

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan kalori dan protein pada tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh tingkat ketersediaan energi untuk padi-padian khususnya jenis pangan beras dimana tingkat ketersediaannya tinggi sebesar 267.08.

|| Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Untuk memberi rasa aman kepada masyarakat, pemerintah melalui Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan secara kontinyu melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tersebut dalam melakukan pengujian terhadap makanan yang diperjualbelikan. Pengujian dilakukan dengan bekerjasama dengan oleh Tim penguji dari salah satu akademi yaitu Universitas Hasanuddin Makassar.

Tabel 2. 129

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku	3	5
2	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan	7	11
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)	42,86	45,45

Sumber Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pada tahun 2016 pencapaian pengawasan dan pembinaan keamanan pangan adalah sebesar 42,86%. Pencapaian tersebut berupa hasil pengujian di laboratorium terdapat jumlah pangan yang diuji adalah 7 sampel dengan hasil pengujian yang aman dikonsumsi sebanyak 4 sampel dan sebanyak 3 sampel yang tidak aman. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar buah-buahan di Kabupaten Soppeng mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan terutama formalin dan pada Tahun 2017 tingkat pencapaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 45% dengan jumlah sampel yang pangan yang diuji sebanyak 11 sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul dan jumlah sampel yang aman atau hasil pengujian oleh Tim dari akademisi (Unhas) menunjukkan bahwa sampel aman sebanyak 5 dan sampel yang tidak aman sebanyak 6 sampel, dimana kondisi ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh Tim penguji dari salah satu akademi yaitu Universitas Hasanuddin Makassar menunjukkan bahwa jenis sampel yang diuji belum aman untuk di konsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Soppeng terutama beberapa jenis buah-buahan seperti buah apel, buah anggur dan ikan kering yang dijual di pasar tradisional di Kabupaten Soppeng yang di duga mengandung zat pengawet atau formalin.

4. Pertanahan

Tabel 2. 130

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Persentase luas lahan bersertifikat		66,90	67,12
	Penyelesaian kasus tanah Negara		100	100
	Penyelesaian izin lokasi	%	86,6	100

Sumber : LPPD Kab.Soppeng

Berdasarkan Tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diukur dari berbagai Indikator Kinerja sebagai berikut :

|| Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Jumlah Luas Lahan bersertifikat pada tahun 2016 adalah 3.458.359 atau 66,90 dari Luas lahan yang seharusnya bersertifikat 5.169.549,60 dan pada tahun 2017 luas lahan yang bersertifikat menjadi 3.465.742 atau 67,12 persen dari luas lahan yang seharusnya bersertifikat.

Tabel 2. 131
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Luas Lahan bersertifikat	3.458.359,00	3.465.742,00
2	Luas lahan yang seharusnya bersertifikat	5.169.549,60	5.163.458,60
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	66,90	67,12

Sumber : LPPD Kab. Soppeng Tahun 2016 dan 2017

|| Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Pada tahun 2016 jumlah kasus yang terdaftar adalah 8 kasus dan diselesaikan 100 % demikian pula di tahun 2017 jumlah kasus tanah negara adalah 2 kasus dan terselesaikan 100 persen.

Tabel 2. 132
Penyelesaian Kasus Tanah Negara Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kasus yang diselesaikan	8	2
2	Jumlah kasus yang terdaftar	8	2
	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100	100

Sumber : LPPD Kab. Soppeng Tahun 2016 dan 2017

|| Penyelesaian izin lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Data Penyelesaian izin lokasi selama tahun 2016-2017 sebagai berikut :

Tabel 2. 133
Penyelesaian Izin Lokasi Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ijin Lokasi	11	19
2	Permohonan Ijin Lokasi	13	19
3	Penyelesaian Ijin Lokasi	11	19
	jumlah	**35**	**57**

Sumber: DPMPTSP Kab. Soppeng

5. Lingkungan Hidup

Tabel 2. 134
Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Ada
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Ada/Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		3,32	1,63
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		89,86	91,71

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan		0,48	0,48
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	-	46,67
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		-	-
	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional			
	Penetapan hak MHA		-	-
	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		-	-
	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana			
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		-	-
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Tidak Ada	Tidak Ada
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.		-	100
	Timbunan sampah yang ditangani	%	24	53
	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	39,54	94,535
	Persentase cakupan area pelayanan	%	18,53	18,53
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	24	53,45
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		73,05	75,95
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan		0	0
	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan		0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2. 135
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	0,9	0,97
	Rasio bayi berakte kelahiran	%	100	0,96
	Rasio pasangan berakte nikah	%	0,33	0,37
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	%	Ada	Ada
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	90,06	96,93
	Cakupan penerbitan akta kelahiran		93,1	94,35

Sumber: Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil

Berdasarkan Tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diukur dari berbagai Indikator Kinerja sebagai berikut :

|| Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kepemilikan KTP per satuan penduduk Kab. Soppeng, Angka ini dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dengan Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah (Wajib KTP) Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk kurun waktu 2016-2017 mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan. Rasio tersebut sudah tergolong dalam kondisi yang baik karena sudah mengalami peningkatan hampir tiap tahun dan sudah hampir mencapai angka 100.

Tabel 2. 136
Penduduk Ber-KTP Per-Satuan Penduduk Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	171.630	177.785
2	Jumlah penduduk usia> 17 atau telah menikah	190.568	183.416
	Rasio penduduk ber-KTP per-satuan penduduk	0,90	0,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

|| Rasio bayi berakte kelahiran

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase bayi yang memiliki akte kelahiran. Kepemilikan akte lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akte kelahiran bermanfaat untuk kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal ataupun menjadi syarat untuk pembuatan surat keterangan diri penduduk. Rasio bayi berakte kelahiran dihitung dengan membandingkan jumlah bayi yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi, Berikut data Rasio bayi berakte kelahiran di Kab. Soppeng kurun waktu 2016-2017:

Tabel 2. 137
Ratio Bayi ber-Akte Kelahiran Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Bayi Ber-Akte Kelahiran	4.222	3.671
2	Jumlah Bayi	4.222	3.808
	Rasio bayi ber-akte kelahiran	1.00	0,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

|| Rasio Pasangan Ber-Akte Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akte. Akte nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akte nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakte nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakte nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng, diketahui bahwa jumlah pasangan nikah yang ada di Kab. Soppeng sudah berakte nikah. Sebagai berikut :

Tabel 2. 138
Ratio Pasangan Ber-Akte Nikah Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Pasangan nikah ber-akte nikah	38.727	41.663
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	118.336	113.461
	Rasio pasangan ber-akte nikah	0,33	0,37

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

|| Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah Kab. Soppeng telah memiliki database kependudukan pada skala Provinsi. Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala Provinsi, berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng sudah tersedia. Database kependudukan dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kab. Soppeng dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Ditambah lagi, dengan adanya program yang dijalankan secara online terpadu, memudahkan koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi untuk dilakukan.

|| Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Indikator ini bertujuan untuk melihat apakah KTP yang diterbitkan sudah berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan). Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng telah menerapkan program e-KTP dan penerapan KTP berbasis NIK.

|| Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan KTP Elektronik adalah jumlah dokumen KTP Elektronik yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah wajib KTP dalam satu wilayah pada tahun yang sama. Jumlah wajib KTP dihitung berdasarkan database kependudukan kabupaten/kota mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada tahun berjalan. Dalam database kependudukan ini sudah termasuk data KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena habis masa berlakunya, atau yang belum habis masa berlakunya dikarenakan pindah datang, rusak atau hilang.

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan dari total jumlah penduduk Wajib KTP. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng Cakupan Penerbitan KTP, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 139
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	171.630	177.785
2	Jumlah penduduk wajib KTP	190.568	183,416
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	90,06	96,93

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

|| Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah jumlah dokumen kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil sampai dengan tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah kelahiran yang terjadi dalam satu wilayah sampai dengan tahun yang bersangkutan. Jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun yang bersangkutan adalah jumlah kelahiran yang harus diterbitkan kutipan akta kelahirannya yang dihitung berdasarkan penduduk yang mempunyai NIK sesuai dengan database kependudukan. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar Cakupan penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Soppeng, angka ini dihitung dari jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dari total jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. Berdasarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran, tahun 2016-2017 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 140
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	2.727	2.555
2	jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	2.929	2.708
	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	93,10	94,35

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2. 141
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		1	3
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		0,2	0,2
4	Persentase LSM aktif	%	100	100
5	Persentase LPM Berprestasi	%	4	1
6	Persentase PKK aktif	%	100	100
7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100
8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	26,60	27,48
	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat		NA	NA

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dari tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik adalah jumlah kantor pemerintahan desa yang berfungsi dengan kondisi baik dan layak pakai pada masing-masing pemerintahan desa. Pada Tahun 2017, dari 49 pemerintahan desa di Kabupaten Soppeng telah memiliki kantor pemerintahan desa yang berfungsi baik dan beroperasi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan desa. Sehingga cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik pada tahun 2017 telah mencapai 100%. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik tahun 2016-2017, pada tabel berikut :

Tabel 2. 142
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	jumlah kantor pemerintahan desa yang baik	49	49
2	Jumlah seluruh pemerintah desa	49	40
	Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

|| Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga Kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Kelompok binaan LPM merupakan kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui LPM, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pembentukan LPM.

Sementara rata-rata jumlah LPM adalah jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Soppeng berdasarkan Jumlah LPM yang ada. Pada Tahun 2017 terdapat 210 kelompok binaan dari 70 LPM. Sehingga apabila dirata-ratakan terdapat 3 jumlah kelompok Binaan LPM pada Kabupaten Soppeng pada masing-masing LPM.

Tabel 2. 143
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	jumlah kelompok binaan LPM	70	201
2	Jumlah LPM	70	70
	Rata-rata jumlah kelompok Binaan LPM	1	3

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

|| Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Kelompok Binaan PKK Kabupaten Soppeng adalah kelompok yang bergerak di penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat yang dibina secara teknis oleh Tim Penggerak PKK. Rata-rata jumlah binaan PKK adalah jumlah seluruh binaan PKK yang di Kabupaten Soppeng yang pada tahun 2017 terdapat 14 binaan PKK dari 79 jumlah PKK yang ada. Atau pada Tahun 2017 Rata-rata jumlah binaan PKK mencapai angka 0,2.

Tabel 2. 144
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	jumlah kelompok binaan PKK	14	14
2	Jumlah PKK	70	70
	Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK	0,2	0,2

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

|| Persentase LPM aktif

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat dengan LPM adalah Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan, oleh dan untuk masyarakat yang merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jumlah LPM di Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017 berjumlah 70 LSM dengan tingkat capaian persentase LSM aktif di Kabupaten Soppeng mencapai 100%.

|| Persentase LPM Berprestasi

Ajang kompetisi dan mengooptimalkan daya saing perlu ditumbuhkan. Untuk menggapai hasil pembangunan yang optimal, maka peran serta kelembagaan sosial masyarakat perlu diberikan rangsangan untuk mencapai prestasi. Untuk itulah dilakukan seleksi terhadap LPM untuk mendapatkan LPM berprestasi merupakan kebijakan yang sangat startegis untuk meningktakan gerak keaktifan lemabaga-lembaga tersebut. LPM berprestasi adalah pada aspek tertentu mampu berperan dalam menggalang persatuan dan kesatuan masyarakat dalam pembangunan partisipatif meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil pembangunan. Pada tahun 2017 dari 70 LPM yang ada di Kabupaten Soppeng hanya terdapat 1 LPM yang berprestasi atau 1% dari jumlah LPM. Capaian tersebut lebih kecil dari capaian tahun 2015 dan 2016 yang mencapai 3 LPM berprestasi.

Tabel 2. 145
Persentase LPM Berprestasi Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah LPM berprestasi	3	1
2	Jumlah LPM	70	70
	Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK (%)	4	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

|| Persentase PKK aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Pada Tahun 2017, terdapat 79 PKK yang aktif dari 79 PKK yang terdata. Atau persentase PKK aktif pada Kabupaten Soppeng mencapai 100%.

Tabel 2. 146
Jumlah PKK Aktif Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah PKK Aktif	70	79
2	Jumlah PKK	70	79
	Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK (%)	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

|| Persentase Posyandu aktif

Pos Pelayanan Keluarga Berencana - Kesehatan Terpadu (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Jumlah Posyandu di Kabupaten Soppeng yang ditempatkan di balai dusun, balai kelurahan, RW, dan sebagainya sebanyak 327 posyandu dengan Persentase Posyandu yang aktif pada Kabupaten Soppeng mencapai 100%.

Tabel 2. 147
Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah Posyandu Aktif	327	327
2	Jumlah Posyandu	327	327
	Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK (%)	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

|| Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana masyarakat berintegrasi dengan program-program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial, politik dan kultural dimana masyarakat yang berswadaya dapat berupa kelompok organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri ataupun himpunan masyaakat tanpa organisasi.

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Soppeng khususnya pada Tahun 2017 dapat terlihat dari Rp.70.469.623.974,- total alokasi anggaran yang dialokasikan seluruh Pemerintah Kelurahan dan Desa terdapat Rp.19.365.830.291,- yang dilaksanakan melalui swadaya masyarakat atau mencapai 27.48%. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh beberapa desa dengan kepanitiaan dilaksanakan oleh Badan Kerjasamanya antar Desa (BKAD).

Tabel 2. 148
Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016-2017 Kabupaten Soppeng

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat	4.393.203.045	19.365.830.291
2	Total Program Pemberdayaan MAsyarakat	16.136.101.673	70.469.623.974
	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat %	26,60	27,48

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

|| Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

Dalam struktur APBDESA Kabupaten soppeng terdapat keseragaman pelaksanaan program/kegiatan dengan melaksanakan 2 item Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu Peningkatan Kapasitas Kades dan Aparatur Pemerintah Desa serta BPD, dan Program/Kegiatan Peningkatan SDM Masyarakat Desa. Bentuk 2 Program/Kegiatan tersebut adalah non fisik berupa bimbingan teknis, pelatihan dan penyuluhan, sehingga tidak terdapat data yang dapat ditampilkan untuk program/kegiatan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat khususnya pada Tahun 2017.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2. 149
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,08	0,07
2	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,3	2,3
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB		20,59	41,18
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	NA	41,18
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		NA	NA
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan		NA	NA
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		NA	NA
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	NA	1,21
9	Ratio Akseptor KB	%	NA	0,75
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	0,78	0,75
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19	%	NA	NA
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun			
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13,74	15,67
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	18	14
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	28	33
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	54	53
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	56	56

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	54	53
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	12	25
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	7,75	7,75
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	83	83
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	19,32	20,65
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	67	71
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	10,11	9,81
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	%	NA	NA
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes			

Sumber : Dinas PPKB Kab.Soppeng

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga Berencana, yang jelaskan sebagai berikut:

|| Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Soppeng terus mengalami penurunan dan bahkan tergolong rendah pada tahun 2016 LPP yaitu 0,08% bahkan di tahun 2017 menurun lagi menajdi 0,07% , tinggal bagaimana mempertahankan LPP ini ke depan.

Tabel 2. 150
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	-	9019
2	jumlah keluarga	-	70205
	% Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	-	12,85%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

|| Total Fertility Rate

TFR untuk dua tahun terakhir masih stagnan yaitu diangka 2,3 artinya rata-rata satu keluarga memiliki 2-3 orang anak, dan sebenarnya ini sudah dibawah TFR provinsi yang 2,4 namun belum mencapai TFR yang menajdi target nasional yaitu:

Tabel 2. 151

Total Fertility Rate Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	TFR Kab. Soppeng	2,3	2,3

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

|| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB

Perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB semakin meningkat artinya adanya kepedulian stakeholder Perangkat Daerah dalam pengendalian penduduk dan KB

Tabel 2. 152

Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	7	14
2	Jumlah semua perangkat daerah	36	38
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	19,44%	36,84%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

|| Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memnafaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Tabel 2. 153

Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk	0	0
2	Jumlah semua perangkat daerah	36	38
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0,00%	0,00%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

Untuk sekarang ini Rancangan Induk Pengendalian Penduduk belum di publikasikan ke perangkat daerah, hanya digunakan dalam lingkup Perangkat Daerah KB saja, untuk rencana ke depan akan di lakukan sosialisasi ke Perangkat Daerah lain yang menggunakan data penduduk untuk menggunakan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk.

|| Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pengendalian kuantitas dan kualitas Penduduk

Sampai sekarang belum ada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang disusun terkait pengendalian penduduk dan KB untuk itu kedepan harus bisa menyusun suatu peraturan daerah atau peraturan bupati terkaiat pelaksanaan kegiatan program KKBPK.

|| Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (Parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan

Data profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) belum dipekrkenalkan ke Perangkat Daerah lain dan akan menjadi PR bagi Perangkat Daerah KB Kab. Soppeng supaya dapat menyusuan Parameter dan Proyeksi Penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan datang untuk Perangkat Daerah lain

|| Jumlah kerjasama penyelenggara pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan

Belum ada kerjasama dengan penyelenggara pendidikan lain tentang pendidikan kependudukan, baik pendidikan formal, non formal maupun informal, sehingga perlu diprogramkan untuk membuat kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk materi pendidikan kependudukan.

|| Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tabel 2. 154
Rata-rata jumlah anak per keluarga Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anak	-	85031
2	Jumlah keluarga	-	70205
	Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga	-	121,12%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Ratio akseptor KB

Ratio Akseptor KB selama dua tahun terakhir mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 rasionya 77,94% artinya diantara 100 PUS 77 orang ber KB dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 75 yang artinya diantara 100 PUS hanya 75 orang yang ikut program KB untuk itu perlu peningkatan edukasi dan menjaga kelangsungan peserta KB untuk menghindari DO.

Tabel 2. 155
Ratio Akseptor KB Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Akseptor KB	29525	27583
2	Jumlah pasangan usia subur	37882	36774
	Ratio Akseptor KB	77,94%	75,01%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun

Tabel 2. 156
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah peserta KB aktif	29525	27583
2	Jumlah pasangan usia subur	37882	36774

	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49	77,94%	75,01%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

Angka CPR untuk wanita usia 15-49 tahun juga mengalami penurunan dari tahun 2016-2017 sebesar 2,93% artinya dalam 1 Tahun ada 2,93% wanita yang pernah Ber KB lalau tidak ber KB lagi, bisa karena menopause bisa juga karena ingin anak atau memang DO tanpa alasan yang jelas.

|| Angka kelahiran remaja perempuan usia 15-19 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Ada penurunan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun sebesar 0,13%, artinya semakin berkurang perempuan usia 15-19 tahun yang melahirkan dini ini dapat dicapai karena banyaknya advokasi dan sosialisasi pendewasaan usia pernikahan dan melahirkan bagi perempuan.

Tabel 2. 157
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19	286	240
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19	36.855	36.833
	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15–19) Per 1.000 Perempuan Usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,78%	0,65%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun

Cakupan PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun untuk saat ini datanya tidak tersedia, karena format pendataan keluarga yang mengalami perubahan, sehingga data ini tidak tersedia.

Tabel 2. 158
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun		
2	Jumlah pasangan usia subur	37882	36774
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	0,00%	0,00%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet need)

Terjadi peningkatan unmet need sebesar 1,93% selama 1 tahun yang artinya semakin banyak PUS yang ingin ber KB tapi tidak terlayani, ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat masalah manfaat alat KB dan pentingnya, ada juga yang tidak ber KB karena memang jauh dari sarana pelayanan KB, bahkan banyak yang menggunakan metode tradisional sehingga tidak tercatat sebagai peserta KB.

Tabel 2. 159

Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	5205	5763
2	Jumlah pasangan usia subur	37882	36774
	Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	13,74%	15,67%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)

Dari tahun 2016 ke 2017 ada penurunan peserta KB MKJP sebanyak 4,7% sebuah angka yang cukup tinggi, tapi hal ini bisa disebabkan karena sudah memasuki masa Menopause.

Tabel 2. 160

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	5572	3908
2	Jumlah akseptor KB	29525	27583
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,87%	14,17%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi

Tingkat keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi mengalami peningkatan sebesar 4,93% artinya masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemakaian alat kontrasepsi sehingga menurunkan angka Drop Out penggunaan alat kontrasepsi.

Tabel 2. 161

Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	8357	9191
2	Jumlah akseptor KB	29525	27583
	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	28,30%	33,32%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

Anggota kelompok BKB yang ber KB mengalami penurunan dari tahun 2016 - 2017 sebesar 0,61%, untuk itu perlu lebih diintensifkan sosialisasi penggunaan Alat Kontrasepsi kepada anggota BKB, karena yang diharapkan semua PUS anggota Poktan ber KB, kecuali yang ingin anak segera.

Tabel 2. 162

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	1352	1318
2	Jumlah anggota kelompok BKB	2502	2467
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB	54,04%	53,43%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB

Terjadi penurunan PUS anggota BKR yang ber KB sebesar 0,35% ini disebabkan karena ada yang Ingin anak segera ada juga yang DO karena tidak cocok dengan Alkon yang dipakai, sehingga perlu pemahaman yang lebih mendalam kepada para anggota Poktan.

Tabel 2. 163
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	1106	1070
2	Jumlah anggota kelompok BKR	1960	1908
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	56,43%	56,08%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber-KB

Anggota BKL yang ber KB juga sangat rendah dan terjadi juga penurunan dari tahun 2016-2017 sebesar 1,24 %, perlu dilakukan peninjauan ulang para anggota BKL ini, karena sebenarnya yang di BKL itu bukan lansianya yang merupakan anggota tapi keluarga dari lansia itu yang anggota BKL dan memang banyak juga anggota BKL yang sudah termasuk lansia.

Tabel 2. 164
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKR) ber-KB Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	584	556
2	Jumlah anggota kelompok BKL	1644	1622
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	35,52%	34,28%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan

Jumlah PPKS mengalami peningkatan dari tahun 2016 Cuma satu kecamatan yang ada PPKS-nya dan tahun 2017 sudah ada 2 kecamatan yang memiliki PPKS ke depan tentu diharapkan semua kecamatan memiliki PPKS.

Tabel 2. 165
Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PPKS	1	2
2	Jumlah kecamatan	8	8
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	12,50%	25,00%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Jumlah remaja yang tergabung dalam PIK Remaja/Mahasiswa sudah sangat tinggi, tinggal ke depan dipertahankan saja dan kalau perlu kegiatan PIK ini bisa lebih diperbanyak utamanya terkait pencegahan dan pemberantasan Narkoba, HIV-AIDS dan pergaulan bebas.

Tabel 2. 166

Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PIK R/M	62	62
2	Jumlah kecamatan	8	8
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	775,00%	775,00%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk dan KB

Semua PKB/PLKB yang ada di daerah diberdayakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan KB yang berjumlah 32 orang.

Tabel 2. 167

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	38	36
2	Jumlah PKB/PLKB	38	36
	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100,00%	100,00%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang ber-KB mandiri

Walaupun ada penurunan anggota UPPKS yang ber KB Mandiri namun itu tidak terlalu berpengaruh dan untuk tahun-tahun mendatang perlu dijaga supaya anggota UPPKS yang ber KB tetap menggunakan alat kontrasepsi dan perlu di perhatikan yang jangka pendek dialihkan ke jangka Panjang.

Tabel 2. 168

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	817	800
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	980	958
	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB Mandiri	83,37%	83,51%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

|| Ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan

Semua desa dan kelurahan memiliki PPKBD, sehingga Program KKBPK dapat berjalan dengan baik yang merupakan langkah antisipasi karena mengingat jumlah PLKB yang sedikit sehingga dengan adanya PPKBD tugas PLKB akan lebih ringan, tinggal sarana dan prasarana PPKBD yang perlu dilengkapi.

Tabel 2. 169
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/kelurahan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa	70	70
2	Jumlah desa/kelurahan	70	70
	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/kelurahan	100,00%	100,00%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

|| Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Untuk alokon yang ada sudah cukup tersedia artinya alat dan obat sudah ada di siapkan berikut juga alat distribusinya ke Faskes KB yang diperlukan sekarang tinggal bagaimana menjaga keberlangsungan ketersediaan ini supaya tidak terjadi kekosongan alokon sementara ada akseptor yang akan dilayani.

Tabel 2. 170
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota	1683	6417
2	Perkiraan Permintaan Masyarakat	6561	3008
	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	25,65%	213,33%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan stnadarisasi pelayanan

Semua faskes dan jejaringnya sudah ada kerjasama dengan BPJS dalam hal pelayanan kesehatan dan kontrasepsi dan semuanya sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ditentukan

Tabel 2. 171
Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	32	32
2	Jumlah Faskes dan jejaring	32	32
	Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	100,00%	100,00%

Sumber : DPPKB Kab.Soppeng

|| Persentase remaja terkena infeksi menular seksual (IMS)

Pendataan mengenai remaja terkena infeksi menular seksual belum dilaksanakan oleh dinas terkait.

Tabel 2. 172

Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0
2	Jumlah remaja	69609	69793
	Persentase Remaja yang Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0,00%	0,00%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Poktan yang ada sudah cukup banyak yang melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga di kelompoknya masing-masing malah dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan sebesar 3,52%, tentu diharapkan tahun-tahun mendatang semua Poktan sudah melakukan pembinaan 8 fungsi keluarga

Tabel 2. 173

Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	325	342
2	Jumlah kelompok kegiatan	482	482
	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	67,43%	70,95%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan

Semua desa dan kelurahan sudah memiliki data mikro terkait program KKBPK dan tinggal bagaimana data ini bisa diadakan updating data secara berkala supaya data tersebut tidak ada yang kadaluarsa.

Tabel 2. 174

Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	70	70
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	70	70
	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	100,00%	100,00%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

|| Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan tumbuh kembang anak masih sangat rendah, padahal ini diharapkan semua keluarga yang punya anak dan balita sudah dapat melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak untuk itu kelompok BKB perlu diaktifkan dengan menggunakan KKA bagi semua anggota BKB.

Tabel 2. 175

Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	980	945
2	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	9692	9635
	Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	10,11%	9,81%

Sumber : DPPKB Kab. Soppeng

9. Perhubungan

Tabel 2. 176

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar perhubungan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	1920	1344
	Rasio ijin trayek	%	0,02	0,08
	Jumlah uji kir angkutan umum		92	89
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		-	-
	Persentase layanan angkutan darat	%	40	30
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0,07	0,2
	Pemasangan Rambu-rambu	%	84	70
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,03	0,02
	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	%	1.328.040	504.000
	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	%	1.328.040	504.000

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Soppeng

Berdasarkan Tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan Perhubungan yang diukur dari berbagai Indikator Kinerja sebagai berikut :

|| Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Pada tahun 2017 jumlah arus penumpang umum yang masuk/keluar daerah adalah 1.344 orang. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2016 yang lalu sebanyak 1.920 orang, penurunan arus penumpang yang masuk/keluar daerah yang menggunakan angkutan umum salah satunya disebabkan karena peningkatan kepemilikan kendaraan pribadi, sehingga mobilitas masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi.

|| Rasio Ijin Trayek

Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat Kab. Soppeng perlu adanya trayek angkutan umum yang dapat menjangkau akses ke berbagai tempat. Selama 2 tahun terakhir jumlah ijin trayek yang dikeluarkan oleh Pemda Kab. Soppeng mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sebanyak 200 ijin, turun dibanding kondisi tahun 2016 yang sebesar 527 . Berdasarkan dari nilai rasio setiap tahun selama dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 177
Rasio Ijin Trayek Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	2016	2017
1	Jumlah Izin Trayek	527	200
2	Jumlah penduduk	249.768	241.430
3	Rasio Ijin Trayek(%)	0,02	0,08

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Soppeng,

|| Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Jumlah Angkutan Umum yang menguji kir di Kab. Soppeng selama periode 2016 s/d 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah uji KIR sebanyak 92 dan di tahun 2017 turun menjadi 89 kendaraan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kab. Soppeng dalam menjamin kelayakan dan keamanan alat trasportasi yang digunakan untuk layanan umum.

Tabel 2. 178
Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	2016	2017
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	92	89

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Soppeng

|| Persentase Layanan Angkutan Darat.

Indikator layanan angkutan darat dapat dijadikan sebagai acuan perbaikan transportasi umum darat. Hal ini dapat terlihat dari kapasitas penumpang yang dapat ditampung oleh angkutan darat atau jumlah penumpang yang dapat diangkut dalam satuan waktu tertentu.

Tabel 2. 179
Persentase Layanan Angkutan Darat Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	2016	2017
1	Jumlah Angkutan Darat	527	200
2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	1.328.0	504.00
3	Persentase Layanan Angkutan Darat	40	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Soppeng

|| Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu lalu lintas yang merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan diantaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Angka ini dihitung dari jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia.

Tabel 2. 180
Pemasangan Rambu-rambu Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	2016	2017
1	Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu	84	70
2	Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia	100	100
3	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	84	70
4	Persentase Layanan Angkutan Darat	40	30

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Soppeng,

|| Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan

Panjang Jalan di Kab. Soppeng mengalami kenaikan dari tahun 20xx sampai dengan tahun 20xx. Bertambahnya panjang jalan akan meningkatkan daya tampung jalan terhadap pertambahan kendaraan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mencegah kemacetan.

Tabel 2. 181
Rasio Panjang Jalan Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	2016	2017
1	Panjang Jalan	1.035,97	898,88
2	Jumlah Kendaraan	36.210	39.736
3	Rasio Panjang Jalan Per Kendaraan	0,03	0,02

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Soppeng,

|| Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

Indikator menunjukkan berapa orang atau barang yang dapat terangkut angkutan umum, pada tahun 2016 jumlah orang/ barang yang terangkut dengan angkutan umum mencapai 1.328.040 dan pada tahun 2017 turun menjadi 504.000

|| Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun

Indikator menunjukkan berapa orang atau barang yang melalui terminal dalam satu tahun, pada tahun 2016 jumlah orang/ barang yang terangkut dengan angkutan umum mencapai 1.328.040 dan pada tahun 2017 turun menjadi 504.000.

10. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2. 182
Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%		575
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%		66
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%		80
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	NA	80
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%		60

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Soppeng

|| Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan.

KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Persentase antara jumlah KIM dan jumlah Kecamatan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 mencapai 600%. Dari 8 kecamatan telah tercakup 48 Kelompok Informasi Masyarakat.

abel 2. 183

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan. Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah KIM	48	48
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota	8	8
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	575	575%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika

|| Cakupan Layanan Telekomunikasi.

Cakupan layanan Komunikasi adalah luas wilayah di Kabupaten Soppeng yang telah terkover layanan telekomunikasi baik berupa HP/Telepon, TV, Radio, HT dan lain sejenisnya yang dapat menghubungkan orang dengan orang lain melalui penerapan teknologi.

Dari 1500 km2 luas wilayah kabupaten Soppeng, telah terkover 998,15 km2 yang terkover layanan telekomunikasi atau 66%. Hal tersebut disebabkan sebagian wilayah Kabupaten Soppeng adalah wilayah pegunungan dan area persawahan dan perkebunan.

Tabel 2. 184

Cakupan Layanan Komunikasi Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Luas Wilayah Yang Tercover		998.15
2	Luas Wilayah Keseluruhan		1500
	Cakupan Layanan Telekomunikasi		66%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

|| Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap HP/Telepon, jika rumah tangga atau anggota rumah tangga memiliki handphone, atau jika rumah tangga atau anggota rumah tangga memiliki telepon kabel. Handphone (HP) didefinisikan sebagai telepon portabel berlangganan ke layanan telepon umum seluler menggunakan teknologi seluler, yang menyediakan akses ke PSTN. Ini termasuk sistem seluler analog dan digital, serta IMT-2000 (3G). Sementara Jaringan telepon kabel didefinisikan sebagai saluran telepon yang menghubungkan peralatan terminal pelanggan (pesawat telepon) ke jaringan telepon umum (PSTN) dan memiliki port khusus pada telepon.

Pada tahun 2017, dari 226.305 Penduduk Kabupaten Soppeng telah tercover 181.044 atau sebesar 80% penduduk yang menggunakan HP/telepon. Besaran tersebut lebih besar dipengaruhi oleh penduduk yang telah berada di usia diatas 50 tahun lebih menganggap menggunakan HP/Telepon sudah bukan prioritas utama kebutuhan.

Tabel 2. 185

Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon		181044
2	Jumlah penduduk		226305

	Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/telepon		80

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

|| Proporsi rumah tangga dengan akses internet

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap Internet, jika rumah tangga atau anggota rumah tangga memiliki koneksi internet. Penggunaan internet yang dimaksud merupakan penggunaan melalui jaringan tetap maupun jaringan bergerak, dalam hal ini termasuk penggunaan internet dengan menggunakan peralatan yang memungkinkan akses internet selain komputer seperti telepon selular, PDA/smart phone.

Pada Tahun 2017, dari 58.055 rumah tangga di Kabupaten Soppeng terdata 46.444 rumah tangga yang telah menggunakan akses internet atau sebesar 80%. Besaran ini dipengaruhi oleh masih adanya rumah tangga yang belum terjangkau jaringan seluler pada beberapa wilayah pedesaan yang khususnya yang berada didaerah pegunungan.

Tabel 2. 186

Proporsi rumah tangga dengan akses internet Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet		46.444
2	Jumlah rumah tangga		58.055
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet		80

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

|| Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap komputer, jika rumah tangga atau anggota rumah tangga memiliki komputer. Yang dimaksud dengan komputer adalah personal computer (PC), laptop, dan tablet.

Pada Tahun 2017, dari 58.055 rumah tangga di Kabupaten Soppeng terdata 34.833 rumah tangga yang telah memiliki computer pribadi atau sebesar 60%. Besaran ini dipengaruhi oleh masih adanya rumah tangga yang belum mendapatkan jaringan listrik khususnya pada daerah pegunungan. Selain faktor tersebut, sebagian besar rumah tangga tidak memiliki komputer pribadi tidak menganggap komputer pribadi sebagai prioritas dan masih menganggap komputer dan sejenisnya sebagai barang mewah.

Tabel 2. 187

Proporsi rumah tangga yang memiliki Komputer Pribadi Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		34833
2	Jumlah rumah tangga		58055
	Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Komputer Pribadi		60

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2. 188

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase koperasi aktif	%	89,16	89,71

2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif		NA	NA
3	Persentase BPR/LKM aktif		NA	NA
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98,9	98,91

Sumber : Dinas PPK & UKM Kab.Soppeng

|| Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu sarana perekonomian yang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Pentingnya fungsi koperasi ditunjukkan melalui peranannya dalam mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Di Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 tercatat jumlah koperasi yang aktif adalah 181 atau 89,16 persen dari jumlah keseluruhan koperasi 203 koperasi, dan pada tahun 2017 jumlah koperasi yang aktif sebanyak 183 atau 89,71 persen jumlah koperasi secara keseluruhan yaitu 204 koperasi. Berikut data persentase koperasi aktif :

Tabel 2. 189
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Koperasi Aktif	181	183
2	Jumlah Seluruh Koperasi	203	204
	Persentase Koperasi Aktif	89,16	89,71

Sumber : Dinas PPK dan UKM

|| Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro dan kecil merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah.

Indikator ini menunjukkan jumlah usaha mikro dan kecil dari jumlah seluruh UKM yang ada di Kab. Soppeng, Berdasarkan data dari Dinas PPK dan UKM pada tahun 2016 jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kab. Soppeng sebanyak 6.371 usaha atau 98,90 persen dari total seluruh UKM sebanyak 6.442 UKM dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 6.471 usaha atau 98,91 persen dari total jumlah UKM sebanyak 6.542 usaha. Antara tahun 2016-2017 tercatat + 71 UKM baru.

Tabel 2. 190
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	6.371	6.471
2	Jumlah seluruh UKM	6.442	6.542
	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,90	98,91

Sumber : Dinas PPK dan UKM

12. Penanaman Modal

Tabel 2. 191
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		3	11
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta Rp)		2.108	22.086,5
3	Rasio daya serap tenaga kerja			
4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	-33,7	947,7

Sumber : Dinas PMPTSP

|| Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kab. Soppeng lebih banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor; perdagangan besar dan eceran dan sektor jasa; dan lain sebagainya. Pada tahun 2016 jumlah investor berskala nasional sebanyak 11 investor meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya sebanyak 3 investor.

Tabel 2. 192
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	3	11

Sumber : Dinas PMPTSP

|| Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Sejalan dengan peningkatan jumlah investor yang menginvestasikan modalnya di Kab. Soppeng, maka perkembangan nilai investasi perusahaan PMDN juga cenderung meningkat signifikan. Pada tahun 2016 nilai investasi perusahaan PMDN di Kab. Soppeng mencapai Rp 2.108.038.000,- kemudian meningkat menjadi Rp 22.086.500.000 di tahun 2017. Besarnya peningkatan nilai investasi tersebut diharapkan lebih menggerakkan roda perekonomian di Kab. Soppeng.

Tabel 2. 193
Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	2.108.038.000	22,086,500,000

Sumber : Dinas PMPTSP

|| Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Secara umum, nilai realisasi PMDN di Kab. Soppeng kurun waktu 2016-2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, walaupun kondisi 2015ke 2016 pertumbuhannya minus. Kenaikan nilai realisasi ini terjadi seiring dengan penambahan

jumlah investor PMDN. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu kenaikan/penurunan realisasi PMDN di tahun 2016 -33,77 persen dan kondisi yang berbeda terjadi di tahun 2017 dimana realisasi PMDN melonjak drastis dengan persentase kenaikan yang mencapai 947,73 persen.

Tabel 2. 194
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)
Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Realisasi PMDN Tahun Evaluasi -Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi	-1.074.962.000	19,978,462,000
2	Realisasi PMDN Sebelum Evaluasi Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rupiah)	-33,77	947,73

Sumber : Dinas PMPTSP

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 2. 195
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olahraga

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	50	50
2	Persentase wirausaha muda	%	NA	100
3	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100
4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	66,67	66,67
5	Cakupan pembinaan atlet muda	%	42,05	44,72
6	Jumlah atlet berprestasi	Orang	2	3
7	Jumlah prestasi olahraga		7	14

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan umum, layanan wajib non pelayanan dasar Kepemudaan dan olahraga, yang diukur dari berbagai indikator kinerja sebagai berikut :

|| Persentase organisasi pemuda yang aktif

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak organisasi pemuda yang aktif untuk mewadahi pemuda dalam menggali potensi diri dan peran aktif dalam upaya mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat, Organisasi pemuda adalah diharapkan menjadi satu solusi untuk menghindarkan pemuda dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna dengan memberdayakan pemuda yang bertujuan meningkatkan kedewasaan, harga diri, serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Berdasarkan data pada tahun 2016 dan 2017, jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kab. Soppeng sebanyak 15 organisasi atau 50 persen dari jumlah organisasi pemuda sebanyak 30 organisasi.

Tabel 2. 196

Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	15	15
2	Jumlah seluruh Organisasi Pemuda	30	30
3	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	50	50

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

|| Cakupan pembinaan olahraga

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui cakupan pembinaan olahraga yang dihitung dari jumlah cabang olahraga yang dibina dari jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar. Berdasarkan data pada tahun 2016 dan 2017, cakupan pembinaan olahraga mencapai 100 persen.

Tabel 2. 197

Cakupan Pembinaan Olahraga Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	19	22
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	19	22
3	Cakupan pembinaan olahraga	100	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

|| Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui cakupan pelatih yang bersertifikat yang dihitung dari jumlah pelatih yang bersertifikat dari jumlah seluruh pelatih. Berdasarkan data pada tahun 2016 dan 2017, cakupan pelatih bersertifikat adalah 66,67 persen.

Tabel 2. 198

Cakupan Pelatih yang Bersertifikat Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pelatih bersertifikat	16	18
2	Jumlah seluruh pelatih	24	27
3	Cakupan pembinaan olahraga	66,67	66,67

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

|| Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui cakupan pembinaan atlet muda yang dihitung dari jumlah atlet pelajar yang dibina dari jumlah seluruh atlet pelajar. Berdasarkan data pada tahun 2016 cakupan pembinaan atlet muda di Kab. Soppeng adalah 42,05 persen dihitung dari jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 127 orang dari 302 orang jumlah seluruh atlet dan pada tahun 2017 cakupan pembinaan atlet muda adalah 44,72 persen dihitung dari jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 182 atlet dari seluruh jumlah atlet pelajar sebanyak 407 atlet pelajar.

Tabel 2. 199
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Atlet Pelajar yang di Bina	127	182
2	Jumlah seluruh atlet Pelajar	302	404
3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	42,05	44,72

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

|| Jumlah Atlet Berprestasi

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah atlet yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun Internasional dalam satu tahun. Karena salah satu aset yang dimiliki daerah adalah atlet-atlet yang berprestasi, maka untuk kepentingan pembinaan dan sekaligus evaluasi pembinaan atlet pemerintah daerah berkewajiban untuk mendata seluruh atlet yang berprestasi yang dimiliki Kab. Soppeng dalam satu tahun. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016 jumlah atlet yang berprestasi di Kab. Soppeng adalah 2 orang dan menjadi pada tahun 2017 menjadi 3 orang.

|| Jumlah Prestasi Olahraga

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun. Berdasarkan data pada tahun 2016 jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun adalah sebanyak 7 orang dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 14 prestasi.

Tabel 2. 200
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Atlet Pelajar yang di Bina	127	182
2	Jumlah seluruh atlet Pelajar	302	404
3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	42,05	44,72

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga

14. Statistik

Tabel 2. 201
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Statistik

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Buku ”kabupaten dalam angka”	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
3	Buku ”PDRB”	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

|| Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi

Sistem data statistik yang terintegrasi adalah hasil pengolahan sumber data statistik yang terpusat dan terpadu dalam satu sistem yang sama sehingga dapat dengan

mudah diakses dan diuji tingkat keakuratannya. Sumber data statistik Kabupaten Soppeng bersumber dari sensus yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng serta data primer dan sekunder dari Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng.

Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Statistik dan Persandian sebagai pelaksana dalam mengintegrasikan data statistik hingga Tahun 2017 belum memiliki sistem terpadu dalam mengakomodir kebutuhan data dan statistik. Akan tetapi pada tahun 2018 Diskominfo berupaya memperbaiki diri dengan menerbitkan aplikasi e-data dalam menghimpun data dan statistik dari berbagai Perangkat Daerah Soppeng.

|| Buku "kabupaten dalam angka"

Buku Kabupaten Soppeng Dalam Angka merupakan publikasi tahunan yang menyediakan data statistik yang lengkap, menyeluruh dan terintegrasi mengenai karakteristik dan keadaan sosial ekonomi Kabupaten Soppeng. Data yang dimuat bersumber dari BPS Kabupaten Soppeng dan perangkat daerah/instansi terkait. Pada Tahun 2017, Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng telah merilis Buku Soppeng dalam Angka pada Bulan Agustus Tahun 2017.

|| Buku "PDRB"

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan buku yang memuat salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Buku PDRB pada dasarnya memuat jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng sebagai pelaksana tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan di Kabupaten Soppeng tidak menerbitkan Buku PDRB Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017. Akan tetapi pada Buku Soppeng Dalam Angka Tahun 2017 telah memuat BAB tersendiri yang memuat Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2017.

15. Persandian

Tabel 2. 202
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Persandian

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	NA	13

Sumber : Dinas Kominfo Kab.Soppeng

Untuk perlindungan dan jaminan keamanan informasi sudah menjadi kewajiban dan tuntutan di setiap instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, untuk menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. mengingat perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang semakin penting dalam peningkatan kualitas layanan terhadap pengamanan informasi, hal ini juga merupakan salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berdasarkan data pada tahun 2017 jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah adalah 5 (lima) perangkat daerah dari 38 perangkat daerah atau 13 persen.

16. Kebudayaan

Tabel 2. 203
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	11	9
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	97
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		NA	NA
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		2	2

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab.Soppeng

Dari tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan umum pada urusan kebudayaan yang diukur dari indikator sebagai berikut :

|| Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Merupakan wujud pelestarian dari budaya dan adat yang dimiliki. Penyelenggaraan festival seni dan budaya salahnya dalam bentuk kegiatan *Pattaungeng* pada tahun 2016 penyelenggaraan festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 11 kali, sedangkan pada tahun 2017 festival seni dan budaya dilaksanakan sebanyak 9 kali.

|| Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Menunjukkan jumlah Benda situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dari total benda situs dan kawasan yang dimiliki daerah. Pada tahun 2016 terdapat 29 jumlah Benda situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah dan kesemuanya dilestarikan. Dan pada tahun 2017 jumlah Benda situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dimiliki daerah menjadi 30 buah dan yang dilestarikan tetap 29 buah. Hal ini terkait dengan belum adanya keputusan dari pusat tentang penambahan jumlah situs yang terdaftar di Kabupaten Soppeng.

|| Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Paradigma pengelolaan Cagar Budaya dewasa ini, diarahkan pada pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap upaya pengelolaannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan Cagar Budaya yaitu kebermanfaatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa setiap upaya pengelolaan Cagar Budaya harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena merekalah pemilik syah Cagar Budaya. Dengan demikian, jika pengelolaan Cagar Budaya tidak memberikan manfaat pada masyarakat maka pengelolaan yang dilakukan dianggap tidak berhasil. Bagaimana membuat suatu bentuk pengelolaan Cagar Budaya yang bukan hanya

berdampak pada lestarinya Cagar Budaya tetapi juga memberikan manfaat berupa kesejahteraan bagi masyarakat. Pada tahun 2017 di Kab. Soppeng terdapat 2 (dua) cagar budaya yang dikelola secara terpadu yaitu Cagar Budaya Calio dan Villa Yuliana.

17. Perpustakaan

Tabel 2. 204
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	3,30	3,37
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	28,19	28,89
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,14	0,15
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	8.342	8.148
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buku	11967	12711
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Berdasarkan Tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan Perpustakaan yang diukur dari berbagai Indikator Kinerja sebagai berikut :

|| Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Indikator ini menunjukkan berapa banyak pengunjung perpustakaan yang datang di Pustakaan yang telah disediakan Pemerintah Daerah dalam setahun, mengingat bahwa Perpustakaan merupakan sumber ilmu dan sumber referensi dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun informal. Untuk itu eksistensi perpustakaan menjadi sangat penting di daerah. Berdasarkan data pada tahun 2016 jumlah kunjungan perpustakaan selama 1 tahun adalah 8.342 atau 3,30 persen dari jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebanyak 252.677 orang. Dan pada tahun 2017 adalah 8.148 orang atau 3,37 persen dari jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebanyak 241.430 orang.

Tabel 2. 205
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	8.342	8.148
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	252.677	241.430
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	3,30	3,37

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

|| Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Indikator menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam memberi akses yang cukup bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan bahan bacaan. Mengingat bahwa koleksi buku merupakan salah satu faktor yang menjadi alasan

orang untuk datang berkunjung ke perpustakaan, jika jumlah koleksi buku yang tersedia, cukup dan dalam jumlah yang banyak maka pengunjung akan dapat memilih berbagai alternatif mendapatkan informasi dan bahan pustaka yang diperlukan. Pada tahun 2016 jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Pustakaan daerah adalah 11,967 judul buku atau 28,19 persen dari total jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Pustakaan daerah sebanyak 42.452, dan pada tahun 2017 jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Pustakaan daerah meningkat menjadi 12.711 judul buku atau 28,89 persen dari total jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Pustakaan daerah sebanyak 44.001.

Tabel 2. 206

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	11.967	12.711
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	42.452	44.001
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	28,19	28,89

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

|| Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk yang ada di Kab. Soppeng. Pada tahun 2016 ratio perpustakaan per-1000 penduduk adalah 1,44 atau terdapat 1 perpustakaan per-1000 penduduk dan pada tahun 2017 ratio perpustakaan persatuan penduduk meningkat menjadi 1,51 atau setiap terdapat 1-2 perpustakaan per 1000 penduduk hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang dilayani berkurang dan juga terdapat penambahan jumlah perpustakaan sebanyak 1 buah.

Tabel 2. 207

Rasio perpustakaan persatuan penduduk Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah perpustakaan	364	365
2	Jumlah penduduk	252.677	241.430
	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	1,44	1,51

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

|| Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun

Indikator ini menunjukkan seberapa besar minat masyarakat untuk datang berkunjung ke perpustakaan-perpustakaan yang telah disediakan. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan adalah 8.342 pengunjung dan pada tahun 2017 menurun menjadi 8.148 pengunjung.

Tabel 2. 208

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	8.342	8.148

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

|| Jumlah koleksi judul buku perpustakaan

Indikator menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan, karena semakin banyak koleksi judul buku, maka akan semakin banyak alternatif pilihan bagi pengunjung yang datang ke perpustakaan, jika jumlah koleksi judul buku yang tersedia cukup dan dalam jumlah yang banyak maka pengunjung akan dapat memilih berbagai alternatif mendapatkan informasi dan bahan pustaka yang diperlukan. Pada tahun 2016 jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Pustakaan daerah adalah 11,967 judul buku dan pada tahun 2017 jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Pustakaan daerah meningkat menjadi 12.711 judul buku.

Tabel 2. 209

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	11.967	12.711

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

|| Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat

Untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan, selain ketersediaan buku, maka yang talah pentingnya dukungan Sumber Daya Manusia yang cukup dan berkualitas. Indikator ini menunjukkan berapa banyak jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat di Kab. Soppeng. Pada tahun 2016 jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat adalah 19 orang dan semuanya telah bersertifikat dan pada tahun 2017 jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat meningkat menjadi 33 orang dan seluruhnya juga sudah bersertifikat.

Tabel 2. 210

Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	19	33
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	19	33
	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

18. Kearsipan

Tabel 2. 211

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	10,81	24,32
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	0	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Tabel tersebut menunjukkan capaian kinerja pelayanan pada urusan Kearsipan yang diukur dari berbagai Indikator Kinerja sebagai berikut :

|| Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku

Pada dasarnya arsip yang ada di setiap Perangkat Daerah memiliki umur tertentu, sehingga ada arsip yang dalam periode waktu tertentu dapat dimusnahkan, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan berkas dan arsip di tiap-tiap Perangkat Daerah. Namun demikian kenyataan yang ada menunjukkan masih sebagian kecil perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2. 212
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	4	9
2	Jumlah Perangkat Daerah	37	37
3	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	10,81	24,32

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

|| Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Terkait dengan pengelolaan arsip, tidak terlepas dari SDM pengelola kearsipan. maka untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan arsip, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga telah menyelenggarakan kegiatan peningkatan SDM bagi pengelola kearsipan. Di tahun 2017 terdapat satu Kegiatan peningkatan kemampuan SDM kearsipan.

Tabel 2. 213
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

Kinerja layanan urusan pilihan, diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pilihan terdiri dari :

1. Pariwisata

Tabel 2. 214
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Pilihan Pariwisata

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Kunjungan wisata	%	1,13	1,11
2	Lama kunjungan Wisata	Hari	2	2
3	PAD sektor pariwisata	%	16,4	0,012

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Dari tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan pilihan pariwisata, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, untuk itu, Pemerintah Kab.

Soppeng melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus berupaya untuk mengoptimalkan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Soppeng, Kunjungan Wisata dihitung dari jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se-Kab. Soppeng dibagi dengan jumlah kunjungan wisata yang direncanakan, Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan di Kab. Soppeng adalah 218.387 orang atau 113 persen dari target sebanyak 192.776 orang. Sementara pada tahun 2017, jumlah kunjungan mencapai 224.018 atau 111 persen dari target sebanyak 201.300.

|| Lama Kunjungan Wisata

Lama Kunjungan Wisata, menunjukkan berapa hari rata-rata lama tinggal wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Soppeng, karena semakin lama waktu tinggal wisatawan diharapkan dapat lebih banyak kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Selama kurun waktu 2016-2017 rata-rata lama hari tinggal Wisatawan di Kab. Soppeng adalah 2 Hari.

|| PAD Sektor Pariwisata

Untuk memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi, Pada tahun 2016 PAD Sektor Pariwisata adalah Rp 1.494.001.000 atau 12 persen dari Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 91.123.526.502.,24 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 1.507.654.000,- atau 12 persen dari total PAD sebesar Rp 125.892.548.021,- Peningkatan kontribusi PAD Sektor Pariwisata dari Total PAD tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui pengembangan dan optimalisasi objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng.

2. Pertanian

Tabel 2. 215

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Pilihan Pertanian

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	*32,00%*	*31,27%*
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan	%	16,44	11,18
3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan	%	27,97	28,24
4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100,00	100,00
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	5,53	5,82
6	Cakupan bina kelompok petani	%	98,42	96,54

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Soppeng

Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja pelayanan urusan pilihan pertanian, dengan berbagai Indikator Kinerja yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kabupaten Soppeng, terutama ketersediaan lahan pertanian berupa lahan sawah maupun lahan kering yang cukup besar menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah utama dalam pengembangan sektor pertanian di Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga didukung oleh kemampuan Sumber

Daya Manusia (Petani) yang sudah terbiasa dalam melakukan proses budidaya pertanian atau bercocok tanam. Khusus untuk Komoditi Padi, Kedelai dan Kakao, Kabupaten Soppeng masuk dalam lokasi pengembangan kawasan prioritas Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional.

Kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB menjadi salah satu indikator yang menunjukkan besarnya peran Sektor Pertanian dalam struktur PDRB Kab. Soppeng. Pada Tahun 2016, kontribusi PDRB Sektor Pertanian terhadap total PDRB Kab. Soppeng mencapai 27,53%, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 27,74%. Kontribusi tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Tingginya kontribusi tersebut terutama didukung oleh Sub Sektor Tanaman Pangan dan Sub Sektor Perkebunan, sebagai sub sektor terbesar dalam sektor pertanian yang ada di Kab. Soppeng. Berikut gambaran kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Kab. Soppeng tahun 2016-2017 (PDRB atas dasar harga berlaku).

Tabel 2. 216

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
2	Jumlah PDRB (Juta Rupiah)	6.828.423,24	7.935.787,23
	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap Total PDRB (%)	***32,00%***	***31,27%***

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Soppeng

|| Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan

Salah satu sub sektor terbesar dalam sektor pertanian di Kabupaten Soppeng yaitu Sub Sektor Tanaman Pangan dengan komoditi utama berupa Padi dan Palawija. Khusus untuk Palawija di Kabupaten Soppeng yang utama adalah Jagung dan Kedelai, disamping itu juga pada beberapa wilayah dibudidayakan palawija jenis lainnya seperti Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar. Palawija sebagai bahan pangan kedua setelah padi (beras) juga sangat penting sebagai pelengkap kebutuhan konsumsi masyarakat, selain itu, palawija juga sebagai bahan pakan ternak utama. Gambaran kontribusi PDRB Pertanian khusus Palawija terhadap PDRB Sektor Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 217

sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian (palawija) (Juta Rupiah)	359.149,60	277.531,85
2	Jumlah PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap Total PDRB Sektor Pertanian/ Perkebunan (%)	***16,44%***	***11,18%***

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Soppeng

Berdasarkan tabel tersebut diatas, tergambar bahwa kontribusi Sektor Pertanian Khusus Palawija terhadap Total PDRB Sektor Pertanian pada tahun 2016 sebesar 16,44% dan mengalami penurunan menjadi 11,18% pada tahun 2017. Penurunan kontribusi tersebut disebabkan oleh menurunnya produksi palawija utama berupa Jagung dan Kedelai pada tahun 2017 akibat kurangnya pertanaman karena petani beralih ke komoditi utama yaitu padi. Sementara lahan untuk tanaman padi sebagian besar sama dengan lahan palawija terutama kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.

|| Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan

Selain sub sektor Tanaman Pangan, kontribusi terbesar kedua pada PDRB Sektor Pertanian yaitu dari Sub Sektor Perkebunan terutama komoditi tanaman keras (tahunan). Jenis tanaman keras utama yang ada di Kab. Soppeng diantaranya Kakao, Kelapa, Kemiri dan Jambu Mete. Berikut gambaran kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian Tahun 2016-2017 :

Tabel 2. 218
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB pertanian/perkebunan Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kontribusi perkebunan (Tanaman Keras) (Juta Rupiah)	611.046,10	700.881,50
2	Jumlah PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan (Juta Rupiah)	2.184.787,30	2.481.733,20
	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	***27,97%***	***28,24%***

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Soppeng

Dari tabel tersebut diatas, tergambar bahwa tahun 2016 kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB Sektor Pertanian sebesar 27,97% dan mengalami peningkatan menjadi 28,24% pada tahun 2017. Adanya peningkatan lebih pada faktor harga jual produk hasil perkebunan (tanaman keras) yang cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya, karena dari sisi produksi, sebagian besar tanaman keras mengalami penurunan dibanding tahun 2016. Tingginya nilai komoditi hasil perkebunan, khususnya tanaman keras disebabkan komoditi tersebut merupakan komoditi ekspor yang bernilai tinggi dibandingkan komoditi hasil pertanian lainnya.

|| Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB

Kegiatan usaha pertanian di Kabupaten Soppeng, khususnya budidaya Komoditi Pangan utama di Kabupaten Soppeng berupa Padi, keseluruhan proses produksinya dihasilkan oleh kelompok tani. Seluruh lahan persawahan yang ada di Kabupaten Soppeng dalam memproduksi padi dikelola oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani. Tidak ada usaha budidaya tanaman pangan khususnya Padi yang dikelola oleh perusahaan atau sejenisnya. Berikut tabel Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap Total Produksi Tahun 2016-2017.

Tabel 2. 219

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton)	280.905,00	309.816,0
2	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)	280.905,00	309.816,0
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap Total Produksi di Daerah	***100,00%***	***100,00%***

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Soppeng

|| Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Sektor pertanian dalam peran utamanya sebagai produsen bahan pangan, harus terus berupaya dalam peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Salah satu upaya dalam meningkatkan produksi hasil pertanian, yaitu dengan intensifikasi usaha tani sehingga produktivitas bisa meningkat. Sebagai gambaran, tingkat produktivitas Padi sebagai pangan utama di Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2017 pada tabel berikut :

Tabel 2. 220

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton)	280.905,00	309.816,00
2	Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	50.822,50	53.223,80
	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	***5,527***	***5,821***

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Soppeng

Berdasarkan data produktivitas tersebut diatas, ada peningkatan dari 5,527 Ton/Hektar pada tahun 2016 menjadi 5,821 Ton/Hektar pada tahun 2017. Tingkat produktivitas sangat dipengaruhi oleh teknologi budidaya yang dilakukan petani, mulai dari proses pengolahan lahan, penggunaan bahan tanam atau bibit unggul, pemupukan yang tepat dan pemeliharaan tanaman. Selain itu juga dipengaruhi oleh ketersediaan air, serangan hama atau OPT serta faktor cuaca. Meskipun ada peningkatan sebagaimana data tersebut diatas, akan tetapi capaian produktivitas tersebut belum optimal dibandingkan potensi produktivitas yang bisa dicapai pada tanaman padi.

|| Cakupan bina kelompok petani

Pelayanan Urusan Pertanian tidak terlepas dari pembinaan kelompok tani, wadah kelompok tani menjadi sasaran utama pembangunan pertanian. Cakupan bina kelompok tani menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan sektor pertanian. Pembinaan kelompok tani diwujudkan dalam bentuk fasilitasi bantuan, baik fisik berupa Sarana dan Prasarana maupun non fisik berupa pelatihan, kunjungan dan fasilitasi-fasilitasi yang dilakukan Instansi Dinas Pertanian Kab. Soppeng melalui penyuluh pertanian. Adapun capaian Cakupan Bina Kelompok Tani Tahun 2016-2017 Kab. Soppeng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 221
Cakupan bina kelompok petani Tahun 2016-2017

NO	URAIAN	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Kelompok Petani yang mendapatkan bantuan Pemda	1181	920
2	Jumlah Kelompok Tani	1200	953
	Cakupan Bina Kelompok Petani	98,42%	96,54%

Sumber : Dinas Pertanian Kab.Soppeng

Pada Tahun 2016 Jumlah Kelompok Tani yang bergerak pada Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan sebanyak 1.200 Kelompok, masing-masing sub sektor terpisah dalam registrasi kelompok tani. Dan yang terbina sebanyak 1.181 atau 98,42%. Sedangkan pada tahun 2017, adanya kebijakan untuk melakukan pendataan atau registrasi ulang tanpa memilah masing-masing sub sektor, jumlah kelompok berkurang menjadi 953 Kelompok, dan yang terbina sebanyak 920 atau 96,54%. Adanya penurunan capaian cakupan bina kelompok petani ini diakibatkan berkurangnya jumlah tenaga penyuluh, baik yang beralih status kepegawaian maupun purna bakti, sehingga penyuluh yang ada memiliki keterbatasan dalam melakukan pelatihan, kunjungan dan fasilitasi ke kelompok-kelompok petani yang ada di seluruh wilayah Kab. Soppeng.

3. Kehutanan

Tabel 2. 222
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Pilihan Kehutanan (bukan kewenangan kab)

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis		na	na
	Kerusakan Kawasan Hutan		na	na
	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Soppeng

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 2. 223
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Layanan Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Persentase rumah tangga pengguna listrik		45,96	49,94
	Rasio ketersediaan daya listrik		NA	NA
	Persentase Pertambangan Tanpa Ijin		NA	NA

Sumber Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Soppeng

5. Perdagangan

Tabel 2. 224
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perdagangan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Nilai omzet perdagangan	Rp	872,724,009,493	903,278,757,608
	Ekspor Bersih Perdagangan			
	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/usaha informal			

Sumber Dinas PPK & UKM Kab. Soppeng

Dari tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan pilihan perdagangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Nilai Omzet Perdagangan

Nilai Omzet perdagangan di Kabupaten Soppeng tahun 2017 mencapai Rp 903.278.757.608 meningkat dibanding nilai omzet perdagangan pada tahun 2016 yang mencapai Rp 872.724.009.493,- peningkatan tersebut menunjukkan jika peran pemerintah dalam upaya menggerakkan sektor perdagangan di Kabupaten Soppeng.

6. Perindustrian

Tabel 2. 225

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perindustrian

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Cakupan bina kelompok pengrajin		NA	NA
	Pertumbuhan Industri	%	0,33	0,33

Sumber: Dinas PPK & UKM Kab. Soppeng

Dari tabel di atas tergambar capaian kinerja pelayanan pada urusan pilihan Perindustrian, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri menunjukkan peningkatan capaian dari tahun sebelumnya (Jumlah Industri tahun n- Jumlah Industri tahun n-1) dibagi Jumlah Industri s.d tahun 2015 X 100 %. Pada tahun 2016-2017 pertumbuhan industri hanya 0,33, pertumbuhan tersebut belum memperlihatkan capaian yang maksimal hal ini disebabkan kurangnya jumlah industri skala kecil yang mampu berkembang menjadi industri pada skala lebih tinggi.

Tabel 2. 226

Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Industri tahun n	3.689	3.701
	Jumlah Industri tahun n-1	3.678	3.689
	Pertumbuhan Industri	0,33	0,33

Sumber : Dinas PPK dan UKM

7. Transmigrasi

Tabel 2. 227

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Transmigrasi

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Persentase transmigran swakarsa	%	25,26	17,88

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan pada urusan pilihan transmigrasi, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Persentase transmigran swakarsa

Transmigrasi Swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau

mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya. Pada tahun 2017 jumlah transmigrasi swakarsa di Kabupaten Soppeng adalah 239 transmigran atau 17,88 persen dari jumlah transmigran secara keseluruhan yaitu 1.337 transmigran, turun dibanding tahun 2016 yaitu 297 transmigran atau 25,26 persen dari 1.176 transmigran.

Tabel 2. 228

Persentase Transmigran Swakarsa Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah transmigran swakarsa	297	239
	Jumlah transmigran	1.176	1.337
	Persentase transmigran swakarsa	25,26	17,88

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

8. Perikanan

Tabel 2. 229

Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pilihan Perikanan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Produksi perikanan	%	173,66	179,37
2	Konsumsi ikan	%	106	106
3	Cakupan bina kelompok nelayan		0	0
4	Produksi perikanan kelompok nelayan		93,6	94,1
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		NA	NA
6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		0,14	0,14
7	Nilai tukar nelayan		104,23	104,28

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan Kab.Soppeng

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan pada urusan pilihan perikanan, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Produksi perikanan

Produksi perikanan di Kab. Soppeng berasal perikanan darat, baik yang bersumber dari danau maupun yang dibudidayakan. Produksi perikanan cukup beraneka ragam antara lain nila, lele, ikan mas, Ikan gabus dan berbagai ikan khas danau lainnya. Dalam kurun waktu 2016-2017 diketahui bahwa tingkat realisasi produksi yang ada menunjukkan kenaikan, walaupun dalam skala kecil. Pada tahun 2016, jumlah produksi ikan (ton) mencapai 4.688,89 ton atau 173,66 persen jauh tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 2.700 ton. Demikian halnya di tahun 2017 realisasi jumlah produksi ikan mencapai 5.381,21 ton atau 179,37 persen dari target 3.000 ton.

Tabel 2. 230

Produksi perikanan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton)	4.688,89	5.381,21
2	Target Daerah (Ton)	2.700,00	3.000,00
	Produksi Perikanan	173,66	179,37

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan Kab.Soppeng

|| Konsumsi ikan

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan

pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Diketahui bahwa Kab. Soppeng tidak memiliki wilayah perairan laut sehingga ikan yang ada adalah berasal dari Wilayah di Luar Kab. Soppeng dan juga merupakan hasil danau dan budidaya . Konsumsi ikan di Kab. Soppeng pada tahun 2016 adalah 7.578.270 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.605.340kg. Secara umum realisasi tingkat konsumsi ikan di Kab. Soppeng telah melebihi target . Pada tahun 2016 dan 2017 , tingkat realisasi konsumsi ikan adalah sebesar 106 persen.

Tabel 2. 231
Konsumsi ikan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	7.578.270	7.605.340
2	Target Daerah (Kg)	7.150.000	7.200.000
	Konsumsi Ikan (%)	106	106

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan Kab.Soppeng

|| Produksi perikanan kelompok nelayan

Tabel 2. 232
Produksi perikanan kelompok nelayan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	4.390,90	5.063,20
2	Jumlah produksi ikan di daerah	4.688,89	5.381,21
	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	93,6	94,1

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan Kab.Soppeng

Produksi perikanan di Kab. Soppeng salah satunya berasal dari Kelompok Nelayan, berdasarkan data Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan pada tahun 2106 jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan adalah 4.390,90 Ton atau 93,6 persen dari total jumlah produksi ikan daerah sebanyak 4.688,89 ton. Dan pada tahun 2017 jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan adalah 5.063,20 Ton atau 94,1 persen dari total jumlah produksi ikan daerah sebanyak 5.381,21 ton.

|| Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial

Kabupaten Soppeng memiliki total luas perairan teritorial yaitu 3.000 Ha, dan sebanyak 413 Ha diantaranya adalah Kawasan Lindung Perairan atau dengan ratio 0,14.

Tabel 2. 233
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Kawasan lindung perairan	413	413
2	Total luas perairan teritorial	3000	3000
	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total Luas Perairan Teritorial	0,14	0,14

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan Kab.Soppeng

|| Nilai tukar nelayan

Nilai Tukar Nelayan adalah rasio antara indeks harga yang diterima Nelayan dengan indeks harga yang dibayar Nelayan yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar nelayan merupakan salah satu indikator dalam menentukan kesejahteraan nelayan. Nilai tukar Nelayan di Kabupaten Soppeng tahun 2016-2017 pada tabel berikut :

Tabel 2. 234
Tukar Nelayan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Indeks yang diterima nelayan	107,7	95,9
2	Indeks yang dibayar nelayan	112,26	100
	Nilai Tukar Nelayan	95,94	95,90

Sumber : Dinas Perikanan & Ketahanan Pangan Kab.Soppeng

2.4.3. Penunjang Urusan

Kinerja layanan penunjang urusan, diukur dari Indikator-Indikator kinerja penyelenggaraan penunjang urusannya pemerintahan daerah. Penunjang Urusan terdiri dari :

1. Perencanaan Pembangunan

Tabel 2. 235
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	53,69	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	53,69	100
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			

Sumber : Bappelitbangda Kab.Soppeng

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan penunjang urusan perencanaan, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan pembangunan jangka panjang memuat penjabaran Visi dan Misi ke dalam tujuan jangka panjang, penjabaran sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan dan prioritas alokasi sumberdaya daerah. Karena RPJPD adalah salah

dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kab. Soppeng telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kab. Soppeng Nomor 9 Tahun 2010.

|| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan pembangunan jangka panjang memuat penjabaran Visi dan Misi ke dalam tujuan jangka panjang, penjabaran sasaran pembangunan daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan dan prioritas alokasi sumberdaya daerah. Karena RPJPD adalah merupakan dokumen perencanaan strategis, Pemerintah Kab. Soppeng telah menyusun Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kab. Soppeng Nomor 9 Tahun 2010.

Penyusunan Dokumen RPJPD tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan admistratif, maka dokumen ini diharapkan benar-benar menjadi rujukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dibawahnya sehingga Visi yang dirumuskan dalam RPJPD 2005-2025 adalah "Soppeng yang Maju, Adil dan Sejahtera Tahun 2025" dapat tercapai.

|| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dengan mengacu pada Dokumen RPJPD selanjutnya diturunkan ke dalam perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD. Setiap RPJMD ditetapkan oleh Peraturan daerah. RPJMD Kab. Soppeng periode tahun 2010-2015 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 3 Tahun 2011. Sedangkan RPJMD periode tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kab. Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021. Sehingga dalam kurun waktu 2010 hingga 2016 terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah.

|| Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Dokumen yang memuat tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka pendek (satu tahun) adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Disusun setiap tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng.

|| Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah adalah dokumen yang berisi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Soppeng ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Soppeng No.8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Soppeng Tahun 2012-2032.

2. Keuangan

Tabel 2. 236

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Keuangan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP
2	Persentase SILPA (Terhadap Pendapatan)		8,91	9,87
3	Persentase SILPA terhadap APBD (belanja)		9,03	10,09
4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana			
5	Program	%	100	100
6	Kegiatan	%	8,32	8,72
7	Persentase belanja pendidikan (20%)		32,7	30,32
8	Persentase belanja kesehatan (10%)		14,2	17,18
9	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung			
10	Belanja Langsung	%	50,07	50,04
11	Belanja Tidak Langsung	%	49,93	49,96
12	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		0,12	0,16
13	Penetapan APBD	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : BPKD Kab.Soppeng

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan penunjang urusan keuangan, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Opini BPK

Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kab. Soppeng telah mendapat perbaikan sejak tahun 2012 dan bahkan sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 telah mendapat predikat opini WTP

|| Persentase SILPA terhadap Pendapatan

SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Soppeng persentase SILPA dari Total APBD (Pendapatan) pada tahun 2016 adalah 8,91 persen dan pada tahun 2017 persentase SILPA dari Total APBD Pendapatan adalah 9,87 persen, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2. 237

Persentase SILPA terhadap Pendapatan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Total SILPA	110.190.519.757,82	111.780.078.528,82
2	Total APBD Pendapatan	1.236.893.800.959,00	1.131.991.996.848,00
	Persentase SILPA	8,91	9,87

Sumber : BPKD Kab.Soppeng

|| Persentase SILPA terhadap APBD (Belanja)

Persentase SILPA terhadap belanja menunjukkan persentase dana yang penggunaannya tertunda atau tidak terserap. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Soppeng persentase SILPA dari Total APBD Belanja pada tahun 2016 adalah 9,03 persen dan pada tahun 2017 persentase SILPA dari Total APBD Belanja adalah 10,09 persen, sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2. 238

Persentase SILPA terhadap APBD (Belanja) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Total SILPA	110.190.519.757,82	111.780.078.528,82
2	Total APBD Belanja	1.219.596.457.298,00	1.108.346.705.360,00
	Persentase SILPA Terhadap APBD	9,03	10,09

Sumber : BPKD Kab.Soppeng

|| Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana

Pada Tahun 2016 dan 2017 seluruh program yang telah ditetapkan dalam APBD Kab. Soppeng terlaksana 100 %, namun untuk kegiatan terdapat beberapa kegiatan yang telah ada APBD yang tidak terlaksana dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Pada tahun 2016 jumlah kegiatan yang tidak dilaksanakan sebanyak 48 kegiatan atau 8,32 persen dari 577 kegiatan. Untuk tahun 2017 jumlah kegiatan yang tidak terlaksana sebanyak 58 kegiatan atau 8,72 persen dari total kegiatan sebanyak 665 kegiatan.

Tabel 2. 239

Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Program dalam APBD yang tidak dilaksanakan	0	0
2	Total Program dalam APBD	0	0
3	Jumlah Kegiatan dalam APBD yang tidak dilaksanakan	48	58
4	Total Kegiatan dalam APBD	577	665
	Persentase Program yang Tidak Terlaksana	0	0
	Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana	8,32%	8,72%

Sumber : BPKD Kab.Soppeng

|| Persentase belanja pendidikan (20%)

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengatur bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal wajib dialokasikan sebesar 20% dari APBD. Dengan adanya Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat membangun sistem pendidikan yang lebih baik sehingga menjadi fondasi yang kuat untuk membangun SDM yang handal.

Pemerintah Kab. Soppeng telah mengalokasikan anggaran pendidikan melebihi dari amanat peraturan tersebut yaitu pada tahun 2016 telah dialokasikan sebesar 32,7% dan pada tahun 2017 sebesar 30,32%.

Tabel 2. 240

Persentase Belanja Pendidikan (20%) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	431.977.401.236,00	374.360.240.894,00
2	Total APBD	1.320.871.298.370,00	1.234.881.325.604,00
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	32,70%	30,32%

Sumber : BPKD Kab. Soppeng

|| Persentase belanja Kesehatan (10%)

Sesuai yang diatur dalam UU Kesehatan, pada dasarnya Pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan minimal 10% dari belanja APBD untuk anggaran kesehatan. Pemerintah Kab. Soppeng telah mengalokasikan belanja kesehatan melebihi dari amanat peraturan tersebut, yaitu pada tahun 2016 belanja kesehatan sudah sebesar 14,2% dan mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 17,18%.

Tabel 2. 241

Persentase Belanja Kesehatan (10%) Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	187.555.785.699,00	212.145.677.240,00
2	Total APBD	1.320.871.298.370,00	1.234.881.325.604,00
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	14,20%	17,18%

Sumber : BPKD Kab. Soppeng

|| Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,dan Belanja Modal. Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2016 dan 2017 pada tabel berikut :

Tabel 2. 242

Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Tahun 2016-2017

NO	Uraian		TAHUN	
			2016	2017
1	Jumlah Belanja Langsung		661.311.870.356,00	617.974.795.821,00
2	Jumlah Belanja Tidak Langsung		659.559.428.014,00	616.906.529.783,00
3	Total APBD		1.320.871.298.370,00	1.234.881.325.604,00
	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	BL	50,07%	50,04%
		BTL	49,93%	49,96%

Sumber : BPKD Kab. Soppeng

|| Bagi hasil kabupaten/kota dan desa

Alokasi belanja bagi hasil Kabupaten Soppeng pada tahun 2016 adalah Rp 1.603.220.900,- atau 0,12 persen dari Total APBD dan pada tahun 2017 Bagi Hasil Kabupaten ke Desa meningkat menjadi Rp 1.916.133.440,0 atau 0,16 persen dari Total APBD sebesar Rp. 1.234.881.325.604,-

Tabel 2. 243

Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kab/kota/desa	1.603.220.900,00	1.916.133.440,00
2	Total APBD	1.320.871.298.370,00	1.234.881.325.604,00
	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,12	0,16

Sumber : BPKD Kab. Soppeng

|| Penetapan APBD

Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah menyampaikan/mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD / Perubahan APBD untuk mendapat persetujuan DPRD. Pada Pemerintah Kab. Soppeng, penetapan Peraturan Daerah tentang APBD / Perubahan APBD telah dilaksanakan tepat waktu.

Tabel 2. 244

Penetapan APBD Kab. Soppeng Tahun 2016-2017

No	Indikator	2016	2017
1	Waktu Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber : BPKD Kab. Soppeng

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2. 245

Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	5,14	7,54
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	7,21	4,92
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	**61,97%**	**61,73%**
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		30	35
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		142	146
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		3334	3277

Sumber : BKPSDM Kab. Soppeng

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan penunjang urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan latihan merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai negeri sipil untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat

mengikuti perkembangan, perubahan sistem dan teknologi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Selain itu pendidikan dan latihan mempunyai berbagai manfaat karier jangka panjang yang membantu pegawai untuk bertanggung jawab lebih besar di waktu yang akan datang. Pemerintah Kab. Soppeng setiap tahun menyiapkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi PNS Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng Berdasarkan data dari BPKSDM rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam tahun adalah 7,54 JP meningkat dibanding tahun 2016 yaitu 5,14 JP. Pendidikan dan pelatihan tersebut termasuk Diklat yang diikuti PNS di luar dari Diklat yang dilaksanakan BKPSDM Kab. Soppeng.

Tabel 2. 246
Rata-rata lama sekolah pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	5,14 JP	7,54 JP

Sumber : BKPSDM Kab. Soppeng

|| Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bagi PNS sangat penting untuk peningkatan kapasitas dan kualitas SDM aparatur, Salah satu bentuk Diklat tersebut adalah diklat formal atau Diklat fungsional dimana Diklat tersebut merupakan Diklat Wajib oleh para calon dan pejabat fungsional tentu.

Tabel 2. 247
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	400	261
2	Jumlah total ASN	5548	5300
	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	7,21	4,92

Sumber : BPKSDM Kab. Soppeng

Pada tahun 2016 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 400 ASN atau 7,21 persen dari total ASN sebanyak 5.548. Dan pada tahun 2017 jumlah ASN yang mengikuti Diklat Formal adalah 261 ASN atau 4, 92 persen dari Total ASN sebanyak 5.300 ASN.

|| Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural

Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur, yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Diklat Kepemimpinan ini dilaksanakan guna mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dari aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat Kepemimpinan ini terdiri dari empat jenjang:

- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi Jabatan Struktural Eselon IV.

- Diklat Kepemimpinan Tingkat III bagi Jabatan Struktural Eselon III.
- Diklat Kepemimpinan Tingkat II bagi Jabatan Struktural Eselon II.

Berdasarkan data, sampai akhir tahun 2017 Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural adalah 479 atau 61,73 persen dari total jabatan sebanyak 776 pejabat., lebih rinci pada tabel berikut :

Tabel 2. 248
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	479	479
2	Jumlah total jabatan	773	776
	Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (%)	**61,97%**	**61,73%**

Sumber : BPKSDM Kab. Soppeng

|| Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Pada tahun 2016 jumlah jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng adalah 30 dan pada tahun 2017 menjadi 35 jabatan.

Tabel 2. 249
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	30	35

Sumber : BPKSDM Kab. Soppeng

|| Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah

Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Administrasi.

Tabel 2. 250
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	142	146

Sumber : BPKSDM Kab. Soppeng

Pada tahun 2016 jumlah jabatan Administrasi Lingkup Pemerintah Kab. Soppeng adalah 142 dan pada tahun 2017 menjadi 146 jabatan.

|| Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dalam UU ASN merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. **Pada tahun 2016 jumlah Pemangku** Jabatan Fungsional Tertentu **di Kab. Soppeng adalah 3334 dan pada tahun 2017 menjadi 3277 pemangku jabatan.**

Tabel 2. 251
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	3334	3277

Sumber : BPKSDM Kab. Soppeng

4. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2. 252
Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100
3	PENERAPAN SIDa :			
4	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0	0
5	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0	0

Sumber : Bappelitbangda Kab. Soppeng

5. Pengawasan

Tabel 2. 253
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pengawasan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Persentase tindak lanjut temuan	%	87,68	27,49
2	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,63	0,19
3	Jumlah temuan BPK		18	8

Sumber : Inspektorat Kab. Soppeng

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan penunjang urusan pengawasan, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Persentase Tindak Lanjut Temuan

Salah satu kunci keberhasilan kegiatan pengawasan adalah adanya tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Hal tersebut memastikan bahwa permasalahan yang ditemukan oleh pemeriksa telah dapat diselesaikan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Tabel 2. 254
Persentase Tindak Lanjut Temuan Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah temuan yang di tindaklanjuti	306	102
2	Jumlah Total Temuan	349	371
	Persentase Tindaklanjut Temuan	87,68	27,49

Sumber : Inspektorat Kab. Soppeng

|| Persentase Pelanggaran Pegawai.

Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pegawai dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai telah bekerja sesuai dengan kewajibannya dan tidak melakukan tindakan larangan. Pegawai yang tidak mematuhi aturan mengenai pemenuhan kewajiban atau melakukan tindakan larangan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Persentase pelanggaran pegawai pada tahun 2016 adalah sebanyak 0,63 % dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 0,19%

Tabel 2. 255
Persentase Pelanggaran Pegawai Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah ASN yang dikenai Sanksi	35	10
	Jumlah Total ASN	5548	5300
	Persentase Pelanggaran Pegawai	0,63	0,19

Sumber : Inspektorat Kab. Soppeng

|| Jumlah Temuan BPK

Salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan pemerintahan secara umum dan khususnya pengelolaan keuangan adalah berkurangnya jumlah temuan BPK baik berupa temuan administrasi maupun temuan finansial. Jumlah temuan BPK pada tahun 2016 adalah sebanyak 18, dan pada tahun 2017 berkurang sehingga menjadi hanya 8 temuan. Hal tersebut merupakan salah satu gambaran upaya Pemerintah Kab Soppeng untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. 256
Jumlah Temuan BPK Tahun 2016-2017

NO	Uraian	TAHUN	
		2016	2017
1	Jumlah Temuan BPK	18	8

Sumber : Inspektorat Kab. Soppeng

6. Sekretariat Dewan

Tabel 2. 257
Indikator Kinerja Aspek Pelayanan Umum Penunjang Urusan Pengawasan

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tdk Ada	Ada	Ada

Sumber : Setwan Kab. Soppeng

Tabel di atas menggambarkan capaian kinerja pelayanan penunjang urusan Sekretariat Dewan, yang dijelaskan sebagai berikut :

|| Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten.

Rencana Kerja DPRD disusun dan dirumuskan agar selaras dengan kebijakan dan sasaran program pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu sebagai lembaga yang ikut membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dalam merumuskan rencana kerja, DPRD wajib menjadikan dokumen tersebut sebagai acuan pokok. Hal ini sangat penting karena dokumen ini merupakan dasar dalam hal pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan . selain itu, penyusunan dan perumusan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) di daerah.

Pada Rencana Kerja DPRD Tahun 2017 secara terpadu telah mencakup semua kebutuhan setiap alat-alat kelengkapan DPRD antara lain Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

|| Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan Daerah (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD).

Sebagai satu kesatuan dari Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Soppeng berupaya untuk memuat dan mengintegrasikan Program-Program Kerja DPRD Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan fungsi DPRD (Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran) pada dokumen perencanaan.

Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Tahun 2017 telah mengintegrasikan program kerja DPRD baik dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan Daerah (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) berupa Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat kegiatan-kegiatan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan DPRD.

|| Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan dan unsur administratif terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang teknis operasionalnya berada dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD sedangkan teknis administrasi berada dalam pembinaan Sekretaris Daerah. Fungsi Sekretariat DPRD adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan serta pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut pada Tahun 2017 sekretariat DPRD

telah mengintegrasikan program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Renstra 2016-2021, Rencana Kerja 2017 hingga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017.

2.5. Standar Pelayanan Minimal

2.5.1. Bidang Urusan Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Pendidikan terdiri dari 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yaitu : (1). Pendidikan dasar; (2). Pendidikan Kesetaraan; (3). Pendidikan Anak Usia Dini, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

|| Pendidikan Dasar

Tabel 2. 258
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, Pendidikan Dasar

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	76,94%	80,58%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Soppeng

Jenis Pelayanan Dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk Pendidikan Dasar diukur melalui Indikator Jumlah penduduk Usia 7-15 Tahun di Kab. Soppeng yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs) pada tahun 2016 adalah 76,94 % dan pada tahun 2017 mencapai 80,58 %. Tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar tersebut masih jauh dibawah Standar Nasional yang ditargetkan sebesar 100%. Berdasarkan data tersebut, maka Pemerintah Daerah masih perlu merumuskan strategi untuk meningkatkan partisipasi penduduk Usia 7-15 Tahun pada jenjang pendidikan dasar sehingga dapat memenuhi target sebesar 100%.

|| Pendidikan Kesetaraan

Tabel 2. 259
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, Pendidikan Kesetaraan

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	51,19%	61,09%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Soppeng

Jenis Pelayanan Dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk Pendidikan Kesetaraan diukur melalui Indikator Jumlah Warga Negara Usia 7-18 yang **belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.** pada tahun 2016 jumlahnya mencapai adalah 51,19 % dan pada tahun 2017 mencapai 61,00 %. Jumlah penduduk pada Usia 7-18 yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan tersebut masih dibawah Standar Nasional yang ditargetkan sebesar 100%.

|| Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 2. 260
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	50,28%	51,99%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Soppeng

Jenis Pelayanan Dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk Pendidikan Anak Usia Dini diukur melalui Indikator Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Pada tahun 2016 Jumlah Anak pada usia 5-6 tahun di Kab. Soppeng yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD adalah 50,28 % dan pada tahun 2017 adalah 51,99 %. Jumlah tersebut masih jauh dibawah Standar Nasional yang ditargetkan sebesar 100%.

2.5.2. Bidang Urusan Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Kesehatan terdiri dari 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar yaitu : (1). Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; (2). Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; (3). Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; (4). Pelayanan Kesehatan Balita; (5). Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar; (6). Pelayanan Kesehatan pada usia produktif; (7). Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut; (8). Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi; (9). Pelayanan Kesehatan penderita diabetes militus; (10). Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; (11). Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; (12). Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), dapat digambarkan sebagai berikut :

|| Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Tabel 2. 261
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	82,62%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2016 jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 2.926 orang atau 82,62% dari total jumlah Ibu hamil sebanyak 3.496 orang, dan pada 2017 jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan adalah sebanyak 2.849 orang atau 100%.

|| Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Tabel 2. 262
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	88,48%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Tahun 2016 jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 3.858 orang atau 88,48% dari total jumlah Ibu bersalin sebanyak 3.230 orang, dan pada 2017 jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan adalah sebanyak 2.721 orang atau 100% ibu bersalin mendapatkan layanan kesehatan.

|| Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel 2. 263
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	92,62%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 2.849 bayi atau 92,62 % dari total jumlah bayi baru lahir sebanyak 3.076 orang, dan pada 2017 Jumlah Bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan yaitu 2.721 bayi atau 100%.

|| Pelayanan Kesehatan Balita

Tabel 2. 264
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Balita yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	52,86%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 11.716 Balita atau 52,86 % dari total jumlah balita 22.164 balita, dan pada 2017 Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan yaitu 11.132 balita atau 100% balita terlayani .

|| Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Tabel 2. 265
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	99,52%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 7.211 Anak atau 99,52 % dari total jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar sebanyak 7.246 Anak, dan pada 2017 Jumlah Anak Usia Sekolah yang mendapat layanan kesehatan mencapai 100% yaitu sebanyak 6.880 Anak Usia Sekolah.

|| Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Tabel 2. 266
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	18,71%	25,30%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 25.688 orang atau hanya 18,71% dari total jumlah penduduk usia produktif sebanyak 137.260 penduduk, dan pada 2017 Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 25,30% atau 34.721 penduduk dari total jumlah penduduk usia produktif sebanyak 137.254 orang.

|| Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Tabel 2. 267
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	24,75%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 4.686 penduduk usia lanjut atau hanya 24,75% dari total jumlah penduduk usia lanjut sebanyak 18.937 penduduk, dan pada 2017 Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 100,00% atau 14.229 penduduk usia lanjut yang ada.

|| Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tabel 2. 268
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	37,35%	94,40%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 4.920 penderita atau hanya 37,35% dari total jumlah penderita hipertensi sebanyak 13.173 penderita, dan pada 2017 Jumlah penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 13.401 penderita atau 94,40% dari 14.196 penderita hipertensi.

|| Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Tabel 2. 269
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017

1	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,00%	61,55%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 1.009 penderita atau 100% penderita mendapatkan layanan kesehatan, dan pada 2017 Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 4.736 penderita atau 61,55% dari jumlah penderita diabetes miletus sebanyak 7.694 penderita hipertensi.

|| Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Tabel 2. 270
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat yang terlayani kesehatan	100%	35,39%	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penderita dengan Gangguan Jiwa Berat yang terlayani kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 252 penderita atau 35,39% , dan pada 2017 Jumlah penderita gangguan jiwa berat yang mendapat layanan kesehatan sebanyak 144 penderita atau 100% penderita mendapatkan layanan kesehatan.

|| Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Tabel 2. 271
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk Kab.Soppeng terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 232 penderita dan seluruhnya mendapat layanan kesehatan kondisi yang sama juga pada tahun 2017 sebanyak 215 terduga tuberkulosis seluruhnya mendapat layanan kesehatan.

|| Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk di Kab. Soppeng dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2016 adalah sebanyak 8 penderita dan seluruhnya mendapat layanan kesehatan kondisi yang sama juga pada tahun 2017 sebanyak 18 penderita seluruhnya mendapat layanan kesehatan.

Tabel 2. 272

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100,00%	100,00%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

2.5.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum terdiri dari 2(dua) jenis pelayanan dasar yaitu : (1). Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari; dan (2). Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dapat digambarkan sebagai berikut :

|| Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Tabel 2. 273

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	95,84%	96,45%

Sumber : Dinas PU-PR Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk di Kab. Soppeng yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari pada tahun 2016 baru mencapai 69,93 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 90,05. Hal ini berarti pula masih terdapat 9,95% penduduk Kab.Soppeng yang belum memperoleh akses pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

|| Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Tabel 2. 274

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	83,29%	90,84%

Sumber : Dinas PU-PR Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk di Kab. Soppeng yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2016 baru mencapai 83,29 persen dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 90,84 persen. Hal ini berarti pula masih terdapat 9,16% penduduk Kab.Soppeng yang belum memperoleh akses layanan pengolahan air limbah domestik.

2.5.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat terdiri dari 2(dua) jenis pelayanan dasar yaitu : (1). Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota; (2). Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kab/Kota, dapat digambarkan sebagai berikut :

|| Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota

Tabel 2. 275
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	NA	26%

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni pada tahun 2017 adalah 5 korban dari 19 korban bencana atau hanya 26 persen.

|| Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah/Kabupaten Kota

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sepanjang Tahun 2016 dan 2017 tidak ada penduduk di Kab. Soppeng yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, hal ini disebabkan karena dalam kurun waktu 2016-2017 tidak ada program pemerintah daerah yang mengakibatkan penduduk harus direlokasi.

Tabel 2. 276
Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah/Kabupate/Kota

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	0	0

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman Kab. Soppeng

2.5.5. Bidang Urusan Trantibunlinmas

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Trantibunlinmas terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu : (1). Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;(2). Pelayanan Informasi Rawan Bencana; (3). Pelayanan pencegahan da kesiapsiagaan terhadap bencana; (4). Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan (5). Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dapat digambarkan sebagai berikut :

|| Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2. 277
Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibunlinmas Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	-	-

Sumber : Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 Jumlah warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, hal ini disebabkan karena tidak ada penegakan hukum Perda dan Perkada yang berimplikasi terhadap adanya layanan yang harus dilakukan pemerintah daerah sebagai akibat dari Penegakan Perda atau perkada.

|| Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Tabel 2. 278
Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibunlinmas Pelayanan Informasi Rawan Bencana

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Bencana	100%	0,079	0,83%

Sumber : BPBD Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana baru mencapai 0,079 persen dan pada tahun 2017 tidak jauh berbeda yaitu 0,83%. Hal ini berarti penduduk di Kab. Soppeng belum mendapatkan akses yang memadai untuk mendapatkan informasi rawan bencana.

|| Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Tabel 2. 279
Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibunlinmas Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	0,079	0,83%

Sumber : BPBD Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana baru mencapai 0,079 persen dan demikian halnya pada tahun 2017 yaitu hanya 0,83%. Hal ini berarti penduduk di Kab. Soppeng belum mendapatkan akses yang memadai untuk mendapatkan informasi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

|| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 2. 280

Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibunlinmas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	100%	93,85%	93,08%

Sumber : BPBD Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah korban bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana pada tahun 2016 yaitu 93,85 persen dan pada tahun 2017 yaitu hanya 93,08%. Hal ini berarti korban bencana belum seluruhnya mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana, kondisi ini terjadi lebih banyak dipengaruhi faktor perilaku dan pola pikir dari warga yang menjadi korban bencana.

|| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 2. 281

Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibun linmas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	100%	93,85%	93,08%

Sumber : BPBD Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah korban bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana pada tahun 2016 yaitu 93,85 persen dan pada tahun 2017 yaitu hanya 93,08%. Hal ini berarti korban bencana belum seluruhnya mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi pada saat terjadi bencana, kondisi ini terjadi lebih banyak dipengaruhi faktor perilaku dan pola pikir dari warga yang menjadi korban bencana.

|| Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 2. 282

Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibunlinmas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

Sumber : BPBD Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah korban kebakaran yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi yaitu 100 persen kondisi yang sama juga pada tahun 2017. Hal ini didukung dengan tersedianya Pos Pemadam Kebakaran disetiap kecamatan, sehingga jika terjadi kebakaran petugas dapat mengakses lokasi dengan waktu yang singkat.

2.5.6. Bidang Urusan Sosial

Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu : (1). Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti ;(2). Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti; (3). Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; (4). Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan (5). Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota, dapat digambarkan sebagai berikut :

|| Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti

Tabel 2. 283
Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibunlinmas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	16,60%	17,31%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah penyandang disabilitas telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yaitu 224 orang atau hanya 16,60 persen dari jumlah penyandang disabilitas diluar panti sebanyak 1.349 orang dan pada tahun 2017 menjadi 17,31 persen atau 216 penyandang disabilitas dari 1.248 penyandang disabilitas telantar diluar panti.

|| Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar diluar panti

Tabel 2. 284
Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibunlinmas Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar diluar panti

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	-	100%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yaitu 100%.

|| Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti adalah 80 lansia atau 8,24 persen dari lansia terlantar sebanyak 971 lansia. Kondisi yang sama juga pada tahun 2017.

Tabel 2. 285
Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibunlinmas Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar diluar panti

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	8,24%	8,24%

Sumber : BPBD Kab. Soppeng

|| Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti

Tabel 2. 286

Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibunlinmas Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

|| Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/Kota

Pada tahun 2016 jumlah penduduk korban bencana adalah 20 orang dan seluruhnya memperoleh perlindungan dan jaminan sosial atau 100%. Demikian halnya pada tahun 2017 jumlah penduduk korban bencana sebanyak 205 orang dan seluruhnya memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Tabel 2. 287

Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibunlinmas Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota

NO	Indikator	Target Nasional	Capaian SPM	
			2016	2017
1	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Soppeng

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2017 berdasarkan urusan menunjukkan bahwa dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan menunjukkan capaian kinerja rata-rata cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah, dan
2. Identifikasi permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap Expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perbedaan dimaksud dilihat dari kesenjangan pencapaian daerah, maupun dengan pencapaian provinsi dan nasional.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan atau "*gap Expectation*" antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan tema dan sasaran pembangunan, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

2.2.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Kesenjangan yang terjadi antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat ini, adalah merupakan permasalahan pembangunan daerah yang senantiasa dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan analisis kondisi umum daerah dan capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Soppeng selama ini, telah diidentifikasi sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius dari segenap *stakeholder* pembangunan daerah. Identifikasi permasalahan tersebut diuraikan berdasarkan kategorisasi agenda pembangunan daerah dan atau beberapa unsur yang dianggap memiliki pengaruh yang saling berhubungan. Permasalahan pembangunan daerah dimaksud adalah :

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2018, prediksi capaian kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan pendanaan pembangunan untuk mencapai prioritas program sangat terbatas.
2. Terlambatnya Juklak dan Juknis kegiatan yang didanai dari Dana Tugas Perbantuan, Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus sehingga realisasi kegiatan yang didanai dari sumber-sumber dana tersebut sangat rendah.

   Dari hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2015-2016, prediksi capaian.
3. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi SKPD karena kekurangan SDM dan sarana prasarana.

4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang menyulitkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
5. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan pada Camat sehingga peran Camat belum oftimal dalam pembangunan.

2.2.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Aspek Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Soppeng berhubungan dengan masalah pokok antara lain: Dilihat dari indikator indeks pembangunan manusia (IPM), capaian Kabupaten Soppeng relative tertinggal di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2017, Kabupaten Soppeng menempati posisi kelompok bawah dengan nilai IPM sebesar 66,67 sementara nilai IPM Sulawesi Selatan sudah mencapai 70,34. Untuk indikator angka rata-rata lama sekolah, pada tahun 2017 Kabupaten Soppeng mencapai 7,42 sementara capaian rata-rata Sulawesi Selatan sudah 7,95, ini berarti bahwa Kabupaten Soppeng tertinggal dari rata-rata Sulawesi Selatan.

Untuk indikator angka harapan lama sekolah, capaian Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar 12,33 sementara rata-rata Sulawesi Selatan sudah mencapai 13,28. Pada aspek kesehatan, angka harapan hidup tahun 2017 sebesar 68,72, berada dibawah dari rata-rata Sulawesi Selatan sebesar 69,84. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapat balita gizi buruk pada tahun 2017 yang sebesar 0,015% dan prevalensi balita gizi kurang yang sebesar 0.11%.

Pada indikator aspek ekonomi, yakni pengeluaran perkapita/tahun, capaian Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 sebesar Rp. 9.035.000, berada lebih rendah dari rata-rata Sulawesi Selatan Rp.10.489.000. Dikaitkan dengan daya saing sumberdaya manusia, dua indikator utama yang menjadi tantangan jangka panjang adalah derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng cukup tinggi, yang pada tahun 2017 mencapai 8,34% tetapi PDRB perkapita yang sebesar Rp.39.508.000,- angka ini masih dibawah masih dibawah provinsi Sulawesi Selatan.

Meskipun angka pengangguran rendah dan cenderung turun, namun Pemerintah Kabupaten Soppeng harus mengatasi permasalahan yaitu perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja juga menjadi perhatian, mengingat di era global dituntut tenaga kerja yang berdaya saing untuk dapat eksis.

Permasalahan penurunan angka kemiskinan yang muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan, maka akan semakin sulit melakukan penurunan, karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Angka kemiskinan pada tahun 2017 angka kemiskinan mencapai 18.706 jiwa. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala. Selain itu, Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal

pemerataan kesempatan bekerja ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk.

B. Aspek Daya Saing Daerah

Kondisi aman, tertib dan tenteram adalah prasyarat bagi berlangsungnya pembangunan pada berbagai bidang. Salah satu variabel dalam mengukur aspek daya saing daerah adalah angka kriminalitas yang tertangani. Dimana pada tahun 2017 angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Soppeng adalah 11,93. Di Kabupaten Soppeng kejadian tindak kriminalitas mencakup berbagai jenis dan tersebar pada berbagai wilayah. Selain itu, gangguan ketertiban dan ketenteraman cenderung meningkat dalam periode terakhir dimana tingkat penyelesaian gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) pada tahun 2017 mencapai 84%. Kapasitas dalam menangani gangguan K3 relatif terbatas disebabkan oleh rasio jumlah Satpol PP/satuan penduduk masih rendah, % Linmas/satuan penduduk juga rendah, rasio poskamling/jumlah desa belum optimal, dan cakupan patroli petugas Satpol PP belum efektif menjangkau lokasi strategis pada delapan kecamatan. Secara jangka panjang perwujudan kondisi keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat menjadi tantangan di tengah berkembang pesatnya berbagai jenis teknologi.

Untuk nilai NTP, pada tahun 2016 nilai NTP tanaman pangan sebesar 100, 97 nilai ini masih lebih rendah dibanding dengan target yang sebesar 101,76. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya PDRB/ Kapita petani yang sebesar Rp.9.288.570,- pada tahun 2016 hal ini tidak sesuai dengan target yang dicanangkan dimana pada tahun 2016 PDRB/Kapita petani ditargetkan sebesar Rp.9.775.000,-.

C. Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

APK PAUD masih rendah dimana pada tahun 2017 masih sebesar 51,99% sementara target yang dicanangkan dalam SPM bahwa Anak Usia 5 – 6 Tahun harus mengenyam pendidikan Usia dini dengan target 100%. Hal ini diakibatkan karena akses layanan pendidikan PAUD masih sangat kurang, masih kurangnya sekolah PAUD di Kab. Soppeng, kualitas manajemen PAUD masih rendah serta masih kurangnya kesadaran orang tua untuk memasukkan anaknya pada layanan PAUD.

APM SD/sederajat pada tahun 2017 direalisasikan sebesar 86.97% dari target 85,00% dengan capaian 102.32%. Angka realisasi menunjukkan bahwa sudah 86,97% penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah tepat waktu walaupun demikian hal ini belum mencapai target yang dicanangkan dalam SPM yang sebesar 100%. Permasalahan yang menyebabkan hal ini karena kurangnya kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anaknya untuk itu dibutuhkan intervensi yang serius dari pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah dicanangkan dalam SPM.

APM SMP/sederajat pada tahun 2017 telah direalisasikan sebesar 74,18% dari target sebesar 64% dengan capaian 115,91%. Angka realisasi menunjukkan bahwa 74,18% penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah tepat waktu. walaupun demikian hal ini belum mencapai target yang dicanangkan dalam SPM yang sebesar 100%. Permasalahan yang menyebabkan hal ini karena kurangnya kesadaran orang tua dalam menyekolahkan anaknya untuk itu dibutuhkan intervensi yang serius dari pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah dicanangkan dalam SPM. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan tingkat SMP dan masih banyaknya anak usia SMP yang lebih memilih bekerja dibanding masuk ke jenjang pendidikan SMP.

APS SD sederajat pada tahun 2017 direalisasikan sebesar 86.97% dari target sebesar 82,50%. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemerataan akses yang didukung dengan program wajib belajar sembilan tahun serta kesadaran masyarakat untuk memasukkan anaknya pada jenjang pendidikan tidak tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Rasio ketersediaan sekolah SMP/sederajat terhadap penduduk usia 13-15 Tahun pada Tahun 2017 sebesar 52,38% dari target 50,14% dengan capaian 104,47%. Berdasarkan data realisasi tersebut, maka jumlah sekolah SMP sederajat yang dapat menampung semua penduduk usia pendidikan baru sebesar 52,38%. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana prasarana SMP/ sederajat di Kab. Soppeng.

Rasio guru sekolah SD/sederajat terhadap siswa usia 7-12 Tahun pada Tahun 2017 sebesar 1:07 dari target minimal 1:20 dengan capaian 35%. Faktor penyebab tidak tercapainya target disebabkan berkurangnya jumlah siswa SD dari tahun sebelumnya dan pengangkatan guru utamanya guru honorer di tahun sebelumnya tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah siswa SD. Hal ini juga mengasumsikan bahwa Kabupaten Soppeng kelebihan guru SD/sederajat. Meskipun demikian yang menjadi masalah adalah pemerataan penempatan guru atau belum optimalnya manajemen pengelolaan pendidikan.

Guru SD/sederajat yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada Tahun 2017 terealisasi sebesar 89.87%, sedangkan Guru SMP/sederajat yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada Tahun 2017 terealisasi sebesar 95,96%, jika digabung guru SD dan guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV telah terealisasi sebesar 91,31%. Hal ini menyebabkan Guru dan tenaga kependidikan masih kurang kompeten.

Masih terdapat kasus Kematian Ibu sebanyak 2 kasus pada tahun 2017. Realisasi diperoleh dari data kasus kematian ibu tahun 2017. Hal disebabkan karena meskipun aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar ataupun rujukan sudah cukup baik dan di imbangi dengan tersedianya sumber daya kesehatan yang kompeten tetapi masih belum adanya kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan kehamilan ke petugas.

Kematian Neonatus yang mencapai 27 kasus, dengan. Realisasi diperoleh dari data kasus kematian bayi yang berumur 0 sampai 28 hari tahun 2017. Pencapaian telah

memenuhi target, hal ini disebabkan karena pelayanan kesehatan ibu hamil yang belum maksimal.

Angka Kematian Bayi yang mencapai 10 kasus, dengan kasus kematian bayi 0-59 Bulan pada tahun 2017. hal ini karena belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar ataupun rujukan dan belum tersedianya sumber daya kesehatan yang kompeten.

Pada tahun 2017 prevalensi gizi buruk mencapai 0,015%,. Hal ini diakibatkan karena kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini pada petugas kesehatan atau sarana kesehatan yang tersedia sehingga anak dapat terlahir dengan sehat dan atau mencegah terjadinya kelahiran dengan BBLR sebagaimana diketahui menjadi faktor utama terjadinya Gizi Buruk.

Pada tahun 2017 terdapat 527 orang balita stunting dari total 13.132 balita (4,01%). Hal ini diakibatkan karena masih terdapat Pemenuhan akan Gizi pada Bumil dan pada anak Balita sampai umur 2 (dua) tahun dapat yang belum terpenuhi.

Realisasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi pada tahun 2017 yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun (13.401kasus) dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama (14.196 orang).

Infrastruktur wilayah dalam hal transportasi dan perhubungan sebagai sarana konektivitas wilayah masih merupakan tantangan secara jangka panjang, baik dalam interkoneksi antar kecamatan maupun interkoneksi antara desa-desa pusat pertumbuhan dengan pusat pemasaran dan distribusi barang. Pada tahun 2017, proporsi panjang jalan kualitas baik baru mencapai 0,33% sementara dari segi perhubungan jumlah pengguna terminal sebesar 14.295 orang dan persentase desa yang terjangkau angkutan umum sebesar 95%.

Dari segi infrastruktur pengairan persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik baru mencapai 74,53 pada tahun 2017, ini berarti masih terdapat jaringan irigasi yang kabupaten dalam kondisi yang tidak baik, hal ini berdampak pada produksi pertanian tanaman pangan.

Dari segi infrastruktur perumahan, persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 90,84% yang mana target SPM untuk Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik harus mencakup 100%. Sementara itu proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan sebesar 90,03% pada tahun 2017. Sedangkan pada target SPM, untuk Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari harus mencakup semua penduduk atau sebesar 100%.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 71,23% pada tahun 2017. Hal ini diakibatkan karena masih adanya wilayah strategis yang tidak dicover oleh patroli pol PP.

sedangkan tingkat waktu tanggap / response time daerah wilayah manajemen kebakaran sebesar 71,43%.

2. Urusa Wajib Non Pelayanan Dasar

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah masih cukup rendah yaitu sebesar 11,61% pada tahun 2017. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya pekerja perempuan yang bekerja di lembaga swasta yang sebesar 88,39%.

Hasil pengukuran indeks kualitas air pada tahun 2017 sebesar 1,63 hal ini berarti bahwa kualitas air di Kabupaten Soppeng mengalami cemar ringan. Selain itu timbunan sampah yang ditangani baru mencapai 53% pada tahun 2017 artinya masih banyak timbunan sampah yang tidak ditangani dengan baik. Hal ini diakibatkan karena persentase cakupan area pelayanan sampah baru mencapai 18,53% yang diakibatkan karena kurangnya sarana dan prasarana persampahan.

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk baru mencapai 0,97 yang berarti bahwa masih ada penduduk yang tidak memiliki KTP. Rasio bayi berakte kelahiran masih sebesar 0,96 sehingga tidak semua bayi di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 memiliki akta kelahiran. Pada tahun 2017, belum semua pasangan berakte nikah dengan rasio sebesar 0,37 hal ini diakibatkan karena masih banyaknya pasangan yang tidak memiliki akta nikah. Pada tahun 2017 bayi yang baru lahir yang mendapatkan akta kelahiran sebesar 94,35.

Persentase koperasi aktif pada tahun 2017 sebesar 89,71 hal ini diakibatkan karena adanya beberapa koperasi yang sudah tidak melaksanakan rapat tahunan. Selain itu persentase usaha mikro kecil masih rendah yaitu sebesar 98,91.

Masih rendahnya jumlah investor berskala nasional yang sebesar 11 pada tahun 2017. Hal ini berdampak pada jumlah nilai investasi yang hanya sebesar 22.086 juta rupiah.

Masih kurangnya organisasi pemuda yang aktif dimana pada tahun 2017 sebesar 50%. Selain itu pada tahun 2017 pengembangan olahraga juga masih belum optimal dimana cakupan pelatih bersertifikat hanya sebesar 66,67%. Yang berdampak pada jumlah atlet yang berprestasi hanya 3 atlet dan prestasi olahraga sebanyak 14.

Belum optimalnya pengelolaan kebudayaan, dimana pada tahun 2017 benda, situs dan cagar budaya yang dilestarikan hanya sebesar 97%. Selain itu kurangnya festival seni dan budaya yang hanya sebanyak 9 kali, dan cagar budaya yang dikelola secara terpadu hanya berjumlah 2.

Masih rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan, dimana pada tahun 2017 jumlah pengunjung perpustakaan sebesar 5,14 %. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya koleksi buku di perpustakaan yang hanya sebesar 28,89% dan rasio perpustakaan persatuan penduduk yang hanya sebesar 0,23%.

3. Urusan Pilihan

Masih rendahnya kunjungan wisata, dimana pada tahun 2017 kunjungan wisata sebesar 1,1%. Hal ini diakibatkan karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Ini mengakibatkan lama kunjungan wisata hanya 2 hari. Dengan keadaan tersebut berdampak pada kurangnya PAD sektor pariwisata yang hanya sebesar 0,012%.

Pada tahun 2017 produktivitas Padi dan Jagung belum mencapai target, masingmasing hanya mencapai 58,21 Kw/Ha dari target 59,28 Kw/Ha atau 98,20% untuk Padi dan 45,09 Kw/Ha dari target 49,90 Kw/Ha atau 90,36% untuk Jagung. Dan dibandingkan dengan tahun 2016, capaian produktivitas padi mengalami peningkatan pada tahun 2017 dari 55,27 Kw/Ha menjadi 58,21 Kw/Ha, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan guna menjaga tingkat produksi dan produktivitas padi, mulai dari upaya penyediaan saprodi tepat waktu, pemberantasan hama secara massal yang intens dilakukan pada tahun 2017 sebagai perlindungan tanaman dari OPT, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti alat mesin pertanian maupun sumber air alternatif. Selain itu faktor cuaca dan iklim tahun 2017 sangat mendukung budidaya padi, meskipun awal tahun meskipun awal tahun mengalami banjir pada beberapa titik.

Produktivitas Cabe Merah hanya mencapai 24,47 Kw/Ha dari target 45,00 Kw/Ha atau 54,38% dari target dan Cabe Rawit mencapai 45,07 Kw/Ha dari target 55,00 Kw/Ha atau 81,95% dari target, keduanya masih dibawah target, sedangkan untuk Bawang Merah melampaui target yang ditentukan dimana mencapai 69,06 Kw/Ha dari target 55,00 Kw/Ha atau 125,56%. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian 2016, Bawang Merah mengalami penurunan dari 75,93 Kw/Ha menjadi 69,06, Cabe Merah meningkat sedikit dari 21,16 Kw/Ha menjadi 24,46 Kw/Ha, dan untuk cabe rawit meningkat signifikan dari 18,87 Kw/Ha menjadi 45,07 Kw/Ha.

Tahun 2017 khusus produktivitas Kakao tidak mencapai target, capaian hanya 732,37 Kg/Ha dari target 1.120 Kg/Ha atau hanya mencapai 65,39%. Dibandingkan capaian tahun 2016 juga mengalami penurunan. Sedangkan untuk komoditas tembakau sudah melewati target, yaitu 545,31 Kg/Ha dari target 375 Kg/Ha atau 145,42%. Hanya saja mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2016. Penurunan tingkat produktivitas kakao yang cukup drastic dibandingkan tahun 2016 dari 899,07 Kg/Ha menjadi 732,37 Kg/Ha, kendala utama terkait semakin meluasnya kerusakan pertanaman kakao yang tidak bisa diimbangi dengan rehabilitasi maupun peremajaan, selain itu alih fungsi lahan kakao produktif untuk berbagai keperluan lainnya. Angka produktivitas yang diperoleh dari Jumlah Total Produksi dibagi Luas Tanaman Menghasilkan, dimana kondisi tanaman menghasilkan saat ini sebagian besar tidak optimal karena kerusakan akibat serangan berbagai jenis hama serta minim perawatan. Sedangkan untuk komoditi tembakau, dilihat dari capaian berdasarkan target sudah jauh melampaui, hanya saja dibandingkan dengan capaian 2016 mengalami sedikit penurunan dari 550 Kg/Ha menjadi 545,31 Kg/Ha. Hal utama yang menjadi penyebab terkait

kondisi cuaca dan iklim yang sangat berpengaruh pada saat pertanaman tembakau dilakukan petani, pada tahun 2017 intensitas hujan pada saat pertanaman lebih tinggi dibanding pada 2016, sementara tanaman tembakau tidak terlalu optimal berproduksi pada kondisi basah, meskipun pemeliharaan dan perawatan intensif dilakukan.

Tahun 2017 produksi benang sutera belum mencapai target, capaian hanya 774,26 Kg dari target 916,50 Kg atau hanya mencapai 84,48%. Dibandingkan tahun 2016 juga mengalami penurunan, tahun 2016 mencapai 828,06 Kg, hal tersebut terkait dengan kurangnya pakan murbei, selain itu informasi mengenai bantuan bibit unggul dari China yang akan diberikan menyebabkan beberapa petani menunda budidaya dengan bibit lokal, sehingga terjadi penurunan produksi.

Tahun 2017 khusus produksi daging dan telur, keduanya sudah melewati target tahunan, dimana untuk produksi daging yaitu 950.712 Kg dari target 950.000 Kg atau mencapai 100,07%, sedangkan untuk telur mencapai produksi 5.262.530 Kg dari target 5.115.000 Kg atau 102,88%. Capaian tersebut diatas perlu untuk terus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi. Mengingat produksi hasil peternakan sangat tergantung pada jumlah populasi ternak, sehingga penambahan jumlah populasi serta menjaga kondisi kesehatan ternak yang ada untuk menjaga jumlah populasi tersebut.

4. Urusan Penunjang Urusan

Belum optimalnya Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Pegawai dilakukan untuk memastikan bahwa pegawai telah bekerja sesuai dengan kewajibannya dan tidak melakukan tindakan larangan. Pegawai yang tidak mematuhi aturan mengenai pemenuhan kewajiban atau melakukan tindakan larangan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Persentase pelanggaran pegawai pada tahun 2016 adalah sebanyak 0,63 % dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu 0,19 .%

Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan pegawai dimana rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2017 sebanyak 1,72 JP. Selain itu persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 4,92%. Hal ini berdampak pada kemampuan SDM aparat masih sangat terbatas.

D. Standar Pelayanan Minimal

Pemenuhan pelayanan khususnya standar pelayanan minimal masih belum optimal, mengingat masih kurangnya capaian dalam pemenuhan layanan minimal terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah Kab. Soppeng.

Untuk urusan Pendidikan, jenis pelayanan dasar untuk Pendidikan dasar, Pendidikan kesetaraan dan Pendidikan anak usia dini belum mencapai target yang diharuskan yaitu Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar belum mencapai 100%, Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan belum

mencapai 100%, dan Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Hal ini diakibatkan oleh masih rendahnya orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya. Selain itu masih adanya anak usia sekolah yang lebih memilih untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Permasalahan lain yang menyebabkan tidak tercapainya pelayanan SPM ini adalah karena kurangnya satuan Pendidikan PAUD, hal ini dapat dilihat bahwa untuk status sekolah PAUD negeri di Kabupaten Soppeng masih sangat kurang yaitu berjumlah 15 unit sekolah.

Untuk urusan Kesehatan, jenis pelayanan dasar untuk Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar , Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) belum semuanya mencapai target yang diharuskan yaitu Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan, Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan, Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan, dan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan secara keseluruhan belum mencapai 100%. Hal ini diakibatkan karena belum adanya data yang lengkap mengenai jumlah warga negara yang berhak menerima layanan tersebut, belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; belum adanya penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan belum semua pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan.

Untuk urusan pekerjaan Umum, jenis pelayanan dasar untuk Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik belum mencapai target yang diharuskan yaitu Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari belum mencapai 100% dan Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik belum mencapai 100%. Terkait pelayanan air minum, dari data terlihat bahwa cakupan persentase penduduk berakses air minum pada Tahun 2017 semakin meningkat yakni 90,46%, dibanding tahun 2016 yang mencapai 85,84%, namun dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan air minum tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan pengelolaan pelayanannya. Saat ini masih sering

dijumpai banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan air minum yang belum lancar distribusi maupun keluhan terhadap kualitas air yang dihasilkan.

Untuk urusan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar untuk Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota belum mencapai target yang diharuskan yaitu Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni belum mencapai 100% dan Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni belum mencapai 100%. Hal ini diakibatkan karena belum adanya data yang lengkap mengenai jumlah warga negara yang berhak menerima layanan tersebut, belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; belum adanya penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan belum semua pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan.

Untuk urusan Trantiblinmas, jenis pelayanan dasar untuk Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum, Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, belum mencapai target yang diharuskan yaitu Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran secara keseluruhan belum mencapai 100%. Hal ini diakibatkan karena belum adanya data yang lengkap mengenai jumlah warga negara yang berhak menerima layanan tersebut, belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; belum adanya penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan belum semua pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan.

Untuk urusan Sosial, jenis pelayanan dasar untuk Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti dengan indikator Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti belum mencapai 100%, Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti dengan indikator Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti belum mencapai 100%, Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti belum mencapai 100%, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan indikator Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti belum mencapai 100% dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota dengan indikator Jumlah Warga

Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social belum mencapai 100%. Hal ini diakibatkan karena belum adanya data yang lengkap mengenai jumlah warga negara yang berhak menerima layanan tersebut, belum adanya penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; belum adanya penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan belum semua pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan.

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja :	1	Tingkat partisipasi dan dukungan dari masyarakat untuk pelaksanaan beberapa program yang membutuhkan partisipasi masyakarat cukup baik.
	2	Ketersediaan dana, sarana dan prasarana yang ada serta SDM yang mendukung untuk beberapa jenis program/kegiatan pada beberapa SKPD
	3	Telah tersedianya segulasi yang jelas terkait pelaksanaan anggaran APBD
	4	Penetapan APBD tahun 2018 dilaksanakan tepat waktu, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
	5	Tersediaanya System LPSE terkait pengadaan barang dan jasa, yang mempercepat proses pengadaan barang dan jasa
Faktor penghambat pencapaian kinerja :	1	Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa memakan waktu yang cukup lama terutama yang ditender
	2	Penyebaran SDM yang tidak merata pada setiap SKPD, masih ada beberapa SKPD yang memiliki kualitas SDM aparatur dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang belum memadai.
	3	Indikator kinerja outcome dan output pada program dan kegiatan masih banyak bermakna ganda, tidak dapat terukur.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :	1	Tim melakukan monitoring langsung terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan dan berkoordinasi langsung dengan SKPD yang bersangkutan
	2	Terkait dengan pelaporan: Melakukan asistensi terhadap laporan SKPD
	3	SKPD melakukan penjadwalan ulang terhadap kegiatan yang mencapai target.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya :	1	Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
	2	Meningkatkan pengawasan internal melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan SKPD
	3	Membangun komitmen terhadap konsistensi antar dokumen perencanaan
	4	Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait sinkronisasi perencanaan pembangunan

TABEL 2.288
EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2018

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.04.4.04.03.01	**PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN**														**Bag. Adm. Pembangunan**	
4.04.4.04.03.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya	Mengikuti rapat-rapat, kordinasi dan konsultasi	Bulan	-		12	3	3	3	3	12	100,00	12	0,00	Bag. Adm. Pembangunan	
4.04.4.04.03.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	-		12	3	3	3	3	12	100,00	12	0,00	Bag. Adm. Pembangunan	
4.04.4.04.03.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**															
4.04.4.04.03.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya RENSTRA dan RENJA Sekretariat Daerah	dok	6		1				1	1	100,00	1	16,67	Bag. Adm. Pembangunan	
4.04.4.04.03.04	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA**															
4.04.4.04.03.04.05	Pelaksanaan Koordinasi Perhubungan darat dan Data Pameran pemerintah daerah	tersedianya laporan hasil kegiatan	dok	6		1				1	1	100,00	1	16,67	Bag. Adm. Pembangunan	
4.04.4.04.03.06	**PROGRAM PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**															
4.04.4.04.03.06.01	Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan se-Kabupaten Soppeng	tersedianya laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan	dok	6		1					-	0,00	-	0,00	Bag. Adm. Pembangunan	
4.04.4.04.03.06.02	Pembinaan Jasa Konstruksi/Kabupaten	Tercapainya pembinaan jasa konstruksi tingkat kabupaten	dok	5		1				1	1	100,00	1	20,00	Bag. Adm. Pembangunan	
4.04.4.04.03.07	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA**															
4.04.4.04.03.07.01	Penyelenggaraan Unit Layanan Barang/ Jasa (ULP)	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	Paket	670		110		50	20	40	110	100,00	110	16,42	Bag. Adm. Pembangunan	
4.04.4.04.03.07.03	Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa	Tersedianya data evaluasi pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang	dok	6		1					-	0,00	-	0,00	Bag. Adm. Pembangunan	
4.04.4.04.03.01	**Program Pelayanan Perkantoran**														**Bagian Ortala**	
4.04.4.04.03.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kali	-	-	-	-	-	-		-	0,00	-	0,00	Bagian Ortala	-
4.04.4.04.03.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	bulan	-	-	12	3	3	3	3	12	100,00	12	0,00	Bagian Ortala	-
4.04.4.04.03.01.12	Penyediaan Jasa Perkantoran	Tersedianya Jasa Perkantoran	Orang	146	-	152	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Bagian Ortala	-
4.04.4.04.03.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**															
4.04.4.04.03.03.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya peningkatan pemahaman dan pengembangan profesionalisme	Orang	108	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.03.17	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kedisplinan Pegawai	Orang	908	-	-					-	0,00	-	0,00	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.03.18	Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Dokumen Kepegawaian	Dokumen	908	-	-	4	3	2		9	0,00	9	0,99	Bag. Ortala	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.04.4.04.03.03	**Program Penguatan Kelembagaan Daerah**															
4.04.4.04.03.03.02	Evaluasi Jabatan	Terwujudnya Penataan Pegawai Negeri Sipil	Dokumen	185	-	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1	100,00	1	0,54	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.03.03	Penyusunan Kompetensi/Analisis Jabatan	Terwujudnya kompetensi Jabatan	Dokumen	5	-	1	-				-	0,00	-	0,00	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.03.04	Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi	Terwujudnya Tugas Fungsi SKPD/Unit	Perbup	10	-	1	-			1	1	100,00	1	10,00	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.03.05	Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan	Terwujudnya Pedoman Tata naskah dan/atau Pokoian Dinas	Dokumen	4	-	1	-				-	0,00	-	0,00	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.03.06	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Terwujudnya Dokumen Revisi Analisis Jabatan	Dokumen	4	-	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1	100,00	1	25,00	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.03.07	Penyusunan Road Map Program Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Dokumen	6	-	1	-			1	1	100,00	1	16,67	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.04	**Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemda**															
4.04.4.04.03.04.01	Pendampingan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Mengoptimalkan Kinerja SKPD	Kali	144	-	24	4	4	4	4	16	66,67	16	11,11	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.12	**Program Pengembangan Kapasitas Kinerja Pelayanan Publik**															
4.04.4.04.03.12.02	Peningkatan Kualitas' Kinerja Pelayanan Publik	Meningkatnya Kinerja pda SKPD Pelayanan Publik	SKPD	37	-	12	-		5	3	8	66,67	8	21,62	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.12.02	Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	Adanya Unit Kerja Pelayanan Publik di Perceptohan	SKPD	10	-	12	-			3	3	25,00	3	30,00	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.12.05	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik	Tersedianya Data Kepuasan Masayarakat Terhadap Kinerja Pelayanan Publik	Dokumen	6	-	1	-				-	0,00	-	0,00	Bag. Ortala	
4.04.4.04.03.01	**PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN**	**Presentase Tingkat Kepuasan ASN Terhadap Pelayanan Perkantoran**													**Bag. Humas & Protokol**	
4.04.4.04.03.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundangan	Media	315	-	34		20	10	20	50	147,06	50	15,87	Bag. Humas & Protokol	
4.04.4.04.03.01.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Serta Kedinasan Lainnya	Mengikuti rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Kali	-	-						-	0,00	-	0,00	Bag. Humas & Protokol	
4.04.4.04.03.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun	-	-	12	3	3	3	3	12	100,00	12	0,00	Bag. Humas & Protokol	
4.04.4.04.03.01.17	Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta	Jumlah Petugas Mess Pemda Yang Terbayarkan	Kegiatan	-	-	12	3	3	3	3	12	100,00	12	0,00	Bag. Humas & Protokol	
4.04.4.04.03.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Presentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik**														
4.04.4.04.03.02.01	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio dan Komunikasi	Jumlah Peralatan yang Dipelihara	Paket	48	-	1		1	-		1	100,00	1	2,08	Bag. Humas & Protokol	
4.04.4.04.03.09	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROTOKOLERAN**	**Terlaksananya Aktivitas Keprotokoleran Daerah**														
4.04.4.04.03.09.02	Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran	Pelaksanaan Kegiatan Keprotokoleran Pemerintah Daerah	kali	345	-	12		3	3	3	9	75,00	9	2,61	Bag. Humas & Protokol	
4.04.4.04.03.01	**Program Pelayanan Perkantoran**														**Bag. Adm. Perekonomian & SDA**	
4.04.4.04.03.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah serta kedinasan lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Bulan	-		12		3	3	6	12	100,00	12	0,00	Bag. Adm. Perekonomian & SDA	
4.04.4.04.03.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	-		12	3	3	3	3	12	100,00	12	0,00	Bag. Adm. Perekonomian & SDA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.04.4.04.03.04	**Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemda**															
4.04.4.04.03.04.02	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Meningkatnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Ketentuan di bidang	Kali	6		1			1		1	100,00	1	16,67	Bag. Adm. Perekonomian & SDA	
4.04.4.04.03.04.03	Koordinasi Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Ilegal	Data Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Monitoring kebijakan DBHCHT	Bulan	24		12	3	3	3	3	12	100,00	12	50,00	Bag. Adm. Perekonomian & SDA	
4.04.4.04.03.04.13	Pembinaan Agen/Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi	Terciptanya distribusi LPG tepat sasaran	Bulan	6		12				3	3	25,00	3	50,00	Bag. Adm. Perekonomian & SDA	
4.04.4.04.03.04.14	Koordinasi Optimalisasi Capaian Target Produksi Pertanian	Terciptanya percepatan peningkatan produksi tanaman pangan dan holtikultura	Bulan	6		12				3	3	25,00	3	50,00	Bag. Adm. Perekonomian & SDA	
4.04.4.04.03.04.15	Koordinasi Teknis Penertiban Ternak Berkeliaran	Terciptanya ketentraman dan ketertiban lingkungan masyarakat	Bulan	6		12				3	3	25,00	3	50,00	Bag. Adm. Perekonomian & SDA	
4.04.4.04.03.04.17	Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan RPH dan Lalu Lintas Ternak	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang produksi peternakan yang ASUH	Bulan	5		12	3	3		3	9	75,00	9	180,00	Bag. Adm. Perekonomian & SDA	
4.04.4.04.03.04.25	Pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi	Terlaksananya koordinasi/kerjasama pemantauan dibidang inflasi daerah	Bulan	12		12				3	3	25,00	3	25,00	Bag. Adm. Perekonomian & SDA	
4.04.4.04.03.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**														**BAGIAN UMUM**	
4.04.4.04.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12		12	3	3	3	3	12	100,00	12	100,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perizinan kendaraan dinas	bulan	425		12	3	3	-	6	12	100,00	12	2,82	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01.05	Penyediaan Layanan kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kantor	bulan	72		12	3	3	3	3	12	100,00	12	16,67	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan dan peralatan listrik lainnya	bulan	72		12		3	3	3	9	75,00	9	12,50	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Biaya pengisian tabung gas	buah	1.847		12	3	3	3	3	12	100,00	12	0,65	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Serta Kedinasan Lainnya	Mengikuti rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	kali	-							-	0,00	-	0,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01.20	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	bulan	-		12	3	3	3	3	12	100,00	12	0,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01.23	Penyediaan kebutuhan rumah tangga KDH/WKDH	Tersedianya makan-minum rumah tangga bupati dan wakil bupati	bulan	72		12	3	3	3	3	12	100,00	12	16,67	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01.24	Penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH	Terwuudnya pelayanan kesehatan bupati dan wakil bupati	bulan	12		12			3		3	25,00	3	25,00	Bag. Umum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.04.4.04.03.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**															
4.04.4.04.03.02.05	Peng.kendaraan Dinas	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	unit	222		2	1		-	1	2	100,00	2	0,90	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas	Sarana dan Prasarana Kantor Rujab/dinas	unit	2		12			3	3	6	50,00	6	300,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor Setda	unit	3		12		3	3	3	9	75,00	9	300,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Tersedianya peralatan rumah jabatan	unit	3		2	1		-		1	50,00	1	33,33	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.03.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpelihatnya sarana dan prasarana rumah jabatan bupati dan wakil bupati	unit	2		5		2	2		4	80,00	4	200,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah dinas	unit	3		5			2		2	40,00	2	66,67	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	4		5		2	2		4	80,00	4	100,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Terwujudnya pemeliharaan mobil jabatan bupati dan wakil bupati	unit	2		2	2	2	2	2	8	400,00	8	400,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan mobil dinas/operasional	unit	66		80	20	25	20	30	95	118,75	95	143,94	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Terpeliharanya peralatan rumah tangga rumah jabatan bupati dan wakil bupati	unit	2		2		2	2		4	200,00	4	200,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	bulan	12		12		3	3		6	50,00	6	50,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	bulan	12		12			3		3	25,00	3	25,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**															
4.04.4.04.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian bupati dan wakil bupati	set	-		2	2		2		4	200,00	4	0,00	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.03	**Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**															
4.04.4.04.03.01.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Aspirasi Masyarakat	kali	152		25	3	5	9	8	25	100,00	25	16,45	Bag. Umum	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.04.4.04.03.01.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Kunjungan Kerja Tamu Pejabat	kali	134		22	3	10	6	3	22	100,00	22	16,42	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01.03	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	kali	655		102	20	35	36	10	101	99,02	101	15,42	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01.04	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	kali	1.112		12	3	4	3	2	12	100,00	12	1,08	Bag. Umum	
4.04.4.04.03.01	**Program Pelayanan Perkantoran**														**BAG. KEUANGAN**	
4.04.4.04.03.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Terselesaikannya Administrasi Keuangan tepat waktu	Bln	32	-	12	3	3	3	3	12	100,00	12	37,50	Bag. Keuangan	
4.04.4.04.03.01.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Bln	-	-	12	3	3	3	3	12	100,00	12	0,00	Bag. Keuangan	
4.04.4.04.03.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**															
4.04.4.04.03.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyelesaian RKA, DPA, DPPA tepat waktu	dok	15	-	3	-		-	3	3	100,00	3	20,00	Bag. Keuangan	
4.04.4.04.03.04.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	dok	10	-	2	-		1		1	50,00	1	10,00	Bag. Keuangan	
4.04.4.04.03.04.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	dok	10	-	2	-		-	2	2	100,00	2	20,00	Bag. Keuangan	
4.04.4.04.03.04.08	Peningkatan Manajemen / Aset	Meningkatnya Manajemen Aset/ Barang Daerah yang Baik dan Lengkap	Bulan	13	-	12	3	3	3	3	12	100,00	12	92,31	Bag. Keuangan	
4.04.4.04.03.01	**Program Pelayanan Perkantoran**														**Bag. Hukum & Per-UU-an**	
4.04.4.04.03.01.10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	aparat skpd	-	-	-	-				-	0,00	-	0,00	Bag. Hukum & Per-UU-an	
4.04.4.04.03.01.11	Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran	pelayanan administrasi perkantoran	aparat skpd	-	-	-	-				-	0,00	-	0,00	Bag. Hukum & Per-UU-an	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.04.4.04.03.03	**Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum Keluarga miskin**															
4.04.4.04.03.3.01	Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Warga Miskin yang mendapat bantuan hukum	orang	100	-	100	-				-	0,00	-	0,00	Bag. Hukum & Per-UU-an	
4.04.4.04.03.08	**Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**															
4.04.4.04.03.08.01	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya proses tindak lanjut hasil temuan	LHP	537	-	85	-	15	15	28	58	68,24	58	10,80	Bag. Hukum & Per-UU-an	
4.04.4.04.03.08.02	Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah	Tetanganinya kasus pemerintah daerah	Konsultan hukum pemda	12		2	-	1	1	2	4	200,00	4	33,33	Bag. Hukum & Per-UU-an	
4.04.4.04.03.08.03	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya sosialisasi pengawasan TP4D	Pemda	72	-	12	-		4	4	8	66,67	8	11,11	Bag. Hukum & Per-UU-an	
4.04.4.04.03.11	**Program Penataan peraturan perundang-undangan**															
4.04.4.04.03.11.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan pemahaman 100 org terhadap undang-undang HAM	orang	750	-	100	-			2	2	2,00	2	0,27	Bag. Hukum & Per-UU-an	
4.04.4.04.03.11.02	Pengelolaan Data LHKPN	Tersedianya data LHKPN di Kab.Soppeng	Pejabat eselon	500	-	37	-	10	24		34	91,89	34	6,80	Bag. Hukum & Per-UU-an	
4.04.4.04.03.11.03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Terciptanya Rancangan PERDA	Rancangan PERDA	96	-	16	2	4	4		10	62,50	10	10,42	Bag. Hukum & Per-UU-an	
4.04.4.04.03.11.04	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kelompok Kadarkum	Kelompok Kadarkum	180	-	30	-	28			28	93,33	28	15,56	Bag. Hukum & Per-UU-an	
4.04.4.04.03.11.05	Kajian Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan keserasian antara peraturan Perundang-undangan Daerah	Terselenggaranya pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan per-UU-an yg berlaku	Produk Hukum Daerah	500	-	16	-	5	3	8	16	100,00	16	3,20	Bag. Hukum & Per-UU-an	
4.04.4.04.03.11.06	Publikasi Peraturan Perundang-undangan berupa sosialisasi peraturan tentang rokok/pajak tembakau	terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi peraturan perundan-undangan tentang rokok kepada masyarakat	aparat pemerintah atau masyarakat	2.400	-	400	100	110			210	52,50	210	8,75	Bag. Hukum & Per-UU-an	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.04.4.04.03.01	**Program Pelayanan Perkantoran**														**Bag. Adm. Kesra**	
4.04.4.04.03.01.10	Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	terlaksananya koordi& konsultasi dalam & luar daerah	kali	-	-	98	1	5	9	5	20	20,41	20	0,00	Bag. Adm. Kesra	
4.04.4.04.03.01.11	Peningkatan Pelayanan administrasi Perkantoran	meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	bulan	-	-	12	3	3	3	3	12	100,00	12	0,00	Bag. Adm. Kesra	
4.04.4.04.03.04	**Program Fasilitasi & Koord. Kebijakan Pemda**															
4.04.4.04.03.04.26	Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Sehat	untuk memantapkan pelaksanaan UKS pada setiap satuan pendidikan	kali	18	-	3	1	2	1		4	133,33	4	22,22	Bag. Adm. Kesra	
4.04.4.04.03.05	**Program Koord & Fasilitasi kesra, keagamaan & Penanggulangan Narkoba**															
4.04.4.04.03.05.01	Pelaksanaan Pemberangkatan/ Pemulangan Jamaah Haji	terwujudnya penyelenggaraan ibadah Haji yang baik	kali	1.500	-	2			2		2	100,00	2	0,13	Bag. Adm. Kesra	
4.04.4.04.03.05.02	Pelaksanaan Perayaan Hari-hari Besar Keagamaan	terwujudnya kegiatan PHBK yang tertib & lancar.	kali	36	-	7		3	3	1	7	100,00	7	19,44	Bag. Adm. Kesra	
4.04.4.04.03.05.03	Pelaksanaan/ Keikutsertaan MTQ/STQ	terpenuhinya fasilitas STQ/MTQ dengan baik	kali	6	-	2	1	1	-		2	100,00	2	33,33	Bag. Adm. Kesra	
4.04.4.04.03.05.04	Pelaksanaan Festival Anak Shaleh	memotivasi anak-anak untuk berprilaku sesuai dengan nilai agama.	kali	6	-	1			1		1	100,00	1	16,67	Bag. Adm. Kesra	
4.04.4.04.03.05.05	Pengembangan Nilai Budaya Lasqi	terselenggaranya lomba Lasqi Tk.Kab & Tk.Propinsi	kali	12	-	1			1		1	100,00	1	8,33	Bag. Adm. Kesra	
4.04.4.04.03.05.06	Peningkatan Nilai - nilai Keagamaan	terlaksanany syiar keagamaan dengan lancar	kali	72	-	13	3	4	5	1	13	100,00	13	18,06	Bag. Adm. Kesra	
4.04.4.04.03.05.07	Penanganan Narkoba melalui Sistem Pencegahan Penyalahgunaan & Pemberantasan Gelap Narkoba (P4GN)	pencegahan & pemberantasan penggunaan narkoba & HIV-AIDS.	kali	96	-	50		8	7	11	26	52,00	26	27,08	Bag. Adm. Kesra	
4.04.4.04.03.01	**PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN**														**Bag. Pemerintahan dan Otoda**	
4.04.4.04.03.01.10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kali	-	-	110	-	10	15	10	35	31,82	35	0,00	Bag. Pemerintahan dan Otoda	
4.04.4.04.03.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Paket	-	-	5	1	1	1	2	5	100,00	5	0,00	Bag. Pemerintahan dan Otoda	
4.04.4.04.03.02	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM EVALUASI KINERJA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**															
4.04.4.04.03.02.02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati	Tersedianya Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Soppeng	Dok	5	-	1	0,25	0,25		-	1	50,00	1	10,00	Bag. Pemerintahan dan Otoda	
4.04.4.04.03.02.03	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Tersedianya Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Soppeng	Dok	5		1	0,25	0,25	0,25	0,25	1	100,00	1	20,00	Bag. Pemerintahan dan Otoda	
4.04.4.04.03.04	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEMDA**															
4.04.4.04.03.04.06	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Dok	8	-	1	-			1	1	100,00	1	12,50	Bag. Pemerintahan dan Otoda	
4.04.4.04.03.04.07	Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan	Terlaksananya PATEN di Kecamatan	Kec	8		8	-	4		4	8	100,00	8	100,00	Bag. Pemerintahan dan Otoda	
4.04.4.04.03.04.08	Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten Soppeng	Jelasnya Data mengenai kerjasama dan tugas pembantuan Kabupaten Soppeng	Dok	6		1	-			1	1	100,00	1	16,67	Bag. Pemerintahan dan Otoda	
4.04.4.04.03.04.11	Pelaksanaan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.	Jelasnya Data mengenai Wilayah Perbatasan Kabupaten, kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dok	6		1	-			1	1	100,00	1	16,67	Bag. Pemerintahan dan Otoda	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.04.4.04.03.04.12	Koordinasi Pembakuan Unsur Rupa Bumi Kabupaten Soppeng	Terlaksananya Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi di setiap kecamatan	Kec	8		8	-	2		6	8	100,00	8	100,00	Bag. Pemerintahan dan Otoda	
4.04.4.04.03.04.19	Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Dok	2		1	-				-	0,00	-	0,00	Bag. Pemerintahan dan Otoda	Setda
4.04.4.04.03.04.24	Pelaksanaan Koordinasi Masalah Keamanan dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya Rasa Keamanan dan berkurangnya Tindak Kriminal	Kec	48		8	-			8	8	100,00	8	16,67	Bag. Pemerintahan dan Otoda	
4.04.4.04.03.04.30	Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD	Tertib Pelaksanaan Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dok	5		1	-			1	1	100,00	1	20,00	Bag. Pemerintahan dan Otoda	
												80,98	**12,93**	**34,09**		
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															***Inspektorat Daerah***	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik		12 Kali				3	3	3	3	12					
-	Penyediaan Jasa Pmeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		1 Unit Roda 4, 23 Unit Roda 2				5	5	7	7	24					
-	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor		8 Jenis, 1 Org				2	2	2	2	8					
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor		5 Jenis				2	2		1	5					
-	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan		6 Terbitan				0	3	2	1	6					
-	Penyediaan Bahan Logistik kantor		12 Kali				3	3	3	3	12					
-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah		85 Kali				20	20	25	20	85					
-	Peningkatan Pelayanan Admnistrasi Perkantoran		12 Paket				3	3	3	3	12					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana															***Inspektorat Daerah***	
-	Pengadaan Kendaraan Dinas		3 Unit, Roda 2				0	0	0	3	3					
-	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		6 Unit				0	0	0	6	6					
-	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor		248 m2				0	83	83	82	248					
-	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dians Operasional		1 Unit Roda 4, 25 Unit				5	5	7	10	27					
-	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor		4 Jenis, 26 Unit				0	10	10	6	26					
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur															***Inspektorat Daerah***	
-	Pendidikan dan Pelatihan Formal		32 Orang				0	10	15	7	32					
-	Bimbingan Teknis Peraturan perundang - Undangan		20 Orang				5	5	5	5	20					
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme Pengawasan															***Inspektorat Daerah***	
-	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala		450 LHP				100	100	100	150	450					
-	Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintahan Daerah		55 Kasus				10	10	15	20	55					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
-	Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan (Pemutakhiran Data)		12 Bulan				0	0		12	12					
-	Evaluasi LAKIP	36 LAKIP SKPD					12	24	0	0	36					
-	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan		38 SKPD				12	12	10	4	38					
-	Pelatihan Teknis Pengawasan, Pengadaan Barang Jasa Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		42 Orang				38			0	38					
-	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa		49 Desa				20	10		19	49					
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															
1.01.01	**DINAS PENDIDIKAN KAB. SOPPENG**															
1.01.1.01.01	**Program Pelayanan Perkantoran**															
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	kali/bulan												Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.01.03	Penyedian Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	Tahun/Unit				-					-	-	-	Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	Buah/Botol				-					-	-	-	Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	Buah/Rol												Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	Buah/Set/Lusin									-	-	-	Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	Tahun									-	-	-	Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.01.09	Penyediaan bahan logistik kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	Kali												Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.01.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan Luar daerah serta kedinasan lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	Tahun/Kegiatan												Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.01.11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	Tahun									-	-	-	Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.01.18	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan perkantoran	Tahun												Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**														Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur	Unit								-	-	-	-	Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.02.09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur	Unit									-	-	-	Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.02.10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur	Set/Buah												Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.02.13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur	m2/paket								-	-	-	-	Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.02.17	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranan aparatur	Unit													
1.01.1.01.01.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**															

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
1.01.1.01.01.03.05	Pembinaan Kepegawaian	Persentase kepuasan pelayanan SKPD	lembar, OM, OK												Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.03.08	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Persentase kepuasan pelayanan SKPD	lembar, OM, OK			12	3				3	25	3	-	Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.03.09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya komponen listrik/penerangan dan peralatan listrik lainnya	Tahun/paket				3				3	-	3	-	Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**					34	9				9	26	9	-		
1.01.1.01.01.04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase penyelesaian laporan tepat waktu	OB,lembar,exp,kegiatan				39				39	-	39	-	Subag Perencanaan, pelaporan dan	
1.01.1.01.01.04.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Persentase penyelesaian laporan tepat waktu	OB, OJ, OH, Keg								-	-	-	-	Subag Perencanaan, pelaporan dan	
1.01.1.01.01.01	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	APK PAUD		60		12	3				3	25	3	5		
1.01.1.01.01.01.01	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD negeri	Jumlah sarana dan prasarana TK Negeri yang dibangun/di adakan	Buah/Paket	2			-				-	-	-	-	Bidang Pend Luar Sekolah	-
1.01.1.01.01.01.03	Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang anak	Jumlah sosialisasi PAUD yang dilaksanakan	OH, OK, Exp,Lbr,OJ, Dok	4											Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.01.04	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini	Jumlah kegiatan pengembangan kurikulum PAUD yang dilaksanakan	Paket, OH, Lbr, Exp, Dok, OH, OK			12	2				2	17	2	-	Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.01.05	Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang dibina	Paket, OH, Lbr, Exp, Dok, OH, OJ	50		12	3				3	25	3	6	Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.01.07	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Jumlah PAUD Negeri yang dibina	Buah,lembar, bungkus,tahun,OB	2		97	41				41	42	41	2.050	Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.01.08	Lomba Apresiasi Gebyar PAUD	Meningkatnya APK PAUD menjadi 48%	OK,Paket,OH ,Lembar,Dok, Dos			97	19				19	20	19	-	Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.02	**Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun**	APK SD sederajat, APK SMP sederajat		APK SD 97,00, APK SMP 83,90												
1.01.1.01.01.02.01	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD	Jumlah sarana dan prasarana SD Negeri yang dibangun/diadakan	Paket	190											Bidang Pendidikan Dasar	
1.01.1.01.01.02.02	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP	Jumlah sarana dan prasarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan	Buah	40											Bidang Pendidikan Dasar	
1.01.1.01.01.02.03	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan pada sekolah swasta	Jumlah sarana dan prasarana SD/SMP sederajat Swasta yang dibangun/diadakan	Paket	6											Bidang Pendidikan Dasar	
1.01.1.01.01.02.06	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan dasar tingkat SD (DAK)	Meningkatnya APK SD menjadi 95% dan SMP menjadi 82,33%	Paket												Bidang Pendidikan Dasar	
1.01.1.01.01.02.07	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan dasar tingkat SMP (DAK)	Meningkatnya APK SD menjadi 95% dan SMP menjadi 82,33%	Paket/Ruang												Bidang Pendidikan Dasar	
1.01.1.01.01.03	**Program Pendidikan Gratis**														Bidang Pendidikan Dasar	
1.01.1.01.01.03.01	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis (APBD Kabupaten)	Menurunnya angka putus sekolah SD 0,09%, SMP 0,60%	Lbr/OM/OB												Bidang Pendidikan Dasar	
	Pendidikan Gratis Pendidikan Dasar (APBD Kabupaten)														Bidang Pendidikan Dasar	
1.01.1.01.01.04	**Program Peningkatan Layanan Pendidikan**														Bidang Pendidikan Dasar	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
1.01.1.01.01.04.01	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu	Meningkatnya angka melanjutkan dari SD ke SMP menjadi 100%, SMP ke SMA menjadi 100%	Lbr/Org												Bidang Pendidikan Dasar	
1.01.1.01.01.04.02	Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu	Meningkatnya angka melanjutkan dari SD ke SMP menjadi 100%, SMP ke SMA menjadi 100%	Lbr/Org												Bidang Pendidikan Dasar	
1.01.1.01.01.04.04	Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa	Meningkatnya angka melanjutkan dari SD ke SMP menjadi 100%, SMP ke SMA menjadi 100%	Kegiatan												Bidang Pendidikan Dasar	
1.01.1.01.01.05	**Program Pendidikan Non Formal**															
1.01.1.01.01.05.01	Peningkatan Kapasitas penyelenggara dan Tutor Keaksaraan	Meningkatnya jumlah penerima SUKMA menjadi 100 org	Kegiatan												Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.05.02	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Terwujudnya pendidikan non formal	Kegiatan												Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.05.03	Sosialisasi program pendidikan masyarakat dan kelembagaan	Meningkatnya jumlah penerima SUKMA menjadi 100 org	Kegiatan												Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.05.04	Peningkatan Peran Serta Hari Aksara Internasional	Meningkatnya jumlah penerima SUKMA menjadi 100 org	Kegiatan												Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.05.05	Pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra	Meningkatnya jumlah penerima SUKMA menjadi 100 org	Paket/OH												Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.05.06	Penyelenggaraan paket A setara SD	Meningkatnya jumlah yang mengikuti pendidikan keaksaraan	Paket/Rkp/OM												Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.05.07	Penyelenggaraan paket B setara SMP	Meningkatnya jumlah yang mengikuti pendidikan keaksaraan	Paket/Rkp/OM												Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.05.08	Penyelenggaraan paket C setara SMA	Meningkatnya APK SMA	Paket/Rkp/OM												Bidang Pend Luar Sekolah	
1.01.1.01.01.06	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**															
1.01.1.01.01.06.01	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah SD yang terakreditasi A menjadi 155 sd SMP menjadi 22	Kegiatan												Subag Perencanaan	
1.01.1.01.01.06.02	Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah	Meningkatnya jumlah SD yang terakreditasi A menjadi 155 sd SMP menjadi 22	OB, OM, lembar												Bidang Pend Dasar	
1.01.1.01.01.06.03	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	Meningkatnya jumlah SD yang terakreditasi A menjadi 155 sd SMP menjadi 22	Kegiatan												Bidang Pend Dasar	
1.01.1.01.01.06.04	Penyediaan barang cetakan sekolah	Meningkatnya jumlah SD yang terakreditasi A menjadi 155 sd SMP menjadi 22	Ekp												Bidang Pend Dasar	
1.01.1.01.01.06.05	Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	Meningkatnya jumlah SD yang terakreditasi A menjadi 155 sd SMP menjadi 22	Kegiatan												Bidang Pend Dasar	
1.01.1.01.01.06.06	Penyusunan Profil Pendidikan	Meningkatnya jumlah SD yang terakreditasi A menjadi 155 sd SMP menjadi 22	Kegiatan												Subag Perencanaan	
1.01.1.01.01.06.07	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan													Bidang Pend Dasar	
1.01.1.01.01.07	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**															
1.01.1.01.01.07.01	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Meningkatnya persentase guru berkualifikasi S1/D4 menjadi 90%	Kegiatan												Subag Umum dan Kepegawaian	
1.01.1.01.01.07.02	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya persentase guru berkualifikasi S1/D4 menjadi 90%	OH, OK												Bidang Pendidik dan Tenaga Kepend	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
1.01.1.01.01.07.03	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Meningkatnya persentase guru berkualifikasi S1/D4 menjadi 90%	Kegiatan												Bidang Pendidik dan Tenaga Kependi	
1.01.1.01.01.07.05	Pembinaan dan pengembangan karir berkelanjutan	Meningkatnya persentase guru berkualifikasi S1/D4 menjadi 90%	Kegiatan												Bidang Pendidik dan Tenaga Kependi	
1.01.1.01.01.07.06	Lomba Olimpiade Nasional Guru	Meningkatnya persentase guru berkualifikasi S1/D4 menjadi 90%	Lbr, ok												Bidang Pendidik dan Tenaga Kependi	
1.01.1.01.01.08	**Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan**															
1.01.1.01.01.08.01	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	Meningkatnya jumlah siswa berprestasi	ok, oh												Subag Perencanaan	
1.01.1.01.01.08.02	Pelatihan Kompetensi siswa berprestasi	Meningkatnya jumlah siswa berprestasi	oh,ok												Bidang Pend Dasar	
1.01.1.01.01.08.03	Pembinaan Siswa OSN	Meningkatnya jumlah siswa berprestasi	OJ, OM												Bidang Pend Dasar	
1.01.1.01.01.08.04	Penyelenggaraan lomba-lomba bidang kesiswaan	Meningkatnya jumlah siswa berprestasi	OB, set												Bidang Pend Dasar	
1.01.1.01.01.08.05	Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi	Meningkatnya jumlah siswa berprestasi	Kegiatan												Bidang Pend Dasar	
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM				
	Urusan Wajib															
	Ketahanan Pangan															
02	**Program Pelayanan Perkantoran**	**% Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu**	%	**100**		100	25	25	25	25	100	100,00	100	100,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Telekomunikasi dan Jasa Listrik	Bulan	60	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24	40,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	469	26	44	5	10	15	12	42	95,45	68	14,50	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	Jenis	1500	8	10	2	4	2	2	10	100,00	18	1,20	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik/Penerangan Bangunan	Jenis	1500	6	6	0	5	0	1	6	100,00	12	0,80	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis	33	6	6		4	0	2	6	100,00	12	36,36	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturaan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Media	73	12	13		3	3	7	13	100,00	25	34,25	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kali	60	7	8	2	2		4	8	100,00	15	25,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah yg terlaksana	Kali	7500	900	1.000	27	477	315	181	1000	100,00	1900	25,33	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran	Paket	90	17	18	4	2	4	8	18	100,00	35	38,89	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
												99,49		24,04		
												Sangat Tinggi		S. Rendah		
02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**% Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran**	**%**	**100**		100					-	0,00	-	0,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Unit		0	1	-	0	0		0	0	0	-		
02	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan	Jenis	15	9	3	0	0	0	3	3	100	12	0,800	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Gedung	40	10	10	0	0	0	10	10	100	20	0,500	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Unit	5	7	44	6	8	2	44	60	136,3636364	67	13,400	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	jenis	20	4	4	0	0	0	4	4	100	8	0,400	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
												87,27		3,02		
												Tinggi		S. Rendah		
02	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**	**% PNS Berkinerja Baik**	**%**	**100**		100					-	0,00	-	0,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Peraturan-Perundang-undangan	orang	78	10	10	1	2	2	5	10	100	20	0,256	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
												100,00		0,26		
												Sangat Tinggi		S. Rendah		
02	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**% Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu**	**%**	**100**		100					-	0,00	-	0,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	25	7	7	0	0	0	7	7	100	14	0,56	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran/Akhir Tahun	Dokumen	1	5	5	0	0	0	5	5	100	10	10,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik yang disusun	Dokumen	1	2	-	0	0	0		0	0	2	2,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
												66,67		4,19		
												Sedang		S. Rendah		
02	**Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan**	**Ketersediaan Pangan Utama**	**Ton**	**1.045.820**		100					-	0,00	-	0,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Laporan Dewan Ketahanan Pangan Tk. Desa Kecamatan dan Kabupaten	Dokumen	5	1	1	0	0	0	1	1	100	2	0,40	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pemetaaan Daerah Rawan Pangan	Laporan Kondisi Daerah Rawan Pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	5	1	1	0	0	1	1	2	200	3	0,60	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Analisis Ratio Jumlah Penduduk Terhadapa Kebutuhan Pangan	Laporan Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan	Dokumen	5	1	1	0	0	0	1	1	100	2	0,40	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Koordinasi Kebijakan Perberasan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Perberasan	Kali	120	9	8	0		0	8	8	100	17	0,14	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang di bina	Desa	25	5	5	0	1	0	4	5	100	10	0,40	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam mengatasi Kerawanan Pangan	Ton	5	10	10	0	0	10	0	10	100	20	4,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	Kelompok	15	15	15	0	1	0	14	15	100,00	30	2,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masdyarakat	Laporan Akses Pangan Masyarakat	Dokumen	5	1	1	0	0	0	1	1	100	2	0,40	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Pembinaan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia	Kelompok	55	70	70	0	1	9	60	70	100,00	140	2,55	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pemantauan dan Harga Pangan Pokok	Laporan stabilisasi Harga Pangan Strategis	Dokumen	5	1	1	0	0	0	1	1	100	2	0,40	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
												110,00		1,13		
												FALSE		S. Rendah		
02	**Pengembangan Penganekaragaman Komsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan**	**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)**	%	**100**		100					-	0,00	-	0,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Analisis dan Penyusunan Pola Komsumsi dan Suplai Pangan	Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	Dokumen	5	1	1	0	0	0	1	1	100	2	0,40	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
02	Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan Melalui P2KP	Pengembangan Tanaman Pekarangan melalui Model Kawasan Rumah Pangan Lestari	Kelompok	102	10	10	0		0	10	10	100	20	0,20	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Promosi dan Sosialisasi Produk Olahan Pangan Lokal	Jumlah Produk Olahan Pangan Lokal yang dipromosikan	jenis	53	7	8	0	4	0	4	8	100	15	0,28	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Jumlah Frekuensi Penyuluhan Konsumsi Sumber Pangan Lokal	kali	120	9	9	0	0	0	9	9	100,00	18	0,15	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Jenis Pangan Segar yang diuji	Jenis	15	3	3	0	0	1	2	3	100,00	6	0,40	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pembinaan dan Pemantauan dan Sosialisasi Prefensi Pangan Masyarakat (PPM)	Jumlah Frekuensi Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Preperensi Pangan Masyarakat	Kali	85	9	9	0	0	4	5	9	100,00	18	0,21	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
												100,00		0,27		
												Sangat Tinggi		S. Rendah		
02	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap**	**Jumlah Produksi Ikan**		**21.015**		100					-	0,00	-	0,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Ungul Air Tawar)	Jumlah benih ikan yang dihasilkan	Benih	82.500.000	13.000.000	13.500.000	#######	#######	#######	#######	13.500.000	100,00	26.500.000	0,32	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Perikanan (DAK)	Jumlah prasarana pengembangan perikanan yang diadakan	Paket	249	44	15	0	0	13	2	15	100,00	59	0,24	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pengembangan Usaha Mina Pedesaaan Perikanan Budidya (PUMP-PB) dan Pengelolaan Pemasaran hasil Perikanan (PUMP-PPHP)	Jumlah anggota yang dibina	Orang	420	50	50	0	7	25	18	50	100	100	0,24	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe	Jumlah penanganan kasus penggunaan alat tangkap ilegal	Kasus	470	92	92	0	13	29	50	92	100,00	184	0,39	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pengukuran Luasan Lahan Tappareng SalaE	Jumlah Tapal batas yang diukur	Tapal Batas	5	0	-	0	0	0		0	0	0	-	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
												80,00		0,24		
												Tinggi		S. Rendah		
02	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**	**Jumlah jenis olahan hasil perikanan lokal di pasaran**	Jenis	**37**		100					-	0,00	-	0,00	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Peningkatan produk hasil olahan perikanan	Event	20	3	12	1	3	2	6	12	100,00	15	0,750	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
02	Pegembangan Daya Saing Produk Perikanan	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan	Kelompok	75	5	5	0	0	0	5	5	100	10	0,133	Dinas Perikanan dan Ketahan Pangan	
												100,00		0,44		
												Sangat Tinggi		S. Rendah		
												92,93		4,20		
												Sangat Tinggi		S. Rendah		
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
0.00.01	***Program Pelayanan Perkantoran***	*Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	213	***339***	***232***	0	884	88400%	**88500%**	88500,00%	Dukcapil	
0.00.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik	Kali	12	12	12	3	3	3	3	12	100%	24	2	Dukcapil	
0.00.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diterbitkan STNKnya	Roda	9	9	6	1	2	2	0	5	83%	14	1,56	Dukcapil	
0.00.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	Org dan Jenis	12	12	12	0	5	4	0	9	75%	21	1,75	Dukcapil	
0.00.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan	Jenis	2	2	2	0	2	0	0	2	100%	4	2	Dukcapil	
0.00.01.07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jenis	6	1	6	6		0	0	6	100%	7	1,166666667	Dukcapil	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
0.00.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbitan	10	12	10	0	7	3	0	10	100%	22	2,2	Dukcapil	
0.00.01.10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	476	1	476	198	315	215	94	822	173%	823	1,729	Dukcapil	
0.00.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Paket	18	1	18	5	5	5	3	18	100%	19	1,06	Dukcapil	
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN									**104%**	**116,75**	1,68		
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN									**S.Tinggi**				
0.00.02	***Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur***	*Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran*	*100%*	*100%*	*98,86*	*100%*	***1***	***3***	***499***	0	9,07	907%	107,93	107,93	Dukcapil	
01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Roda	1	0,00	1	-	-	-	1	1	9849,44%	1	1,00	Dukcapil	
0.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis	10	5	10	0	0	0	8	8	9380,92%	13	1,30	Dukcapil	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jenis	4	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	3	0,75	Dukcapil	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	Jenis	3	3	0	0	0	0	0	0	0,00%	3	1,00	Dukcapil	
0.00.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara	M2	1,032	1,032	1.032 M2	0	0	495	0	495	47,97%	496	480,65	Dukcapil	
0.00.02.15	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaran dinas/operasional yang dipelihara	Roda	6	9	6	1	2	2	1	6	100%	15	2,50	Dukcapil	
0.00.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	4	4	4	0	1	2	2	5	125,00%	9	2,25	Dukcapil	
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN									**2413%**	**89,84**	81,41		
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN									**S. Tinggi**				
0.00.03	***Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur***	*Persentase ASN yang berkinerja baik*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	17,58%	***13%***	***1***	0	131%	131%	***231%***	2,31	Dukcapil	
0.00.03.01	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapat pakaian dinas	Orang	52	50	50	0	0	0	50	50	100%	100	1,92	Dukcapil	
0.00.03.09	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	ASN yang mengikuti BINTEK	Orang	7	7	7	2	2	1	2	7	100%	14	2,00	Dukcapil	
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN									**100%**	57	1,96		
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN									**S. Tinggi**				
0.00.04	***Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan***	*Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	0,00%	***17%***	***2***	0	217%	217,00%	***317%***	3,17	Dukcapil	
0.00.04.01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Dokumen	7	7	7	0	3	2	2	7	100%	14	2,00	Dukcapil	
0.00.04.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	Dokumen	1	1	1	0	1	0	0	1	100%	2	2,00	Dukcapil	
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN									**100%**	8	2,00		
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN									**S. Tinggi**				
2.06.01	***Program Penataan Administrasi Perkantoran***	*Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan*	*100%*	*100%*	*100%*	*100%*	10,21%	***6%***	***14.292***	0	1429241%	1429241%	1429341%	14293,41	Dukcapil	
2.06.01.01	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Jumlah software/hardware komputer yang dipelihara dan dibangun	Jenis	9	10	2	0	0	0	1	1	50%	11	1,22	Dukcapil	
2.06.01.02	Pengolahan dalam Penyusunan Informasi Kependudukan	Profil Kependudukan Kab. Soppeng	Dokumen	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1	100%	2	2,00	Dukcapil	
2.06.01.03	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta capil yang diterbitkan	Akta	7	6,600	6700	-	2.561	2700	0	5.261	79%	5267,6	752,51	Dukcapil	
2.06.01.04	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah KK yang diterbitkan	KK	25	19,000	22000	4.889	5.000	6350	0	16.239	74%	16258	650,32	Dukcapil	
2.06.01.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dokumen	1	1	1	0	-	0	1	1		2	2,00	Dukcapil	
2.06.01.07	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah E-KTP berbasis NIK yang diterbitkan	KTPel	1,870	1690	1720	10.174	6.207	5242	0	21623	1257%	23313	12466,84	Dukcapil	
2.06.01.08	Sosialisasi Berbagai Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	89	90	89,00	0	89	0	0	89	100%	179	2,01	Dukcapil	
2.06.01.09	Penerapan Sistem Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukanberstandar ISO	Diterapkannya sistem manajemen pelayanan publik yang berstandar ISO	ISO	1	65	1,00	0	0	0	0	0	0%	65	65,00	Dukcapil	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH KEGIATAN									207%	5.637	1743		
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH KEGIATAN									S. Tinggi				
												303779,16%		305836,36%		
												S. Tinggi		S. Tinggi		
	Dinas Komunikasi dan Informatika															
04.08.01	**Program Pelayanan Perkantoran**	Persentase kelancaran administrasi yang terlayani	**%**	**100**	**100**	**100**						**7**	**585**	**4**		
04.08.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik	Kali	72	12	36	1	6	-	4	11	0,31	23	0,32	Diskominfo	
04.08.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK	Unit	4	1	1	-	-	-	-	1	1,00	1	0,25	Diskominfo	
04.08.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Pembersih	Buah	106	20	18	-	10	-	-	18	1,00	38	0,36	Diskominfo	
04.08.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik	Buah	625	95	6	-	-	-	-	6	1,00	101	0,16	Diskominfo	
04.08.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Koran / Majalah	Terbitan	5	5	9	-	-	-	-	9	1,00	9	1,80	Diskominfo	
04.08.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian BBG	Kali	70	12	12	-	6	-	-	12	1,00	24	0,34	Diskominfo	
04.08.01.10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kali	2.783	355	12	2	5	-	-	12	1,00	367	0,13	Diskominfo	
04.08.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Paket	29	4	18	0	8	-	-	18	1,00	22	0,76	Diskominfo	
												0,91		0,52		
												T		SR		
04.08.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**% Sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**100**	**100**						5,00	34,00	12,25		
04.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Unit	**1**	**0**	**2**	-	**-**	**-**	**-**	**2**	1,00	2	2,00		
04.08.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	1	-	1					1	1,00	1	1,00		
04.08.02.11	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara	Unit / M2	1	-	1	-	-	-		1	1,00	1	1,00	Diskominfo	
04.08.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit / M2	1	1	1	-	1	-		1	1,00	1,00	1,00	Diskominfo	
04.08.02.15	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	4	4	29	-	10	-		29	1,00	29	7,25	Diskominfo	
												1,00		1,71		
												R		SR		
04.08.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**	**% ASN yang berkinerja baik**	**%**	**100**	**100**	**100**						0,20	12,00	0,15		
04.08.03.09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti diklat / bimtek	PNS	78	9	15	1	1	1		3	0,20	12	0,15	Diskominfo	
												0,20		0,15		
												ST		SR		
04.08.27	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**% Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan**	**%**	**100**	**100**	**100**						0,00	0,00	0,00		
04.08.27.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan/pelaporan yang tersusun	Dok	25		5	-	-	-	**-**	**-**	0,00	-	0,00		
04.08.27.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Dok	10		2	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Diskominfo	
												0,00		0,00		
												SR		SR		
04.08.28	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**	**Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan**		**100**	**100**	**100**						2,00	12,00	0,40		
04.08.28.01	Pembangunan Sarana Jaringan Komunikasi dan Informasi	Cakupan jaringan IT yang terbangun	titik	55	10	1	-	-	-	-	1	1,00	11	0,20	Diskominfo	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
04.08.28.02	Penyediaan akses internet	Jumlah langganan provider internet	line	5		1	-	1	-	-	1	1,00	1	0,20		
04.08.28.03	Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan informasi	% sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terpelihara	%	100	-	1	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Diskominfo	
												0,67		0,20		
												SR		SR		
04.08.29	**Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika**	**Persentase jumlah desa/kelurahan yang terakses informasi**	**%**	**100**	**100**	**100**	**-**	**3**	**2**	**-**		**200**	**6**	**0**		
04.08.29.02	Pengelolaan dan Pemutakhiran Informasi Situs Web Pemerintah	Jumlah domain dan sub domain pemkab.soppeng yang dikelola	Domain	5	-	1	-	1	1	-	1	100,00	1	0,20	Diskominfo	
04.08.29.03	Pengelolaan Layanan Soppeng Command Center	Jumlah jenis informasi yang tersaji	Jenis	25	-	5	-	2	1	-	5	100,00	5	0,20	Diskominfo	
04.08.29.06	Pengawasan dan Site Audit Menara Telekomunikasi	jumlah menara yang diawasi	Menara	70	-	70	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Diskominfo	
												66,67		0,13		
												SR		SR		
04.08.03	**Program Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika**	**% peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika**	**%**	**100**	**100**	**100**				**0**	**166**	**300**	**166**	**15**		
04.08.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompentensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jumlah SKPD yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah	SKPD	38	0	37	-	-	-	-	37	100,00	37	0,97	Diskominfo	
04.08.29.02	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Orang	400	0	75	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Diskominfo	
04.08.29.03	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah KIM yang terbina	Kelompok	55	0	64	-	-	-	-	64	100,00	64	1,16	Diskominfo	
04.08.29.04	Orientasi Kehumasan	Jumlah peserta orientasi kehumasan	Kegiatan	5	0	65	-	-	-	-	65	100,00	65	13,00	Diskominfo	
												75,00		3,78		
												SR		SR		
04.08.03	**Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**	**Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**				**0**	**88**	**480**	**88**	**1**		
04.08.29.01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah kegiatan pemerintah yang disebarluaskan	Terbitan	5		1	-	-	-	-	1	100,00	1	0,20	Diskominfo	
04.08.29.03	Peliputan dan Pendokumentasian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pemerintah yang diliput dan didokumentasikan	Kegiatan	125		25	-	-	-	-	25	100,00	25	0,20	Diskominfo	
04.08.29.05	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Pameran	Jumlah keikutsertaan dalam pameran	Kegiatan	5		1	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Diskominfo	
04.08.29.06	Pengelolaan opini dan aspirasi publik	Jumlah pengaduan dan aspirasi masyarakat	Pengaduan dan aspirasi	240		60		-	-	-	60	100,00	60	0,25		
04.08.29.07	Visualisasi Profil Kabupaten	Jumlah dokumen visualisasi yang tersusun	video	10		2	-	-	-	-	2	100,00	2	0,20	Diskominfo	
												80,00		0,17		
												ST		SR		
04.08.03	**Program Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik**	**% penyelesaian pengadaan barang/jasa tepat waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**			-			**1**	**200**	**2**		
04.08.03.01	Penyelenggaraan Unit pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)	Persentase pelayanan penyelesaian proses pengadaan barang/jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel	%	100	100	100	20	30	-	-	100	1,00	200	2,00	Diskominfo	
												1,00		2,00		
												ST		SR		
04.08.03	**Program Pengembangan Statistik Daerah**	**% Ketersediaan data/informasi pembangunan daerah**	**%**	**100**	**100**	**100**						0,00				
04.08.03.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Skala Kabupaten	Jumlah dokumen statistik yang dihasilkan	Dok	5	2	1	-	-	-	-	1	100,00	3	0,60	Diskominfo	
												100,00		0,60		
												ST		SR		
04.08.03	**Program Penyelenggaraan Persandian**	**% Informasi yang diamankan**	**%**	**100**	**100**	**100**						1,42				
04.08.03.09	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng	Jumlah informasi yang diamankan	Informasi	120		24	-	10	-	-	10	0,42	10	0,08	Diskominfo	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
04.08.03.09	Sosialisasi Hubungan Komunikasi Sandi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Orang	500	100	100	-	-	100	-	100	1,00	200	0,40	Diskominfo	
												0,71		0,24		
												ST		SR		
						AIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 11)						22,34		1,50		
						DIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)						T		SR		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan														**DPK**	
1.26.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**															
26.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	#REF!	#REF!	3	3	3	3	12	#REF!	12	100,00		
26.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terbayarnya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Unit	11	#REF!	#REF!	0		0	6	6	#REF!	6	54,55		
26.01.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Jenis	13	9	#REF!	1	1	1	1	1	#REF!	1	7,69		
26.01.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung Kantor	Tersediaya Instalasi Listrik dan Penerangan yang Memadai	Jenis	9	6	#REF!	0	6	0		6	#REF!	6	66,67		
26.01.01.07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	13	#REF!	4	4	0	0		4	100,00	4	30,77		
26.01.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Judul	18	18	16	0	0	8	8	16	100,00	16	88,89		
26.01.01.09	Penyediaan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan BBM dan Gas	Kali	12	#REF!	#REF!	3	3	3	3	12	#REF!	12	100,00		
26.01.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kali	290	175	175	20	55	25	75	175	100,00	175	60,34		
26.01.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Admininstrasi Perkantoran	Bulan	12	#REF!	#REF!	3	3	3	3	12	#REF!	12	100,00		
												#REF!		67,66		
												Sangat Tinggi		Sedang		
1.26.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**															
26.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit/Buah	48	#REF!	33	31			2	33	100,00	33	68,75		
26.01.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	1	1	1			0	1	1	100,00	1	100,00		
26.01.02.15	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Meningkatnya Kelancaran Pemanfaatan Kendaraan Dinas / Operasional	Bulan	11	#REF!	#REF!	3	3	3	3	12	#REF!	12	109,09		
26.01.02.19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Unit	19	#REF!	#REF!	0		6	8	14	#REF!	14	73,68		
												#REF!		**87,88**		
												Sangat Tinggi		Tinggi		
1.26.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**															
26.01.05.03	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kelancaran Tugas-Tugas Operasional	Orang	45	5	5	1	1	1	2	5	100,00	5	11,11		
												100,00		**11,11**		
												Sangat Tinggi		Sangat Rendah		
1.26.01.06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**															
26.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	43	7	7	0	3	4	0	7	100,00	7	16,28		
26.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	42	4	4	1	1	1	1	4	100,00	4	9,52		
												100,00		**12,90**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
												Sangat Tinggi		Sangat Rendah		
	Urusan Wajib															
	Perpustakaan															
1.26.01.21	**Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**															
26.01.21.01	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Keliling	Orang	96	#REF!	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0		16		16	#VALUE!	16	16,67		
26.01.21.02	Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Perpustakaan Ceria	Orang	8000	#REF!	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0	313	313	624	1250	#VALUE!	1250	15,63		
26.01.21.05	Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Bertambahnya Jumlah Koleksi Perpustakaan	Judul	14392	#REF!	#REF!	0		0	240	240	#REF!	240	1,67		
26.01.21.06	Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato Bagi Siswa Sekolah	Terwujudnya Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato bagi Siswa Sekolah	Orang	96	#REF!	#REF!	0		16		16	#REF!	16	16,67		
26.01.21.07	Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang Pengetahuan Umum	Terwujudnya Minat dan Bakat pada Bidang Pengetahuan Umum	Orang	144	#REF!	#REF!	0		24		24	#REF!	24	16,67		
26.01.21.08	Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan	Terwujudnya Kualitas Perpustakaan Desa / Kelurahan	Desa/Kel	40	#REF!	#REF!	0		8		8	#REF!	8	0,00		
												#VALUE!		**7,48**		
												Sangat Tinggi		Sangat Rendah		
24.1.26.01.16	**Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah**															
26.01.16.02	Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip	Terlaksananya Pendataan dan Penelusuran Dokumen / Arsip Daerah	Lembar	#REF!	#REF!	#REF!	0		0	1500	1500	#REF!	1500	#REF!		
26.01.16.02	Penyimpanan dan Penataan Arsip	Arsip dapat Ditemukan dengan Cepat	SKPD	#REF!	#REF!	#REF!	0		0	5	5	#REF!	5	#REF!		
26.01.18.03	Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta	Meningkatnya Pengetahuan Aparat Desa / Keluarahan Mengenai Pengelolaan Arsip	Peserta	#REF!	#REF!	#REF!	0		0	70	70	#REF!	70	0,00		
												#REF!		**#REF!**		
												Sangat Tinggi		Sangat Rendah		
												#REF!		**#REF!**		
												Sangat Tinggi		**Sangat Rendah**		
3.03	**Bidang Urusan Pertanian**															
0.00.01	**Program Pelayanan Perkantoran**	**Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		
0.00.01.01	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kali	72	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24	33,33		
0.00.01.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasinal	Unit	160	84	157	16	18	20	55	109	69,43	109	68,13		
0.00.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan	Orang/ Jenis	6	2	4	4	4	4	4	4	100,00	4	66,67		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
0.00.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Buah	166	46	20	-	-	20	-	20	100,00	66	39,76		
0.00.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbitan	161	31	23	23	23	23	23	23	100,00	54	33,54		
0.00.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	kali	216	29	29	6	6	6	6	24	82,76	53	24,54		
0.00.01.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	2250	752	750	183	196	149	322	850	113,33	1.602	71,20		
0.00.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket pelayanan administrasi perkantoran	Paket	30	5	5	5	5	5	5	5	100,00	10	33,33		
0.00.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran**	**%**	**100**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		
0.00.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan Gedung kantor	Unit/ Buah	61	5	11	-	1	-	8	9	81,82	14	22,95		
0.00.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	6	1	1	-	-	-	1	1	100,00	2	33,33		
0.00.02.15	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	Unit	166	50	159	5	5	125	21	156	98,11	206	124,10		
		* Roda 2	Unit	160		152										
		* Roda 4	Unit	6		5										
		* Ekscavator	Unit	2		2										
0.00.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	30	3	2	2	2	-	2	2	100,00	5	16,67		
0.00.02.25	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Paket	3	1	1	-	-	-	1	1,00	100,00	2	66,67		
0.00.03	**Program Peningkatan Profesionalisme ASN**	**Persentase Peningkatan Disiplin ASN**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**		
0.00.03.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparat yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang	50	9	10	4	2	1	5	12	120,00	21	42,00		
0.00.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Laporan Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**100**	**100**		
0.00.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	36	7	6	5	-	-	1	6	100,00	13	36,11		
0.00.04.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tepat Waktu	Dokumen	24	4	4	-	2	-	2	4	100,00	8	33,33		
3.03.01	**Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan**	**Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**	**Ton**	**396.061**	**390.764**	**359.332**	**-**	**211.213**	**-**	**225.094**	**436.307**	**121,42**	**436.307**	**110,16**		
		a. Padi	**Ton**	**334.935**	**308.687**	**305.125**	**-**	**161.525**	**-**	**177.408**	**338.933**		**338.933**			
		b. Jagung	**Ton**	**48.476**	**79.367**	**44.875**	**-**	**49.430**	**-**	**45.407**	**94.837**		**94.837**			
		c. Kedelai	**Ton**	**7.920**	**2.008**	**6.984**	**-**	**132**	**-**	**391**	**523**		**523**			
		d. Kacang Tanah	**Ton**	**1.046**	**113**	**725**	**-**	**31**	**-**	**1.394**	**1.425**		**1.425**			
		e. Kacang Hijau	**Ton**	**1.320**	**29**	**410**	**-**	**10**	**-**	**246**	**256**		**256**			
		f. Ubi Kayu	**Ton**	**1.917**	**438**	**927**	**-**	**85**	**-**	**106**	**191**		**191**			
		g. Ubi Jalar	**Ton**	**447**	**123**	**286**	**-**	**-**	**-**	**142**	**142**		**142**			
3.03.01.02	Pengadaan Benih Padi dan Palawija	Jumlah Benih yang Tersedia Setiap tahun	Ton	1214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Benih didukung APBN
3.03.01.03	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian	Luas Areal Penangkaran Benih Unggul Tanaman Pangan	Ha	150	55	20	-	20	-	-	20	100,00	75	50,00		
3.03.01.04	Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan (RDKK) Pupuk Bersubsidi	Jumlah RDKK Pupuk Bersubsidi yang tersusun tepat waktu	Dokumen	6	2	1	-	1	-	-	1	100,00	3	50,00		
3.03.01.08	Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Jumlah pengecer dan distributor pupuk bersubsidi	Orang	52	50	50	-	50	-	50	50	100,00	50	96,15		
3.03.01.09	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Serealia	Luas Areal Pengembangan Tanaman Serealia Melalui Peningkatan Produktivitas	Ha	900	195	50	-	30	20	-	50	100,00	245	27,22		
		a. Padi	Ha	600	140	30	-	30	-	-	30		170	28,33		
		b. Jagung	Ha	300	55	20	-	-	20	-	20		75	25,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
3.03.01.10	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Luas areal pengembangan tanaman aneka kacang dan umbi melalui peningkatan produktivitas	Ha	630	33	21	-	10	9	2	21	100,00	54	8,57		
		a. Kedelai	Ha	300	25	10	-	10	-	-	10					
		b. Kacang Tanah	Ha	90	4	5	-	-	5	-	5					
		c. Kacang Hijau	Ha	180	2	2	-	-	2	-	2					
		d. Ubi Kayu (UB)	Ha	30	2	2	-	-	-	2	2					
		e. Ubi Jalar (UB)	Ha	30	-	2	-	-	2	-	2					
3.03.01.11	Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	Luas areal pengembangan padi ladang	Ha	250	20	25	-	-	-	-	-	-	20	8,00		Tidak Terealisasi
3.03.01.12	Penanganan Pasca Panen	Jumlah Peserta Bimtek Susut Hasil pertanian dan survey susut hasil produksi pertanian	Orang /Kali	250 / 10	50	-	-	-	-	-	-	-	50	20,00		Ditiadakan pada perubahan anggaran
3.03.01.13	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI	Jumlah Peta daerah rawan banjir dan kekeringan, serta Gerakan Pengendalian OPT	Dokumen dan Kali	7	-	1	-	-	1	-	1	100,00	1	14,29		
		Peta daerah rawan banjir dan kekeringan	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-	-		-			
		Gerakan Pengendalian OPT	Kali	6	-	1	-	-	1	-	1		1			
3.03.01.14	Perlindungan Tanaman untuk Peningkatan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Obat-obatan yang diadakan	Paket	18	8	1	-	-	1	-	1	100,00	9	50,00		
3.03.01.15	Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah data potensi tanaman pangan dan holtikultura yang tersusun	Dokumen	12	4	2	-	1	-	1	2	100,00	6	50,00		
3.03.13	**Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura**	**Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura**	**Ton**	**7.845**	**2.616**	**6.960**	**-**	**-**	**-**	**7.418,98**	**7.418,98**	**106,59**	**7.419**	**94,57**		
		a. Bawang Merah	**Ton**	**200**	**142,50**	**180**	**-**	**-**	**-**	**122,10**	**122,10**		**122,10**			
		b. Cabe Merah	**Ton**	**160**	**76,90**	**150**	**-**	**-**	**-**	**239,50**	**239,50**		**239,50**			
		c. Cabe Rawit	**Ton**	**150**	**101,10**	**150**	**-**	**-**	**-**	**339,60**	**339,60**		**339,60**			
		d. Durian	**Ton**	**430**	**75,00**	**430**	**-**	**-**	**-**	**45,60**	**45,60**		**45,60**			
		e. Pisang	**Ton**	**1.600**	**850,30**	**1.500**	**-**	**-**	**-**	**1.375,10**	**1.375,10**		**1.375,10**			
		f. Mangga	**Ton**	**5.250**	**987,62**	**4.500**	**-**	**-**	**-**	**5.079,10**	**5.079,10**		**5.079,10**			
		g. Jahe	**Ton**	**30**	**1,55**	**25**	**-**	**-**	**-**	**23,12**	**23,12**		**23,12**			
		h. Kencur	**Ton**	**25**	**381,23**	**25**	**-**	**-**	**-**	**194,86**	**194,86**		**194,86**			
3.03.13.01	Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran	Luas Areal Pengembangan Tanaman Sayuran Unggulan dan Tanaman Sayuran Lainnya	Ha	175	15,53	95	-	40	-	55	95	100,00	110,53	63,16		
		a. Bawang Merah	Ha	50	3	5	-	-	-	5	5		8			
		b. Cabai Merah	Ha	50	4,53	20	-	20	-	-	20		24,53			
		c. Cabai Rawit	Ha	50	8	70	-	20	-	50	70		78			
		d. Tan. Sayuran Lainya	Ha	25	-	-	-	-	-	-	-		-			
3.03.13.02	Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah	Jumlah Pohon Tanaman Buah Unggulan dan Tanaman Buah Lainnya yang dikembangkan	Pohon	30.000	10.494	3.800	-	-	-	3.800	3.800	100,00	14.294	47,65		
		a. Durian	Pohon	3.500	1.322	1.000	-	-	-	1.000,00	1.000		2.322			
		b. Pisang	Pohon	20.000	2.400	2.800	-	-	-	2.800,00	2.800		5.200			
		c. Mangga	Pohon	3.500	706	-	-	-	-	-	-		706			
		d. Tan. Buah Lainya	Pohon	3.000	6.066	-	-	-	-	-	-		6.066			
3.03.13.03	Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Biofarmaka	Luas Areal Pengembangan Tanaman Biofarmaka	M²	8.000	500	500	-	-	500		500	100,00	1.000	12,50		
		a. Jahe	M²	2.500	500	500	-	-	500		500		1.000			
		b. Kencur	M²	5.000	-	-	-	-	-		-		-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
		c. Tan Biofarmaka Lainnya	M²	500	-	-	-	-	-		-		-			
3.03.13.05	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	Jumlah Bibit Unggul Hortikultura Yang dikembangkan	Kg	20.800	-	1200	-	-	-	1200	1.200	100,00	1.200	5,77		
3.03.13.06	Pengembangan diversifikasi tanaman	Jumlah Komoditi Hortikultura yang diusahakan	Komoditi	20	22	10	-	-	1	9	10	100,00	32	160,00		
3.03.13.07	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Jumlah Komoditi Lahan Pekarangan yang dikembangkan	Komoditi	15	3	9	-	5	-	4	9	100,00	12	80,00		
3.03.13.08	Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	Paket	50	5	3	-	-	2	1	3	100,00	8	16,00		
3.03.13.09	Pengembangan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Jumlah Peserta Pelatihan Pengendalian OPT dan bahan OPT Hortikultura yang Diadakan	Orang/ Paket	130	26	26	-	-	26	-	26	100,00	52	40,00		
3.03.03	**Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/Perkebunan**	**Persentase Peningkatan Luas Areal Tanam Komoditi Tanaman Pangan**	**%**	**52,87**	**35,34**	**45,94**	**-**	**-**	**-**	**38,66**	**38,66**	**84,16**	**38,66**	**73,13**		
3.03.03.01	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Panjang Jaringan Irigasi yang Terbangun / terehabilitasi	Meter	36.053	8.965	439	-	-	-	439	439	100,00	9.404	26,08		
		- JITUT / JIDES														
3.03.03.02	Peningkatan Pengelolaan Lahan	Panjang Jalan Usaha Tani yang Dikembangkan/direhabilitasi	Km	120	48,81	0,99	-	0,5	-	0,49	0,99	100,00	49,80	41,50		
3.03.03.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Tersedia	Unit	361	30	5	-	-	5	-	5	100,00	35	9,70		Penyediaan Alsintan Didukung dari Dana APBN, sehingga realisasi melalui APBD Kabupate
		a. Hand Traktor	Unit	112	3											
		b. Traktor Roda 4	Unit	22												
		c. Cultivator	Unit	30		5			5							
		d. Power Tresher	Unit	45												
		e. Mesin Pompa Air	Unit	38	16											
		f. Transplanter	Unit	15												
		g. Combine Harvester	Unit	10												
		h. Pemipil Jagung	Unit	29	1											
		i. Mesin Pemotong Rumput	Unit	20												
		j. Alsintan Lainnya	Unit	40	10											
3.03.03.05	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Peserta Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna	Orang	320	220	50	-	-	-	100	100	200,00	320	100,00		
3.03.03.06	Pengelolaan Sumber - Sumber Air Untuk Pertanian	Jumlah Sumber - Sumber Air Untuk Irigasi yang Dibangun / Direhab	Unit	167	87	27	-	6	14	7	27	100,00	114	68,26		
		- Embung	Unit	23	9	9	-	2	5	2	9		18			
		- Dam Parit	Unit	21	16	7	-	1	4	2	7		23			
		- Sumur Tanah Dangkal	Unit	82	56	11	-	3	5	3	11		67			
		- Sumur Tanah Dalam	Unit	5	4	-	-	-	-	-	-		4			
		- Irigasi Air Permukaan	Unit	23	2	-	-	-	-	-	-		2			
		- Prasarana Lainnya (Long Storage)	Unit	13	-	-	-	-	-	-	-		-			
3.03.03.09	Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan P3A / GP3A	Jumlah Kelembagaan P3A dan GP3A yang dibina	Kelompok	122	-	10	-	-	-	10	10	100,00	10	8,20		
3.03.03.10	Pengembangan Jalan Produksi	Tersedianya Prasarana Pertanian Berupa Jalan Produksi	Km	112	19,27	4,13	-	0,5	-	3,93	4,43	107,26	23,70	21,16		
3.03.06	**Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan**	**Peningkatan Produksi Komoditi Perkebunan**	**Ton**	**28.452**	**14.105,61**	**24.431**	**-**	**-**	**-**	**11.452,91**	**11.452,91**	**46,88**	**11.452,91**	**40,25**		
		a. Kakao	**Ton**	**16.345**	**10.015,79**	**13.845**	**-**	**-**	**-**	**7.472,05**	**7.472,05**		**7.472,05**			
		b. Tembakau	**Ton**	**107**	**99,50**	**86,35**	**-**	**-**	**-**	**101,75**	**101,75**		**101,75**			
		c. Tanaman Perkebunan Lainnya	**Ton**	**12.000**	**3.990,32**	**10.500**	**-**	**-**	**-**	**3.879,11**	**3.879,11**		**3.879,11**			
3.03.06.02	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Jumlah Bibit Sambung Pucuk Kakao	Pohon	592.500	309.000	30.000	-	-	30.000	-	30.000	100,00	339.000	57,22		
3.03.06.03	Pengembangan Tnaman Alternatif Perkebunan	Jumlah Bibit Lada dan Pala	Pohon	70.000	30.300	1.000	-	-	-	1000	1.000	100,00	31.300	44,71		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
3.03.06.04	Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pada Kelompok Tani Pembudidaya Tanaman Tembakau	Kelompok	47	22	9	1	-	8	-	9	100,00	31	65,96		
3.03.06.06	Pengadaan Sarana Produksi	Tersedianya Sarana Produksi	Ha	750	20	20	-	-	-	20	20	100,00	40	5,33		
3.03.06.07	Pelatihan Petani SL-PHT	Meningkatnya Wawasan Petani dalam Pengendalian Hama Terpadu	Kelompok	25	2	2	-	-	2	-	2	100,00	4	16,00		
3.03.06.09	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Berkelanjutan	Tersedianya CP/CL Kegiatan APBN & Kajian Upaya Peningkatan Produksi	Dokumen	180	30	2	1	-	-	1	2	100,00	32	17,78		
3.03.08	**Program Pengembangan Sutera Alam**	**Produksi Kokon**	**Kg**	**17.721**	**5.973,08**	**10.021**	**-**	**-**	**-**	**9.372,01**	**9.372,01**	**93,52**	**9.372,01**	**52,89**		
3.03.08.01	Pengembangan Sutera Alam	Areal Pengembangan Sutera Alam dan Pengadaan Telur Sutera	Ha dan Box	2100	378	520	-	-	500	-	500	96,15	878	41,81		
		Luas Areal Pengembangan	Ha	100	78	20	-	-	-	-	-		78			
		Jumlah Telur Sutera yang Diadakan	Box	2000	300	500	-	-	500	-	500		800			
3.03.08.02	Pelatihan Petani Sutera Alam	Jumlah Kelompok Tani yang Diberikan Pelatihan Pengembangan Sutera Alam	Kelompok	20	6	1	-	-	1	-	1	100,00	7	35,00		
3.03.02	**Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan**	**Peningkatan Jumlah Populasi Ternak**	**Ekor**	**2.467.500**	**2.316.455**	**2.122.000**	**-**	**-**	**-**	**3.890.780**	**3.890.780**	**183,35**	**3.890.780**	**157,68**		
		a. Sapi	**Ekor**	**65.000**	**49.120**	**52.000**	**-**	**-**	**-**	**52.027**						
		b. Kambing	**Ekor**	**37.500**	**27.870**	**30.000**	**-**	**-**	**-**	**30.938**						
		c. Unggas	**Ekor**	**2.365.000**	**2.239.465**	**2.040.000**	**-**	**-**	**-**	**3.807.815**						
3.03.02.01	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Jumlah Sarana dan Prasarana IB dan Jumlah Bibit Ternak yang Diadakan	Dosis	16.530	2.429	750	-	200	240	859	1.299	173,20	3.728	22,55		
		- IB Sapi	Dosis	7.200	1.179	750	-	200	240	859	1.299		2.478			
		- Bibit kambing	Ekor	780	50	-	-	-	-	-	-		50			
		- Bibit Sapi	Ekor	150	20	-	-	-	-	-	-		20			
		- Unggas	Ekor	8.400	1.180	-	-	-	-	-	-		1.180			
3.03.02.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Bergulir	Jumlah Laporan yang Disusun	Laporan	6	2	1	-	-	1	-	1	100,00	3	50,00		
3.03.11	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan**	**Peningkatan Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna**	**Kelompok**	**18**	**6**	**3**	**-**	**-**	**-**	**5**	**5**	**166,67**	**11**	**61,11**		
3.03.11.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Tepat Guna	Jumlah sarana dan Prasarana Peternakan yang Diadakan	Unit	40	5	6	-	-	-	6	6	100,00	11	27,50		
3.03.11.02	Pelatihan dan Bimbingan Pengoprasian Teknologi PeternakanTepat Guna	Pelatihan Pasca Panen, Pembuatan Pakan dan Sosialisasi IB	Kali	72	18	4	-	-	4	-	4	100,00	22	30,56		
		- Pelatihan Pasca Panen	Kali	12	-	-	-	-	-	-						
		- Pembuatan Pakan	Kali	12	9	2	-	-	2	-						
		- Sosialisasi IB	Kali	48	9	2	-	-	2	-						
3.03.12	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian**	**Persentase Peningkatan Luas Areal Pertanian**	**%**	**2,30**	**1,42**	**2,30**	**-**	-	**-**		**-**	**-**	**1,42**	**61,74**		
3.03.12.01	Pengembangan Pertanian Organik	Luas Areal Pengembangan Usaha Tani Organik	Ha	150	15	18	-	18	-	-	18	100,00	33	22,00		
3.03.12.04	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian (TP)	Jumlah Luas areal Tanam yang Bertambah	Ha	900	400	100	-	-	-	100	100	100,00	400	44,44		2018 Baru Berupa Hasil SID
		* Cetak Sawah Baru	Ha	250	400	100										APBN
		* Optimasi Lahan	Ha	250	-	-										
		* Pengembangan Sistem Pengelolaan Lahan (SRI, dll)	Ha	400	-	-										
3.03.09	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**	**Persentase Jenis Kasus Penyakit Ternak**	**%**	**0,00**	**27,27**	**30,00**	**-**	**-**	-	**27,27**	**27,27**	**109,10**	**54,54**	**45,46**		
3.03.09.01	Pendataan Masalah Peternakan	Jumlah Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah Sapi dan Jumlah Populasi Ternak	Sampel	2400	400	70	-		70	-	70	100,00	470	19,58		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
3.03.09.02	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Manular Ternak	Jumlah Vaksin dan Pengobatan Ternak	Ekor / Dosis	48.000	15.000	10.000	-	2.000	4.000	4762	10.762	107,62	25.762	53,67		
3.03.09.05	Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan	Jumlah Pemeriksaan Sampel Daging dan Uji Sampel Produk Peternakan	Sampel	390	90	60	-	-	60		60	100,00	150	38,46		
3.03.14	**Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh**	**Persentase Efektifitas Penyelenggaran Penyuluh**	**%**	**96**	**100**	**93**	**-**	**-**	**-**	**100**	**100**	**107,53**	**200,00**	**208,33**		
3.03.14.01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas	Orang	120	120	150	-	120	-	30	150	100,00	150	125,00		
3.03.14.02	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh yang Meningkat Kesejahteraannya	Orang	120	32	32	-	-	-	31	31	96,88	63	52,50		
3.03.14.03	Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian Perkebunan	Penyusunan Program Penyuluhan dan Rencana Kerja	Dokumen	894	158	79	-	-	70	9	79	100,00	237	26,51		
3.03.14.04	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluhan	Jumlaha Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang Diadakan	Jenis	76	26	19	-	5	5	8	18	94,74	44	57,89		
3.03.14.05	Penyuluhan Desiminasi Teknologi Pertanian/Perkebunan Spesifikasi Lokasi	Frekuensi Penyuluhan Informasi Teknologi Spesifikasi Lokasi yang Telah Direkomendasikan	Kali	48	16	8	-	-	-	8	8	100,00	24	50,00		
3.03.14.07	Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK	Frekuensi Pendampingan dan Pengawalan Peningkatan Produksi	Kali	894	149	70	70	-	-	-	70	100,00	219	24,50		
3.03.14.09	Penyuluhan dan Pendampingan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	Frekuensi Penyuluhan Teknologi Peternakan yang Dilaksanakan	Kali	104	40	8	-	8	-	-	8	100,00	48	46,15		
3.03.14.16	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program	Jumlah Daerah Irigasi yang Terbina Melalui IPDMIP	Daerah Irigasi	5	-	5	-	-	-	5	5	100,00	5	100,00		
3.03.05	**Program Penguatan Kelembagaan Pelaku Utama**	**Lembaga Petani yang Mandiri**	**%**	**50**	**22**	**35**	**-**	**-**	**-**	**36**	**36**	**102,86**	**58**	**116,00**		
3.03.05.01	Pendidikan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Petani yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2360	500	400	-	-	400	-	400	100,00	900	38,14		
3.03.05.02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Pendampingan Kemitraan Usaha Gapoktan Dalam Beragribisnis	Orang	70	70	70	-	-	70	-	70	100,00	140	200,00		
3.03.05.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan KTNA	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama yang Dibina	Poktan	810	775	70	70	-	-	-	70	100,00	845	104,32		
3.03.04	**Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian**	**Jumlah Jenis Komoditi yang diolah dan dipasarkan**	**Komoditi**	**6**	**4**	**5**	**-**	**-**	**-**	**5**	**5**	**100,00**	**5**	**83,33**		
3.03.04.01	Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Jenis Usaha Pengolahan hasil Pertanian	Jenis	18	7	3	-	1	-	2	3	100,00	10	55,56		
3.03.04.02	Pengembangan Teknologi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Alat Mesin Pengolahan Hasil Pertanian yang Dikembangkan/ Diadakan	Unit	15	4	26	-	-	-	25	25	96,15	29	193,33		
3.03.04.03	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	Jumlah Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pameran Promosi Tingkat Kab. Prov. Dan Nasional	Kali	30	9	5	2	1	2	-	5	100,00	14	46,67		
3.03.04.11	Penyuluhan dan bimbingan Pengelolaan Sumber Daya Petani Melalui Bantuan Pemerintah	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumber Daya Petani Melalui Bantuan Pemerintah	Orang	135	130	50	50	-	-	-	50	100,00	180	133,33		
3.03.04.12	Pelatihan dan Bimbingan Kewirausahaan bagi Kelompok Tani	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	Orang	120	210	20	-	20	-	0	20	100,00	230	191,67		
3.03.07	**Program Peningkatan Pasca panen, Pemasaran dan Promosi Hasil Perkebunan**	**Tersedianya Alat Pasca Panen**	**Unit**	**353**	**215**	**278**	**-**	**-**	**-**	**224**	**224**	**80,58**	**224**	**63,46**		
3.03.07.04	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Tani	Kelompok	10	2	2	-	2	-		2	100,00	4	40,00		
3.03.07.05	Penyedia Sarana dan Prasarana Perkebunan	Unit Pengolahan dan Alat Transportasi	Unit	29	1	3	-	-	-	3	3	100,00	4	13,79		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9)											100,50				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 9)						S. Tinggi				
2.12.2.12.01.01	**Program Pelayanan Perkantoran**	**Prosentase Penyelesaian kegiatan tepat waktu**	**12 bulan**	**12**	**12 bln**	**100%**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**24**	**2**	DPMPTSP	
2.12.2.12.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 kali	12	12	12	3		3		3	36	15	1,25		
2.12.2.12.01.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas operasional	4 unit roda dua, 1 unit roda empat	7	7	1 unit roda empat, 6 unit roda dua	0		1		4	0	11	1		
2.12.2.12.01.01.05	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	5 alat pembersih, 15 bahan pembersih dan 2 orang petugas pembersih	12	12	3 jenis alat pembersih, 3 jenis bahan pembersih, 3 orang petugas pembersih	3	3	3		12	#VALUE!	24	1,25		
2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	3 buah/unit	3	3	1 paket alat listrik	1				0	0	3	1		
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 terbitan	12	12	14 media bahan bacaan, 1 paket jasa publikasi	0		1		12	0	24	1		
2.12.2.12.01.01.09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian gas	3 isi tabung	3	3	12 kali	0	1			3	0	6	2		
2.12.2.12.01.01.10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	376 kali	12	12	400 kali	20	94	189		12	#VALUE!	24	1,25		
2.12.2.12.01.01.11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	1 paket	1	1	17 paket	4	1	5		1	0	2	2		
													0			
2.12.2.12.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana perkantoran**	**12 bulan**	**12 bln**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**144**	**15**	**1**		
2.12.2.12.01.02.07	Pengadaaan Kendaraan dinas	Juml;ah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	12		1				1	1	100	100	1		
2.12.2.12.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 paket	3	3	4 jenis	0			3	3	75	6	1,3		
2.12.2.12.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 unit roda dua, 1 unit roda empat	6	6	4 unit roda dua, 1 unit roda empat	1	1	1		4	#VALUE!	10	1,6		
2.12.2.12.01.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	4	4	1 paket	0				1	#VALUE!	5	1,25		
2.12.2.12.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi	Jumlah peralatan aplikasi yang terpelihara	2 jenis	1	1	12 bulan	0	3	3		12	0	13	1		
													0			
2.12.2.12.01.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**	**Prosentase PNS berkinerja baik**	**12 bulan**	**12**	**12**	**12 bln**	**3**	**12**	**12**	**12**	**3**	**100**	**15**	**1**		
2.12.2.12.01.03.09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Persentase pegawai yang mengikuti bimtek	10 %	12	12	21 orang	3			4	12	100	24	1		
													0			
2.12.2.12.01.04	**Program Peningkatan Pengembangan sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase penyusunan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**12 bulan**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**100**	**24**	**2,00**		
2.12.2.12.01.04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	1 dokumen	6	12	6 dokumen	0				6	100	12	2,00		
2.12.2.12.01.04.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1	1	2 dokumen	0		1		1		2	2,00		
													0			
2.12.2.12.01.01	**Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi**	**Meningkatnya Iklim dan Promosi Investasi**	**12 bulan**	**12**	**12**	**12**	**0**	**12**	**12**	**12**	**12**	**144**	**24**	**1**		
2.12.2.12.01.01.02	Penyelenggaraan pameran investasi	Terciptanya Promosi Produk Unggulan Daerah	Dalam dan luar daerah	4	4	4 kali kegiatan	1	6	6	1	2	0	6	1		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
2.12.2.12.01.01.03	Fasilitasi pembuatan peta potensi investasi daerah	Tersusunnya data Potensi Daerah	Watansoppeng	1	1	1 peta potensi	0				1	#VALUE!	2	2		
4.04.2.12.01.26	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**	**Persentase kepuasan publik terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan**	**12 bulan**	**12**	**12**	**100%**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**24**	**2,000**		
4.04.2.12.01.26.01	Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pelayanan publik	Jumlah dokumen regulasi	1 dokumen	1	1	5 dokumen	0		4		1	100	2	2		
4.04.2.12.01.26.03	Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti	2500 rekomendasi			2500 dokumen	0	500	1.000							
4.04.2.12.01.26.04	Penyusunan dan pengolohan data dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan	Jumlah dokumen perizinan non perizinan dan penanaman modal	2500 sertifikat izin	12	12	2000 sertifikat izin	300	500	1.100	2.457	12	#VALUE!	24	1		
4.04.2.12.01.26.05	Survey kepuasan masyarakat	Hasil survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	1	1	1 dokumen	0				1	0	2	1		
4.04.2.12.01.26.10	Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	5 dokumen	5	5	5 dokumen	0			5	5	0	10	0		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															
												380,00				
												Baik				
05.01.01	**Program Peningkatan dan Kesiagaan Serta Pencegahan Bahaya Kebakaran**	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)										**100,00**	**139,67**		POL PP & PMK	
05.01.01.02	Kegiatan Penyuluhan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah lokasi penyuluhan	Kec	8	8	8	0	0	-	8	8	100,00	16	200,00		
05.01.01.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	Jenis	51	39	16	2	7	1	6	16	100,00	55	107,84		
05.01.01.04	Kegiatan Pencegahan dan Pegendalian Bahaya Kebakaran	Jumlah tenaga pemadam kebakaran	Orang	174	174	174	43	44	44	43	174	100,00	348	200,00		
05.01.02	**Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban**	Persentase Penegakan Perda										**100,00**	**370,50**			
05.01.02.01	Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Petugas Jaga	Orang	1214	611	274	67	67	67	73	274	100,00	885	72,90		
05.01.02.02	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Pengamanan dan Patroli yang dilaksanakan 1x24 Jam	Kali	6	2	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00	3	50,00		
05.01.02.04	Penegakan dan Pengawasan PERDA	Jumlah Penegakan dan Pengawasan PERDA	Kali	396	128	60	12	9	30	9	60	100,00	188	47,47		
05.01.02.05	Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota Linmas yang terbina	Orang	2030	0	406	0	0	406	0	406	100,00	406	20,00		
05.01.01	**Program Pelayanan Perkantoran**	Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu										**102,03**	**214,38**			
05.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kali	72	24	12	3	3	3	3	12	100,00	36	50,00	**Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**	
05.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional dan Premi Asuransi Kendaraan Dinas	unit	84	30	27	0	7	18	3	28	103,70	58	69,05		
05.01.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	Jenis	120	29	9	0	3	3	3	9	100,00	38	31,67		
05.01.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	120	20	15	0	5	5	5	15	100,00	35	29,17		
05.01.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbitan	114	38	12	3	3	3	3	12	100,00	50	43,86		
05.01.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian tabung gas	Kali	72	86	72	12	18	18	25	73	101,39	159	220,83		
05.01.01.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	720	782	450	133	14	49	304	500	111,11	1.282	178,06		
05.01.01.11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Paket	114	38	19	5	5	4	5	19	100,00	57	50,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
05.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi baik										**100,00**	**51,33**			
05.01.02.09	Pengadaan Peralatan gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gegung Kantor yang diadakan	Jenis	66	48	26	0	0	0	26	26	100,00	74	112,12		
05.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	unit	84	40	28	7	6	6	9	28	100,00	68	80,95		
05.01.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	24	8	4	0	1	1	2	4	100,00	12	50,00		
05.01.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**	Persentase ASN Berkinerja Baik										**140,00**	**407,00**			
05.01.03.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	Steel	1641	426	324	0	0	-	324	324	100,00	750	45,70		
05.01.03.09	Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	57	37	15	4	4	3	16	27	180,00	64	112,28		
05.01.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj dan Keuangan Tepat Waktu										**100,00**	**33,00**			
05.01.04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	162	27	6	3	1	1	1	6	100,00	33	20,37		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)											105,34		84,81		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)											S. Tinggi		Tinggi		
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN		**PRESENTASE PENYELESAIAN KEGIATAN TEPAT WAKTU**	%	**100**		**100**	**-**	**26**	**17**	**34**	**97**	**97,27**	**97,27**	**97,27**		
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kali	60	48	48	12	12	12	12	48	100	96	160,00		
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	12	1	2	-	-	-	2	2	100	3	25,00		
05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	Orang Jenis	3 23	2 10	2 10	-	- 2	- 5	2 3	2 10	100	4	133,33		
06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	Jenis	10	6	8	-	-	5	3	8	100	14	140,00		
08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terbitan	20	12	14	-	-	10	2	12	85,71	24	120,00		
09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kali	12	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24	200,00		
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan lainnya	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kali	600	600	600	25	50	50	100	225	37,50	825	137,50		
11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	Paket	10	5	5	1	2	1	1	5	100,00	10	100,00		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran**	%	**100**	**3**	**100**	**3**	**14**	**25**	**55**	96	**96,12**	**99**	**98,79**		
09	Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor	Unit	100	2	4	-	-	-	4	4	100,00	6	6,00		
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraaan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	100	2	2	0,5	0,5	0,5	0,5	2	100,00	4	4,00		
28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	100	4	4	-	-	2	2	4	100,00	8	8,00		
Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur		**Presentase ASN Berkinerja Baik**	%	**100**	**100**	**100**	**-**	**7**	**4**	**79**	91	91,17	**191**	**191,17**		
09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan/ Keterampilan ASN serta jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	ASN	100	25	20	-	7	4	8	20	98,70	45	44,74		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
Program Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		**Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu**	%	**100**	**-**	**100**	**-**	**-**	**-**	**97**	97	97,38	**97**	**97,38**		
01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang dibuat	Dokumen	7	-	7	-			7	7					
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan yang dibuat	Dokumen	3	-	3	-			3	3					
Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya		**CAKUPAN KERAGAMAN dan KEKAYAAN BUDAYA YANG DILESTARIK-AN dan DIKEMBANGKAN**		**26,87**		**22,39**	**-**	**57**	**15**	**5**	78	**346,40**	**78**	**288,65**		
01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Pelestarian/Aktualisasi Budaya Daerah	Kegiatan	15	9	8	-	-	3	5	8	100,00	17	113,33		
02	Pengelolaaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Paket	7	1	1	-	0,30	0,2	0,5	1	100,00	2	28,57		
03	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat dan Event Kesenian	Pesta Rakyat	2	2	2	2	-	-	-	2	23,56	4,36	217,80		
			Event Kesenian	8	13	8	-	3	2	3	8					
06	Pelaksanaan Festival Budaya Daerah	Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah	Paket	3	1	2	-	2	-		2	100,00	3,00	100,00		
Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata		**Jumlah Wisatawan**	Orang	248200	224018	**100**		**21**	**28**	**13**	61,19	**61,19**	**0**	**0**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWIS	
01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah Event Promosi	Paket	4	2	2	1	-	-	1	2,00	100,00	4,00	100		
02	Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah Duta Wisata yang Terlatih	Orang	20	20	20	20	-	-	-	20,00	100,00	40,00	200		
03	Pengembangan Zona Kreatif bagi Insan Kreatif	Jumlah Lokasi Zona Kreatif	Lokasi	3	2	2	-	2	-	-	2	100,00	4,00	133		
04	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara	Objek	6	5	5	1	3	-	1	5	100,00	10,00	167		
06	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan	Objek	4	1	2	-	-	1	1	2	100,00	3,00	75		
07	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata	Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dievaluasi	Objek	3	3	3	-	-	2	1	3	100,00	6,00	200		
08	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata [DAK]	Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan	Objek	3	2	2	-	-	1,0	1	2	100,0	4,00	0		
				100	**-**	**84**	**0,54**				**84,66**	**138,98**	**92,96**	**92,95802787**		
												98,61		92,96		
												Tinggi		Tinggi		
1.03.1.03.01.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu**														
1.03.1.03.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan Listrik dan Telepon	Kali	72	24	12		3	3	6	12,00	100,00	36	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan/ pengesahan Jasa KIR,STNK, dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasi-onal	Unit	366	109	53		13	11	29	53,00	100,00	162	44,26	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Gedung, Halaman, Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibersihkan	Tahun	6	2	1		0	0	1	1,00	100,00	3	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	36	3	3			2	1	3,00	100,00	6	16,67	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01.07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan yang diadakan	Jenis	42	0	7				7	7,00	100,00	7	16,67	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah majalah/surat kabar/buku yang tersedia	Terbitan	140	32	20			15	-	15,00	75,00	47	33,57	Dinas PUPR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
1.03.1.03.01.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian tabung gas dan Mesin Pemotong Rumput	Kali	138	12	23				23	23,00	100,00	35	25,36	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah yang terlaksana	Kali	21000	8000	4000	10	875	1870	1245	4.000	100,00	12000	57,14	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket/bidang dilayani kebutuhan administrasinya	Bidang	42	14	7		2	2	3	7,00	100,00	21	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran**														
1.03.1.03.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang diadakan	Unit	24	6	4				4	4,00	100,00	10	41,67	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Unit	432	136	72				72	72,00	100,00	208	48,15	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.02.13	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Bangunan dan halaman kantor yang dipelihara	M^2	12600	4200	2300				2300	2.300	100,00	6500	51,59	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	180	67	54		13	13	28	54,00	100,00	121	67,22	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.02.17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	24	9	8			3	5	8,00	100,00	17	70,83	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARATUR**	**Persentase ASN berkinerja baik**														
1.03.1.03.01.03.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah aparatur mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan	Orang	96	30	32		7	9	16,00	32,00	100,00	62	64,58	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.04	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu**														
1.03.1.03.01.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, Laporan Triwulan, LAKIP, Bahan LPPD/ILPPD dan LKPJ	Dok	48	16	8				8,00	8,00	100,00	24	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.04.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dok	6	2	1				1,00	1,00	100,00	3	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.04.05	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen revisi SOP	Dok	6	2	1				1,00	1,00	100,00	3	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01	**PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN JALAN**	**Terbangunnya Persentase proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap (baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganannya**														
1.03.1.03.01.01.01	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	km	758		12				12,00	12,00	100,00	12	1,58	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01.03	Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	km	234		39	0	0,0	0	39,00	39,00	100,00		16,67	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01.04	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan/direhab melalui DAK	km	492		57,15		45,0	5,0	7,15	57,15	100,00		11,62	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.01.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan/direhab secara rutin	km	158,09		30,85			15	15,85	30,85	100,00		19,51	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.02	**PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN JEMBATAN**	**Persentase jembatan dalam kondisi mantap**														
1.03.1.03.01.02.01	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	Unit	35		9				8,00	8,00	88,89	8	22,86	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.02.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhab	Unit	18	3	4			2	2,00	4,00	100,00	7	38,89	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA**	**Terlaksananya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya (Luas areal sawah yang terairi)**														
1.03.1.03.01.03.01	Pembangunan Pintu Air	Jumlah Pintu air yang di buat	Unit	42	1	1				1,00	1,00	100,00	2	4,76	Dinas PUPR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
1.03.1.03.01.03.02	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Jumlah bendung dan panjang saluran yang direhab	M	30997	10332	7325			5000	2325	7.325	100,00	17657	56,96	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.03.03	Pembangunan Jaringan Irigasi	Jumlah bendung dan panjang saluran yang dibangun	M	45906	15302	3581			0	3581	3.581	100,00	18883	41,13	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.03.06	Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif	Jumlah DI yang direhabilitasi secara partisipatif	DI	30	10	5				5,00	5	100,00	15	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.03.07	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi	Jumlah Peralatan Penunjang OP yang diadakan	Tahun	6	2	1				-	-	0,00	2	33,33	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.03.08	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan	Jumlah petugas OP	Tahun	6	2	1				1,00	1,00	100,00	3	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.03.10	Penyusunan sistem informasi database irigasi	Jumlah DI yang di database	D.I (Daerah Irigasi)	121	30	22				-	-	0,00	30	24,79	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.04	**PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH**	**Persentase RT dengan akses air bersih**														
1.03.1.03.01.04.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Jumlah SAB yang terbangun/direhab	Paket	51	3	3				3,00	3,00	100,00	6	11,76	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.04.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)	Jumlah SAB yang terbangun/direhab (DAK)	Paket	12	6	2				2,00	2,00	100,00	8	66,67	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN DAN AIR LIMBAH**	**Persentase RT dengan akses sanitasi yang layak**														
1.03.1.03.01.05.01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	Paket	909	635	19			0	19,00	19,00	100,00	654	71,95	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.05.02	Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Jumlah dokumen sanitasi yang disusun	Dokumen	6	2	1				1,00	1,00	100,00	3	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.05.03	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun/direhab	Paket	30	4	5				5,00	5,00	100,00		30,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.05.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Penugasan)	Jumlah sarana dan prasarana air limbah yang terbangun	Paket	96	0	16				16,00	16,00	100,00	16	16,67	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.06	**PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DAN GORONG-GORONG**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**														
1.03.1.03.01.06.01	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Saluran Drainase yang terbangun	Meter	25686	4281	6858				6.858	6.858	100,00	11139	43,37	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.07	**PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**	**Persentase Ketaatan terhadap RTRW**														
1.03.1.03.01.07.05	Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terlaksananya kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tahun	6	2	1				1,00	1,00	100,00	3	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.09	**PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG**	**Persentase rencana tata ruang yang di-perda-kan**														
1.03.1.03.01.09.01	Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah PERDA Revisi RTRW Kab. Soppeng	Perda	6	1	1				1,00	1,00	100,00	2	33,33	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.09.02	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Rancangan Perda RDTR dan RTRK yang disusun	Dokumen	6	2	1				1,00	1,00	100,00	3	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.09.03	Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang	Jumlah Perda RDTR dan RTRK yang difasilitasi	Perda	6	1	1				1,00	1,00	100,00	2	33,33	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.09.05	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis RDTR	Dokumen	5	1	1				1,00	1,00	100,00	2	40,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.09.08	Penyusunan Data Base Tata Ruang	Tersusunnya Dok database pemanfaatan tata ruang	Dokumen	8	1	2				2,00	2,00	100,00	3	37,50	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.10	**PROGRAM PEMELIHARAAN BANTARAN, TANGGUL DAN NORMALISASI SUNGAI**	**Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun**														
1.03.1.03.01.10.01	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Panjang tebing sungai yang diperkuat	M	23913	3985	1200				1.200	1.200	100,00	5185	21,68	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.10.02	Pengerukan/Normalisasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	KM	30	5,6	14,8				14,8	14,80	100,00	20,4	68,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.10.03	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang dibangun	M	18112	1500	3500				3500	3.500	100,00	5000	27,61	Dinas PUPR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
1.03.1.03.01.10.04	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Sungai	Dokumen Data Base yang disusun	Dokumen	5	-	1				-	-	0,00	0	0,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.11	**PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN EMBUNG/CEKDAM**	**Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan dan pembangunan embung/cekdam**														
1.03.1.03.01.11.01	Pembangunan dan Pemeliharaan Embung/Cekdam	Jumlah Embung yang direhab	Unit	13	1	1				1,00	1,00	100,00	2	15,38	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.12	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN**	**Persentase jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik**														
1.03.1.03.01.12.02	Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat Laboratorium yang diadakan	Paket	8	-	4				4,00	4,00	100,00	4	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.12.03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Jumlah Alat berat yang diperbaiki	Unit	70	32	8				8,00	8,00	100,00	40	57,14	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.12.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah Alat Laboratorium yang perbaiki	Unit	6	-	1				5,00	5,00	500,00	5	83,33	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.13	**PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN**	**Persentase Cakupan Jalan dan Jembatan yang diinspeksi**														
1.03.1.03.01.13.01	Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Database Jalan dan Jembatan	Dokumen	6	-	1				1,00	1,00	100,00	1	16,67	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.14	**PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase jumlah rekomendasi IJK**														
1.03.1.03.01.14.01	Penerbitan Rekomendasi IUJK	Jumlah rekomendasi IUJK yang diterbitkan	Rekomendasi	480	60	35				35,00	35,00	100,00	95	19,79	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.14.02	Pembinaan Jasa Konstruksi	Terlaksananya pembinaan jasa konstruksi	Tahun	6	2	1				1,00	1,00	100,00	3	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.15	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**	**Persentase kondisi bangunan pemerintah dalam kondisi baik, terpenuhinya penataan bangunan dan lingkungan dan luas kawasan pemukiman yang dikembangkan infrastrukturnya**														
1.03.1.03.01.15.01	Pembangunan Gedung/Rumah Dinas/Rumah Jabatan	Jumlah Gedung/Rumah Dinas/Rumah Jabatan yang dibangun	Unit	32	9	7				7,00	7,00	100,00	16	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.15.02	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Rumah Dinas/Rumah Jabatan	Jumlah Gedung/Rumah Dinas/Rumah Jabatan yang direhab	Unit	90	14	15				15,00	15,00	100,00	29	32,22	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.15.03	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	6	-	1				-	-	0,00	0	0,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.15.04	Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung	Jumlah prasarana gedung yang dibangun	Paket	90	15	15				15,00	15,00	100,00	30	33,33	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun/direhab	Ruas	126	12	37				37,00	37,00	100,00	49	38,89	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.15.06	Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan	Jumlah dokumen RPI2JM yang disusun	Dokumen	6	2	1				1,00	1,00	100,00	3	50,00	Dinas PUPR	
1.03.1.03.01.15.07	Perizinan dan Pengawasan Bangunan	Jumlah rekomendasi IMB yang diterbitkan	Rekomendasi	1.200	400	200				200	200,00	100,00	600	50,00	Dinas PUPR	
												99,42		**38,85**		
												Tinggi		**Sedang**		
1.06.1.06.01.01	**PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN**	**Prosentase Tingkat kepuasan Layanan ASN**														
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telepon dan Listrik	Bulan	12	12	12	9,26	12	23	-	44,64	372,03	56,64	472,03	Dinas Sosial	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
1.06.1.06.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang terpelihara	Unit	138	18	19	0,00	16	-	30	45,69	240,47	63,69	46,15	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	jumlah jenis alat kebersihan dan claning servis	Jenis	60	12	12	0,13	19	33	100	152	1270,60	164,47	0,00	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	21	12	12	0,00	0	-	100	100	833,33	111,94	533,05	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jenis	65	0	6	0,00	0	100	100	200,00	3333,33	200,00	307,69	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan surat kabar	Exp	90	15	6	0,00	25	30	93	147,83	2463,91	162,83	180,93	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Kali	57	0	12	0,00	25	25	99	149	1243,69	149,24	261,83	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi dalam dan luar daerah yang terlaksana	Kali	1650	10	12	0,14	27	20	99	146,25	1218,77	155,78	9,44	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis paket pelayanan administrasi perkantoran	Jenis	48	11	12	0,16	11	32	97	141,27	1177,23	152,50	317,72	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik**														
1.06.1.06.01.02.15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Jenis	71	4	6	0,00	0	-	96	96,03156727	1.600,53	100,03	140,89	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Unit	138	1	22	0,10	20	29	100	149,34	678,83	150,10	108,77	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	46	15	4	-	0	-	89	89	2.222,22	103,48	224,95	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**% Peningkatan disiplin ASN**														
1.06.1.06.01.03.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian lapangan yang diadakan	pakaian	90	0	90	0,00	0	-	100	100,00	111,11	100,00	-	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah aparatur mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan	Orang	48	9	25	0,05	12	-	94	106,49	425,97	115,27	-	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01	**Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial**	**Persentase (jumlah) KK Miskin yang terlayani**													Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.01	Pencetakan Kartu Macca, Pendataan, Monitoring dan Evaluasi	Persentase KK Miskin yang mendapatkan pelayanan Kartu Macca	Paket	1	0	16	2	44	33	100	178,90	1.118,10	179	17.889,62	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.03	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemebrdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Petugas yang mendapatkan Penguatan kapasitas dan melakukan pendampingan sosial (PKH dan UPPKH)	Orang	255	11	11	-	0	-	98	97,60	887,28	108,43	42,52	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.04	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang dibantu	Orang	1.300	25	100	1,81	4	-	70	75,25	75,25	100,67	7,74	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.07	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah keluarga Veteran yg menerima bantuan	Orang	348	25	36	2,49	35	34	100	171,02	475,07	196,44	56,45	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.08	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahtraan Sosial Masyarakat	Jumlah anak panti Asuhan, Panti Cacat dan resiko sosial yang mendapat bantuan	Paket	1	25	36	0,03	44	6	100	149,95	416,53	175,37	17.537,19	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.10	Pendataan dan Pengelolaan Data Bagi Warga Miskin	Jumlah warga miskin yang terdata	%	100	0	100	0,00	43	4	99	146,26	146,26	146,26	146,26	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.01.11	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah warga miskin yang mendapatkan layanan rujukan terpadu	%	100	0	100	0	42	21	97	159,90	159,90	159,90	159,90	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.02	**Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin**	**% RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera**													Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.02.01	Pendataan, Pengelolaan data, monitoring dan evaluasi Penerima Raskin	Jumlah RT Miskin yang di data ,di Monitoring , di Evaluasi yang mendapat Raskin	Bulan	12	24	50	-	15	32	87,94	135	269,404	158,31	1.319,26	Dinas Sosial	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
1.06.1.06.01.04	**Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin**	**% Penduduk Miskin yang dilatih dan diberi modal usaha**													Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.04.02	Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani miskin)	Jumlah kelompok Yang Menerima Bantuan	Orang	210	1	1	-	3	97	100	199	19.942,98	200,32	95,39	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.04.03	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah kelompok karang Taruna yang dibina dan dibantu	Orang	230	1	1	-	99	-	99	198,48	19.848	199,48	86,73	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.05	**Program Rehabilitasi Sosial**	**Persentase PMKS yang mendapatkan layanan program kesejahteraan sosial**													Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.05.02	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah lansia yang dibantu	Orang	510	37	48	-	0	-	100	100	208,333	137,46	-	Dinas Sosial	
1.06.1.06.01.05.03	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat disabilitas tubuh, tuna wicara, tuna rungu, tuna netra dan eks trauma (kusta) yang dibantu	Orang	1.245	5	5	0,00	54	36	90	179,68	3.593,665	184,53	-	Dinas Sosial	
												1.311,80		**842,96**		
												TINGGI		**Tinggi**		
2.07.2.07.01.01	**Program Pelayanan Perkantoran**										-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
2.07.2.07.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kali	60	24	12	3	3	3	3	12	100,00	36	60,00	DPMD	
2.07.2.07.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK kendaraan dinas operasional	kali	30	12	6	0	50	25	25	100	1.666,67	112	373,33	DPMD	
2.07.2.07.01.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Luas bangunan/pekarangan yang dibersihkan	M2	250	100	150	12,50	12,5	55	20	100	66,67	200	80,00	DPMD	
2.07.2.07.01.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik	jenis	30	11	3	0	24,35	0	76	100	3.345,00	111	371,17	DPMD	
2.07.2.07.01.01.07	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	15		2	0	2	0	0	2	100,00	2	13,33	DPMD	
2.07.2.07.01.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dn aperaturan perundang-undangan	terbitan	50	20	10	0	0	4	6	10	100,00	30	60	DPMD	
2.07.2.07.01.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian tabung gas	kali	60	24	12	2	2	3	5	12	100,00	36	60,00	DPMD	
2.07.2.07.01.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Serta Kedinasan Lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah	kali	60	24	1556	0	63	500	850	1.413	90,81	1.437	2395	DPMD	
2.07.2.07.01.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	jenis	60	24	16	2	4	3	7	16	100,00	40	66,67	DPMD	
												104,31		3479,50		
												FALSE		FALSE		
2.07.2.07.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**					100					-	-		#DIV/0!		
2.07.2.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional perkantoran	Unit	0	0	2	0	0	0	2	-	-	-	#DIV/0!	DPMD	
2.07.2.07.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	Jenis/buah	30	20	10/27	0	0		10	10	0,02	30	100,00	DPMD	
2.07.2.07.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit	30	12	8	0	2	6	4	12	150,00	24	80,00	DPMD	
2.07.2.07.01.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis/buah	98	28	7/42	0	1	6	0	7	0,05	35	35,71	DPMD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
												82,27		#DIV/0!		
												Tinggi		#DIV/0!		
2.07.2.07.01.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**					100					-	-		#DIV/0!		
2.07.2.07.01.03.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	Orang	100%		11	0	5	3	3	11	100,00	11	1100	DPMD	
												254,40		1100,00		
												FALSE		FALSE		
2.07.2.07.01.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**					100					-	-		#DIV/0!		
2.07.2.07.01.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan RKA,DPA,Renja,Lakip dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	dokumen	25		5	0	1	2	2	5	100,00	5	20	DPMD	
2.07.2.07.01.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran	dokumen	5		1	0	0	0	1	1	100,00	1	20	DPMD	
2.07.2.07.01.04.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	penyusunan laporan keuangan akhir tahun	dokumen	5		1	0	0	0	1	1	100,00	1	20	DPMD	
												99,93		20,00		
												S. Tinggi		S. Rendah		
2.07.2.07.01.01	**Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan**					100					-	-		#DIV/0!		
2.07.2.07.01.01.01	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Jumlah anak SD kurang mampu yang diberikan makanan tambahan	Anak SD yang kurang mampu	1350		300	0	0	300		300	100,00	300	22,22222222	DPMD	
2.07.2.07.01.01.02	Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang	Jumlah baruga sayang yang dibina	Baruga sayang	25		5	0	0	5	0	5	100,00	5	20	DPMD	
2.07.2.07.01.01.03	Fasilitasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah program pokok PKK	Program pokok PKK	350		10	0	3	7	3	13	130,00	13	3,714285714	DPMD	
2.07.2.07.01.01.05	Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pengurus lembaga yang dilatih	orang	350		140	0	0	140	0	140	100,00	140	40	DPMD	
2.07.2.07.01.01.06	Pencanangan/Penutupan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah pelaksanaan bulan bakti masyarakat	kali	5		1	0	0	0	1	1	100,00	1	20	DPMD	
2.07.2.07.01.01.07	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Data dasar mengenai percepatan pembangunan sanitasi pemukiman pada sektor pemberdayaan masyarakat di 70 desa/kel	Dokumen	5		1	0	0	0	1	1	100,00	1	20	DPMD	
2.07.2.07.01.01.0	Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Jumlah lomba desa dan inovasi desa yang dilakukan	kali	5		2	0	0	1	1	2	100,00	2	40	DPMD	
												124,74		27,66		
												FALSE		S. Rendah		
2.07.2.07.01.02	**Program Perencanaan Pembangunan Desa**					100					-	-		#DIV/0!		
2.07.2.07.01.02.02	Fasilitasi Penyusunan RKPDesa dan APBDesa	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan rkpd/apbdesa	Desa	49		49	0	24	15	10	49	100,00	49	100	DPMD	
												33,33		33,33		
												S. Rendah		S. Rendah		
2.07.2.07.01.03	**Pembinaan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**					100					-	-		#DIV/0!		
2.07.2.07.01.03.02	Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2)	Jumlah masyarakat masginal yang dibina	Kelompok	115		108	0	18	0	72	90	83,33	90	78,26086957	DPMD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
2.07.2.07.01.03.05	Bimtek Pengembangan Kewirausahaan Bumdes	Jumlah pengelola bumdes yang dibimtek	orang	30		175	0	175	0	0	175	100,00	175	583,3333333	DPMD	
2.07.2.07.01.03.06	Monev Pengelolaan dan Pengembangan Bumdes	Jumlah bumdes yang terbina	Bumdes	35		49	0	49	26		75	153,06	75	214,2857143	DPMD	
2.07.2.07.01.03.08	Pelaksanaan Gelar TTG Provinsi/Nasional	Jumlah pelaksanaan expo	expo	10		2	0	0	0	2	2	100,00	2	20	DPMD	
												109,1		223,97		
												FALSE		S. Tinggi		
2.07.2.07.01.04	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**					100					-	-		#DIV/0!		
2.07.2.07.01.04.01	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa	Orang	880		588	0	0	0	588	588	100,00	588	66,81818182	DPMD	
2.07.2.07.01.04.03	Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan Dana ADD/DAD	Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	Desa	245		49	12	10	6	21	49	100,00	49	20	DPMD	
2.07.2.07.01.04.04	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi	Desa	42		33	0	0	10	23	33	100,00	33	78,57142857	DPMD	
2.07.2.07.01.04.10	Penyusunan Produk Hukum terkait dengan Desa	Jumlah Produk Hukum ttg desa	Produk hukum	12		1	0	0	0	1	1	100,00	1	8,333333333	DPMD	
												66,67		28,95		
												Sedang		S. Rendah		
												109,34		#DIV/0!		
												FALSE		S. Tinggi		
11.01.01	**Program Pelayanan Perkantoran**															
11.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kali	72	24	12	2	3	3	4	12	100,00	36	50,00	**PPK&UKM**	
11.01.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengesahan STNK kendaraan dinas operasional	unit	89	14	14	1	3	5	5	14	100,00	28	31,46	**PPK&UKM**	
11.01.01.05	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	Orang/jenis	6 dan 60	0	12	1	5	3	3	12	100,00	12	-	**PPK & UKM**	
11.01.01.06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listik/penerangan bangunan	Jenis	54	9	9	0	3	3	3	9	100,00	18	33,33	**PPK & UKM**	
11.01.01.08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbitan	72	12	12	4	4	4	0	12	100,00	24	33,33	**PPK & UKM**	
11.01.01.09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian tabung gas	kali	61	10	10	0	3	4	3	10	100,00	20	32,79	**PPK & UKM**	
11.01.01.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Terlaksananya rapat, koordinasi, konsultasi serta kepentingan kedinasan lainnya baik dlm maupun luar daerah	kali	3160	300	350	75	75	125	75	350	100,00	650	20,57	**PPK & UKM**	
11.01.01.11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Paket	36	6	5	1	2	1	1	5	100,00	11	30,56	**PPK & UKM**	
11.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**				0											
11.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit	21	0	1	0	0	0	1	1	100,00	1	4,76	**PPK & UKM**	
11.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	jenis	47	0	24	0	0	0	24	24	100,00	24	51,06	**PPK & UKM**	
11.01.02.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-		
11.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	121	14	14	0	5	5	4	14	100,00	28	23,14	**PPK & UKM**	
11.01.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	Jenis	40	3	4	0	1	1	2	4	100,00	7	17,50	**PPK & UKM**	
11.01.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**				0											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
11.01.03.09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	PNS	60	0	7	1	2	1	3	7	100,00	7	11,67	**PPK & UKM**	
11.01.04	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**				0											
11.01.04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Dok	43	8	7	2	1	2	2	7	100,00	15	34,88	**PPK & UKM**	
11.01.04.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Dok	36	6	6	1	2	2	1	6	100,00	12	33,33	**PPK & UKM**	
2	**Urusan Wajib**															
2,11	**Koperasi**															
2.11.01	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**															
2.11.01.01	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah Koperasi / Meningkatnya jumlah koperasi sehat berprestasi	koperasi	67	0	202	0	100	66	36	202	100,00	202	301,49	**PPK & UKM**	
2.11.01.02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana perkuatan koperasi	Jumlah Koperasi / Meningkatnya pengawasan dan tersedianya laporan dana perkuatan koperasi	koperasi	70	0	61	0	20	20	21	61	100,00	61	87,14	**PPK & UKM**	
2.11.01.04	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Jumlah Peserta Pelatihan /Meningkatnya kemampuan pengurus dalam mengelola rumah tangga koperasi	orang	255	0	35	0			35	35	100,00	35	13,73	**PPK & UKM**	
	UMKM				0											
2.11.02	**Program pemberdayaan dan pengembangan UMKM**				0											
2.11.02.01	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil	Jumlah Peserta Pelatihan /Fasilitasi kemitraan Investor dan pelaku UMKM	UMKM/orang	760	0	60	0	0	60		60	100,00	60	7,89	**PPK & UKM**	
2.11.02.02	Pembinaan dan Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi (dekranasda)	Jumlah Keikutsertaan promosi kerajinan khas daerah (dekranasda)	kali	12	0	2	0	1		1	2	100,00	2	16,67	**PPK & UKM**	
2.11.02.03	Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah	Jumlah Keikutsertaan produk UMKM pada ajang promosi	Kali	42	0	4	0	2	1	1	4	100,00	4	9,52	**PPK & UKM**	
2.11.02.07	Pelatihan teknologi peningkatan mutu produk UMKM	Jumlah Peserta Pelatihan /Meningkatnya kemampuan UMKM dalam diversifikasi produk olahan	orang	160	0	20	0		20		20	100,00	20	12,50	**PPK & UKM**	
3	**Urusan Pilihan**				0											
3,06	**Perdagangan**				0											
3.06.01	**Program pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**				0											
3.06.01.02	Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Jumlah Pembinaan pelaku dan penataan sarana perdagangan	pasar	85	17	17	3	5	5	4	17	100,00	34	40,00	**PPK & UKM**	
3.06.02	**Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilitas Harga Barang**				0											
3.06.02.02	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Dokumen omzet perdagangan	dokumen	1	0	1	0			1	1	100,00	1	100,00	**PPK & UKM**	
3.06.02.03	Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat pasar	Jumlah Dokumen harga kebutuhan barang pokok	dokumen	6	0	1	0			1	1	100,00	1	16,67	**PPK & UKM**	
3.06.03	**Program Perlindungan konsumen**				0											
3.06.03.02	Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Jumlah Alat Tera ulang UTTP	alat tera	23594	3920	62	0	0	0	62	62	100,00	3982	16,88	**PPK & UKM**	
3,07	**Perindustrian**				0											
3.07.01	**Program pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi IKM**				0											
3.07.01.01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Fasilitasi alat kemasan (packaging) dan alat industri berteknologi canggih lainnya	0	0	0	0	0	0		0	0	-	0	-		
3.07.01.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana IKM	Jumlah IKM penerima bantuan	unit	3	1	8	0	8	0		8	100,00	9	300,00	**PPK & UKM**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
3.07.01.03	Pelatihan kerajinan souvenir/ kerajinan tangan	Jumlah peserta yang dibina dan dilatih	orang	420	50	50	0	50	0		50	100,00	100	23,81	**PPK & UKM**	
3.07.01.04	Penguatan Sentra dan Kelompok Penrajin	Jumlah sentra yang terbentuk dan Jumlah IKM yang dibina	Unit	100	20	20	0	6	8	6	20	100,00	40	40,00	**PPK & UKM**	
3.07.01.08	Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit	Jumlah peserta yang dibina dan dilatih	orang	130	0	20	0	0	20	0	20	100,00	20	15,38	**PPK & UKM**	
3.07.01.10	Pelatihan Pengembangan Industri Gula Merah	Jumlah peserta yang dibina dan dilatih	orang	85	0	20	0	0	0	20	20	100,00	20	23,53	**PPK & UKM**	
3.07.01.11	Pelatihan Kemasan Produk Pangan	Jumlah peserta yang dibina dan dilatih	orang	100	0	20	0	0	0	20	20	100,00	20	20,00	**PPK & UKM**	
3.07.01.13	Pelatihan Pemintalan Benang Sutera	Jumlah pengrajin sutera yang dilatih	0	0	0	30	0	0	0	30	30	100,00	30	-	**PPK & UKM**	
3.07.01.15	Kajian pengembangan industri	Dokumen pengembangan industri	dok	1	0	1	0	0	0	1	1	100,00	1	100,00	**PPK & UKM**	
				29.803	4.414	1.121	91	301	359	370	1.121	100,00	5.535	18,57		
											Rata-rata capaian kinerja (%)	100,00				
											Peringkat kerja	**TINGGI**				
											Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program	**100,00**		18,57		
											Predikat kerja dari seluruh program	**TINGGI**				
2.02.2.02.01.01	**Program Pelayanan Perkantoran**	Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu		500	100	100	8,1327313	26	30,58	34	99	98,88	199	39,78		
2.02.2.02.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	60	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24	40,00	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	18	26	4	0	3	1		4	100,00	30	166,67	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebrsihan dan jumlah peralatan kebersihan	orang	6	46	1	3	3	3		9	900,00	55	916,67	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	18	99	2	0	2	0		2	100,00	101	561,11	DPPPA	
2.07.2.07.01.02.09	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	jenis	19	31	0	12	0			12	#DIV/0!	43	226,32	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	jenis	30	34	6	0	24	18		42	700,00	76	253,33	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	kali	60	61	12	3	3	3		9	75,00	70	116,67	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	kali	1000	181	100	75				75	75,00	256	25,60	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Paket	114	79	8	3	3	3		9	112,50	88	77,19	DPPPA	
												#DIV/0!		264,84		
												Sangat Rendah		Sangat Rendah		
2.02.2.02.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		85	100	100	0	12,66	9,14	72	94	94,17	194	228,44		
2.02.2.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kntor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang diadakan	paket	16	77,93	6	0	0		6	6	100,00	#VALUE!	#VALUE!	DPPPA	
2.02.2.02.01.02.10	Pengadaan Mobiler	Jumlah mobiler yang diadakan	paket	3	64,19			0			0				DPPPA	
2.02.2.02.01.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah areal yang terpelihara	M2	1350	0	1	0	0			0	-	-	0,00	DPPPA	
2.07.2.07.01.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	18	76,33	4	0	4	4	4	8	200,00	#VALUE!	#VALUE!	DPPPA	
2.02.2.02.01.02.19	Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis Peralatan kantor yang dipelihara	Unit	117		26		26	0		26				DPPPA	
												75,00		#VALUE!		
												Rendah		SRendah		
2.02.2.02.01.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**	Persentase peningkatan kedisiplinan ASN		100	100	100	0	15,00	6,69	65	87	86,63	187	186,63		
2.02.2.02.01.03.09	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek	0rang%	25	89	10	0	2	1	8	11	110,00	100	400,00	DPPPA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
												110,00		400,00		
												SRendah		SRendah		
2.02.2.02.01.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100	100	100	16,6655	0	17,93	65	100	100,00	200	200,00		
2.02.2.02.01.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	Dokumen	54	100	8	0	8	8		16	200,00	116	214,81	DPPPA	
2.02.2.02.01.04.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun	Dokumen	18	51,00	2	0	0	0	1	0	-	#VALUE!	#VALUE!	DPPPA	
												66,67		#VALUE!		
												SRendah		SRendah		
2.02.2.02.01.01	**Pemberdayaan perempian dan Kesetaraan gender**	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan		91	100	100	28,675179	29	28,38	49,20	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
2.02.2.02.01.01.01	Pembinaan Organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Organisasi	56	100		0	0			0	#DIV/0!	100	1,79	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.02	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah peserta pelatihan	orang	130	100		0	0			0	#DIV/0!	100	76,92	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.04	Pelatihan Peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Jumlah peserta pelayanan pendampingan korban tindak kekerasan	orang	120	99,99	60	60	0			60	100,00	#VALUE!	#VALUE!	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.05	Sosialisasi Kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta Sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT	orang	200		200		0	200		200	100,00	200	100,00		
2.02.2.02.01.01.06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah peserta Sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT	orang	100	93,84	50	0	0			0	-	#VALUE!	#VALUE!	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.07	Penguatan dan Pengembangan kelembagaab P2TP2A	Jumlah pesert pertemuan pengurus P2TP2A	0rang	210		90		90			90	100,00	90	42,86		
2.02.2.02.01.01.09	Workshop penyusunan PPRG	Jumlah peserta workshop	orang	125	100	75	0	0			0	-	100	80,00	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.11	Penyusunan Profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak	dokumen	4	61	1				1	1	100,00	62	1550,00	DPPPA	
2.02.2.02.01.01.10	Sosialisasi Pembentukan dan Penguatan Focal Point PUG	Jumlah Peserta Rapat Sosialisasi	Orang	125		75		75			75	100,00	75	60,00		
												#DIV/0!		#VALUE!		
												SRendah		SRendah		
2.02.2.02.01.02	**Peningkatan kualitas keluarga dan perlindungan Anak**	Ratio KDRT	%	0.24	0	0.032	13,922919	4,6310334	10,19086	465,6911	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
2.02.2.02.01.02.01	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah keluarga yang mendapatkan pembinaan	keluarga	500	98	100	0	0	0	100	100	100,00	198	39,60	DPPPA	
2.02.2.02.01.02.02	Penyusunan Perda perlindungan Anak	Jumlah perda perlindungan anak yang disahkan	Perda	1	0	1	0	0			-	-	-	0,00	DPPPA	
2.02.2.02.01.02.03	Pertemuan forum anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan Anak	Jumlah peserta forum anak	orang	990	100	165	165	0			165	100,00	265	26,77	DPPPA	
2.02.2.02.01.02.04	Pembentukan dan pengembangan kabupaten layak anak	Jumlah sekolah ramah anak	Kecamatan	8	46,74	8		4	4		8	100,00	#VALUE!	#VALUE!	DPPPA	
2.02.2.02.01.02.05	Sosialisasi Partisipasi anak dalam pembangunan	Jumlah Peserta Sosialisasi	orang	725	100	70					-	-	100	13,79	DPPPA	
2.02.2.02.01.02.08	Sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	Jumlah peserta sosialisasi	orang			400	0	0	0	400	400	100,00	400	#DIV/0!	DPPPA	
2.02.2.02.01.02.09	Sosialisasi partisipasi ibu dan perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi	orang	950	93,8	150					-	-	#VALUE!	#VALUE!	DPPPA	
2.02.2.02.01.02.06	Pelatihan pola asuh anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak	Jumlah peserta pelatihan	orang			50				50	50	100,00	50	#DIV/0!	DPPPA	
												166,67		#VALUE!		
												SRendah		SRendah		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
												#DIV/0!		#VALUE!		
												Rendah		SRendah		
Program Pelayanan Perkantoran				**1344**	**-**	**361**	**-**	**157**	**114**	**114**	**385,00**	**802,40**	**385,00**	**204,82**		
01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	-	12	-	6	3	3	12,00	100,00	12,00	20,00	**D P P K B**	
03	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	148	-	62	-	19	38	5	62,00	100,00	62,00	41,89		
05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	Bulan	60	-	12	-	6	3	3	12,00	100,00	12,00	20,00		
06	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/ penerangan bangunan	Jenis	16	-	6	-	3	-	3	6,00	100,00	6,00	37,50		
08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	55	-	15	-	5	5	5	15,00	100,00	15,00	27,27		
09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian tabung gas	Kali	60	-	12	-	3	3	5	11,00	91,67	11,00	18,33		
10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi	Kali	850	-	233	-	112	59	87	258,00	110,73	258,00	30,35		
11	Peningkatan pelayanan adminitrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	Paket	95	-	9	-	3	3	3	9,00	100,00	9,00	9,47		
												100,30		**25,60**		
												ST		**SR**		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				**527,00**	**-**	**324**	**-**	**164**	**4**	**156**	**324,00**	**400,00**	**324,00**	**167,93**		
09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Paket	16	-	4	-	-	-	4	4,00	100,00	4,00	25,00		
13	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Luas bangunan yang dipelihara	M^2	270	-	270	-	135	-	135	270,00	100,00	270,00	100,00		
15	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Unit	145	-	26	-	19	4	3	26,00	100,00	26,00	17,93		
17	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung yang dipelihara	Unit	96	-	24	-	10	-	14	24,00	100,00	24,00	25,00		
												100,00		**41,98**		
												ST		**ST**		
Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur				**136,00**	**-**	**0**	**-**	**-**	**1**	**7**	**12,00**	**92,31**	**12,00**	**38,71**		
05	Pembinaan Kegegawaian		Orang	105	-	38	-	-	-	-	0,00	-	-	-		
09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	31	-	13	-	4	1	7	12,00	92,31	12,00	38,71		
												92,31		**19,35**		
												T		**SR**		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan				**60**	**-**	**10**	**-**	**2**	**5**	**3**	**10,00**	**200,00**	**10,00**	**31,11**		
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang dususun	Dokumen	45	-	8	-	2	4	2	8,00	100,00	8,00	17,78		
04	Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan semesteran/ akhir tahun	Dokumen	15	-	2	-	-	1	1	2,00	100,00	2,00	13,33		
												100,00		**15,56**		
												ST		**SR**		
											0,00					
Program Pengendalian Penduduk				**120**	**-**	**24**	**-**	**-**	**24**	**-**	**24,00**	**100,00**	**24,00**	**20,00**		
04	Pengolahan data dan informasi program KB	Laporan	Laporan	120	-	24	-	-	24	-	24,00	100,00	24,00	20,00		
												100,00		**20,00**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
												ST		SR		
Program KB				**36031**	**-**	**7195**	**-**	**5**	**485**	**7.694**	**8.184,00**	**913,07**	**8.184,00**	**390,09**		
01	Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes,Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes	Jumlah peserta KB yang dilayani	Akseptor KB	34.500	-	6800	-	-	-	7.689	7689,00	113,07	7.689,00	22,29		
02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB	Paket	15	-	6	-	-	3	3	6,00	100,00	6,00	40,00		
03	Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)	Jumlah PLKB yang dibiayai	Balai PLKB	8	-	8	-	4	2	2	8,00	100,00	8,00	100,00		
04	Orientasi Peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB kepada stakeholder dan Mitra Kerja	Peserta Orientasi	Orang	200	-	100	-	-	100	-	100,00	100,00	100,00	50,00		
06	Peningkatan Jejaring Kerjasama dengan mitra kerja tentang Pelayanan KB, kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA) dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR)	Jumlah Lembaga yang menjadi mitra kerja pelayanan KB, KHIBA dan PMKR	Lembaga	5	-	5	-	-	5	-	5,00	100,00	5,00	100,00		
07	Pembinaan Keluarga Berencna	Jumlah Kegiatan Pembinaan KB	Kegiatan	23	-	1	-	1	-	-	1,00	100,00	1,00	4,35		
08	Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Peserta Rakerda	Orang	1000	-	200	-	-	200	-	200,00	100,00	200,00	20,00		
09	Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah kelompok yang dibina	Kelompok	280	-	75	-	-	75	-	75,00	100,00	75,00	26,79		
10	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Jumlah Peserta Advokasi dan KIE	Orang	375	-	100	-	-	100	-	100,00	100,00	100,00	26,67		
												101,45		**43,34**		
												ST		**T**		
Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga				**1982**	**-**	**501**	**-**	**-**	**-**	**501**	**501,00**	**400,00**	**501,00**	**566,16**		
01	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	Orang	1050	-	150	-	-	-	150	150,00	100,00	150,00	14,29		
03	Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS	jumlah Kelompok yang dibina	Kelompok	32	-	151	-	-	-	151	151,00	100,00	151,00	471,88		
04	Pelatihan Kader pendamping kelompok BKB, BKR, dan BKL	Jumlah Kader yang mengikuti Latihan	Orang	150	-	100	-	-	-	100	100,00	100,00	100,00	66,67		
08	Sosialisasi Pembinaan Ketahanan Keluarga	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	750	-	100	-	-	-	100	100,00	100,00	100,00	13,33		
												100,00		**141,54**		
												ST		**ST**		
												99,15		**43,91**		
												ST		**T**		
1	**Urusan Wajib**															
2.13.01	**Pemuda dan Olahraga**															
2.13.2.13.01.01	**Program Pelayanan Perkantoran**	Persentase Penyelesaian Kegiatan tepat Waktu		100	100	**100**	2	15	124	124	265	265,00	365	365	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	12	**12**		0	6	6	12	100,00	24	0	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK kendaraan Dinas/Operasional	Buah	16	2	**2**		0		2	2	100,00	4	25	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.05	Penyediaan jasa layanan kebersihan kantor	Jumlah petugaskebersihan dan Jenis peralatan kebersihan.	Jenis	22	5	**8**	0	0	4	4	8	100,00	13	1	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis alat listrik/penerangan bangunan yang diadakan	Jenis	20	12	**4**			4		4	100,00	16	80	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.07	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis peralatan Rumah Tangga	Jenis	35	7	**7**			7		7	100,00	14	40	DISPORA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
2.13.2.13.01.01.08	Penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Langganan terbitan Surat Kabar/ Majallah	Terbitan	60	12	12			6	6	12	100,00	24	69	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Pengisian tabung gas	Bulan	60	12	12			4	8	12	100,00	24	0	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan	10000	200	200	0	13	91	96	200	100,00	400	667	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumla paket pelayanan Administrasi perkantoran	paket	40	8	8	2	2	2	2	8	100,00	16	0	DISPORA	
												100,00		531		
												sangat tinggi		sedang		
2.13.2.13.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran**		**90%**	**100**	**22**	0	21	**1**	**7**	**29**	131,82	129	**14.333**	**DISPORA**	
2.13.2.13.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapangedung kantor yang diadakan	unit	**16**	1	**15**		13	0	2	15	100,00	16	100	DISPORA	
2.13.2.13.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Jenis peralatan yang diadakan	Jenis	**48**	3	**0**	0	0	0		0	0,00	3	6	DISPORA	
2.13.2.13.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis meubeleur yang diadakan	Jenis	**31**	2	**1**	0	1	0		1	100,00	3	10	DISPORA	
2.13.2.13.01.02.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung kantor /halaman kantor yang dipelihara	m^2	450	1	**0**	0	0	0		0	0,00	1	16	DISPORA	
2.13.2.13.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (roda 2 dan roda 4)	unit	**9**	1	**2**	0	0	1	1	2	100,00	3	33	DISPORA	
2.13.2.13.01.02.17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan peralatan yang dipelihara	unit	50	1	**4**		0		4	4	100,00	5	10	DISPORA	
												100,00		30		
												sangat Tinggi		sangat rendah		
2.13.2.13.01.03	**Program Peningkatan Proesionalisme Aparatur**	**Persentase ASN berkinerja Baik**	**tahun**	70			0	7	0	0	14	115,00	14	20		
2.13.2.13.01.03.05	Pembinaan Kepegawaian	Jumlah Kegiatan Pembinaan pegawai yang dilaksanakan	KEG	5	1	**1**		0		1	1	100,00	2	40	DISPORA	
2.13.2.13.01.03.09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	Orang	65	6	**10**	0	7	0	6	13	130,00	19	29	DISPORA	
												122,50		35		
												sangat Tinggi		sangat rendah		
2.13.2.13.01.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan, capaian kinerja dan keuangan tepat waktu**		**100**	**100**	**11**	**0**	0	**3**	**8**	**11**	100,00	111	**67**	**DISPORA**	
2.13.2.13.01.04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	21	7	**7**			3	4	7	100,00	14	67	DISPORA	
2.13.2.13.01.04.04	Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	Dokumen	15	1	**4**	0	0	0	4	4	100,00	5	33	DISPORA	
												100,00		50		
												sangat Tinggi		Sedang		
	URUSAN KEPEMUDAAN															
2.13.2.13.01.01	**Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**	**Jumlah Organisasi pemuda**		**1.386**	**278**		**0**	283	**128**	**69**	**480**	**172,66**	758	**55**	**DISPORA**	
2.13.2.13.01.01.01	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah anggota OKP yang ikut pelatihan	Orang	200	40	**40**	0	0	0		40	100,00	80	40	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.03	Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka	Jumlah lulusan hasil seleksi anggota paskibraka	org	355	71	**71**	0	71		0	71	100,00	142	0	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.04	Pembinaan Anggota Paskibraka	Jumlah Anggota paskibraka yang dibina	keg	5	1	**71**	0	0	71		71	100,00	72	0	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.06	Fasilitasi dan pembinaan kepramukaan	Jumlah anggota pramuka yang di fasilitasi dan dibina	org	400	80	**80**	0	40	0	40	80	100,00	160	40	DISPORA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
2.13.2.13.01.01.07	Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna	Jumlah anggota karang Taruna yang dibina /fasilitasi	orang	125	25	**25**	0	0	0	25	25	100,00	50	40	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.08	Fasilitasi dan pembinaan Pemuda Pelopor	Jumlah anggota Pemuda Pelopor yang di fasilitasi dan dibina	org	300	60	**60**	0	0	55	4	59	98,33	119	40	DISPORA	
2.13.2.13.01.01.09	Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan	Jumlah organisasi OKP yang dibina	organisasi	1	1	**2**	0	0	2	0	2	100,00	3	300	DISPORA	
												99,76		56		
												sangat Tinggi		sedang		
2.13.2.13.01.01.02	**Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewiraushaan dan Kecakapan hidup Pemuda**	**% wirausaha muda**		**320**	**1**		**0**	172	**40**	**0**	**40**	**12,50**	**80**	**25**	**DISPORA**	
2.13.2.13.01.02.01	Pelatihan Usaha Kelompok Pemuda Kreatif	Jumlah anggota kelompok pemuda kreatif yang mengikuti pelatihan	org	320	40	**40**	0	0	40		40	100,00	80	25	DISPORA	
												100,00		25		
												Sangat Tinggi		sangat rendah		
	Urusan Keolahragaan															
2.13.2.13.01.03	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**	**-Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional. - Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional**		**1.632**	**7**		**4**	87	**98**	**58**	**247**	100,00	254	16	DISPORA	
2.13.2.13.01.03.02	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah atlet olahraga prestasi yang dibina	org	80	80	**80**	0	0	80		80	100,00	160	200	DISPORA	
2.13.2.13.01.03.03	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah Kegiatan kompetisi /pertandingan cabang olahraga yang selenggarakan	kegiatan	25	5	**5**	1	1	2	1	5	100,00	10	40	DISPORA	
2.13.2.13.01.03.04	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih peneliti praktisi dan teknisi olahraga	Jumlah pelati , peneliti, praktusi, teknisi olahraga yang mengikuti pelatihan	org	720	80	**80**	0	80	0		80	100,00	160	22	DISPORA	
2.13.2.13.01.03.05	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan infrastruktur/sarana dan prasarana Olahraga	Jumlah Infrastruktur sarana dan prasarana olahraga yang dibangun,diadakan, diperbaiki	Paket	45	2	**4**		0	1	3	4	100,00	6	**13,33333333**	DISPORA	
2.13.2.13.01.03.06	Pembinaan Cabang-Cabang Olahraga	Jumlah cabang cabang olahraga yan dibina dalam 1 Tahun	cabang olahraga	85	17	**20**	2	4	14	2	22	110,00	129	152	DISPORA	
2.13.2.13.01.03.07	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi diberikan penghargaan	org	650	50	**50**		0	0	50	50	100,00	100	15	DISPORA	
2.13.2.13.01.03.08	Pembinaan Cabang cabang olahraga Tradisional, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Khusus	Jumlahcabang olahraga tradisional, rekreasi, dan olahraga khusus yang dibina.	kegiatan	15	3	**3**	1	0	0	2	3	100,00	6	40	DISPORA	
2.13.2.13.01.03.09	Pembinaan Cabang cabang olahraga unggulan daerah	Jumlah cabang olahraga unggulan yang daerah di bina	cabang olahraga	12	1	**3**	0	2	1		3	100,00	4	33	DISPORA	
												101,25		**64,57**		
												sangat Tinggi		**Sedang**		
												90,44		**98,92**		
												Tinggi		**sangat Tinggi**		
	Program pelayanan perkantoran															
	Penyediaan jasa komuniasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,listrik dan air	12 Bulan	12 Bulan	12	12	3	3	3	3	12	100	24	200,00		
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah STNK kendaraan dinas yang diterbitkan	1 roda 4 dan 10 roda 2	2 roda 4 dan 11 roda 2	1	1	0	3	3	3	9	128,5714286	10	0,00		
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Bahan dan peralatan kebersihan serta jasa cleanning service	12 Bulan	12 Bulan	12	12	3	3	3	3	12	100	24	200,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Tahun	1 Tahun	1	1	3	0	3	3	9	75	10	83,33	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Tahun	1 Tahun	1	1	0	0	0	0	0	0	1	8,33		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar dan majalah	12 Bulan	12 bulan	12	12	0	3	3	0	6	50	18	150,00		
	penyediaan bahan logistik kantor	terpenuhinya pengisian tabung gas	12 Bulan	0	0	0	0	3	3	0	6	0	6	50,00		
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	1 Tahun	1 Tahun	1	1	3	3	3	0	9	75	10	83,33		
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	terlaksanya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1	1	3	3	3	0	0	0	1	8,33		
												66,07		97,92		
												sangat rendah		sangat rendah		
	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur															
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	5 Jenis	30 jenis	5	5	0	0	0	0	0	0	5	16,67	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	4 Jenis	24 Jenis	4	5	0	0	0	0	0	0	4	16,67		
	Pengadaan mebeleur	mebeleur	3 Jenis	18 Jenis	3	0	0	0	0	0	0	0	3	16,67		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor yang diperlihara	1 Tahun	1 Tahun	1	1	0	0	3	3	6	50	7	58,33		
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirpelihara	1 roda 2 dan 10 roda 4	4 roda 4 dan 16 roda 2	1	1	0	3	3	3	9	300,0	10	50,00		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperlihara	5 Jenis	5 jenis	5	4	0	0	3	3	6	150	11	220,00		
												83,33		63,06		
												sangat rendah		sangat rendah		
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur															
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	ASN yang mengikuti bimtek	7 Orang	62 Orang	9	40	3	3	3	3	12	171,4285714	21	33,87	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
												171,4285714		33,87		
												sangat rendah		sangat rendah		
	Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan															
	Penyusunan laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan anggaran dan laporan kinerja SKPD	7 Jenis	7 Jenis	7	7	0	3	3	3	9	128,5714286	16	228,57	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1	0	0	0	3	3	300	4	400,00		
												214,2857143		314,29		
												sangat rendah		sangat rendah		
	Program peningkatan Kualitas & Produktifitas Tenaga kerja															
	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Tersusunnya data base tenaga kerja daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5	4	0	0	0	0	0	0	1	20,00	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Terlaksannya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	20 orang	20 orang	1	20	0	3	3	0	6	30	24 orang	120,00		
												15		70,00		
												sangat rendah		sedang		
	Program peningkatan kesempatan kerja															
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Laporan informasi pasar kerja	12 Laporan	12 Laporan	12	0	0	0	0	0	0	0	12	100,00	Dinas Tenaga Kerja &	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
	Pemberdayaan tenaga kerja mandiri	Jumlah TKM yang diberdayakan	orang	140 orang	30	30	0	3	3	3	9	128,5714286	39	0,00	Transmigrasi	
												64,29		50,00		
												sangat rendah		sangat rendah		
	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan															
	Kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan insdustrial	Persentasi penyelesaian perselsihan di luar pengadilan HI	%	50 orang	100%	0	0	0	0	0	0	0	50 Orang	100,00		
	kegiatan Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase kepesertaan dalam program jaminan sosial	2%	40%	5%	10%	0	3	0	3	6	6000	605%	1512,50	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Persentase pemahaman pengusaha dan pekerja mengenai sarana HI dan syarat - syarat kerja serta jaminan sosial	70%	85%	0,8	0%	0	0	0	0	100%	0	1,8	211,76		
												2000		608,09		
												sedang		sangat tinggi		
	Program Perencanaan & Pengembangan Kawasan Transmigrasi															
	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi	tersedianya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi dikawasan transmigrasi	50%	97%	60%	75%	0,06	3	3	0	6,06	303	6,66	686,60	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
												303		686,60		
												sangat rendah		sangat tinggi		
												364,7		240,48		
												sangat rendah		Rendah		
1.04.	Urusan Perencanaan															
4.01.4.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**100**	**100**	100	100	100	**100**	**400**	**400**	**500**	500		
01.01.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	36	10	10	10	6	36	100	48	400	Bappelitbangda	
01.01.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang Diterbitkan STNK nya	Unit	13	12	15	6	0	5	4	15	100	27	208		
01.01.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Cleaning Service dan Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Kebersihan	Orang Perbulan	180	180	180	45	33	40	62	180	100	360	200		
01.01.01.07	Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah tangga	Jenis	15	13	15	0			15	15	100	28	187		
01.01.01.08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	10	12	12	0	6	2	4	12	100	24	240		
01.01.01.09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian Gas	Bulan	12	12	12	3	3		6	12	100	24	200		
01.01.01.10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12	985	250	450	150	135	985	100	997	8.308		
01.01.01.11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket pelayanan Perkantoran	Bulan	4	12	4	1	1	1	1	4	100	16	400		
01.01.01.06	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	buah	20	20	20	0	5		15	20	100	40	200		
4.01.4.01.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**	**%**			**100**	**17**	**2**			**19**	**19**	**19**	**#DIV/0!**		
01.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang diadakan	buah	17		17	5	3	4	5	17					
01.01.02.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas Gedung Kantor yang Terpelihara	Tahun	1	1	1	1	0			1	100	2	200		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
01.01.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpelihara-Kendaraan Roda Empat- Kendaraan Roda Dua	Unit	13	12	13	1	9		2	12	92	24	185		
01.01.02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	41	41	48	10		10	18	38	79	79	193		
01.01.02.25	Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor	JumlahGedung Kantor Dalam Kondisi Baik	Paket			1			1	1	2	200	2	#DIV/0!		
4.01.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**% penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu**	**%**	**100**							**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**		
01.01.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan SKPD	Dok	7	7	7	1	3		3	7	100	14	200		
01.01.04.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran/akhir tahun	Dok	2	2	1	1	1	1		3	300	5	250		
4.01.01.01	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	**% ketersediaan doukumen RPJPD,RPJMD,RKPD, yang sesuai dengan regulasi**	**%**	**100**	**100**						**0**	**#DIV/0!**	**100**	**100**		
01.01.01.16	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen musrenbang	Dok	2	2	2	0	1	1		2	100	4	200		
01.01.01.03	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Jenis Dokumen yang Disusun	Dok	5	5	5	2	1	1		4	80	9	180		
01.01.01.11	Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat	Jumlah Jenis Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	Dok	1	1	1	0	1	1	1	1	100	2	200		
01.01.01.04	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA-PPAS Pokok dan perubahan	Dok	2	2	2	0		1		1	50	3	150		
01.01.01.14	Koordinasi Perencanaan percepatan pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	Jumlah dokumen hasil pelaksnaan koordinasi	Dok	1	1	1	0	0	1		1	100	2	200		
01.01.01.12	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah	Jumlah Jenis Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	Dok	2	2	2	1	1			2	100	4	200		
01.01.01.15	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	orang	400	400	400	0				0	0	400	100		
01.01.01.16	PendampinganPenyusunan RPJM Desa	Jumlah Desa yang didampingi	12 Desa	12	12	0					0		12	100		
01.01.01.18	Koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten/kota layak anak	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	Dok	1	1	1	0	1			1	100	2	200		
01.01.01.05	Asistensi Penyusunan RAPBD	Jumlah SKPD yang diasistensi	SKPD	38	37	38	0		20		20	53	57	150		
01.01.01.06	Pendampingan Penysunan Renstra	Jumlah SKPD yang didampingi dalam penyusunan Renstra	37 SKPD	-	-	1	0	0	0	1						
01.01.01.09	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah Peserta Sosialisasi	0rang	80	80	80	0				0	0	80	100		
01.01.01.20	Penyusunan, Pengumpulan dan analisis Data/Informasi Kabutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi	Jumlah Jenis Dokumen yang Disusun	Dok	1	1	1	0				0	0	1	100		
01.01.01.21	Penyusunan, Pengumpulan dan analisis Data/Informasi Kabutuhan Perencanaan Bidang Sosbud	Jumlah Jenis Dokumen yang Disusun	Dok	1	1	1	0				0	0	1	100		
01.01.01.22	Penyusunan, Pengumpulan dan analisis Data/Informasi Kabutuhan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Jenis Dokumen yang Disusun	Dok	1	0	1	0				0	0	0	0		
01.01.01.23	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/ Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Jenis Dokumen yang Disusun	Dok	1	1	1	0	1			1	100	2	200		
01.01.01.25	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen SIPD	Dok	1	1	1	0				0	0	1	100		
01.01.01.26	Penyusunan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Jumlah dokumen penelitian & pengembangan	Dok	5	5	5	0		2		2	40	7	140		
01.01.01.29	Inovasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	6 SKPD	-	-	6	0		3		3		#VALUE!	#VALUE!		
01.01.01.19	Pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan		1	1	0	1	0		1		1		1	100		
01.01.01.13	Koordinasi Perencanaan Responsif gender	Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG	SKPD	38		38	0		0		0		0	0		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.01.4.01.01.02	**Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan**	**Program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD**	**%**	**100**	**100**	**4**	**0**				**0**	**0**	**100**	**100**		
01.01.02.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil monev pelaksanaan APBD dan APBN rencana pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Soppeng	Dok	2	2	2	0	0	1		1	50	3	150		
01.01.02.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKJIP Kabupaten	Dok	1	1	1	0	1			1	100	2	200		
01.01.02.06	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka menegah daerah (RPJMD)	Jumlah dokumen hasil evaluasi	Dok	1	2	1	0		1		1	100	3	300		
4.01..01.02.07	Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasisi Key Performance Indikator (KPI)	Jumlah dokumen evaluasi	Dok	1	1	2	0				0	0	1	100		
4.01..01.02.05	Revisi Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah	Jumlah SKPD yang didampingi dalam penyusunan RENSTRA/jumlah dokumen	Dok	1	1	1	0			1	1	100	2	200		
4.01..01.02.08	Pembangunan sistem informasi monitoring dan evaluasi	Jumlah Aplikasi	0	0	0	1	0			1	1	100	1	#DIV/0!		
4.01..01.02.09	Revisi Rencana Pembangunan Jangaka Menengah Daerah (RPJMD)	Jumlah RANPERDA RPJMD	Dok	1		1	0			1	1	100	1	100		
4.01.01.03	**Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Peesentase ASN yang meningkat kompetensinya dalam hal perencanaan.**	**Dok**	**29,27**		**3**	**0**	**2**			**2**	**67**	**2**	**#VALUE!**		
01.01.03.01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	jumlah tenaga perencana yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bintek	orang	12	12	18	1	9	2		12	67	24	200		
01.01.03.02	Wokshop Perencanaan Pembangunan Daearh	Jumlah Peserta Workshop	orang	0	0	100	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											16,50				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran**		**100**	**100**	**100**	**0**	**7**	**4**	**9**	**0**	**91,88**	**0**	**117**	**BKPSDM**	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	3	3	3	3	12	**100,00**	**24**	**2**	**BKPSDM**	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terpenuhinya kebutuhan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	Unit	10	10	7	1	2	0	4	7	**100,00**	**17**	**0**	**BKPSDM**	
	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Terpenuhinya kepbutuhan petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	Tahun	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	**100,00**	**2**	**0**	**BKPSDM**	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan gedung kantor	Tahun	1	1	1	0	0,3	0,0	0,3	1	**60,00**	**2**	**160**	**BKPSDM**	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	1	1	1	0	0,5	0,15	0,35	1,00	**100,00**	**2**	**200**	**BKPSDM**	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan bahan logistik kantor.	Tahun	1	1	1	0,25	0,25	0,0	0,25	1	**75,00**	**2**	**175**	**BKPSDM**	
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tahun	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1	**100,00**	**2**	**200**	**BKPSDM**	
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Tahun	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1	**100,00**	**2**	**200**	**BKPSDM**	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**Tersedianya sarana dan prasarana aparatur**		**100**	**100**	**100**	**0**	**2**	**1**	**5**	**0**	**65,56**	**0**	**146**	**BKPSDM**	
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jenis	7	2	2	0	0,3	0	7	7	**365,00**	**9**	**133**	**BKPSDM**	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas area gedung yang dipelihara	Unit	2	2	2	0	0,3	0	1,3	2	**80,00**	**4**	**180**	**BKPSDM**	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	10	10	4	1	1	1	1	4	**100,00**	**14**	**140**	**BKPSDM**	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah AC dan perangkat komputer yang dipelihara	Unit	30	30	30	1	1	0	3	5	**16,67**	**35**	**117**	**BKPSDM**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur	**Terpenuhinya Kapasitas sumber daya aparatur BKPSDM Soppeng**		**100**	**100**	**100**	**0**	**4**	**1**	**4**	**0**	**100,00**	**0**	**267**	**BKPSDM**	
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	Pengiriman	6	6	10	1	4	1	4	10	**100,00**	**16**	**267**	**BKPSDM**	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu**		**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**4**	**7**	**100,00**	**0**	**200**	**BKPSDM**	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dokumen perencanaan dan pelaporan	Dokumen	5	5	5	0	0	2	3	5	**100,00**	**10**	**200**	**BKPSDM**	
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	dokumen laporan keuangan	Dokumen	2	2	2	0	0	1,0	1	2	**100,00**	**4**	**200**	**BKPSDM**	
	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	**Meningkatnya kapasitas aparatur**		**100**	**100**	**100**	**20**	**0**	**200**	**231**	**0**	**76,34**	**0**	**302**	**BKPSDM**	
	Pemberian Penghargaan ASN yang Berprestasi.	Jumlah PNS yang diberikan penghargaan karena prestasi dan pengambdiannya	Orang	450	450	450	20	0	200	230	450	**100,00**	**900**	**0**	**BKPSDM**	
	Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai	Jumlah penegakan Disiplin PNS	Dokumen	1	1	1	0	0,00	0,00	1	1	**100,00**	**2**	**0**	**BKPSDM**	
	Program Pendidikan dam Pelatihan Prajabatan dan dalam jabatan	**Meningkatnya kapasitas aparatur**		**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**100,00**	**0**	**167**	**BKPSDM**	
	Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan dan Diklat dalam jabatan	Jumlah Peserta Diklat	Orang	145	0	28	3	0	0	0	3	**10,71**	**3**	**2**	**BKPSDM**	
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II	Jumlah Peserta Diklat	Kelas	2	0	25	10	10	5	0	25	**100,00**	**25**	**1.250**	**BKPSDM**	
	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III	Jumlah Peserta Diklat	Kelas	3	0	25	0	15	10	0	25	**100,00**	**25**	**833**	**BKPSDM**	
	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV	Jumlah Peserta Diklat	Kelas	7	0	40	30	5	5	25	0	**0,00**	**0**	**0**	**BKPSDM**	
	Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi	Jumlah kelas diklat teknis pelaksanaan tugas dan fungsi	kelas	3	3	2	0	0	0	2	2	**100,00**	**5**	**167**	**BKPSDM**	
	Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	**Terlaksananya program Perencanaan dan mutasi Kepegawaian ASN**		**100**	**100**	**100**	**3**	**101**	**1**	**2**	**106**	**81,25**	**205,75**	**205,75**	**BKPSDM**	
	Perencanaan, penyeleksian dan pengangkatan ASN	- Pengelolaan berkas CPNS menjadi PNS -Pelaksanaan proses penerimaan CPNS	- CPNS - Pengadaan	1	0	1	0	0		1	1	**100,00**	**1**	**100,00**	**BKPSDM**	
	Penempatan ASN	pelaksanaan perpindahan PNS dan pengisian jabatan kosong	Tahun	1	1	1	0,25	0,25	0,0	0,25	1	**75,00**	**1,75**	**175,00**	**BKPSDM**	
	Pemberhentian ASN	pengelolaan berkas PNS yang mengusulkan pensiun	Tahun	1	1	1	0,00	0,25	0	0,25	1	**50,00**	**1,50**	**150,00**	**BKPSDM**	
	Penilaian Kompetensi ASN	pelaksanaan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama (eselon II)	kali	2	2	2	2	0	0	0,0	2	**100,00**	**4,00**	**200,00**	**BKPSDM**	
	Mutasi Kepangkatan ASN	pelaksanaan pengusulan kenaikan untuk ASN	kali	2	2	2	0,5	0,5	0,5	0,0	1,5	**75,00**	**3,50**	**175,00**	**BKPSDM**	
	Ujian Penyesuaian Ijazah/Ujian Dinas	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas/penyesuaian Ijazah	orang	300	0	100	0,0	100,0	0	0,0	100	**100,00**	**100,00**	**33,33**	**BKPSDM**	
	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Peningkatan pengetahuan akan perraturan kepegawaian	kali	2	2	1	0		0	0,0	0	**0,00**	**2,00**	**100,00**	**BKPSDM**	
	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian			**100**	**100**	**100**	**1.001**	**0**	**0**	**4.102**	**5.103**	**108,33**	**5.203,00**	**5.203,00**	**BKPSDM**	
	Pelayanan Pengadministrasian berkas-berkas kepegawaian	Pengelolaan pelayanan KPE, TASPEN, TAPERUM, Karsi Karsu dan cuti PNS	Tahun	1	1	1	0,25	0,0	0,0	1,0	1	**125,00**	**2**	**225**	**BKPSDM**	
	Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut pegawai	Penyediaan bahan cetak kartu tanda pengenal yang dicetak berdasarkan jumlah pengusulan	lembar	800	800	4.000	1.000	0	0,0	4.000	5.000	**125,00**	**5.800**	**725**	**BKPSDM**	
	Pengembangan dan pengelolaan data base Kepegawaian	Penyediaan layanan informasi data kepegawaian	Tahun	1	1	1	0,25	0,00	0,25	0,25	1	**75,00**	**2**	**175**	**BKPSDM**	
	Pelayanan izin belajar dan seleksi mahasiswa ke perguruan tinggi berikatan dinas	Penyediaan layanan izin belajar yang berikatan dinas kepada ASN.	Tahun	100	100	100	0	0	0	100	100	**100,00**	**200**	**200**	**BKPSDM**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
	Monitoring dan Evaluasi Kinerja pelayanan	pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan kegiatan	tahun	1	1	1	0,0		0,0	1,0	1	**100,00**	**4**	**400**	**BKPSDM**	
												90,42		734,12		
												sedang		Rendah		
4.04.4.04.14.01	**Program Pelayanan Perkantoran**	**% penyelesaian kegiatan tepat waktu**	**persen**	**100%**	**98,79%**	**96%**		**-**	**-**	**-**		**-**	**98,79%**	**98,79**		
4.04.4.04.14.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terwujudnya jaringan komunikasi dan Jaringan Network untuk kelancaran tugas-tugas kedinasan secara optimal	Bulan	12	12	12	3	-	-	-	3	100,00	15	300,00	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	
4.04.4.04.14.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan	Unit	8	6	8	-	-	-	-	-	100,00	6	75,00		
4.04.4.04.14.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Tercapainya kebersihan kantor	Orang	2	2	2	2	-	-	-	2	100,00	4	200,00		
4.04.4.04.14.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya penerangan gedung kantor untuk mendukung kelancaran tugas perkantoran	Jenis	3	2	2	-	-	-	-	-	100,00	2	66,67		
4.04.4.04.14.01.08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercapainya pemenuhan kebutuhan informasi melalui media cetak	Exp	16	14	14	-	-	-	-	-	100,00	14	87,50		
4.04.4.04.14.01.09	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya gas untuk kebutuhan sehari-hari pegawai	Kali	7	7	7	1	-	-	-	1	100,00	8	50,00		
4.04.4.04.14.01.10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Kali	248	240	170	105	-	-	-	105	100,00	345	139,11		
4.04.4.04.14.01.11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Jenis	8	8	8	5	-	-	-	5	100,00	13	162,50		
											JUMLAH CAPAIAN KINERJA	**100,00**				
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)	ST				
4.04.4.04.14.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**% pemenuhan kebutuhan sarana prasarana perkantoran**	**persen**	**100%**	**99,60%**	**100%**		**-**	**-**	**-**	-	-	**6,00**	**600,00**		
4.04.4.04.14.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya kinerja pegawai	Unit	8	6	2	5	-	-	-	5	100,00	11	1.100		
4.04.4.04.14.02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana	Unit	8	6	8	1	-	-	-	1	100,00	7	87,50		
4.04.4.04.14.02.17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tercapainya perawatan sarana dan prasarana kantor	Unit	3	3	3	-	-	-	-	-	100,00	3	100		
											JUMLAH CAPAIAN KINERJA	**100,00**				
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)	ST				
4.04.4.04,14.03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**% PNS berkinerja baik**	**persen**	**100%**	**100%**	**100%**		**-**	**-**	**-**	-		**100%**	**100,00**		
4.04.4.04,14.03.09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya program peningkatan SDM bagi aparatur pemerintah	Orang	10	5	5	3	-	-	-	3	100,00	8	80,00		
											JUMLAH CAPAIAN KINERJA	**100,00**				
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)	ST				
4.04.4.04.14.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**% Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu**	**persen**	**100%**	**95,80%**	**100%**		**-**	**-**	**-**		-	**95,80%**	**95,80**		
4.04.4.04.14.04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya pembuatan rancangan anggaran kinerja serta Laporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dok.	7	6	6	-	-	-	-	-	100,00	6	85,71		
4.04.4.04.14.04.02	Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran	Tercapainya Penyususnan Laporan Keuangan semesteran	Dok.	2	2	2	-	-	-	-	-	100,00	2	100		
4.04.4.04.14.04.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tercapainya Penyususnan Laporan Keuangan Yang Akuntabel	Dok.	13	13	13	-	-	-	-	-	100,00	13	100		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
	JUMLAH CAPAIAN KINERJA											100,00				
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)											ST				
4.04.4.04.14.24	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**	**Adanya hasil pengkajian dan pengambilan keputusan terkait perkembangan situasi dan kondisi ideologi politik dan sosial**	**persen**	**65%**	**100%**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**100%**	**153,85**		
4.04.4.04.14.24.01	Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarkat (FKDM)	Terlaksananya pertemuan FKDM dan sosialisasi pengendalian dan kenyamanan lingkungan	Kali	4	4	4	-	-	-	-	-	100,00	4	100,00		
4.04.4.04.14.24.02	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya sosialisasi	Orang	150	-	110	-	-	-	-	-	100,00	-	-		
4.04.4.04.14.24.03	Fasilitas Penguatan Jaringan Intelien Daerah (KOMINDA)	Terlaksananya pertemuan KOMINDA	Kali	12	12	12	-	-	-	-	-	100,00	12	100,00		
4.04.4.04.14.24.04	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Terlaksananya pertemuan FPK	Kali	4	4	4	-	-	-	-	-	100,00	4	100,00		
4.04.4.04.14.24.05	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Tercapainya kondisi yang aman dan tentram antar umat beragama	Kali	4	4	4	-	-	-	-	-	100,00	4	100,00		
4.04.4.04.14.24.06	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan seminar, talkshaw dan diskusi	Kali	2	2	2	-	-	-	-	-	100,00	2	100,00		
4.04.4.04.14.24.26	Penyelenggaran unit layanan pembrantasan pungli (UPP)	Tereliminirnya Pungli pada setiap layanan pemerintah	Kali									100,00				
4.04.4.04.14.24.08	Penyelenggaraan Pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah kabupaten soppeng	Terlaksanaya pengawalan dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah	Kali									100,00				
	JUMLAH CAPAIAN KINERJA											100,00				
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)											ST				
4.04.4.04.14.25	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**	**Jumlah/Cakupan Organisasi masyarakat dan Tokoh masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik**	**persen**	**83%**	**100%**	**79%**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	**100%**	**120,48**		
4.04.4.04.14.25.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Terlaksananya sosialisasi pendidkan politik di masyarakat	Orang	200	200	200	-	-	-	-	-	100,00	200	100,00		
4.04.4.04.14.25.02	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Terwujudnya kelancaran administrasi parpol	Parpol	10	10	10	-	-	-	-	-	100,00	10	100,00		
4.04.4.04.14.25.03	Pembinaaan Ormas/LSM dalam bidang Kesbangpol	Jumlah pembinaan ormas/LSM	Orang	100	100	100	-	-	-	-	-	100,00	100	100,00		
	JUMLAH CAPAIAN KINERJA											100,00				
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					711,79	125		-	-	125					
												ST				
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)											100,00				
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)											SR				
04.07.01	**Prgram Pelayanan Perkantoran**	**% Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**163**	**-**						
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik	bulan	72	12	96	24	24	20	-	68	70,83	80	111,11	Kec. Lalabata	
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK	Unit	36	20	24		4	5		9	37,50	9	25,00	Kec. Lalabata	
05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Pembersih	jenis	120	14	54	13	20	15		48	88,89	62	51,67	Kec. Lalabata	
06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik	jenis	60	15	6	1		1		2	33,33	17	28,33	Kec. Lalabata	
08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Koran / Majalah	jenis	30	12	15	-	7	6		13	86,67	13	43,33	Kec. Lalabata	
09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian BBG	tbg	72	101	76	1	16	5		22	28,95	123	170,83	Kec. Lalabata	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kali	750	540	1.104	5	103	89		197	17844,20	737	98,27	Kec. Lalabata	
11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	bln	72	107	93	23	48	22		93	100,00	200	277,78	Kec. Lalabata	
												2286,30		100,79		
												T		SR		
04.07.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**% Sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**98**							
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	jenis	103	16	52			-		-	0,00	16	15,53	Kec. Lalabata	
09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	jenis	97	23	-					-	#DIV/0!	23	23,71	Kec. Lalabata	
10	Pengadaan Meubuler	Jumlah Rumah Jabatan yang diadakan	jenis	99	33	-					-	#DIV/0!	33	33,33	Kec. Lalabata	
13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	gdg-hlm	1.020	249	326		163	98		261	80,06	261,00	25,59	Kec. Lalabata	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	unit	36	20	23	23		-		23	100,00	23	63,89	Kec. Lalabata	
17	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jenis	50	17	40		20			20	50,00	37	74,00	Kec. Lalabata	
20	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	jenis	2	150	-					-	#DIV/0!	150	7500,00	Kec. Lalabata	
												#DIV/0!		1289,34		
												R		SR		
04.07.03	**Program Profesionalisme Aparatur**	**% ASN yang berkinerja baik**	**%**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**-**	**-**	**1**	**50**	**9**	**450**		
01	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas	psg	352	88	-	-	-	-	-	-					
09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti diklat / bimtek	Jenis	2	8	2	1	-	-	-	1	50,00	9	450,00	Kec. Lalabata	
												#DIV/0!		450,00		
												ST		SR		
04.07.27	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan/Capaian Kinerja dan Keuangan**	**% Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan**	**%**	**100**	**-**	**100**	**-**				**0**	**0**	**0**	**0**		
08	Penyusunan Profil Kelurahan	Jumlah penyusunan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat guna	Buah	60	-	7		-	-		-	0,00	-	0,00		
												0,00		0,00		
												SR		SR		
04.07.28	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**% Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan**	**%**	**100**	**100**	**100**	18									
01	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan	Jumlah keterangan / Ijin yang diterbitkan	Buah	450	150	150	18	36			54	36,00	204	45,33	Kec. Lalabata	
												36,00		45,33		
												SR		SR		
04.07.28	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**	**Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan**		**100**	**100**	**100**					**7**	**100**	**21**	**55**		
01	Bupati Menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Kali	10	2	2		1			1	50,00	3	30,00	Kec. Lalabata	
02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah Masyarakat yang mengikuti	Kali	72	12	12			6		6	50,00	18	25,00	Kec. Lalabata	
												50,00		27,50		
												SR		SR		
04.07.29	**ProgramPeningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan**	**% Kelembagaan dan Penyelenggara Ibadah yang dibina**	**%**	**100**	**100**	**100**	**-**	**334**	**-**	**-**	**334**	**147,53**	**334,00**	**#DIV/0!**		
01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	org	36	3	3	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	Kec. Lalabata	
02	Fasilitasi pembinaan guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan dan penghulu syara'	Jumlah guru mengaji, imam masjid, pendeta, kelurahan yg diberi intensif	org	1.638	272	272	-	136	-	-	136	50,00	136	8,30	Kec. Lalabata	
03	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah RT, RW, LPMK yang diberi intensif	org	191	406	191	-	93	-	-	93	48,69	93	48,69	Kec. Lalabata	
04	Fasilitasi kader Posyandu	Jumlah kader posyandu yang diberi intensif	0rg	1.290	215	215	-	105	-	-	105	48,84	105	8,14	Kec. Lalabata	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
05	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah kader posyandu yang diberi intensif	0rg	-	-	2	-	-	-	-	-	0,00	-	#DIV/0!	Kec. Lalabata	
												0,00		#DIV/0!		
												SR		SR		
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRA										#DIV/0!		#DIV/0!		
		KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)										T		SR		
4.4.27	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan	%	100												
4.4.27.1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	jumlah perizinan dan non perizinan	buah	150	-	150	40	35	30	45	150	100,00	150	100,00		
4.04.01	**Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu**	%	100												
4.04.01.01	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kali	12	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24	200,00	Kantor Camat Marioriwawo	
4.04.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	unit	51	11	7		3	2	2	7	100,00	18	35,29		
4.04.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	orang/ buah	4 / 876	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24			
4.04.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	buah	740	12	5	1	1	1	2	5	100,00	17	2,30		
4.04.01.07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	jenis	99		1					-	0,00	-	0,00		
4.04.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terbitan	648	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24	3,70		
4.04.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	kali	340	48	48	12	12	6	18	48	100,00	96	28,24		
4.04.01.10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	kali	3677	380	442	114	179	119		412	93,21	792	21,54		
4.04.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	paket	24	32	31	5	5	10	11	31	100,00	63	262,50		
												99,15		69,20		
												ST				
4.04.02	**Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	%	100									-	0,00		
4.04.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan air bersih	paket	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	100,00		
4.04.02.07	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	2												
4.04.02.08	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantoryang diadakan	unit	51	4	11	7	1	1		9	81,82	13	25,49		
4.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	23	5		-	-	-	-	-	-	5	21,74		
4.04.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah mebeler yang diadakan	unit	213	10		-	-	-	-	-	-	10	4,69		
4.04.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	unit	3	12	12	12				12	100,00	24	800,00		
4.04.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan	unit	1	-	-					-	0,00	-	0,00		
4.04.02.15	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	12	11	11	2	2	2	5	11	100,00	22	183,33		
4.04.02.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	198	21	17	4	4	4	5	17	100,00	38	19,19		
4.04.02.20	Rehabilitasi sedang/berat halaman, pagar, tempat parkir	luas halaman dan taman yang direhab	meter	450		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00		tidak ada di dalam Renstra

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
												95,45		164,92		
												ST				
4.04.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**	**Persentase ASN yang berkinerja baik**	%	100									-			
4.04.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Jumlah pakaian dinas /pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	set	422	48	-	-	-	-	-	-	-	48			
4.04.03.09	Bintek Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	kegiatan	21	6	2		1		1	2	100,00	8	38,10		
												100,00		19,05		
												SR				
4.04.28	**Program Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**	**Jumlah rekomendasi yang dihasilkan**	rekomendasi	5							-		-			
4.04.28.01	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	kali	2	2	2		1	1		2	100,00	4	200,00		
4.04.28.02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	orang	3000	12	12		3	3	6	12	100,00	24	0,80		
												100,00		100,40		
												ST				
4.04.04	**Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan caaian Kinerja dan Keuangan Daerah**	**Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu**	%	**100**							-		-			
4.04.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	dokumen	10												
4.04.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	dokumen	10	3	3				3	3	100,00	6	60,00		
4.04.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	dokumen	21												
4.04.04.04	Profil kelirahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	dokumen	2	2	2					1	50,00	3	150,00		
												75,00		105,00		
												S				
4.04.29	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan**	**Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina**	%	100							-		-			
4.04.29.01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa difasilitasi	desa	11	11	11		3	3	5	11	100,00	22	200,00		
4.04.29.02	Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara	Jumlah Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan yang diberi intensif	OB	51	51	51		25		26	51	100,00	102	200,00		
4.04.29.03	Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RTRW/LPMK yang diberi intensif dan jmlh orang yg mengikuti gemar mario	OB	53	53	53		26		27	53	100,00	106	200,00		
4.04.29.04	Fasilitasi Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang diberi intensif	OB	55	55	55		27		28	55	100,00	110	200,00		
4.04.29.05	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	kali	2		2		1		1	2	100,00	2	100,00		
												100,00		225,00		
												ST				
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)										95,66		111,94		
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)										SR				
20.11.01	***Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran***															
20.11.01.02	#REF!	#REF!	#REF!				3	3	3	3	12	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.01.06	#REF!	#REF!	#REF!					1	2	2	5	100,00			Kecamatan & Kelurahan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
20.11.01.08	#REF!	#REF!	#REF!				500 m2 dan 2 orang	500 m2 dan 2 orang	500 m2 dan 2 orang	500 m2 dan 2 orang	500 m2 dan 2 orang	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.01.12	#REF!	#REF!	#REF!				0	3	3	4	10	75,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.01.15	#REF!	#REF!	#REF!				0	400 eks	400 eks	550 Eks	1350 eks	96,43			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.01.16	#REF!	#REF!	#REF!				3	3	3	3	12	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.01.18	#REF!	#REF!	#REF!				3	3	3	3	12	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.01.20	#REF!	#REF!	#REF!				Kasi 2org,Kasu bag 1org	Kasi 1org,Kasu bag 1org	Kasi 1org,Kasu bag 1org	Kasi 1org,Kasu bag 1org	#REF!	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.02	***Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur***															
20.11.02.05	#REF!	#REF!	#REF!							0	0				Kecamatan	
20.11.0207	#REF!	#REF!	#REF!				2 Jenis	2 Jenis	0	2 jenis	6 jenis	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.02.09	#REF!	#REF!	4 unit				1 unit		1 unit	2 unit	4 unit	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.02.10	#REF!	#REF!	#REF!				54 Unit	0	1 paket		54 unit 1 paket	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.02.22	#REF!	#REF!	#REF!				Gdng 10m2, Hlmn 100m2	Gdng 10m2, Hlmn 100m2	Gdng 10m2, Hlmn 100m2	Gdng 10m2, Hlmn 100m2	Gdng 40m2, Hlmn 400m2	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.02.24	#REF!	#REF!	#REF!				Roda 4 = 1 unt, Roda 2 = 1 unt	Roda 4 = 1 unt, Roda 2 = 1 unt	Roda 4 = 1 unt, Roda 2 = 1 unt	Roda 4 = 1 unt, Roda 2 = 1 unt	Roda 4 = 1 unt, Roda 2 = 1 unt	80,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.02.28	#REF!	#REF!	#REF!				0	10 Unit		10 unit	20 unit	90,91			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.02.42	#REF!	#REF!	#REF!							1 paket	1 paket	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.03	***Program Peningkatan Disiplin Aparatur***															
20.11.03.02	#REF!	#REF!	#REF!							27 orng	27 org	100,00			Kecamatan & Kelurahan	
20.11.05	***Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur***															
20.11.05.03	#REF!	#REF!	#REF!						1 Orang	1 Orang	2 orang	20,00			Kecamatan	
20.11.06	***Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan***															
20.11.06.01	#REF!	#REF!	#REF!						9	3	12	100,00			Kecamatan	
20.11.21	***Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial***															
20.11.21.05	#REF!	#REF!	#REF!						Guru mengaji 71 org, Imam mesjid 22 org	Guru mengaji 71 org, Imam mesjid 22 org	Guru mengaji 71 org, Imam mesjid 22 org	97,89			Kecamatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
20.11.19	***Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan***															
20.11.19.02	#REF!	#REF!	#REF!					20 Orang	20 Orang	22 Orang	62 orang	100,00			Kecamatan	
20.11.19	***Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa***															
20.11.19.04	#REF!	#REF!	#REF!					3	3	3	3	100,00			Kecamatan	
20.11.15	***Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan***															
20.11.15.01	#REF!	#REF!	#REF!						RT 66 org, RW 21 org, LPMK 3 org	RT 66 org, RW 21 org, LPMK 3 org	RT 66 org, RW 21 org, LPMK 3 org	100,00			Kecamatan	
20.11.15	***Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Perdesaan***															
20.11.15.13	#REF!	#REF!	#REF!						40 Org	40 Org	80 org	100,00			Kecamatan	
												90,01		**0,00**		
												T		**s.rendah**		
04.08.01	**Prgram Pelayanan Perkantoran**	% Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu														
04.08.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik	Kali	72	12	12	3	3	3	3	12	100,00	24	33,33	Kec. Citta	
04.08.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK	Unit	25	6	3		3		3	6	200,00	12	48,00	Kec. Citta	
04.08.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Pembersih	Buah	72	12	3	3		3	3	9	300,00	21	29,17	Kec. Citta	
04.08.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik	Buah	120	12	2		3	3	3	9	450,00	21	17,50	Kec. Citta	
04.08.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Koran / Majalah	Jenis	30	12	5		3	3	3	9	180,00	21	70,00	Kec. Citta	
04.08.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian BBG	Tabung	72	12	10		3	3	3	9	90,00	21	29,17	Kec. Citta	
04.08.01.10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kali	1.284	12	673	3	3	3	3	12	1,78	24	1,87	Kec. Citta	
04.08.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Orang	8	12	15	3	3	3	3	12	80,00	24	300,00	Kec. Citta	
04.08.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	% Sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik														
20.12.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	10	1	1					-	0,00	1	10,00	Kec. Citta	
05.01.02.04	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah/Jabatan Dinas	Jensi	35	-	1					-	0,00	-	0,00	Kec. Citta	
04.08.02.06	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terpenuhnya Kendaraan Dinas Untuk Menunjan Kinerja Aparat	Unit	1		3					-	0,00	-	0,00	Kec. Citta	
04.08.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jenis	58	9	9					-	0,00	9	15,52	Kec. Citta	
04.08.02.11	Pengadaan Mebeleur	Terpenuhnya meubeler	Unit	15	6	50					-	0,00	6	40,00	Kec. Citta	
04.08.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Unit	1	12	40	3	3	3	3	12	30,00	24	2400,00	Kec. Citta	
04.08.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit	6	6	3	2	2	2	2	8	266,67	14	233,33	Kec. Citta	
04.08.02.19	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	12	12	3		3	3	3	9	300,00	21	175,00	Kec. Citta	
04.08.03	**Program Profesionalisme Aparatur**															
04.08.03.09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Diklat yang diikuti	Kali	20	3	1					-	0,00	3	15,00	Kec. Citta	
20.10.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas	Psg	42	24	41					-	0,00	24	57,14	Kec. Citta	
04.08.27	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	% Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
04.08.27.01	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan	Jumlah keterangan / Ijin yang diterbitkan	Buah	750	12	150		3	3	3	9	6,00	21	2,80	Kec. Citta	
04.08.28	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan														
04.08.28.01	Bupati Menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Kali	10	2	2			2	2	4	200,00	6	60,00	Kec. Citta	
04.08.28.02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah Masyarakat yang mengikuti	Orang	125	25	12		3	3	6	12	100,00	37	29,60	Kec. Citta	
04.08.29	**Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa**															
04.08.29.01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	4	12	12		3	3	6	12	100,00	24	600,00	Kec. Citta	
04.08.29.05	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kec.sehat	Desa			12				12	12	100,00	12	#DIV/0!	Kec. Citta	
04.04.04.	**Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah**															
04.04.04	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	10	2	12				12	12	100,00	14	140,00	Kec. Citta	
04.04.04.04	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan semester/akhir tahun	Dokumen	10	2	12				12	12	100,00	14	140,00	Kec. Citta	
04.04.04	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	10	2											
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM															
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRA											142,34		#DIV/0!		
	KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)											R		SR		
4.04.11.01	**Prgram Pelayanan Perkantoran**	**% Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu**														
4.04.11.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi dan listrik	Kali	72	24	12	3	3	3	3	12	100,00	36	50,00	Kec. Ganra	
4.04.11.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	7	3	3	-	1	1	1	3	100,00		0,00	Kec. Ganra	
4.04.11.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	orang	3	2	2	2	2	2	2	2		2		Kec. Ganra	
			Jenis	48	16	8	8	8	8	8	8	100,00	24	50,00		
4.04.11.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan	buah	35	11	5	2	1	1	1	5	100,00	16	45,71	Kec. Ganra	
4.04.11.01.07	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	buah	30	7	5	5	-	-	-	5	100,00	12	40,00	Kec. Ganra	
4.04.11.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	terbitan	5	8	5	5	5	5	5	5	100,00	5	100,00	Kec. Ganra	
4.04.11.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian Tabung Gas	Kali	68	20	8	1	1	2	4	8	100,00	28	41,18	Kec. Ganra	
4.04.11.01.10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya	Jumlah Rapat-=Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	1.900	670	320	1	3	88	291	383	119,69	1.053	55,42	Kec. Ganra	
4.04.11.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran	Paket	15	14	15	15	15	15	15	15	100,00	15	100,00	Kec. Ganra	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**102,19**				
											Predikat Kinerja	**ST**				
4.04.11.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**% Pemenuhan Sarana dan prasarana perkantoran**														
4.04.11.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Unit	24	3	6	-	-	-	6	6	100,00	9	37,50	Kec.Ganra	
4.04.11.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	29	15	-	-	-	-	-	-	0,00	15	51,72	Kec. Ganra	
4.04.11.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	Unit	33	13	-	-	-	-	-	-	0,00	13	39,39	Kec. Ganra	
4.04.11.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung dan Halaman Kantor yang Dipelihara	Unit	2	2	2	-	-	2	2	2	100,00	2	100,00	Kec. Ganra	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.04.11.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Unit	7	3	3	3	3	3	3	3	100,00	3	42,86	Kec. Ganra	
4.04.11.02.19	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Unit	6	13	15	2	5	-	8	15	100,00	28	466,67	Kec. Ganra	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100,00**				
											Predikat Kinerja	**SR**				
4.04.11.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**	**% ASN yang berkinerja baik**														
4.04.11.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	Set	253	62	25	-	-	-	25	25	100,00	87	34,39	Kec. Ganra	
4.04.11.03.09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan	org	11	4	7	-	1	-	6	7	100,00	11	100,00	Kec. Ganra	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100,00**				
											Predikat Kinerja	**ST**				
4.04.11.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**% Penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu**														
4.04.11.04.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Capaian SKPD	Dok	10	-	2	-	-	-	2	2	100,00	2	20,00	Kec. Ganra	
4.04.11.04.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	Dok	14	-	2	-	-	-	2	2	100,00	2	14,29	Kec. Ganra	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100,00**				
											Predikat Kinerja	**ST**				
4.04.11.27	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**% Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan**														
4.04.11.27.01	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	Buah	750	49	150	93	105	102	67	367	244,67	416	55,47	Kec. Ganra	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**244,67**				
											Predikat Kinerja	**ST**				
4.04.11.28	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**	**Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan**														
4.04.11.28.01	Bupati Menyapa	Jumlah Tatap Muka yang dilaksanakan	Kali	10	1	2	-	-	1	1	2	100,00	3	30,00	Kec. Ganra	
4.04.11.28.02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah Penyuluhan Penyuluhan yang dilaksanakan	kali	72	24	12	-	3	3	6	12	100,00	36	50,00	Kec. Ganra	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100,00**				
											Predikat Kinerja	**ST**				
40.4.11.29	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/KelurahanKeuangan Desa**	**% Kelembagaan dan Penyelenggaraan ibadah yang dibina**														
4.04.11.29.01	Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	4	4	4	-	-	-	4	4	100,00	8	200,00	Kec. Ganra	
4.04.11.29.05	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	kali	6	-	2	-	-	-	2	2	100,00	2	33,33	Kec. Ganra	
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)	**100,00**				
											Predikat Kinerja	**ST**				
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														
		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGR										120,98		78,39		
		KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 6)										ST		T		
4.04.4.04.10.01	**Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran**															
4.04.4.04.10.01.01	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya air, listrik, telpon dan jaringan ir	Bulan	58	12	12	3	3	3	3	6	50	18	31	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Tersedianya perizinan Kendaraan Dinas /Op	unit	30	12	12	3	3	3	3	6	50	18	60	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	- Terciptanya gedung kantor yang bersih dan nyaman	jenis	38	12	12	3	3	3	3	6	50	18		Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Instalasi Listrik dan Penerangan yang memadai	jenis	38	12	12	3	3	3	3	6	50	18	47	Kantor Camat Lilirilau	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
4.04.4.04.10.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	- Tersedianya surat kabar/majalah	examplar	3.000	12	12	3	3	3	3	6	50	18	1	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Tersedianya Bahan Logistik	kali	58	12	12	3	3	3	3	6	50	18	31	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.01.10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	- Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah guna kelancaran pelayanan publik	kali	1.920	12	12	3	3	3	3	6	50	18	1	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.01.09	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Tersedianya ATK, Materai, Makan Minum, Cetak/Penggandaan untuk Pelayanan Adm,Honor tim pengelola keuangan	orang	42	12	12	3	3	3	3	6	50	18	43	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.02	**Program Peana Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur**														Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	- Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Kantor	jenis	21	12	12	8 jenis	3	3	3	6	50	18	86	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.02.07	Pengadaan kendaraan Dinas Dinas	- Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional	jenis	23	12	12	1 unit	3	3	3	6	50	18	78	Kantor Camat Lilirilau	
	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	- Terpenuhinya Peralatan kantor	jenis	23	12	12										
4.04.4.04.10.02.10	Pengadaan Meubelair	- Terpenuhinya Kebutuhan Mebeulair Kantor	jenis	46	12	12	-	3	3	3	6	50	18	39	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.02.13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya bangunan yang layak fungsi	buah	6	12	12	3	3	3	3	6	50	18	300	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.02.15	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan dinas Operasional yang layak fungsi	unit	16	12	12	3	3	3	3	6	50	18	113	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	- Tersedianya peralatan gedung kantor yang l	unit	19	12	12	3	3	3	3	6	50	18	95	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.03	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**															
4.04.4.04.10.03.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas	buah	320	12	12	-	3	3	3	-		12		Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.03.09	Bintek Peraturan Perundang-undangan	- Meningkatnya Pengetahuan keterampilan Pl	orang	12	12	12	2 0rang	3	3	3	-		12	100	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.04	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Keuangan Kinerja dan Keuangan**															
4.04.4.04.10.04.09	Penyusuna Profil Kelurahan	Tersedinaya Dokumen Profil kelurrahan	dok.	4			4						-		Kantor Kelurahan	
4.04.4.04.10.04.10	Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun															
4.04.4.04.10.27	**Program Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)**															
4.04.4.04.10.27.01	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan	Presentase Surat IZIN yang diterbitkan	lembar	100									-		Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.28	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan**															
4.04.4.04.10.28.01	Bupati Menyapa	Presentase tatap muka yang dilaksanakan	kali	12	12		2	3					12		Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.28.02	Penyuluhan Kamtibmas	- Persentase peserta yang mengikuti penyuluhan Kamtibmas	orang	300	12	12	3	3			-		12	4	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.29	**Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan**															
4.04.4.04.10.29.01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	- Persentase pengelolaan dana ADD didesa tepat waktu	desa	8	12	12	-	3			-		12	150	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.29.02	Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji,Imam Masjid Kelurahan dan Penghulu Syara	Presentase guru Mengaji dan Imam Masjid yang dibayar	orang	115	12			3						-	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.29.03	Fasilitasi Lembaga dan Orgnisasi Masyarakat Kelurahan	Presentase ketua RT,Ketua RW,dan LPMK yang dibayar	orang	123	12			3						-	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.29.04	Fasilitasi Kader Posyandu	Presentase Kader Posyandu yang dibayar	orang	135	12			3						-	Kantor Camat Lilirilau	
4.04.4.04.10.29.05	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Terselenggaranya masyarakat hidup sehat						3								
										:ata-rata capaian kinerja (%)		45,61		61,25		
										Predikat Kinerja		SR		SR		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM.....)												41,42		68,86		
PREDIKAT KINERJA DARI SELUEUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM.....)												SR		SR		
04.08.01	**Prgram Pelayanan Perkantoran**	**% Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu**	**%**	**100**	**100**	**100**										
04.08.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telepon, air dan listrik	Kali	72	12	12		3	3	3	9	75,00	21	29,17	Kec. Donri-Donri	
04.08.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perpanjangan STNK	Unit	4	3	3		1	2	-	3	100,00	3	75,00	Kec. Donri-Donri	
04.08.01.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Pembersih	Buah	106	18	18		18	-	-	18	100,00	36	33,96	Kec. Donri-Donri	
04.08.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik	Buah	625	106	106		106	-	-	106	100,00	212	33,92	Kec. Donri-Donri	
04.08.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Koran / Majalah	Terbitan	5	5	5		2	2	1	5	100,00	5	100,00	Kec. Donri-Donri	
04.08.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengisian BBG	Kali	70	10	12		4	3	5	12	100,00	22	31,43	Kec. Donri-Donri	
04.08.01.10	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Kali	2.783	709	430		3	67	384	454	105,58	1.163	41,79	Kec. Donri-Donri	
04.08.01.11	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Paket	29	5	5	1	1	1	2	5	100,00	10	34,48	Kec. Donri-Donri	
												97,57		47,47		
												S		SR		
04.08.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**% Sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik**	**%**	**100**	**100**	**100**										
04.08.02.06	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Unit	4	3	1			-		-	0,00	3	75,00	Kec. Donri-Donri	
04.08.02.06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas	Unit	7	3	17			-	17	17	100,00	20	285,71	Kec. Donri-Donri	
04.08.02.13	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor	Unit / M2	1	1	2			1	1	2	100,00	2,00	200,00	Kec. Donri-Donri	
04.08.02.15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan yang dipelihara	Unit	4	3	3		1	1	1	3	100,00	3	75,00	Kec. Donri-Donri	
04.08.02.19	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	14	4	2			2	-	2	100,00	6	42,86	Kec. Donri-Donri	
												80,00		120,71		
												T		ST		
04.08.03	**Program Profesionalisme Aparatur**	**% ASN yang berkinerja baik**	**%**	**100**	**100**	**100**										
04.08.03.09	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti diklat / bimtek	PNS	6	4	8		1	-	6	7	87,50	11	183,33	Kec. Donri-Donri	
20.10.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Jumlah Pakaian Dinas	Set	208		27			27	-	27	100,00	27	12,98	Kec. Donri-Donri	
												93,75		98,16		
												ST		ST		
04.08.27	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**	**% Penyusunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu**	**%**	**100**		**100**										
04.08.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen	43		7			-	7	7	100,00	7	16,28	Kec. Donri-Donri	
04.08.04.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran / Akhir Tahun	Dokumen	42		7			-	7	7	100,00	7	16,67	Kec. Donri-Donri	
												100,00		16,47		
												ST		SR		
04.08.27	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**% Jenis Pelayanan yang telah dilaksanakan**	**%**	**100**	**100**	**100**										
04.08.27.01	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan	Jumlah keterangan / Ijin yang diterbitkan	Buah	750	182	150	94	71	97	76	338	225,33	520	69,33	Kec. Donri-Donri	
												225,33		69,33		
												ST		R		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV						
04.08.28	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**	**Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan**		**100**	**100**	**100**										
04.08.28.01	Bupati Menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	Kali	10	1	2		1	1	-	2	100,00	3	30,00	Kec. Donri-Donri	
04.08.28.02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	Orang	1.800	535	300		140	130	260	530	176,67	1.065	59,17	Kec. Donri-Donri	
												138,33		44,58		
												ST		SR		
04.08.29	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa / Kelurahan**	**% Kelembagaan dan Penyelenggara Ibadah yang dibina**	**%**	**100**	**100**	**100**										
04.08.29.01	Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Desa	9	9	9			4	5	9	100,00	9	100,00	Kec. Donri-Donri	
04.08.29.05	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	Kali			2			-	2	2	100,00	2		Kec. Donri-Donri	
												100,00		50,00		
												ST		SR		
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PRO									119,28		63,82		
			DIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)									ST		R		
4.4.27	**Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)**	**Persentase jenis pelayanan yang telah dilaksanakan**	**%**	**100**												
4.4.27.1	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	jumlah perizinan dan non perizinan	buah	1000	-	200						0,00	-	0,00		
												-				
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)		**S. Rendah**		
4.4.28	**Program Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**	**Jumlah rekomendasi yang dihasilkan**	**rekomendasi**	**5**							-		-			
4.4.28.01	Bupati menyapa	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	kali	10		2			1	1		0,00	-	0,00		
4.4.28.02	Penyuluhan Kamtibmas	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	orang	1400	12	12			6	6		0,00	12	0,86		
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)		**-**		
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)		**S. Rendah**		
2.7.1.	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat Desa/Kelurahan**	**Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah desa/kelurahan yang dibina**	**%**	**100**							-		-			
2.7.1.01	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Dana ADD di Desa	Jumlah desa difasilitasi	desa	5	5	5				5		0,00	5			
2.7.1.02	Fasilitasi Pembinaan Guru Mengaji, Imam Masjid dan Penghulu Syara	Jumlah Guru Mengaji, Imam Masjid Kelurahan yang diberi intensif	OB	6438	93	97						0,00	93			
2.7.1.03	Fasilitasi lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Jumlah RTRW/LPMK yang diberi intensif	OB	5976	88	88						0,00	88			
2.7.1.04	Fasilitasi Kader Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang diberi intensif	OB	1020	85	85						0,00	85			
2.7.1.05	Penyelenggaraan Kecamatan Sehat	Jumlah pelaksanaan koordinasi Kecamatan Sehat	Kali	2		2			1	1		0,00	-			
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)		**-**		
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)		**S. Rendah**		
5.1.1	**Prgram Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase penyelesaian kegiatan tepat waktu**	**%**	**100**												
5.1.1.01	Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	kali	72	12	12		6	3	3		0,00	12	16,67	Kantor Camat Marioriwawo	
5.1.1.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	unit	17	17	17		6				0,00	17	100,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Satuan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun Akhir Periode Renstra SKPD	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2017)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2018)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2018)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 (%)	Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
							I	II	III	IV					
5.1.1.03	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	orang/ buah	2 / 876	12	12		6				0,00	12			
5.1.1.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	buah	560	12	12		6				0,00	12	2,14		
5.1.1.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	terbitan	648	12	12		6	3	3		0,00	12	1,85		
5.1.1.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian gas	kali	2700	12	12						0,00	12	0,44		
5.1.1.07	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	kali	4500	12	12						0,00	12	0,27		
5.1.1.08	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	paket	72	12	12	3					0,00	12	16,67		
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)	-				
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)	S. Rendah				
5.1.2	**Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**%**	**100**									-	0,00		
5.1.2.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	3	1						-	0,00	1	33,33		
5.1.2.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantoryang diadakan	unit	25	1	33					-	0,00	1	4,00		
5.1.2.03	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit	72	9						-		9	12,50		
5.1.2.04	Pengadaan Meubelair	Jumlah mebeler yang diadakan	unit	60	9								9			
5.1.2.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor	unit	6	12	12						0,00	12	200,00		
5.1.2.06	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	12	12	12	3					0,00	12	100,00		
5.1.2.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit	50	12	12						0,00	12	24,00		
5.1.2.08	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit	1												
5.1.2.09	Rehabilitasi sedang/berat halaman, pagar, tempat parkir	luas halaman dan taman yang direhab	paket	3								0,00	-	0,00		
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)	-				
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)	S. Rendah				
5.1.3	**Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur**	**Persentase ASN yang berkinerja baik**	**%**	**100**									-			
5.1.3.01	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya	Jumlah pakaian dinas /pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	pasang	168		0							-			
5.1.3.02	Bintek Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kegiatan Bimtek yang diikuti	kegiatan	17	12	12						0,00	12	70,59		
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)	-				
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)	S. Rendah				
4.2.1	**Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan caaian Kinerja dan Keuangan Daerah**	**Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu**	**%**	**100**							-		-			
4.2.1.01	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	dokumen	10							-	0,00	-	0,00		
4.2.1.02	Profil kelurahan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	dokumen	5		5					-	0,00	-	0,00		
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)	-				
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)	S. Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)	-		26,48		
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM 7)	S. Rendah		S. Rendah		

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dokumen RKPD memuat analisis ekonomi daerah yang dimaksudkan untuk menilai sejauhmana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan mengetahui sejauhmana pencapaian target indikator ekonomi daerah apakah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Disamping itu, analisis ekonomi tersebut digunakan sebagai salah satu input utama dalam membuat analisis keuangan daerah. Selanjutnya, analisis ekonomi dan kondisi keuangan tersebut selain dijadikan dasar untuk menentukan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan guna mengatasi permasalahan-permasalahan penting dalam tataran pembangunan tahunan daerah. Dengan demikian rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan akan menjadi pijakan dalam penyusunan dan pengalokasian sumber daya daerah.

Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sehingga akan menjadi pedoman dan arah aktivitas pembangunan ekonomi oleh lintas pelaku (*stakeholder*) untuk mengantar Kabupaten Soppeng pada kondisi ekonomi yang diharapkan dengan mengembangkan dan memantapkan ketahanan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, penyusunan rancangan kerangka ekonomi daerah secara cermat dan akurat menjadi syarat bagi perumusan kebijakan keuangan daerah yang tepat.

Bab ini menjelaskan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Soppeng tahun 2018, dan prospek perekonomian Kabupaten Soppeng tahun 2019 dan 2020. Bab ini juga membahas perkiraaan keuangan daerah serta kebijakan keuangan daerah termasuk kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2020.

3.1. Arah Kebijakan ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan

pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2020 (RPJMN 2015-2020): "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas", maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,0-4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, Kalimantan 4,08 persen, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persen Papua 7,18 persen.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan nasional tahun 2020. Dengan demikian, hal tersebut menjadi barometer dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Kabupaten Soppeng Tahun 2020. Selain itu, sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2020 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan nasional yaitu:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup; dan
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017 dan Perkiraan Tahun 2019

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng Tahun 2018 sebesar 8,15 persen lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,17 persen dan pertumbuhan ekonomi provinsi yang sebesar 7,07 persen. Walaupun demikian laju pertumbuhan ekonomi Kab Soppeng pada tahun 2018 sedikit melambat dibanding tahun 2017 yang sebesar 8,29 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng terjadi pada seluruh kategori lapangan usaha. Kategori lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan andil terbesar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng meskipun pada tahun 2018, meskipun mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun 2017. Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 yaitu kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 12,09 persen serta jasa pendidikan sebesar 10,08 persen.

Kondisi perekenomian global pada tahun 2019 diperkirakan masih ada tantangan yang akan dihadapi pemerintah seperti ketidakpastian arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat, perang dagang Amerika Serikat dan China serta dinamika harga komoditas internasional menjadi tantangan eksternal.

Meskipun demikian, ditengah kondisi ekonomi global dan nasional yang berfluktuatif namun kinerja perekonomian Kab. Soppeng pada tahun 2019 diperkirakan optimis tumbuh pada kisaran 8,4 persen. Penepatan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang masih cukup baik didukung oleh beberapa faktor seperti konsumsi masyarakat Kab. Soppeng masih diperkirakan memberikan kontribusi terbesar yang didukung oleh daya beli masyarakat yang tinggi, program pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga untuk menahan laju inflasi serta meningkatnya sektor jasa lainnya akibat adanya pelakasanaan Pemilihan Umum pada tahun 2019 serta ditunjang oleh program program pembangunan pemerintah Kabupaten Soppeng.

Tabel 3.1
Laju Perumbuhan Ekonomi Nasional, Prov. Sul-Sel dan Kab. Soppeng
Tahun 2015-2018

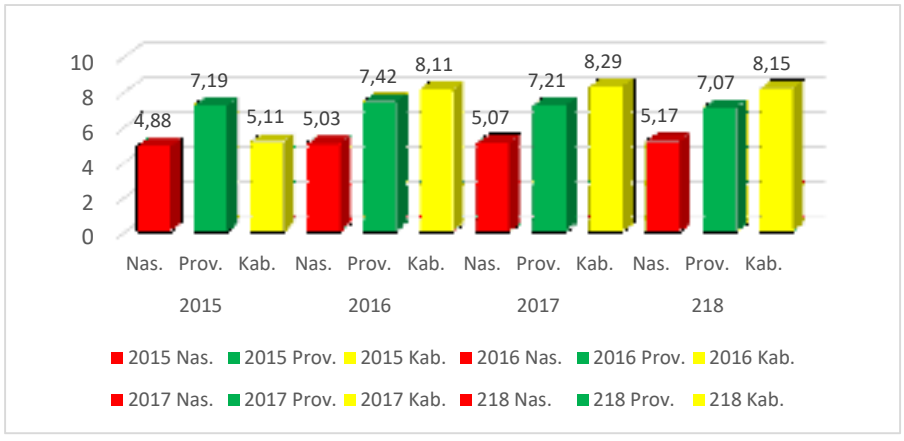

Sumber: Data Diolah

b. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah.

Perekonomian Kabupaten Soppeng pada tahun 2018 tetap menunjukkan perkembangan yang positif, yang tercermin dari nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp.1.000.145,6 juta. Hal tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi di Kab. Soppeng masih tumbuh menggeliat.

Jika dilihat dari komponen penyusunnya, kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi lapangan usaha utama yang memberikan

produktivitas tertinggi di Kabupaten Soppeng dengan kontribusi pada tahun 2018 sebesar Rp.3.053.410,5 juta. Selanjutnya kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi tinggi yaitu konstruksi sebesar Rp.1.290.274,6,00 juta dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.1.276.053,6 juta. Selaras dengan karakteristik Kabupaten Soppeng sebagai Kabupaten yang mengandalkan sektor pertanian sebagai aktifitas ekonomi utama masyarakatnya. Besarnya produktivitas sektor pertanian tersebut menjadi pengungkit dalam mendorong tumbuhnya lapangan usaha penunjang lainnya yaitu kategori lapangan usaha kontruksi. Kontruksi menjadi kategori lapangan usaha yang memiliki prospek tumbuh tinggi dikarenakan semakin berkembangnya suatu wilayah maka semakin tinggi pula permintaan akan pembangunan fisik di Kab. Soppeng. .Untuk selengkapnya gambaran terkait PDRB ADHB Kab. Soppeng terangkum dalam Tabel III.2 berikut.

Tabel 3.2
PDRB ADHB Kab. Soppeng Tahun 2015-2018

No	Sektor	2015	2016	2017	2018*
		HB	HB	HB	HB
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.943.945,60	2.391.150,60	2.731.526,10	3.053.410,50
2	Pertambangan & Penggalian	286.945,40	356.041,70	384.274,80	432.920,40
3	Industri Pengolahan	728.525,00	822.548,30	936.725,30	1.048.113,00
4	Pengadaan Listrik, dan Gas	5.539,60	6.096,40	7.449,30	8.125,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang	3.233,60	3.553,30	4.050,10	4.504,90
6	Konstruksi	883.337,50	964.170,60	1.098.866,00	1.290.274,60
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	862.811,30	980.946,00	1.101.069,00	1.276.053,60
8	Transportasi dan Pergudangan	236.863,90	257.663,50	273.810,80	303.263,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	103.983,50	113.746,10	128.377,60	147.031,70
10	Informasi dan Komunikasi	185.991,40	218.035,40	261.882,20	299.074,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	234.756,80	276.358,40	295.267,60	324.413,00
12	Real Estate	384.530,30	438.088,30	483.696,50	527.386,20
13	Jasa Perusahaan	13.540,70	15.896,00	17.835,60	19.750,50
14	Administasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	501.131,30	521.439,50	561.179,30	607.050,80
15	Jasa Pendidikan	308.564,40	344.565,70	379.408,50	418.110,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111.467,50	128.931,50	145.963,10	167.871,50
17	Jasa Lainnya	48.440,20	56.708,30	64.825,10	74.102,00
PDRB		**6.843.608,00**	**7.895.939,60**	**8.876.206,90**	**10.001.456,00**

Sumber: BPS Tahun 2019

*** Angka Sementara***

Jika dilihat dari besaran PDRB atas dasar harga konstan yang menggambarkan produktivitas ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar konstan, PDRB ADHK Kab. Soppeng menggambarkan pola yang sama dengan PDRB ADHB yang mengalami kinerja positif. Nilai PDRB ADHK Kab. Soppeng pada tahun 2018 sebesar Rp.6.497.184 juta, yang diperkirakan meningkat dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp.6.007.455,7 juta. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kategori dengan nilai PDRB ADHK terbesar di tahun 2018 sebesar Rp.1.899.717,3 juta.

Tabel 3.3
PDRB ADHK Kab. Soppeng Tahun 2015-2018

No	Sektor	2015	2016	2017	2018*
		HK	HK	HK	HK
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.450.643,70	1.613.107,00	1.757.019,70	1.899.717,30
2	Pertambangan & Penggalian	158.534,50	175.714,50	189.228,40	207.354,40
3	Industri Pengolahan	529.141,10	564.498,30	621.778,80	657.200,80
4	Pengadaan Listrik, dan Gas	6.688,80	7.244,90	7.615,90	8.068,70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,, Limbah dan Daur Ulang	3.079,40	3.155,10	3.391,50	3.712,90
6	Konstruksi	644.797,60	672.422,90	728.663,30	793.817,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	718.737,90	789.092,60	860.583,90	943.562,00
8	Transportasi dan Pergudangan	150.806,00	160.047,70	172.636,30	190.016,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	80.319,10	86.675,10	95.683,30	107.252,30
10	Informasi dan Komunikasi	181.925,90	201.083,80	225.201,30	245.823,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	152.001,00	169.575,70	174.714,40	185.203,20
12	Real Estate	272.687,50	280.586,90	290.107,20	306.756,60
13	Jasa Perusahaan	11.316,40	12.291,80	13.248,40	14.568,10
14	Administasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	350.013,90	351.948,20	369.224,50	385.072,20
15	Jasa Pendidikan	289.837,30	317.755,90	342.203,40	376.713,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	95.081,70	103.499,80	113.580,00	124.167,00
17	Jasa Lainnya	36.103,40	38.990,60	42.575,30	48.178,00
PDRB		**5.131.715,20**	**5.547.690,80**	**6.007.455,60**	**6.497.184,00**

Sumber: BPS Tahun 2019
* ***Angka Sementara***

Nilai PDRB Kabupaten Soppeng atas dasar harga konstan telah meningkat dari Rp. 5.131.715.000.000,- pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp.5.549.501.390.000,- pada tahun 2016 . dan pada tahun 2017 meningkat lagi sebesar Rp.6.012.107.700.000,-. Kontribusi tujuh belas lapangan usaha pembentuk struktur PDRB Kabupaten Soppeng disajikan dalam Tabel 3.1. Selama tiga tahun terakhir struktur ekonomi Kabupaten Soppeng yang tercermin dari PDRB menurut lapangan usaha tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Tiga lapangan usaha dominan yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Soppeng adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor; dan konstruksi;. Kontribusi ketiga lapangan usaha tersebut pada tahun 2016 masing-masing sebesar 30,6 persen, 12,63 persen dan 12,59 persen. Total kontribusi ketiganya sebesar 55,82 persen.

c. Laju Inflasi

Fluktuasi inflasi daerah akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Soppeng yang cukup tinggi pada tahun terakhir tentu tidak akan terlalu bermakna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manakala laju inflasi juga cukup tinggi. Oleh karena itu, penentuan asumsi indikator inflasi merupakan langkah strategis dan penting.

Dengan menggunakan asumsi baseline dan tidak terdapat shock kebijakan harga dari Pemerintah, Laju inflasi di kabupaten Soppeng diharapkan pada kisaran 3 – 4 persen. Penetapan laju inflasi yang demikian merupakan perkiraan optimis, sebagaimana penetapan laju inflasi nasional. Jika laju inflasi terkendali, maka nilai barang dan jasa akan stabil sehingga secara akumulasi pertumbuhan ekonomi akan terasa dampaknya.

Tabel 3.4
Inflasi Kab. Soppeng Tahun 2014-2018

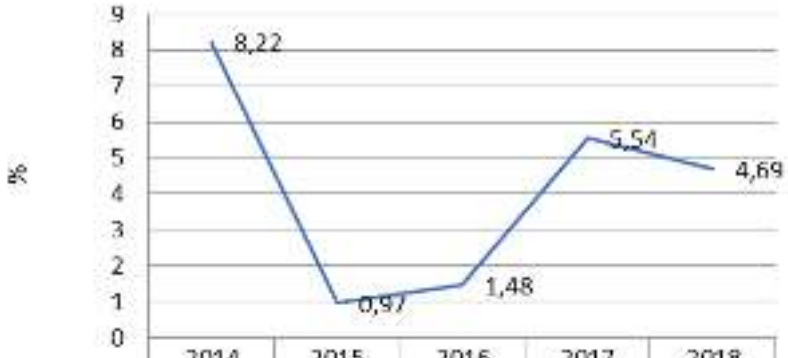

	2014	2015	2016	2017	2018
Inflasi	8,22	0,97	1,48	5,54	4,69

Sumber: Laju Inflasi Kab. Bone

Kestabilan harga yang tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehingga di Kabupaten Soppeng dibentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), , yang berupaya menjaga stabilitas harga dan inflasi di Kabupaten Soppeng. Secara periodik TPID telah melakukan pemantauan inflasi, mengeluarkan rekomendasi rekomendasi kebijakan, dan melakukan langkah-langkah antisipatif-preventif dalam rangka mengendalikan kenaikan harga dan inflasi.

Data-data PDRB, pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan perekonomian Kabupaten Soppeng sampai pada tahun 2018 dalam kondisi yang cukup kondusif yang ditandai dengan karakter pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Soppeng adalah wilayah yang berpotensi sebagai aktivitas investasi para investor baik dari dalam maupun luar wilayah untuk menanamkan modalnya dalam berbagai sektor ekonomi. Melihat perkembangan ekonomi makro tahun-tahun sebelumnya, dapat diprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara keseluruhan di Kabupaten Soppeng pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan kondisi yang kondusif, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat inflasi yang terkendali.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi Kab. Soppeng di tahun 2018 diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan untuk tahun 2020. Selain itu kondisi perekonomi daerah pada tahun 2020 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten Soppeng adalah aktivitas ekonomi Kabupaten Soppeng yang sangat tergantung pada sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi. Sehingga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berkelanjutan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan dan peningkatan peran koperasi dan UMKM harus lebih diintensifkan. Keberadaan UMKM dinilai penting dan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi, karena selain sebagai katup pengaman sekaligus juga sebagai penggerak perekonomian daerah dalam rangka mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan hal tersebut faktor pendorong perekonomian pada tahun 2020 diantaranya:

1. Konsumsi pemerintah yang tetap kuat sejalan dengan perbaikan pola penyerapan anggaran pemerintah daerah.
2. Berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan sarana publik.
3. Sektor pertanian yang akan semakin membaik seiring dengan komitmen pemda dalam mendorong pertanian, dimana proyek-proyek yang mendukung sektor pertanian diantaranya pembangunan beberap bending sudah dapat dilihat hasilnya.
4. Dukungan infrastruktur semakin ditingkatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kabupaten Soppeng agar terus berkembang baik melalui perbaikan maupun peningkatan kapasitasnya, antara lain pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan jalan yang bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan sehingga dapat mengurangi biaya transportasi bagi pelaku usaha di Kabupaten Soppeng. Selain itu tersedianya infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan investasi.
5. Perhelatan Pilkada Kab. Soppeng pada tahun 2020 dihrapkan dapat menjadi factor pendorong perekonomian Kab. Soppeng hal ini dikarenakan akan banyak kegiatan yang diharapkan medorong tingkat konsumsi rumah tangga.
6. Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Soppeng yang lebih baik ini dibuktikan dengan adanya opini BPK terhadap laporan keuangan Kab. Soppeng yang memperoleh opini WTP.
7. Struktur belanja pemerintah yang produktif, di mana Kondisi belanja daerah mengalami pertumbuhan sebagaimana pendapatan daerah. Ditinjau dari komposisi penggunaanya, komponen belanja pelayanan publik merupakan komponen yang cukup besar dalam menyerap belanja daerah.

Selain faktor pendorong diatas, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2020 adalah:

- Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor kenaikan harga beberapa komoditas seperti harga cabai merah, bawang dan tarif listrik.
- Mempercepat ketersediaan infrastruktur yang memadai guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur strategis maupun pembangunan infrastruktur lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif
- Perbaikan infrastruktur pertanian untuk menunjang perekonomian daerah mengingat sektor inilah yang merupakan sektor penopang ekonomi Kab. Soppeng.

- Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas.
- Kualitas pendidikan belum optimal hal ini dapat dilihat dimana angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah di Kab. Soppeng masih dibawah rata-rata provinsi. Ini disebabkan antara lain karena Akses layanan PAUD masih terbatas pada beberapa wilayah, Masih kurangnya minat melanjutkan ke perguruan tinggi, dan Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang menyebabkan banyaknya anak putus sekolah.
- Derajat kesehatan Ditandai dengan masih terbatasnya ketersediaan tenaga medis.
- Tuntutan ketersediaan infrastruktur Antara lain dapat dilihat dari usulan masyarakat dan adanya wilayah yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai serta ketersediaan air bersih.
- Adanya pemilukada di Kab. Soppeng pada tahun 2020 yang diharapkan dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kabupaten Soppeng di tahun 2020 antara lain:

- Meningkatnya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan Kabupaten Soppeng;
- Berkembangnya potensi unggulan daerah berbasis potensi lokal di Kabupaten Soppeng;
- Ketersediaan pangan utama yang cukup.
- Semakin meningkatnya minat masyarakat untuk mengunjungi Tempat Wisata di Kabupaten Soppeng akibat adanya promosi yang dilakukan oleh Pemda.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Soppeng serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 maka perekonomian Kabupaten Soppeng ditargetkan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Target Ekonomi Kabupaten Soppeng di Tahun 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8.50
2	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	Rp	12.881.766,18
3	PDRB ADHK (Juta Rupiah)	Rp	7.603.854,53
4	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	16,941
5	Angka Kemiskinan	%	7,20
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.36
7	Laju Inflasi	%	4-5
8	IPM		68.66

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimana dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan. Arah kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam RKPD ini bertujuan antara lain untuk :

- Menopang proses pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah Kabupaten Soppeng.
- Menjamin ketersediaan pendanaan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
- Meminimalkan resiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.
- Kesinambungan anggaran dengan merujuk kepada ketentuan yang terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang.
- Peningkatan akuntabilitas dan transparansi anggaran serta peningkatan partisipasi masyarakat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam tiga tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan

peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Soppeng
Tahun 2017 s.d 2020

No.	Uraian	2017(Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	PENDAPATAN	1.155.718.382.299,00	1.107.421.802.323,00	1.162.500.111.145,00	1.185.570.697.247,00
01.01	***Pendapatan Asli Daerah***	***125.892.548.021,00***	***90.247.382.396,00***	***106.944.950.291,00***	***126.663.815.393,00***
01.01.01	Pajak Daerah	14.730.111.288,00	11.738.000.000,00	14.635.000.000,00	17.120.000.000,00
01.01.02	Retribusi Daerah	8.072.513.217,00	8.038.314.000,00	8.107.435.600,00	5.506.592.200,00
01.01.03	Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan	15.056.096.674,38	13.000.000.000,00	15.000.000.000,00	21.319.295.580,00
01.01.04	Lain-Lain PAD yang sah	88.033.826.841,62	57.471.068.396,00	69.202.514.691,00	82.717.927.613,00
01.02	***Dana Perimbangan***	***927.905.872.664,00***	***896.999.573.029,00***	***918.094.689.029,00***	***913.530.050.029,00***
01.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	22.156.455.815,00	21.991.322.029,00	21.729.447.029,00	21.729.447.029,00
01.02.02	Dana Alokasi Umum	624.804.701.000,00	624.804.701.000,00	649.192.878.000,00	649.192.878.000,00
01.02.03	Dana Alokasi Khusus	280.944.715.849,00	250.203.550.000,00	247.172.364.000,00	242.607.725.000,00
01.03	***Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah***	***101.919.961.614,00***	***120.174.846.898,00***	***137.460.471.825,00***	***145.376.831.825,00***
01.03.01	Hibah	7.006.539.933,00	25.175.200.000,00	30.563.200.000,00	38.479.560.000,00
01.03.02	Dana Darurat	-	-	-	-
01.03.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39.172.623.881,00	27.177.369.698,00	26.802.430.625,00	26.802.430.625,00
01.03.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	49.462.570.600,00	61.544.050.000,00	73.816.614.000,00	73.816.614.000,00
01.03.05	Bantuan Keuangan..... dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.278.227.200,00	6.278.227.200,00	6.278.227.200,00	6.278.227.200,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan)

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020, selain mengacu pada rencana pendapatan pada APBD Tahun 2019 juga tergantung pada realisasi pendapatan daerah pada Penetapan APBD Tahun 2018. Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2018 dan APBD tahun 2019, rencana pendapatan daerah tahun 2020 ditargetkan mencapai Rp. 1.185.570.697.247,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp. 126.663.815.393,,-; Dana Perimbangan Rp. 913.530.050.029,-; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 145.376.831.825,-.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah ditujukan pada peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan perkembangan perekonomian regional dan nasional yang dapat mempengaruhi sumber penerimaan daerah. Selain itu Pendapatan daerah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan kepada upaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Selain itu juga mempertimbangkan kebijakan pendapatan khususnya Dana Perimbangan, tidak memperlakukan secara defenitif, sebagai salah satu contoh Dana transfer DAU yang sifatnya Dinamis/tidak pasti

a. Pendapatan Asli Daerah

Memperhatikan perkembangan keuangan daerah tahun 2018 dan mengingat pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan sangat tergantung dari kebijakan pemerintah pusat maka penerimaan daerah yang dapat di pacu dan dapat dikendalikan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan meningkatnya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah guna melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tuntutan peningkatan PAD semakin besar mengingat pelayanan kepada masyarakat selayaknya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kebijakan pendapatan daerah dikhususkan pada upaya pencapaian pertumbuhan PAD. Arah kebijakan yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah meliputi :

- ✓ Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- ✓ Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan selain pajak dan retribusi.
- ✓ Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan system informasi yang berbasis teknologi informasi.
- ✓ Mendorong pembentukan system pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan.
- ✓ Meningkatkan koordinasi, kerjasama antar OPD yang terkait.
- ✓ Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah.
- ✓ Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
- ✓ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.
- ✓ Memperkuat srtruktur permodalan BUMD antara lain melalui PMD.
- ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan asset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis melalui kerjasama pihak ketiga.
- ✓ Mengoptimalkan pendapatan melalui BLUD.

Selain itu terdapat juga strategi khusus dalam pemungutan pajak yaitu:

- ✓ Meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
- ✓ Penyederhanaan system dan prosedur pembayaran pajak;
- ✓ Meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil. Terhadap dana perimbangan ini maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan perundangan yang berlaku, selanjutnya dirumuskan dalam tiga prioritas, yakni: Prioritas I untuk pemenuhan kebutuhan belanja langsung wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi ini untuk implementasi urusan wajib pelayanan dasar-Standar pelayanan Minimum (SPM). Prioritas II, ditujukan untuk membiayai belanja pemenuhan visi kepala daerah, dalam urusan pemenuhan visi kepala daerah ini, termasuk dalam urusan pelayanan dasar maka dikategorikan dalam prioritas I sebelumnya. Sedangkan prioritas III, diperuntukkan untuk alokasi belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang belum tercover dalam prioritas I dan II, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

- Kebijakan belanja prioritas I adalah:
  - ✓ Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang wajib berupa gaji dan tunjangan.
  - ✓ Meningkatkan terus proporsi belanja yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar pada masyarakat seperti : pendidikan, kesehatan dan infrasturktur yang pengalokasiannya melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.
  - ✓ Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Kebijakan belanja prioritas II adalah Memenuhi proporsi belanja daerah sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah, Prioritas pembangunan dan urusan Pemerintahan.
- Kebijakan belanja prioritas III adalah Memenuhi proporsi belanja OPD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, terutama pelaksanaan siknronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

- ✓ Penyediaan dana untuk kejadian luar biasa seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kegiatan tanggap darurat.
- ✓ Pemberian hibah kepada pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, tidak bersifat mengikat dan tidak wajib.
- ✓ Belanja bantuan sosial kepada individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, serta lembaga non Pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.

Tabel 3.7
Realisasi,Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun 2017-2020

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	ANGGARAN BELANJA TAHUN 2019	PROYEKSI BELANJA TAHUN 2020
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**608.057.552.779,00**	**583.647.006.027,60**	**625.763.319.273,00**	**694.645.745.242**
1	Belanja Pegawai	441.435.974.734,00	440.053.737.039,00	490.625.426.756,00	542.132.301.870,00
2	Belanja Bunga				
3	Belanja Subsidi	3.790.368.000,00	1.315.800.000,00	4.608.000.000,00	2.000.000.000,00
4	Belanja Hibah	51.975.878.209,00	30.714.723.307,60	6.054.800.000,00	25.439.200.000,00
5	Belanja Bantuan Sosial				
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.916.133.440,00	2.472.902.412,00	2.283.754.690,00	2.544.670.006,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	108.918.536.696,00	109.085.807.175,00	119.652.176.375,00	119.990.411.914,90
8	Belanja Tidak terduga	20.661.700,00	4.036.094,00	2.539.161.452,00	2.539.161.452,00
B	**BELANJA LANGSUNG**	**539.072.731.874,00**	**568.751.418.979,50**	**542.395.348.799,00**	**514.795.197.366,00**
1	Belanja Pegawai	17.679.115.850,00	15.829.659.500,00	20.413.278.100,00	19.392.614.195,00
2	Belanja Barang dan Jasa	222.259.997.139,00	282.657.259.051,50	291.185.449.954,00	275.707.644.457,25
3	Belanja Modal	299.133.618.885,00	270.264.500.428,00	230.796.620.745,00	219.694.938.713,75
	JUMLAH BELANJA	**1.147.130.284.653,00**	**1.152.398.425.007,10**	**1.168.158.668.072,00**	**1.204.440.942.608,90**

Sumber : DPPKAD Kabupaten Soppeng (olahan).

Belanja yang diproyeksikan pada tahun 2020 sebesar Rp.1.204.440.942.608,00 Yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.694.645.745.242,00, dan belanja langsung sebesar Rp.514.795.197.366,00. Untuk kebijakan belanja pegawai pada tahun 2020 diarahkan agar belanja pegawai kurang dari 50 persen dari total belanja.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ini ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Arah kebijakan pembiayaan diarahkan pada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerahmelaui kegiatan pengeluaran pemibiayaan berupa penyertaan modal. Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, sumber dari sisi Penerimaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, dan dari penerimaan serta Pinjaman Daerah. Sedang dari sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk kegiatan Pembiayaan Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah.

Tabel 3.8
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Soppeng
Tahun 2019-2020

URAIAN	ASUMSI APBD TAHUN 2019 APBN	ASUMSI APBD TAHUN 2020
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	**21.308.556.927**	**30.870.245.362**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	**21.308.556.927**	**30.870.245.362**
Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	**21.308.556.927**	**30.870.245.362**
Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung	21.308.556.927	30.870.245.362
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**21.308.556.927**	**30.850.695.363**
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	**15.650.000.000**	**7.000.000.000**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	**15.650.000.000**	**7.000.000.000**
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	**15.650.000.000**	**7.000.000.000**
BUMD (Investasi Saham Bank Sulsel)	10.000.000.000	5.000.000.000
PDAM	2.000.000.000	2.000.000.000
PERUSDA	3.650.000.000	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**15.650.000.000**	**7.000.000.000**
Pembiayaan Netto	**5.658.556.927**	**23.870.245.362**

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020

Berdasarkan tema pembangunan nasional pada RKP tahun 2020 adalah **"Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas"** dan tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada RKPD Tahun 2020 adalah **"Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Sulawesi Selatan Yang Inklusif"** maka tema pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah : **"Pemeliharaan Kesejahteraan dan Pelayanan Umum Dengan Dukungan Tata Kelola Yang Baik"**

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 disusun mengikuti arah dan kebijakan yang digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng (RPJMD) 2016-2021 dengan visi **"PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK"** serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang termuat dalam RPJMD 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan dengan visi "**SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF, DAN BERKARAKTER"** serta memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 **"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG".**

Penyusunan prioritas pembangunan ini juga tetap mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kondisi umum daerah, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi serta tetap memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial, serta memperhatikan usulan yang telah dilakukan melalui pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Daerah (musrenbang) yang melibatkan berbagai pihak (multi stakeholder) yang kemudian diselaraskan dengan program dari SKPD untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada rumusan visi ini terkandung substansi "perwujudan visi" bahwa Kabupaten Soppeng "pemerintahannya akan lebih melayani" dan "daerahnya akan lebih baik". Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni "pemerintahan yang melayani" dan "Kabupaten Soppeng yang lebih baik".

Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

"Kabupaten Soppeng yang lebih baik" bermakna bahwa Kabupaten Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan. Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan, maka

Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

1. **Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani**

   Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. **Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga**

   Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. **Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik**

   Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati menyapa).

4. **Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman**

   Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan / perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung terpencil.

5. **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi**

   Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun.

6. **Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah**

   Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit, penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. **Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan**

   Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah. Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja (BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji.

8. **Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan**

   Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini sebagai salah saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi kemiskinan.

9. **Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi**

   Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Berangkat dari kondisi pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 disusun dengan tema **“Pemeliharaan Kesejahteraan dan Pelayanan Umum Dengan Dukungan Tata Kelola Yang Baik” .**

Beranjak dari tema diatas, maka tema tersebut memiliki 3 (tiga) kalimat kunci yaitu :

1. **Pemeliharaan Kesejahteraan** dimaknai sebagai Pembangunan yang berorientasi pemerataan dan keadilan sosial, yang dilandasi hal-hal seperti meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, meratanya peran dan kesempatan masyarakat sesuai dengan bidang kemampuan, meratanya kehidupan ekonomi melalui sector-sektor unggulan yang bisa memperbaiki pendapatan dan daya beli masyarakat dimana kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan serendah mungkin dan perekonomian daerah tumbuh dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan.
2. **Pelayanan Umum** dimaknai sebagai upaya Pemerintah dalam mewujudkan kualitas manusia yang seutuhnya baik upaya dalam meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan maupun upaya dalam memperkokoh kebudayaan daerah, kondisi mental-spiritual serta kondisi ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan dalam masyarakat serta penguatan daya Saing daerah.
3. **Daya Dukungan Tata Kelola Yang Baik** dimaknai sebagai pemanfaatan maksimal sumber daya alam dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumber daya alam dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam. Serta meningkatkan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik untuk menjangkau dimensi antar golongan/kelompok/lapisan masyarakat tetapi juga dimensi antar wilayah khususnya antara wilayah perdesaan dengan perkotaan.

Perumusan tema di atas merupakan hasil dari beberapa kriteria perumusan yaitu:

1. korelasi terhadap pencapaian tema, prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan, pencapaian SDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD;
3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Dari Tema dan Pengertian Tema di atas, maka dirumuskan Prioritas Pembangunan Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang diklasifikasikan ke dalam 5 (Lima) prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Minimal dan Kualitas Pelayanan Publik;
2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah;
3. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Dan Kesehatan;
4. Penguatan Pertanian Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan;
5. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Didukung Oleh Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat;
6. Pengembangan Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan;
7. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban dan Pengembangan Demokrasi.

Tabel 4.1
Singronisasi Prioritas Nasional Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH
Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Minimal dan Kualitas Pelayanan Publik
	Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Dan Kesehatan
Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah
Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif	Penguatan Pertanian Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Didukung Oleh Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat
Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air melalui pelestarian lingkungan	Penguatan Pertanian Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Stabilitas Keamanan nasional	Pengembangan Kapasitas Birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan
	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban dan Pengembangan Demokrasi

Tabel 4.2
Singronisasi Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan Dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH
Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Pengembangan kapasitas birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dan pengembangan demokrasi
Penguatan infrastruktur wilayah	Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur wilayah
Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Peningkatan daya saing ekonomi daerah didukung oleh kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat
Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Peningkatan kualitas standar pelayanan minimal dan kualitas pelayanan publik
Pembangunan manusia	Meningkatkan kualitas dan daya saing pendidikan dan kesehatan
Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Peningkatan daya saing ekonomi daerah didukung oleh kemandirian desa dan keberdayaan masyarakat
Pelestarian lingkungan hidup	Penguatan pertanian serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan

Delanjutnya dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah maka diperlukannya rumusan Sasaran Pembangunan Daerah. Sasaran RKPD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Secara skematis keterkaitan antara Tema dengan perumusan Prioritas Pembangunan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Terkait RKPD Kab. Sioppeng tahun 2020, perumusan Prioritas dan sasaran berdasarkan Tema Pembangunan yang kemudian menjadi landasan perumusan prioritas pembangunan, sasaran, strategi, kebijakan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk satu tahun. Rumusan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran Pembangunan Tahun 2020 dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kab. Soppeng Tahun 2020

PRIORITAS PEMBANGUNAN		SASARAN PEMBANGUNAN
1	Peningkatan Kualitas Standar Pelayanan Minimal dan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar berbasis SPM
		Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil
		Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP
2	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya jangkauan dan kualitas sistem transportasi
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat
3	Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Dan Kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan
4	Penguatan Pertanian Serta Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas pertanian
		Meningkatnya ketersediaan pangan utama beras
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup
5	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Didukung Oleh Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata
		Meningkatnya daya saing investasi
		Meningkatnya kesejahateraan masyarakat lapis bawah
		Berkembangnya lapangan kerja dan usaha
		Meningkatnya daya saing UKM dan industri
		Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah
6	Pengembangan kapasitas birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

7	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban dan Pengembangan Demokrasi	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
		Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
		Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
		Meningkatnya Kualitas Demokrasi

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2020 diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari:
   a) revolusi mental;
   b) Pembangunan pendidikan;
   c) pembangunan kesehatan; dan
   d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari:
   a) kedaulatan pangan;
   b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;
   d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari:
   a) Pemerataan antarkelompok pendapatan;
   b) Pengembangan daerah tertinggal;
   c) Pembangunan perdesaan dan perkotaan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah ke depan sebagai berikut:

A. Merevitalisasi Sektor Pertanian

Revitalisasi sektor pertanian merupakan upaya untuk menempatkan kembali sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual dalam kerangka pengembangan ekonomi daerah agar dapat tetap memberi kontribusi yang signifikan, terutama bagi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan nilai tambah, dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Revitalisasi sektor pertanian diarahkan untuk menggalang komitmen dan kerja sama seluruh *stakeholder* dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa pertanian tidak hanya sekedar urusan bercocok tanam dan menghasilkan komoditas. Namun pertanian memiliki sejumlah fungsi strategis, yaitu selain sebagai sumber kehidupan sebagian besar masyarakat, pemasok sandang dan pangan untuk kelangsungan kehidupan penduduk, juga sebagai pemelihara atau konservasi alam yang berkelanjutan dan keindahan lingkungan untuk dinikmati (agro-wisata) maupun sebagai penghasil energi seperti bio-diesel.

Untuk mendorong percepatan revitalisasi di sektor pertanian, maka kebijakan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas berbagai komoditas unggulan, perluasan sentra-sentra pengembangan komoditas pertanian, peningkatan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan sumber-sumber pembiayaan, peningkatan penerapan teknologi pertanian, pemberdayaan tenaga penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan petani dan pembinaan kelompok tani, perbaikan nilai tukar petani (NTP), pengembangan kegiatan pasca-panen, dan peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian.

B. Mengembangkan Kegiatan Ekonomi Lokal

Pengembangan kegiatan ekonomi lokal dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat yang berbasis pada potensi daerah (komoditas unggulan), sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengembangan komoditas unggulan, industri pengolahan (agro-industri dan agribisnis), UMKM dan koperasi, perdagangan, dan pariwisata merupakan bagian dari upaya pengembangan ekonomi lokal.

Kebijakan pembangunan industri pengolahan akan diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk-produk hasil industri, peningkatan pemasaran produk-produk hasil industri, pengembangan sentra-sentra industri pengolahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Kebijakan pembangunan UMKM dan Koperasi akan diarahkan pada peningkatan akses UMKM terhadap sumberdaya produktif, khususnya terhadap pemodalan dan teknologi; penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan kewirausahaan, penataan organisasi, pengembangan jaringan kemitraan, dan lain-lain; penataan peraturan/regulasi dan perbaikan proses pelayanan perizinan; penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif; serta pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung usaha.

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja/buruh serta saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan mengarah pada pengembangan sumber daya tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial serta pengawasan tenaga kerja.

Kebijakan pembangunan trasmigrasi diarahkan untuk mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang seimbang. Kebijakan pembangunan pariwisata akan diarahkan pada pengembangan potensi wisata, terutama wisata alam, budaya, dan sejarah; pengembangan jaringan kerjasama wisata dengan daerah wisata lainnya baik regional maupun nasional; pengembangan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan pengembangan SDM di bidang kepariwisataan; serta pengembangan kemitraan dan pemasaran pariwisata.

Pembangunan perdagangan diarahkan pada pemetaaan pusat-pusat aktifitas perdagangan; peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem pemasaran dan distribusi barang dan jasa antar wilayah; pengembangan pasar-pasar tradisional di daerah-daerah perdesaan; meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah; perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.

C. Mengendalikan Jumlah Penduduk dan Meningkatkan Kualitas Keluarga

Kebijakan pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera akan diarahkan pada peningkatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dan promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat; pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS dan pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; dan penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

D. Meningkatkan Kapasitas, Pemberdayaan, Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Sosial Penduduk Miskin

Untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat marginal dan mengurangi jumlah penduduk miskin maka kebijakan penanggulangan kemiskinan hendaknya dilakukan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan. Oleh karena itu Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 1). Program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial seperti pemenuhan hak dasar dan pengurangan beban hidup sementara *dengan* Skema dalam bentuk bantuan sosial (misalnya, BLT, Raskin, dll.), pembebasan biaya (misalnya, pendidikan dan kesehatan gratis), dan pemberian subsidi (misalnya, pupuk dan sarana produksi lainnya); 2) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti penguatan kapasitas, keterlibatan/partisipasi, pemanfaatan potensi, keberlanjutan ; 3). Program penanggulangan kemiskinan berbasis penguatan usaha ekonomi mikro dan kecil dengan sasaran penyediaan kemudahan akses dan bantuan permodalan. Upaya semacam ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas penduduk miskin sehingga pada gilirannya mereka mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.

E. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan lingkungan pemukiman yang layak merupakan salah satu hak dasar masyarakat, dan oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa dari tahun ke tahun masyarakat menikmati perumahan dan lingkungan pemukiman yang semakin baik dan berkualitas. Untuk itu, kebijakan pembangunan perumahan dan pemukiman ke depan akan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan perumahan

dan pemukiman, perbaikan perumahan dan pemukiman akibat bencana, peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, dan penataan areal pemakaman.

Untuk mendukung upaya tersebut di atas, perlu dilakukan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengendalian atas pemanfaatan ruang, pemetaan ruang secara optimal berdasarkan potensi dan daya dukung lahan, dan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan ruang. Bersamaan dengan itu, juga perlu dilakukan penanganan pertanahan daerah melalui pembangunan sistem pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan pengembangan sistem informasi pertanahan.

F. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Pendidikan

Kebijakan pembangunan pendidikan akan diarahkan pada upaya peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia dini; pengintensifan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan menengah, pendidikan formal, pendidikan luar biasa; peningkatan kualitas proses belajar mengajar, tenaga kependidikan dan manajemen pelayanan pendidikan; pengembangan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); pengembangan kegiatan pendidikan berbasis karakter, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah-wilayah terpencil; dan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

G. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Layanan Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan akan diarahkan pada upaya peningkatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan meliputi peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana; perbaikan status gizi masyarakat; pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; pemenuhan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan; peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat dan makanan; pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas dan Jamkesda); pemberdayaan masyarakat promosi kesehatan dan penanggulangan bencana; peningkatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder serta didukung oleh peningkatan kualitas manajemen dan pembiayaan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

H. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam akan diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, sumberdaya energi, mineral dan air. Sumberdaya ini disamping belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah juga sangat potensial menurunkan kualitas lingkungan hidup jika tidak terkelola dengan baik.

Untuk pembangunan kehutanan, kebijakan akan diarahkan pada pemanfaatan secara optimal potensi sumberdaya hutan dengan tetap mengedepankan prinsip kelestarian hutan; pemberdayaan dan

peningkatan peran serta masyarakat terhadap reboisasi dan rehabilitasi hutan serta lahan dan penghijauan di luar kawasan hutan; perlindungan sumberdaya hutan melalui penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak pembakaran hutan, pembalakan liar dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan; penataan kawasan hutan dan pembuatan tata batas untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan, baik oleh masyarakat maupun untuk kepentingan industri.

Sedangkan untuk pembangunan energi dan sumberdaya mineral, kebijakan akan diarahkan pada pengidentifikasikan potensi-potensi pertambangan, energi dan sumberdaya mineral yang potensial dan berdaya saing; peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertambangan dan sumberdaya mineral; pengelolaan potensi pertambangan, energi, dan energi dan sumberdaya mineral secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan; pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral; dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan.

I. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan mempersyaratkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kebijakan pembangunan lingkungan hidup akan diarahkan pada pengendalian pencemaran dan pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam; peningkatan kualitas dan akses informasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup; peningkatan pengendalian polusi, kebakaran hutan dan pengelolaan RTH; dan penegakan hukum untuk menjamin berkurangnya kerusakan lingkungan hidup.

J. Menciptakan Iklim Investasi Daerah yang Lebih Kondusif

Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan prasyarat penting bagi tumbuh-kembangnya kegiatan investasi daerah yang diperlukan untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berkembangnya investasi daerah juga menjadi pertanda bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam hal daya tarik dan daya saing wilayah. Untuk mendorong iklim investasi yang lebih kondusif di Kabupaten Soppeng, akan diupayakan penataan peraturan daerah yang menghambat investasi daerah, pemberian kemudahan perijinan usaha dan pemberiaan insentif bagi dunia usaha, penyusunan profil potensi investasi daerah, pemberian jaminan dan kepastian hukum termasuk didalamnya jaminan atas keamanan usaha, peningkatan promosi dan kerjasama investasi, dan perbaikan kualitas, produktivitas, dan iklim ketenagakerjaan.

K. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan Penyebaran Sarana dan Prasarana Wilayah

Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan diarahkan pada pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan; pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong; pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi turap/talud/brojong; pembangunan sistem informasi dan data-base jalan dan jembatan, dan peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Pengembangan

kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

Kebijakan pembangunan irigasi dan pengendalian banjir diarahkan pada pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; penyediaan dan pengolahan air baku; pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; dan pengendalian banjir.

Kebijakan pembangunan perhubungan akan diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan fasilitas perhubungan, peningkatan pelayanan angkutan darat, peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dan peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor.

L. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Publik

Tugas pokok pemerintah daerah adalah menyediakan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan publik dimaksud terutama yang terkait dengan administrasi kependudukan, perijinan, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas manusia, dan sebagainya. Kebijakan utama yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan pelayanan publik, antara lain, penerapan standar pelayanan minimum (SPM) untuk setiap jenis layanan, pengembangan sistem pelayanan satu atap (*one stop services*), peningkatan kualitas, kapasitas, dan pofesionalitas sumberdaya aparat pemberi layanan, dan perluasan jangkauan layanan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama di wilayah-wilayah terpencil.

M. Memperkuat Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa

Kebijakan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah akan diarahkan pada peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan; peningkatan kapasitas dan kemampuan sumberdaya aparatur; peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah; peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah; peningkatan efektifitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah; peningkatan pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); perbaikan tata-kelola pemerintahan daerah; penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif; peningkatan mekanisme kerja dan koordinasi inter dan antar SKPD; penyebarluasan dan sosialisasi kebijakan dan program pembangunan daerah; dan penguatan kelembagaan pemerintahan dan masyarakat desa.

N. Mengembangkan Kebudayaan Lokal

Kebijakan pembangunan kebudayaan lokal akan diarahkan pada pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah, penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal, pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah terutama untuk tujuan wisata, pengelolaan keragaman budaya dan kesenian daerah, dan pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dan kesenian daerah.

O. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Sosial

Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial akan diarahkan pada peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; pelayanan dan rehabilitasi sosial dan pembinaan anak terlantar, pembinaan para penyandang cacat dan trauma; pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya; pemberiaan bantuan sosial kepada pondok pesantren dan panti asuhan; pemberian insentif kepada imam masjid, guru mengaji, Ketua RT, RW, kader posyandu, pengurus LPMD/LPMK; dan pemberian bantuan keuangan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir di perguruan tinggi dengan prioritas pada S1 dan S2.

P. Mendorong Peningkatan Aktualisasi Nilai-Nilai Agama

Meskipun bidang agama bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk memberi dukungan dan berkontribusi bagi keberlangsungan kehidupan keagamaan di daerah. Dukungan dan kontribusi pemerintah daerah dimaksud dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain, peningkatan toleransi kehidupan antar umat beragama melalui pengembangan budaya dialogis antar pemimpin, tokoh, dan organisasi keagamaan; peningkatan aktualisasi dan pengamalan nilai-nilai agama bagi pemeluknya masing-masing; peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses sosialisasi, baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal; peningkatan peran dan fungsi pemimpin/tokoh agama dan institusi keagamaan dalam rangka pembinaan kehidupan kemasyarakatan; dan peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.

Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021. Pada tahun ini hasil-hasil akselerasi pada tahun empat dimanfaatkan diharapkan sudah mencakupi sasaran yang lebih banyak sehingga tinggal dimatangkan. Pada tahap ini perhatian diarahkan kepada sasaran-sasaran yang belum terwujud targetnya sambil menjamin ketenteraman dan ketertiban umum sebagai prakondisi bagi penyelenggaraan pesta demokrasi untuk keberlanjutan pembangunan periode RPJMD berikutnya. Tahun ini merupakan tahun “pemberlanjutan akselerasi”.

Tema pembangunan pada tahun 2020 adalah **“Pemeliharaan kesejahteraan dan pelayanan umum dengan dukungan tata kelola yang baik”**. Selanjutnya prioritas kebijakan diarahkan pada:

1. Penerapan SPM
2. Perbaikan sistem penyediaan sarana produksi pertanian khususnya pupuk dan bibit ikan
3. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan bendung, bendungan dan jaringan irigasi
4. Perbaikan penyelenggaraan wajib belajar sembilan tahun serta dukungan pendidikan gratis dan beasiswa
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6. Bimbingan belajar lulusan SMA/ SMK dan peningkatan kualitas pembelajaran serta manajemen sekolah SD sederajat dan SMP sederajat
7. Penyelenggaraan pendidikan paket A,B dan C
8. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar
9. Peningkatan pengamanan aktivitas yang melibatkan masyarakat luas
10. Peningkatan pembinaan keamanan lingkungan di wilayah
11. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata
12. Perbaikan kualitas jalan yang sudah ada dan perintisan jalan khusus serta jalan ke lokasi terpencil
13. Perbaikan rumah tidak layak huni
14. Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam rangka Memenuhi Pelayanan Minimal
15. Peningkatan kinerja PDAM untuk Pengembangan SPAM Mandiri
16. Penyelenggaraan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan data kinerja yang akurat
17. pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja
18. peningkatan kualitas sistem informasi dan teknologi untuk memperkuat database dan akurasi pengelolaan keuangan daerah
19. Peningkatan fasilitas kesehatan sesuai standar
20. Peningkatan cakupan penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan
21. Peningkatan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan
22. Penyediaan sarana/prasarana bagi imam mesjid dan pemberian insentif bagi imam masjid, guru mengaji dan pendeta
23. Penyediaan sarana/prasarana dan pembinaan prestasi pemuda dan olah raga
24. Peningkatan surplus beras (sebagai pilar ketahanan pangan Sulawesi Selatan)
25. Penanganan sampah dan penataan taman kota
26. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
27. Peningkatan pelatihan kewirausahaan bagi tenaga kerja
28. pameran industri kreatif.

Sedangkan Program Prioritas Pembangunan RPJMD 2016-2021 dengan program Prioritas RKPD tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Sasaran dan Program Prioritas Daerah Kab. Soppeng
Tahun 2020

SASARAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	SKPD PELAKSANA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar berbasis SPM	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
		Program Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan
		Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	Dinas Pendidikan
		Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	Dinas Kesehatan
		Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	Dinas Kesehatan

		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
		Program tanggap darurat dan logistik	BPBD
		Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Dinas PU dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil
		Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Capil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Badan Penanaman Modal dan PTSP
4	Meningkatnya jangkauan dan kualitas sistem transportasi	Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Penerangan Jalan	Dinas Perhubungan
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ	Dinas Perhubungan
		Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Dinas Perhubungan
		Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas	Dinas Perhubungan
		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Dinas PU dan Penataan Ruang
5	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
		Program Pemanfaatan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas perumahan dan Permukiman
		Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dinas perumahan dan Permukiman
		Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertanahan	Dinas perumahan dan Permukiman

6	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	Program Pendidikan Gratis	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	Dinas Pendidikan
		Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan daerah
		Program Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka	Dinas perpustakaan dan Kearsipan daerah
7	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Dinas Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
		Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
		Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
8	Meningkatnya produktivitas pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pertanian
		Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Pertanian
		Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dinas Pertanian
		Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Sutra Alam	Dinas Pertanian

		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai	Dinas Pu dan Penataan Ruang
9	Meningkatnya ketersediaan pangan utama beras	Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
		Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
10	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup	Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Objek Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12	Meningkatnya daya saing investasi	Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Badan Penanaman Modal dan PTSP
13	Meningkatnya kesejahateraan masyarakat lapis bawah	Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	Dinas Sosial
		Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	Dinas Sosial
		Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	Dinas Sosial
14	Berkembangnya lapangan kerja dan usaha	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Perencanaan, dan Pengembangan kawasan transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15	Meningkatnya daya saing UKM dan industri	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
		Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
		Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
		Program Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
16	Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Kecamatan
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Kecamatan
17	Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bappelitbangda
		Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Bappelitbangda
		Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	BKPSDM
		Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan	BKPSDM
		Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	BKPSDM
		Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian	BKPSDM
		Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Tata laksana	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah

		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
		Program Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	Sekretariat DPRD
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme Pengawas	Inspektorat Daerah
		Program Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD dan Desa
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Dinas PMD dan Desa
		Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	Kecamatan
		Program Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Informatika dan Komunikasi
		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Dinas Informatika dan Komunikasi
		Program Pengembangan Statistik Daerah	Dinas Informatika dan Komunikasi
		Program penyelenggaraan Persandian	Dinas Informatika dan Komunikasi
		Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Seluruh SKPD
		Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Seluruh SKPD
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dinas Informatika dan Komunikasi
		Program pengembangan komunikasi dan informatika	Dinas Informatika dan Komunikasi
18	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPKD
19	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
20	Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat	Program Perlindungan Masyarakat	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
		Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana daerah
21	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Dinas pemuda dan Olahraga
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Dinas pemuda dan Olahraga

		Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Dinas pemuda dan Olahraga
22	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	Dinas PP dan PA
		Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak	Dinas PP dan PA
23	Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan KESBANGPOL
		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Badan KESBANGPOL

Tabel 4.5
Program Prioritas Daerah Kab. Soppeng
Tahun 2020

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Program Prioritas Daerah (RKPD)	Bidang Urusan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	Dinas Pendidikan
Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	BPBD
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
Program tanggap darurat dan logistik	Program tanggap darurat dan logistik	BPBD
Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Capil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Capil
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Badan Penanaman Modal dan PTSP
Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan	Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan	Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Penerangan Jalan	Program Penerangan Jalan	Dinas Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ	Dinas Perhubungan
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Dinas Perhubungan
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Dinas Perhubungan

Program Pelayanan Angkutan	Program Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas	Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas	Dinas Perhubungan
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
Program Pemanfaatan Ruang	Program Pemanfaatan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas perumahan dan Permukiman
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas PU dan Penataan Ruang
Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dinas perumahan dan Permukiman
Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertanahan	Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertanahan	Dinas perumahan dan Permukiman
Program Pendidikan Gratis	Program Pendidikan Gratis	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	Dinas Pendidikan
Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah	Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Dinas perpustakaan dan Kearsipan daerah
Program Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka	Program Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka	Dinas perpustakaan dan Kearsipan daerah
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan SDM Kesehatan	Program Pengembangan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	Dinas Kesehatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan
Program Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Keluarga Berencana	Program Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pertanian
Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam	Program rehabilitasi/ pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Pertanian
Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dinas Pertanian
Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan	Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Sutra Alam	Program Pengembangan Sutra Alam	Dinas Pertanian
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Dinas Pertanian
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh	Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai	Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai	Dinas Pu dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	Dinas Lingkungan Hidup
Program Ruang Terbuka Hijau	Program Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kesenian Daerah	Program Pengembangan Kesenian Daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Objek Wisata	Program Pengelolaan Objek Wisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Badan Penanaman Modal dan PTSP
Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	Dinas Sosial
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	Dinas Sosial
Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	Dinas Sosial
Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	Dinas Sosial
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Perencanaan, dan Pengembangan kawasan transmigrasi	Program Perencanaan, dan Pengembangan kawasan transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang	Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Program Perlindungan Konsumen	Program Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Kecamatan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Bappelitbangda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bappelitbangda
Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Bappelitbangda
Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur	BKPSDM
Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan	Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan	BKPSDM
Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	BKPSDM
Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian	Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian	BKPSDM
Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH	Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH	Sekretariat Daerah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Tata laksana	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Tata laksana	Sekretariat Daerah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam	Sekretariat Daerah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
Program Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	Program Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD	Sekretariat DPRD
Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme Pengawas	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme Pengawas	Inspektorat Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Desa	Program Perencanaan Pembangunan Desa	Dinas PMD dan Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Dinas PMD dan Desa
Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan	Kecamatan

Program Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika	Program Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Informatika dan Komunikasi
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Dinas Informatika dan Komunikasi
Program Pengembangan Statistik Daerah	Program Pengembangan Statistik Daerah	Dinas Informatika dan Komunikasi
Program penyelenggaraan Persandian	Program penyelenggaraan Persandian	Dinas Informatika dan Komunikasi
Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	Seluruh SKPD
Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	Seluruh SKPD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dinas Informatika dan Komunikasi
Program pengembangan komunikasi dan informatika	Program pengembangan komunikasi dan informatika	Dinas Informatika dan Komunikasi
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPKD
Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Perlindungan Masyarakat	Program Perlindungan Masyarakat	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota	Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana	Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana daerah
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Dinas pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Dinas pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Dinas pemuda dan Olahraga
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	Dinas PP dan PA
Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak	Dinas PP dan PA
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Badan KESBANGPOL
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Badan KESBANGPOL

Tabel 4.6
Penjelasan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020

Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	Padi (GKG) = 312.239 ton	Dinas Pertanian
			Jagung (Pipilan Kering) = 46.377 ton	
			Kedelai (pipilan kering) = 1.308 ton	

			Kacang Tanah (Ton) = 530	
			Kacang Hijau = 291 ton	
			Ubi Kayu = 845 ton	
			Ubi Jalar = 351 ton	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	jumlah populasi ternak	Ekor	Populasi Sapi = 55.000 ekor	Dinas Pertanian
			Populasi kambing = 33.500 ekor	
			Populasi Unggas = 2.250.000 ekor	
program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Persentase Peningkatan luas areal tanam komoditi tanaman pangan (%)	%	36,92	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan	Jenis	4	Dinas Pertanian
Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	Cakupan bina kelompok petani	%	98.5	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	Produksi Sektor Perkebunan (ton)			Dinas Pertanian
	- kakao	Ton	12052	
	- tembakau		94.11	
Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)		32	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Sutra Alam	Produksi kokon (kg)	kg	17000	Dinas Pertanian
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	92	Dinas PUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam	Volume embung/cekdam yang terbangun (m3)	m3	4,800	Dinas PUPR
Program Pendidikan Gratis	Angka Putus Sekolah SD sederajat (%)	%	0	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMP sederajat (%)	%	0	
Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Cakupan Penerima Beasiswa, bimbel (%)	%	100	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Sekolah SD yang berakreditasi A		21	Dinas Pendidikan
	Jumlah Sekolah SMP yang berakreditasi A		4	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru yang berpendidikan Minimal S1 / D4 (%)		100	Dinas Pendidikan
Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	Jumlah Siswa yang berprestasi di lomba olimpiade		20	Dinas Pendidikan
Program Dana Bantuan Operasional Sekolah	Cakupan Sekolah Penerima BOS	%	100	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan, (orang)	%	0	Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	1000	Dinas Pendidikan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase penanganan penyakit	%	100	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak dan lansia	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	% Ibu hamil dan melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Bayi Baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta pelayanan kesehatan usia lanjut	% Bayi Baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	% Masyarakat yang produktif mendapatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit sesuai dengan standar pelayanan minimal	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	
Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program tanggap darurat dan logistik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	Dinas Sosial
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis (%)	%	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%		
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%	98.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban	Patroli siaga, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		1	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Perlindungan masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68,49	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan	jiwa	234,126	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	40	Dinas PUPR
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ	Pemasangan Rambu-rambu	%	90	Dinas Perhubungan
Program Penerangan Jalan	Panjang jangkauan penerangan (km)	km	136	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	Dinas PUPR

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	Dinas PUPR
Program Pengembangan Kawasan Permukiman		%	70	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Persentase pemukiman yang tertata			
Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan		13.5	Dinas PUPR
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Akses Sanitasi yang layak (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sesuai dengan regulasi	%	100	Bappelitbangda
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	% program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD	%	100	Bappelitbangda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Cakupan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu	%	100	Skretariat Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	%	100	BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	% SKPD dengan Pencatatan Aset Yang Benar	%	90	BPKD
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	persentase sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar (%)	%	5.88	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Persentase Puskesmas BLUD (%)	%	58.82	Dinas Kesehatan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (Ccost recovery) (%)	%	1.12	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit		PARIPURNA	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase puskesmas yang terakreditasi (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)	%	98	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase penanganan penyakit	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan SDM Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan terlatih (%)	%	0	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase ketersediaan sarana RS (%)	%	100	Dinas Kesehatan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase kelayakan peralatan dan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Kelembagaan dan Penyelenggara ibadah Desa/ Kelurahan yang dibina	%	0	8 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi kegiatan, pembinaan dan Pengawasan desa/ kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan	%	100	8 Kecamatan
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	98.12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda		28	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional		5	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional		7	
Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	3.96	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Program Pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman kota	Luas Taman Kota yang dibangun, ditata, dan dipelihara (m2)	m2	1,465	Dinas Lingkungan Hidup
Program Ruang Terbuka Hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik selesai 20% dari luas perkotaan	%	55	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	70	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentasi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	Persentase Jumlah KK Miskin yang mendapatkan layanan kartu MACCA (%)	%	100	Dinas Sosial
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera (%)	%	100	Dinas Sosial
Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	Warga miskin yang mendapat bantuan hukum (%)	%	100	Dinas Sosial
Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin yang dilatih dan pemberian modal usaha	%	0.18	Dinas Sosial

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	67.31	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	91	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98.94	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Tipe C		1	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	50	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian

Sumber : RPJMD Kabupaten Soppeng Periode 2016 – 2021

4.1.1. Program Pembangunan Daerah Dalam Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang termuat ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun program pembangunan dalam pemenuhan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.7
Program Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum
Tahun 2020

URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	INDIKATOR PENCAPAIAN	SAT	TARGET 2020
Pendidikan Dasar	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	100
Pendidikan Kesetaraan	Program Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100
	Program Pendidikan Non Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan, (orang)		0
Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100

KESEHATAN			**%**	**100**
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	%	n.a
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	% Ibu hamil dan melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal sesuai standar	%	100
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak dan lansia	%	n.a
Pelayanan kesehatan balita				
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Pelayanan Bayi Baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta pelayanan kesehatan usia lanjut	% Bayi Baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;				
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	% Masyarakat yang produktif mendapatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit sesuai dengan standar pelayanan minimal	%	100
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase penanganan penyakit	%	n.a
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus				
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis				
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)				
PEKRJAAN UMUM				
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100
Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100
PERUMAHAN RAKYAT				
Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota		Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
TRANTIBUMLINMAS				
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100
Pelayanan informasi rawan bencana	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program tanggap darurat dan logistik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100
SOSIAL				
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota		Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100

Tabel 4.8
Singkronisasi RPJP dengan RKPD Tahun 2020

No.	RPJP untuk RPJMD Periode ketiga	Program RKPD Tahun 2019	
		PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME
1	Penerapan sistem agribisnis dan agroindustri berlandaskan sumber daya lokal	Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	Peningkatan Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan
		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan
		Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan	Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	Peningkatan jumlah produksi tananaman perkebunan
		Program Pengembangan Sutra Alam	Produksi Benang Sutra
2	Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	% Ketaatan RTRW
		Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 7(Tujuh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap
		Program Perencanaan Tata Ruang	% RDTR yang diperdakan
			% Jumlah RTRK yang diperdakan
3	Meningkatnya kualitas jalan di sepanjang jalan poros Kabupaten/ Kecamatan/ Desa/ kelurahan	Program Rehabiltasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik/sedang) sesuai dengan jenis penanganan
		Program Pembangunan Jalan/ jembatan	Persentase proporsi Jembatan dalam kondisi mantap
4	Meningkatnya investasi – penanaman modal diberbagi sector baik yang berasal dari domestic maupun luar negeri	Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Jumlah investor (PMDN/PMA)

5	Meningkatnya kualitas SDM ditandai dengan meningkatnya IPM	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Gratis, Program Peningkatan Layanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan penduduk miskin, Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia	IPM
6	Berkembangnya UMKM dan koperasi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi Aktif (%)
			Volume usaha koperasi (Rp)
		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	UMKM (%)
			Jumlah Wirausaha baru

Tabel 4.9
Dukungan Program Pembangunan Daerah Tahun 2020 terhadap RPJMN (Nawacita)

No.	Nawa Cita	Program Pembangunan Daerah
1	Menghadirkan Kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara	Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban
2	Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Terpercaya	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas
		Program Penguatan Kelembagaan daerah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Sipil Negara
		Program evaluasi mandiri kepala daerah berbasis kinerja penilaian berbasis KPI
3	Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah Dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan
4	Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem Dan Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat Dan Terpercaya	
5	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia,	Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun
		Program Pendidikan Anak Usia Dini
		Program Pendidikan Gratis
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD
6	Meningkatkan Produktivitas Rakyat Dan Daya Saing Di Pasar Internasional	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi
7	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah
8	Melakukan Revolusi Karakter Bangsa	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

		Program Peningkatan Layanan Pendidikan
		Program Pendidikan Non Formal
		Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
9	Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya

Tabel 4.10
Singkronisasi Pembangunan Prioritas Propinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PEMERINTAH KAB. SOPPENG YANG MENDUKUNG PRORITAS PEMBANGUNAN PROV. SUL-SEL	
		PROGRAM	SKPD
1	Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPELITBANGDA
		Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	BAPPELITBANGDA
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	BPKD
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	BPKD
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme pengawas	INSPEKTORAT
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Penguatan Kelembagaan daerah	SEKRETARIAT DAERAH
		Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan	BKPSDM
		Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
		Program Rehabilitasi Sosial	DINAS SOSIAL
		Program Pengembangan Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Program Pengembangan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	DINAS PUPR
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	DINAS PUPR
		Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	SATUAN POL. PP
		Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban	SATUAN POL. PP
2	Penguatan infrastruktur wilayah	Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan	DINAS PUPR
		Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan	DINAS PUPR

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PEMERINTAH KAB. SOPPENG YANG MENDUKUNG PRORITAS PEMBANGUNAN PROV. SUL-SEL	
		PROGRAM	SKPD
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya	DINAS PUPR
		Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	DINAS PUPR
		Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai	DINAS PUPR
		Program Penerangan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN
		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ	DINAS PERHUBUNGAN
		Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas	DINAS PERHUBUNGAN
		Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3	Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN UKM
		Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN UKM
		Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN UKM
		Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	Penurunan kesenjangan sosial ekonomi	Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	DINAS SOSIAL
		Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	DINAS SOSIAL
		Belanja Subsidi kepada Perusahaan (RASTRA)	BPKD
		Program Pendidikan Gratis	DINAS PENDIDIKAN
		Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
5	Pembangunan manusia	Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Program Pendidikan Anak Usia Dini	DINAS PENDIDIKAN
		Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	DINAS PENDIDIKAN
		Program Peningkatan Layanan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		Program Pendidikan Non Formal	DINAS PENDIDIKAN
		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS PENDIDIKAN
		Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	DINAS PENDIDIKAN
		Belanja Hibah Dana DAK Pendidikan	BPKD
		Belanja Hibah Pendidikan Gratis Dikdas	BPKD
		Belanja BOP PAUD Masyarakat/Swasta	BPKD
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PEMERINTAH KAB. SOPPENG YANG MENDUKUNG PRORITAS PEMBANGUNAN PROV. SUL-SEL	
		PROGRAM	SKPD
		Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	DINAS KESEHATAN
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	DINAS KESEHATAN
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	DINAS KESEHATAN
		Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	DINAS KESEHATAN
		Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia	DINAS KESEHATAN
		Program Pengembangan SDM Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN
		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN
		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD-RSUD	DINAS KESEHATAN
		Program Pengendalian Penduduk	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Program KB	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas	Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	DINAS PERTANIAN
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	DINAS PERTANIAN
		program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan	DINAS PERTANIAN
		Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	DINAS PERTANIAN
		Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	DINAS PERTANIAN
		Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	DINAS PERTANIAN
		Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan	DINAS PERTANIAN
		Program Pengembangan Sutra Alam	DINAS PERTANIAN
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	DINAS PERTANIAN

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PEMERINTAH KAB. SOPPENG YANG MENDUKUNG PRORITAS PEMBANGUNAN PROV. SUL-SEL	
		PROGRAM	SKPD
		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	DINAS PERTANIAN
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian	DINAS PERTANIAN
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura	DINAS PERTANIAN
		Program Peningkatan Kapasitas SDM DAN Kelembagaan Penyuluh	DINAS PERTANIAN
7	Pelestarian lingkungan hidup	Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2020 mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

“Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik”

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut :

Tabel 4.8
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan
Tahun 2020

Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact/ Outcome)	Sat	Target 2020	Perangkat Daerah Penanggungjawab
Visi : Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik				
Misi 1 Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro-petani				
Meningkatkan kesejahteraan petani (T1)	Nilai tukar petani tanaman pangan		104,72	
	Nilai tukar pembudidaya ikan		105,12	
Meningkatnya produktivitas pertanian (S1)	Peningkatan PDRB dari sektor pertanian/perkebunan (Juta Rupiah)	%	9.65	

Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	Padi (GKG) = 312.239 ton	Dinas Pertanian
			Jagung (Pipilan Kering) = 46.377 ton	
			Kedelai (pipilan kering) = 1.308 ton	
			Kacang Tanah (Ton) = 530	
			Kacang Hijau = 291 ton	
			Ubi Kayu = 845 ton	
			Ubi Jalar = 351 ton	
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	jumlah populasi ternak	Ekor	Populasi Sapi = 55.000 ekor	Dinas Pertanian
			Populasi kambing = 33.500 ekor	
			Populasi Unggas = 2.250.000 ekor	
program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan	Persentase Peningkatan luas areal tanam komoditi tanaman pangan (%)	%	36,92	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian	Jumlah Jenis Komoditi yang dipasarkan		4	Dinas Pertanian
Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama	Cakupan bina kelompok petani	%	98.5	Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan	Produksi Sektor Perkebunan (ton)			Dinas Pertanian
	- kakao	Ton	12052	
	- tembakau		94.11	
Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan (Unit)		32	Dinas Pertanian
Program Pengembangan Sutra Alam	Produksi kokon (kg)	kg	17000	Dinas Pertanian
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	92	Dinas PUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan dan pembangunan embung/ cekdam	Volume embung/cekdam yang terbangun (m3)	m3	4,800	Dinas PUPR
Misi 2 Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga				
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat (T2)	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.92	
Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan (S2)	APM SD/ Sederajat	%	100	
	APM SMP/ Sederajat	%	100	
Program Pendidikan Gratis	Angka Putus Sekolah SD sederajat (%)	%	0	Dinas Pendidikan
	Angka Putus Sekolah SMP sederajat (%)	%	0	
Program Peningkatan Layanan Pendidikan	Cakupan Penerima Beasiswa, bimbel (%)	%	100	Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Jumlah Sekolah SD yang berakreditasi A		21	Dinas Pendidikan
	Jumlah Sekolah SMP yang berakreditasi A		4	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kualifikasi Guru yang berpendidikan Minimal S1 / D4 (%)		100	Dinas Pendidikan
Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan	Jumlah Siswa yang berprestasi di lomba olimpiade		20	Dinas Pendidikan
Program Dana Bantuan Operasional Sekolah	Cakupan Sekolah Penerima BOS	%	100	Dinas Pendidikan
Misi 3 Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik				
Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan kualitas pelayanan publik (T3)	IKM atas pelayanan publik	%	81.75	
Meningkatnya kualitas pelayanan dasar berbasis SPM (S3)	IKM atas pelayanan dasar berbasis SPM	%	81.75	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	Jumlah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan, (orang)	%	0	Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	1000	Dinas Pendidikan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase penanganan penyakit	%	100	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, balita, anak dan lansia	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan	% Ibu hamil dan melahirkan yang mendapatkan pelayanan kesehatan minimal sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Bayi Baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta pelayanan kesehatan usia lanjut	% Bayi Baru lahir, Balita dan anak usia pendidikan dasar serta usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit	% Masyarakat yang produktif mendapatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan penyakit sesuai dengan standar pelayanan minimal	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	
Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program tanggap darurat dan logistik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	Dinas Sosial
	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	
	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	
	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100	
Meningkatnya kualitas pelayanan pada PTSP (S4)	IKM atas layanan PTSP	%	81.75	
Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi teknis (%)	%	100	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan catatan sipil (S5)	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		1	
	Rasio bayi berakte kelahiran		1	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	%	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%		

Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta kelahiran	%	98.1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum (T4)	IKM atas ketertiban Umum	%	81.75	
Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat (S6)	Angka Kriminalitas yang tertangani	%	12.14	
Program peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban	Patroli siaga, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		1	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Program Perlindungan masyarakat	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68,49	Sartan Pol PP dan Pemadam Kebakaran
Misi 4 Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman				
Meningkatkan daya saing pariwisata (T5)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	4.57	
Meningkatnya daya tarik destinasi wisata (S7)	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata	%	2	
Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan	jiwa	234,126	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatkan kapasitas infrastruktur wilayah (T6)	IKM atas keterpenuhan infrastruktur wilayah	%	81.75	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas sistem transportasi (S8)	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0.39	
Program Rehabiltasi/Pemeliharaan dan pembangunan jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	40	Dinas PUPR
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ	Pemasangan Rambu-rambu	%	90	Dinas Perhubungan
Program Penerangan Jalan	Panjang jangkauan penerangan (km)	km	136	Dinas Perhubungan
Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam mendukung kehidupan masyarakat yang bersih dan sehat (S9)	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	100	
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	100	
Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	Dinas PUPR
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	Dinas PUPR
Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pemukiman yang tertata	%	70	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan		13.5	Dinas PUPR
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Akses Sanitasi yang layak (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Misi 5 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi				
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T7)	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Tinggi	
Meningkatnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungan kinerja (S10)	Nilai akuntabilitas daerah		B	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	% Ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang sesuai dengan regulasi	%	100	Bappelitbangda
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	% program RPJMD yang dijabarkan kedalam RKPD	%	100	Bappelitbangda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem evaluasi kinerja dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Cakupan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu	%	100	Skretariat Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (S11)	Opini Laporan Keuangan		WTP	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	% Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan daerah tepat waktu	%	100	BPKD
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.	% SKPD dengan	%	90	BPKD

	Pencatatan Aset yang benar			
Misi 6 Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah				
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (T8)	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	69.02	
Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan (S12)	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	%	41.18	
	Persentase balita gizi buruk	%	0	
	Prevalensi balita gizi kurang	%	0	
	Prevelensi Balita Stunting	%	<25%	
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan	persentase sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar (%)	%	5.88	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas	Persentase Puskesmas BLUD (%)	%	58.82	Dinas Kesehatan
Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan	%	100	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (Ccost recovery) (%)	%	1.12	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit		PARIPURNA	Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase puskesmas yang terakreditasi (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan (%)	%	98	Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Persentase penanganan penyakit	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pengembangan SDM Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan terlatih (%)	%	0	Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	Persentase ketersediaan sarana RS (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase kelayakan peralatan dan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap dan penunjang medis (%)	%	100	Dinas Kesehatan
Misi 7 Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan				
Meningkatkan situasi kondusif dan dukungan kehidupan beragama (T9)	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		1.94	
Meningkatnya kesejahteraan pengelola rumah ibadah (S13)	Persentase penyelenggara ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	%	100	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase Kelembagaan dan Penyelenggara ibadah Desa/ Kelurahan yang dibina	%	0	8 Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi kegiatan, pembinaan dan Pengawasan desa/ kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan desa/ kelurahan yang dilaksanakan	%	100	8 Kecamatan
Meningkatkan partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan (T10)	IPG	%	99.5	
	IDG	%	69.36	
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan (S14)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	12.25	
Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	98.12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan (S15)	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah Organisasi Pemuda		28	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional		5	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional		7	
Misi 8 Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan				
Meningkatkan kontribusi daerah dalam perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pilar nasional dalam ketahanan pangan (T11)	Surplus beras daerah	Ton	139,149	
Meningkatnya produksi pertanian padi sawah (S16)	Produksi Beras	Ton	214,219	

Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	%	3.96	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
Melestarikan daya dukung sumberdaya alam dan lingkungan hidup (T12)	Indeks Lingkungan Hidup	%	66.17	
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S17)	Indeks Kualitas Air		1	
	Indeks Kualitas Udara		91.71	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		0.48	
Program Pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman kota	Luas Taman Kota yang dibangun, ditata, dan dipelihara (m2)	m2	1,465	Dinas Lingkungan Hidup
Program Ruang Terbuka Hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik selesai 20% dari luas perkotaan	%	55	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	70	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Persentasi peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
Misi 9 Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi				
Meningkatkan daya saing investasi dan iklim usaha dalam mendukung kemajuan ekonomi masyarakat (T13)	Pertumbuhan ekonomi	%	8.5	
Meningkatnya daya saing investasi (S18)	Jumlah nilai Investasi berskala nasional	Juta Rp	######	
Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Meningkatnya kesejahateraan masyarakat lapis bawah (S19)	Angka kemiskinan	Jiwa	16,941	
Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial	Persentase Jumlah KK Miskin yang mendapatkan layanan kartu MACCA (%)	%	100	Dinas Sosial
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin	Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera (%)	%	100	Dinas Sosial
Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin	Warga miskin yang mendapat bantuan hukum (%)	%	100	Dinas Sosial
Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin yang dilatih dan pemberian modal usaha	%	0.18	Dinas Sosial
Berkembangnya lapangan kerja dan usaha (S20)	Tingkat pengangguran terbuka	%	2.36	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	67.31	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
Meningkatnya daya saing UKM dan industri (21)	Kontrbusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	15.9	
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	12.58	
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	91	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98.94	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Tipe C		1	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian
Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	50	Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian

4.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Prioritas pembangunan Kabupaten Soppeng tahun 2020 juga berdasarkan penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil serap aspirasi aspirasi masyarakat melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum terbahas untuk diakomodir pada tahun rencana.

Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah selain itu dalam perumusan program prioritas kabupaten dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu-isu strategis dalam RKPD Kabupaten Sampang tahun 2018. Secara singkat Pokok-pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam tiga bidang, yaitu :

- Pertama, Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- Kedua, Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
- Ketiga, Bidang Perekonomian.

a. Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Dalam Bidang Sumber Daya Alam dan Infrastruktur, terdapat beberapa hal yang dianggap perlu dan menjadi harapan kami, yaitu :

1. Pembangunan Insfrastuktur diharapkan mendukung pengembangan kawasan strategis yang terfokus pada pertanian dan diupayakan terintegrasi dengan kepariwisataan;
2. Dalam upaya untuk mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, diharapkan tetap memperhatikan infrastruktur perhubungan atau jalan;
3. Penyediaan dan pemenuhan akan sarana air bersih serta sanitasi pedesaan maupun perkotaan. Kita ketahui bersama air bersih sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk air minum maupun kebutuhan lainnya;
4. Pengelolaan lahan kritis dan lahan tidur agar dapat lebih dioptimalkan, seperti percetakan sawah baru, penanaman pohon produktif atau pengelolaan lainnya, namun tentunya memperhatikan kaidah – kaidah konservasi lahan, sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat;
5. Kami juga menaruh perhatian terhadap kegiatan yang berdampak pada pengrusakan dan pencemaran lingkungan, untuk itu perlu dioptimalkan pengawasannya.

b. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Selanjutnya pada bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan. Berbicara mengenai kelembagaan dan sumber daya manusia bahwa setelah selesainya pembentukan kelembagaan baru dan pengisian jabatan yang ada ini tentunya harus diikuti dengan penataan – penataan, baik secara kelembagaan maupun sumber daya manusianya, seperti :

1. Melakukan penataan organisasi, hal ini termasuk di dalamnya regulasi-regulasi dalam pelaksanaannya.
2. Peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur, yang tentunya bermuara kepada peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat, melalui upaya peningkatan ketersediaan tenaga medis, obat, dan sarana – prasarana di rumah sakit dan puskesmas.
4. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di semua SKPD.

c. Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Sedangkan dalam Bidang Perekonomian, kami harapkan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung dengan kesejahteraan masyarakat terutama peningkatan derajat ekonomi masyarakat. Ada empat poin yang dapat kami sampaikan, yaitu :

1. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pembinaan dan bantuan permodalan
2. Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan
3. Mengoptimalkan upaya – upaya antisipasi terhadap kenaikan tingkat inflasi dan memperlancar distribusi barang kebutuhan masyarakat, dan
4. Meningkatkan pengelolaan dan penataan serta pengembangan pasar – pasar tradisional.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (*output*) kegiatan maupun keluaran program (*outcome*), lokasi, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Tahun 2018 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dibuat analisanya sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun selanjutnya.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun bersama ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Soppeng dikarenakan adanya perubahan regulasi-regulasi terkait perubahan organisasi perangkat daerah. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun rencana Program/Kegiatan dan Pagu Pelaksanaannya tahun 2020 dan perkiraan maju rencana Program/Kegiatan dan Pagu Pelaksanaannya tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**				**4.275.156.118**				
0.00.1.01.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Telepon, Air, Internet dan Listrik	12 Bulan	174.200.000			12 Bulan	174.200.000
0.00.1.01.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Perizinan/Perpanjangan STNK	70 kali	14.280.000	-		70 kali	14.280.000
0.00.1.01.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jenis peralatan kebersihan	10 kali	28.781.750	-		10 kali	30.000.000
			Jumlah cleaning servis	5 kali				5 kali	
0.00.1.01.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jenis yang diadakan	1 kali	1.500.000	-		1 kali	3.500.000
0.00.1.01.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jenis peralatan rumah tangga	7 kali	1.500.000	-		7 kali	3.500.000
0.00.1.01.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Pengisian tabung gas	12 kali	500.000	-		12 kali	2.000.000
0.00.1.01.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi	200 kali	150.000.000	-		200 kali	270.000.000
0.00.1.01.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Prosentase pelayanan perkantoran	90%	902.267.232	-		90%	1.200.000.000
0.00.1.01.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	24 kali	0	-		24 kali	15.000.000
0.00.1.01.01.05.024	Pembangunan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Yang Diadakan	0	50.000.000	-		0	50.000.000
0.00.1.01.01.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Kendaraan Yang Diadakan	0	40.000.000	-		0	135.000.000
0.00.1.01.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Yang Diadakan	0	20.000.000	-		0	60.000.000
0.00.1.01.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Luas Gedung Yang Dipelihara	0	10.000.000	-		0	135.000.000
0.00.1.01.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau		0 Unit	71.841.800	-		0 Unit	71.841.800
0.00.1.01.01.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Perlengkapan Yang Dipelihara	0	10.000.000	-		0	10.000.000
0.00.1.01.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peralatan Yang Dipelihara	0	10.000.000	-		0	10.000.000
0.00.1.01.01.05.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	0	0	-		0	0
0.00.1.01.01.05.059	Pembinaan Kepegawaian	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pembinaan	0	20.000.000	-		0	20.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.1.01.01.05.062	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Sosialisasi	0	25.000.000	-		0	25.000.000
0.00.1.01.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau			50.000.000	-			75.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**				**33.975.000**				
0.00.1.01.01.06.006	Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah SPM yang dibuat	0	15.000.000	-		0	25.000.000
0.00.1.01.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	0	50.000.000	-		0	50.000.000
0.00.1.01.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	0	20.000.000	-		0	50.000.000
0.00.1.01.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	0	30.000.000	-		0	50.000.000
0.00.1.01.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	0	25.000.000	-		0	25.000.000
1	**Wajib**								
1 1	**Pendidikan**								
1 1 1	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**		**APK PAUD**	**56%**	**189.650.000**			60%	
01.01.1.01.01.01.001	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD negeri	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sarana dan prasarana TK Negeri yang dibangun/diadakan	15 Unit	0	-		15 Unit	2.510.447.700
01.01.1.01.01.01.002	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur PAUD swasta	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sarana dan prasarana lembaga PAUD swasta yang dibangun/diadakan	2 Unit	0	-		2 Unit	100.000.000
01.01.1.01.01.01.003	Sosialisasi PAUD dan deteksi tumbuh kembang anak	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sosialisasi yang PAUD yang dilaksanakan	4 Kali	20.000.000	-		4 Kali	35.802.500
01.01.1.01.01.01.004	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah kegiatan pengembangan kurikulum PAUD yang dilaksanakan	1 Kali	35.000.000	-		1 Kali	54.999.800
01.01.1.01.01.01.005	Pembinaan lembaga penyelenggara PAUD	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah lembaga PAUD yang dibina	40 Kali	38.750.000	-		50 Kali	38.750.000
01.01.1.01.01.01.007	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah PAUD Negeri yang diselenggarakan	15 Kali	634.800.000	-		15 Kali	708.000.000
01.01.1.01.01.01.008	Lomba Apresiasi Gebyar PAUD	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jenis lomba yang dilaksanakan	5 Kali	30.000.000	-		5 Kali	50.000.000
1 1 2	**Program Wajib Belajar Dasar Sembilan Tahun**		**APK SD Sederajat; APK SMP Sederajat**	**96,5 %;83,17 %**	**89.775.000**			97 %;83,9 %	
01.01.1.01.01.02.001	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SD	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sarana dan prasarana SD Negeri yang dibangun/diadakan	230 Kali	0	-		190 Kali	400.000.000
01.01.1.01.01.02.002	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan tingkat SMP	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sarana dan prasarana SMP Negeri yang dibangun/diadakan	40 Kali	300.000.000	-		40 Kali	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.01.1.01.01.02.003	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan pada sekolah swasta	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sarana dan prasarana SD/SMP/Sederajat Swasta yang dibangun/diadakan	2 Kali	0	-		3 Kali	200.000.000
01.01.1.01.01.02.006	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan dasar tingkat SD (DAK)	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sekolah SD/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana	50 Kali	28.000.285.000	-		92 Kali	28.100.000.000
01.01.1.01.01.02.007	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana/infrastruktur pendidikan dasar tingkat SMP (DAK)	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sekolah SMP/Sederajat yang mendapatkan sarana dan prasarana	5 Kali	7.847.103.000	-		8 Kali	7.000.000.000
1 1 10	**Program Pendidikan Kesetaraan**		**Jumlah yang mengikuti pendidikan kesetaraan**	**100%**	**34.310.000**			100%	
01.01.1.01.01.10.001	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	SKPD	Jumlah orang yang mengikuti Paket A	240 Orang	60.000.000	-		240 Orang	196.300.000
01.01.1.01.01.10.002	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	SKPD	Jumlah orang yang mengikuti Paket B	360 Orang	129.600.000	-		360 Orang	75.350.000
01.01.1.01.01.10.003	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	SKPD	Jumlah orang yang mengikuti Paket C	400 Orang	229.400.000	-		400 Orang	534.450.000
1 1 3	**Program Pendidikan Gratis**		**Angka Putus Sekolah SD; Angka Putus Sekolah SMP**	**0,06 %;0,45 %**	**18.225.000**			0,05 %;0,4 %	
01.01.1.01.01.03.001	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan gratis (APBD Kabupaten)	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen yang dibuat	0 Kali	50.000.000	-		0 Kali	100.000.000
01.01.1.01.01.03.002	Pendidikan gratis pendidikan dasar (APBD-Kabupaten)	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase sekolah yang melaksanakan pendidikan bebas pungutan	0%	950.000.000	-		0%	950.000.000
1 1 4	**Program Peningkatan Layanan Pendidikan**		**Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP; Angka Melanjutkan (AM) SMP ke SMA**	**100 %;100 %**	**177.500.000**			100 %;100 %	
01.01.1.01.01.04.001	Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan siswa kurang mampu	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah siswa tingkat SD, SMP dan SMA yang diberikan Beasiswa	0 Org	45.000.000	-		0 Org	45.000.000
01.01.1.01.01.04.002	Pemberian beasiswa bagi Mahasiswa berprestasi dan mahasiswa kurang mampu	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Mahasiswa S1 dan S2 yang diberikan beasiswa	700 Siswa	4.990.000.000	-		700 Siswa	5.000.000.000
01.01.1.01.01.04.004	Pelaksanaan Bimbingan Belajar Bagi Siswa	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah siswa yang mengikuti bimbingan belajar	240 Siswa	150.000.000	-		240 Siswa	200.000.000
1 1 6	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**		**Jumlah Sekolah yang Berakreditasi A tingkat SD; Jumlah Sekolah yang Berakreditasi A tingkat SMP**	**100 %;26 %**	**30.314.954.693**			100 %;27 %	
01.01.1.01.01.06.001	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen yang dibuat	4 Kali	50.000.000	-		4 Kali	50.000.000
01.01.1.01.01.06.002	Monitoring dan evaluasi Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen monev	1 dokumen	45.000.000	-		1 dokumen	80.000.000
01.01.1.01.01.06.003	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sekolah yang dibina	120 Sekolah	20.000.000	-		118 Sekolah	50.000.000
01.01.1.01.01.06.004	Penyediaan barang cetakan sekolah	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Rapor Yang Dicetak	7.000 exp	70.000.000	-		7.000 exp	70.000.000
01.01.1.01.01.06.005	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sekolah yang difasilitasi	25 Sekolah	20.000.000	-		25 Sekolah	20.000.000
01.01.1.01.01.06.006	Penyusunan Profil Pendidikan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen yang dibuat	1 Dokumen	70.000.000	-		1 Dokumen	100.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.01.1.01.01.06.007	Penyelenggaraan Ujian Nasional/Ujian Sekolah	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	persentase siswa yang ikut ujian	100 persen	170.000.000	-		100 persen	173.000.000
1 1 7	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**		**Kualifikasi Guru yang berpendidikan minimal S1/D4**	**97%**	**35.014.676.586**			98%	
01.01.1.01.01.07.001	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah guru yang diusulkan untuk menerima sertifikasi	150 Orang	30.000.000	-		125 Orang	50.000.000
01.01.1.01.01.07.002	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti uji kompetensi	20 orang	25.000.000	-		20 orang	60.000.000
01.01.1.01.01.07.003	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah tenaga pendidik yang ikut pelatihan	40 orang	25.000.000	-		40 orang	100.000.000
01.01.1.01.01.07.005	Pembinaan dan pengembangan karir berkelanjutan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah guru yang terbina karir berkelanjutan	70 orang	15.000.000	-		70 orang	52.500.000
01.01.1.01.01.07.007	Pelaksanaan uji kompetensi bagi calon Kepala Sekolah	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah guru yang mengikuti Uji kompetensi Cakep	60 Orang	0	-		0 Orang	0
1 1 8	**Program Pembinaan dan Pengembangan Kesiswaan**		**Jumlah Siswa yang berprestasi**	**18%**	**26.200.000**			20%	
01.01.1.01.01.08.001	Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	192 Orang	145.000.000	-		70 Orang	145.000.000
01.01.1.01.01.08.004	Penyelenggaraan lomba-lomba bidang kesiswaan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah lomba yang dilaksanakan	3 Lomba	150.000.000	-		3 Lomba	180.000.000
01.01.1.01.01.08.005	Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah siswa berprestasi yang memperoleh penghargaan	6.000 orang	5.000.000.000	-		6.000 orang	290.000.000
1 1 9	**Program Dana Bantuan Operasional Bantuan Sekolah**		**Angka Putus Sekolah SD; Angka Putus Sekolah SMP**	**0,06 %;0,45 %**	**25.175.200.000**			0,05 %;0,4 %	
01.01.1.01.01.09.001	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	SKPD, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	Jumlah sekolah yang melaksanakan	290 Sekolah	25.175.200.000	-		290 Sekolah	25.000.000.000
		TOTAL			**76.240.008.782**				**75.423.921.800**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase Keterpaduan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**4.165.004.118**			100 Persen	
0.00.1.02.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	jumlah pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 kali	193.270.000			12 kali	2.905.063.922
0.00.1.02.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	jumlah STNK Kendaraan Dinas/ operasional	295 Unit	91.928.018	-		295 Unit	112.303.978
0.00.1.02.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Kebersihan	21 Jenis	212.600.000	-		21 Jenis	339.287.172
			jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	24 Orang				24 Orang	
0.00.1.02.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	506 unit	31.997.200	-		506 unit	135.167.513
0.00.1.02.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	jumlah pengisian gas	12 Kali	2.000.000	-		12 Kali	72.066.361
0.00.1.02.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten, SKPD	jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi	1.450 kali	425.412.900	-		1.450 kali	570.000.000
0.00.1.02.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	jumlah paket pelayanan perkantoran	12 paket	2.020.202.000	-		12 paket	2.700.000.000
0.00.1.02.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	SKPD	jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	52 Berita	5.000.000	-		52 Berita	144.000.000
0.00.1.02.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah peralatan gedung kantor yang di adakan	43 Unit	125.000.000	-		45 Unit	7.198.327.200
0.00.1.02.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	jumlah gedung kantor	20 unit	45.000.000	-		20 unit	84.000.000
0.00.1.02.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di pelihara(Roda2dan Roda 4)	283 Unit	462.141.800	-		283 Unit	500.000.000
0.00.1.02.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah peralatan gedung yang di pelihara	71 Unit	86.800.000	-		71 Unit	82.000.000
0.00.1.02.01.05.056	Pengadaan pakaian kerja lapangan	SKPD	jumlah pakaian kerja lapangan yang di adakan	75 set	0	-		75 set	54.030.000
0.00.1.02.01.05.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD	jumlah pakaian dinas yang di adakan	720 set	0	-		720 set	108.000.000
0.00.1.02.01.05.059	Pembinaan Kepegawaian	SKPD	jumlah jenis DUPAK yang di selesaikan	17 jenis	64.790.000	-		17 jenis	65.690.000
0.00.1.02.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis yang di ikuti	20 Orang	116.234.000	-		20 Orang	98.955.000
0.00.1.02.01.05.066	Peningkatan Kapasitas Satuan Pengamanan (Satpam)	SKPD	jumlah SATPAM yang di tingkatkan kapasitasnya	21 orang	282.628.200	-		21 orang	247.828.200
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun Tepat Waktu**	**100 Persen**	**163.587.900**			100 Persen	
0.00.1.02.01.06.005	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	SKPD	jumlah SOP yang tersusun	5 Dokumen	1.100.000	-		5 Dokumen	10.000.000
0.00.1.02.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	8 dokumen	109.052.000	-		8 dokumen	199.000.000
0.00.1.02.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	jumlah dokumen pelaporan kinerja	4 dokumen	19.460.900	-		4 dokumen	60.000.000
0.00.1.02.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan	2 dokumen	21.975.000	-		2 dokumen	60.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.1.02.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 dokumen	12.000.000	-		4 dokumen	60.000.000
1	**Wajib**								
1 2	**Kesehatan**								
1 2 17	**Program Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan**		**Persentase Ibu Hamil dan Melahirkan yang mebdapatkan Pelayanan Kesehatan Minimal Sesuai Standar**	**100 Persen**	**53.550.000**			100 Persen	
01.02.1.02.01.17.001	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	SKPD	Pesentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Ibu Hamil	100%	34.550.000	-		100%	1.000.000.000
01.02.1.02.01.17.002	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	SKPD	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100%	19.000.000	-		100%	1.000.000.000
1 2 18	**Program Pelayanan Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Usia Pendidikan Dasar serta Pelayanan Kesehatan Usia lanjut**		**Persentase Bayi Baru Lahir, Balita, Anak Usia Pendidikan Dasar dan Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Minimal Sesuai Standar**	**100 Persen**	**125.250.000**			100 Persen	
01.02.1.02.01.18.001	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	SKPD	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	17.000.000	-		100%	500.000.000
01.02.1.02.01.18.002	Pelayanan Kesehatan Balita	SKPD	Pesentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100%	11.325.000	-		100%	500.000.000
01.02.1.02.01.18.003	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	SKPD	Pesentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	11.325.000	-		100%	500.000.000
01.02.1.02.01.18.004	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	SKPD	Pesentase Warga Negara Usia 60 tahun ke atas yang Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	85.600.000	-		100%	500.000.000
1 2 19	**Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif dan Pencegahan Penyakit**		**Persentase Masyarakat yang Produktif Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Sesuai Standar Pelayanan Minimal**	**100 Persen**	**164.775.000**			100 Persen	
01.02.1.02.01.19.001	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	SKPD	Persentase Warga negara usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	46.150.000	-		100%	500.000.000
01.02.1.02.01.19.002	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	SKPD	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehtaan sesuai standar	100%	18.250.000	-		100%	500.000.000
01.02.1.02.01.19.003	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	SKPD	Persentase Penyandang DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	30.600.000	-		100%	500.000.000
01.02.1.02.01.19.004	Pelayanan Kesehatan Jiwa pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	SKPD	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	9.775.000	-		100%	500.000.000
01.02.1.02.01.19.005	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	SKPD	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	30.000.000	-		100%	500.000.000
01.02.1.02.01.19.006	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terinfeksi HIV	SKPD	Persentase Orang Berisiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV sesuai Standar	100%	30.000.000	-		100%	500.000.000
1 2 8	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**		**Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS**	**100 Persen**	**65.300.000**			100 Persen	
01.02.1.02.01.08.001	Pengembangan Media Promosi dan informasi sadar hidup sehat	SKPD	Jumlah Media Promosi yang Diadakan	1 Paket	20.000.000	-		1 Paket	31.555.000
01.02.1.02.01.08.002	Penyuluhan Masyarakat Pola hidup sehat	SKPD	Jumlah Rumah Tangga Ber-PHBS	39.479 Rumah Tangga	10.990.000	-		42.516 Rumah Tangga	117.360.000
01.02.1.02.01.08.003	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	SKPD	Jumlah Tenaga Penyuluh yang dilatih	34 Orang	11.150.000	-		34 Orang	30.000.000
01.02.1.02.01.08.005	Kampanye Bahaya merokok	SKPD	Jumlah Kegiatan Kampanye Bahaya Merokok yang dilaksanakan	1 Kegiatan	23.160.000	-		1 Kegiatan	375.085.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 2 10	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**		**Persentase Akses Sanitasi yang Layak**	**100 Persen**	**466.930.000**			100 Persen	
01.02.1.02.01.10.001	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	SKPD	Jumlah Akses Sanitasi Primer yang layak bagi masyarakat	54%	436.680.000	-		55%	207.000.000
01.02.1.02.01.10.002	Sosialisasi Kebiajakan Lingkungan sehat	SKPD	Jumlah Kawasan yang STBM	18 Kawasan	12.025.000	-		30 Kawasan	40.000.000
01.02.1.02.01.10.003	Penyuluhan menciptakan Lingkungan sehat	SKPD	Jumlah Sarana Publik yang Saniter	265 Sarana	6.200.000	-		275 Sarana	8.000.000
01.02.1.02.01.10.005	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	SKPD	Jumlah Dokumen Sanitasi yang Tersusun	1 Dokumen	12.025.000	-		1 Dokumen	20.000.000
1 2 9	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**		**Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan**	**100 Persen**	**15.109.113.000**			100 Persen	
01.02.1.02.01.09.001	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	SKPD	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan	100%	160.000.000	-		100%	160.000.000
01.02.1.02.01.09.002	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	SKPD	Prevalensi Gizi Buruk	2%	17.500.000	-		2%	30.550.000
			Prevalensi Gizi Kurang	15%				15%	
01.02.1.02.01.09.004	Bantuan Operasional Kesehatan	SKPD	Jumlah Puskemas Yang Mendapatkan BOK	17 Puskesmas	14.931.613.000	-		17 Puskesmas	14.931.613.000
			JUmlah Puskesmas yang Mempublikasikan Laporan Pemanfaatan BOK	17 Puskesmas				17 Puskesmas	
1 2 1	**Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan**		**Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar**	**11,76 Persen**	**9.134.578.000**			5,88 Persen	
01.02.1.02.01.01.001	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAU)	SKPD	Jumlah UPTD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prsarana kesehatan	19 UPTD	20.000.000	-		19 UPTD	10.620.327.000
01.02.1.02.01.01.002	Pengadaan , peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan (DAK)	SKPD	Jumlah UPTD yang mendapatkan peningkatan sarana dan prsarana kesehatan	19 UPTD	9.114.578.000	-		19 UPTD	9.879.673.000
1 2 2	**Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan**		**Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan**	**100 Persen**	**41.327.440.279**			100 Persen	
01.02.1.02.01.02.001	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) -Kapitasi	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah Peserta JKN yang terdaftar di FKTP	272.000 Jiwa	6.248.763.693	-		272.000 Jiwa	6.027.826.400
01.02.1.02.01.02.002	Jaminan Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN) - Non Kapitasi	SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Jumlah Peserta JKN yang terdaftar di FKTP	272.000 Jiwa	64.000.000	-		272.000 Jiwa	1.337.050.000
01.02.1.02.01.02.003	pelayanan kesehatan masyarakat (Umum)	SKPD	Jumlah Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis	5 Kegiatan	1.043.000.000	-		5 Kegiatan	2.135.123.600
01.02.1.02.01.02.004	Pelayanan Kesehatan Gratis	SKPD	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan Kesehatan Gratis	242.720 Jiwa	32.084.143.414	-		242.720 Jiwa	32.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.02.1.02.01.02.006	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Puskesmas (JKN-Kapitasi)	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah Pengadaan Peralatan dan perlengkapan puskesmas	17 Paket	659.133.172	-		17 Paket	1.500.000.000
01.02.1.02.01.02.007	Peningkatan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu	SKPD, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	Jumlah pelayanan Pusat pelayanan Keselamatan terpadu yang melaksanakan sesuai setandar	8 Pelayanan	1.228.400.000	-		8 Pelayanan	2.000.000.000
1 2 3	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas**		**Persentase Puskesmas BLU**	**58,82 Persen**	**8.541.730.748**			70,59 Persen	
01.02.1.02.01.03.002	Penyusunan profil Kesehatan	SKPD	Jumlah Dokumen Profil yang Tersusun	20 Dokumen	5.500.000	-		20 Dokumen	10.050.000
01.02.1.02.01.03.003	sosialisasi dan Monev SPM	SKPD	Jumlah Sosialisasi yang diadakan	1 Kegiatan	16.200.000	-		1 Kegiatan	18.300.000
			Jumlah Kegiatan Monev yang diadakan	4 Kegiatan				4 Kegiatan	
01.02.1.02.01.03.007	Pengembangan BLUD Puskesmas	SKPD	Jumlah Puskesmas yan BLU	17 Puskesmas	10.000.000	-		17 Puskesmas	50.000.000
01.02.1.02.01.03.009	Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas	SKPD	Jumlah Puskesmas yang BLUD	17 Puskesmas	8.510.030.748	-		17 Puskesmas	521.650.000
1 2 4	**Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD**		**Kemandirian Keuangan Rumah Sakit (Cost Recorvery)**	**1,12 Cost Recorvery**	**65.000.000.000**			1,12 Cost Recorvery	
01.02.1.02.01.04.001	Penyediaan dan peningkatan pelayanan BLUD-RSUD	SKPD	Jumla Paket Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	1,12 CR	65.000.000.000	-		1,12 CR	55.000.000.000
1 2 5	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit**		**Akreditasi Rumah Sakit**	**4 Akreditasi**	**133.260.000**			4 Akreditasi	
01.02.1.02.01.05.001	Penyusunan Standar Kesehatan Rumah Sakit	SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Akreditasi	0 Akreditasi	67.760.000	-		0 Akreditasi	100.000.000
01.02.1.02.01.05.002	Peningkatan Pelayanan Rekam Medik Rumah Sakit	SKPD	Jumlah Unit Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit	1 Unit	65.500.000	-		1 Unit	50.000.000
1 2 6	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**		**Persentase Puskesmas yang Terakreditasi**	**100 Persen**	**1.113.705.000**			100 Persen	
01.02.1.02.01.06.002	Akreditasi Puskesmas (DAU)	SKPD	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	11 Puskesmas	0	-		1 Puskesmas	0
01.02.1.02.01.06.003	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	SKPD	Jumlah Puskesmas Yang Terakreditasi	11 Puskesmas	1.078.655.000	-		1 Puskesmas	550.000.000
01.02.1.02.01.06.006	Peningkatan Kesehatan Primer dan Tradisional	SKPD	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan Primer dan Trasional	17 Puskesmas	22.000.000	-		17 Puskesmas	30.000.000
01.02.1.02.01.06.007	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	SKPD	Jumlah Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan kinerja baik	2 Pelayanan	13.050.000	-		2 Pelayanan	30.000.000
1 2 7	**Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan**		**Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Kebutuhan**	**98 Persen**	**2.210.310.000**			98 Persen	
01.02.1.02.01.07.001	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	SKPD	Jumlah Paket Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Kebutuhan	1 Paket	2.150.880.000	-		1 Paket	4.188.420.000
01.02.1.02.01.07.002	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	SKPD	Jumlah Sarana Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit Sesuai Standar	55 Sarana	22.450.000	-		55 Sarana	30.000.000
01.02.1.02.01.07.003	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	SKPD	Jumlah Kategori Pengguna Obat Rasional	3 Kategori	13.480.000	-		3 Kategori	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.02.1.02.01.07.004	Peningkatan pengawasan Keamanan Pangan dan bahan berbahaya	SKPD	Jumlah Pengawasan Terhadap Keamanan pangan dan bahan berbahaya yang memenuhi standar	2 Jenis	23.500.000	-		2 Jenis	35.000.000
1 2 11	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit**		**Persentase Penanganan Penyakit**	**100 Persen**	**123.700.000**			100 Persen	
01.02.1.02.01.11.001	Penyemprotan /fogging sarang nyamuk	SKPD			50.000.000	-			200.000.000
01.02.1.02.01.11.003	Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	SKPD			1.600.000	-			422.500.000
01.02.1.02.01.11.004	Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	SKPD	Cakupan Penderita Penyakit Menular yang Ditangani	100%	35.100.000	-		100%	50.000.000
			Angka kesembuhan kasus diare	100%				100%	
			Angka Kesembuhan Kasus Kusta	100%				100%	
			Angka Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	100%				100%	
01.02.1.02.01.11.005	Peningkatan Imunisasi	SKPD	Cakupan Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi dasar Lengkap pada bayi	68%	13.250.000	-		68%	302.500.000
			Persentase anak Usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap	93%				94%	
			Cakupan UCI	100%				100%	
01.02.1.02.01.11.006	Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah	SKPD	Cakupan Penemuan AFP	1 Kasus	23.750.000	-		1 Kasus	315.000.000
1 2 12	**Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia**		**Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia**	**100 Persen**	**1.902.000.000**			100 Persen	
01.02.1.02.01.12.004	Jaminan Pesalinan (DAK Non isik)	SKPD	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	1.902.000.000	-		100%	2.023.821.000
1 2 14	**Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana Rumah Sakit**		**Persentase Ketersediaan Sarana Rumah Sakit**	**75 Persen**	**5.293.896.000**			80 Persen	
01.02.1.02.01.14.001	Pembangunan Rumah Sakit	SKPD	Jumlah Unit Gedung Rumah Sakit yang Terbangun	2 Bangunan	2.000.000.000	-		2 Bangunan	4.556.415.550
01.02.1.02.01.14.006	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	SKPD	Jumlah Alat Kesehatan Rumah Sakit yang diadakan	10 Paket	3.276.496.000	-		10 Paket	3.000.000.000
01.02.1.02.01.14.007	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)	SKPD	Jumlah Perlengkapat RT RS yang diadakan	5 Unit	17.400.000	-		5 Unit	350.000.000
1 2 15	**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit**		**Persentase Kelayakan Peralatan dan Pelayanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis**	**75 Persen**	**144.865.000**			**80 Persen**	
01.02.1.02.01.15.001	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	SKPD	Jumlah Sarana Rumah Sakit yang terpelihara	16 Bangunan	17.000.000	-		16 Bangunan	215.000.000
01.02.1.02.01.15.002	Pemeliharaan ruitn/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	SKPD	Jumlah Alat Kesehatan Terpelihara	783 Unit	107.865.000	-		789 Unit	105.000.000
01.02.1.02.01.15.003	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	SKPD	Jumlah Mobil AMbulance yang Terpelihara	11 Unit	20.000.000	-		11 Unit	150.000.000
1 2 16	**Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan**		**Persentase Tenaga Kesehatan Terlatih**	**100 Persen**	**105.000.000**			100 Persen	
01.02.1.02.01.16.001	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	SKPD	Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 orang	75.000.000	-		34 orang	75.000.000
01.02.1.02.01.16.002	Peningkatan Mutu Alat Kesehatan dan PKRT	SKPD	Jumlah Sarana Kesehatan yang Dilakukan Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT	17 Sarana	30.000.000	-		17 Sarana	75.000.000
		TOTAL			**155.343.995.045**				**176.735.538.896**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur; Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur**	**100%**	**3.546.806.563**			100 %;100 %;100 %;100 %	
0.00.1.03.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	135.000.000			12 kali	135.000.000
0.00.1.03.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan yang terbayar jasa KIR, pajak dan STNK	57 Unit	41.000.000	-		63 Unit	45.000.000
0.00.1.03.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah jenis peralatan kebersihan yang tersedia	11 Jenis	36.700.000	-		11 Jenis	36.515.000
			Jumlah petugas kebersihan yang terbayar	4 Orang				4 Orang	
0.00.1.03.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah komponen listrik yang diadakan	3 Jenis	7.500.000	-		3 Jenis	7.500.000
0.00.1.03.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah peralatan dapur yang diadakan	7 Jenis	20.000.000	-		7 Jenis	25.000.000
0.00.1.03.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah pengisian tabung gas dan bahan bakar mesin yang tersedia	12 Kali	5.000.000	-		12 Kali	5.000.000
0.00.1.03.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	4.900 Kali	1.150.000.000	-		5.000 Kali	1.200.000.000
0.00.1.03.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	7 Bidang/bagian	1.430.906.563	-		7 Bidang/bagian	1.500.000.000
0.00.1.03.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	SKPD	Jumlah informasi terupdate dalam setahun	48 Berita	12.000.000	-		48 Berita	12.000.000
0.00.1.03.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 Unit	175.000.000	-		10 Unit	500.000.000
0.00.1.03.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Luas bangunan yang dipelihara	2.100 m2	60.000.000	-		2.100 m2	100.000.000
0.00.1.03.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	11 Unit Mobil	300.000.000	-		11 Unit Mobil	330.000.000
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	43 Unit Motor				49 Unit Motor	
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit Toilet Portable				2 Unit Toilet Portable	
0.00.1.03.01.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Jenis	43.700.000	-		8 Jenis	45.000.000
0.00.1.03.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	15 Orang	130.000.000	-		15 Orang	130.000.000
0.00.1.03.01.05.074	Pengadaan mesin/kartu absensi	SKPD	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	5 Unit	0	-		0 Unit	0
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun Tepat Waktu**	**100%**	**67.200.000**			100%	
0.00.1.03.01.06.005	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	SKPD	Jumlah SOP yang tersusun	1 Dokumen	6.200.000	-		1 Dokumen	6.200.000
0.00.1.03.01.06.006	Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	SKPD	Jumlah laporan SPM yang tersusun	1 Dokumen	5.000.000	-		1 Dokumen	5.000.000
0.00.1.03.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun	6 Dokumen	24.000.000	-		6 Dokumen	18.000.000
0.00.1.03.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang tersusun	5 Dokumen	14.000.000	-		5 Dokumen	14.000.000
0.00.1.03.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun	6 Dokumen	12.000.000	-		6 Dokumen	12.000.000

0.00.1.03.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 Dokumen	6.000.000	-		4 Dokumen	12.000.000
1	**Wajib**								
1 3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1 3 4	**Program Pembangunan sarana dan prasarana air bersih**		**Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari**	**100%**	**2.673.087.000**			100%	
01.03.1.03.01.04.001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kabupaten	Jumlah SAB yang terbangun	1 Paket	150.000.000	Pendapatan Daerah		1 Paket	500.000.000
01.03.1.03.01.04.002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)	Kabupaten, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa	Jumlah SAB yang terbangun (DAK)	8 Paket	2.523.087.000	-		8 Paket	2.700.000.000
1 3 5	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah**		**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik**	**100%**	**7.948.305.000**			100%	
01.03.1.03.01.05.001	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	Kabupaten, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah sarana air limbah yang terbangun	1 Paket	680.000.000	Pendapatan Daerah		1 Paket	400.000.000
01.03.1.03.01.05.002	Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	SKPD	Jumlah Dokumen sanitasi yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000	-		1 Dokumen	10.000.000
01.03.1.03.01.05.003	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah sarana air limbah yang terbangun	7 Paket	4.883.305.000	-		8 Paket	5.000.000.000
01.03.1.03.01.05.006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Penugasan)	Kabupaten, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa	Jumlah sarana air limbah yang terbangun	5 Paket	2.125.000.000	APBD + DAK		5 Paket	2.000.000.000
01.03.1.03.01.05.007	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Hibah	Kabupaten, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	Jumlah sarana IPAL kawasan yang terbangun	1 Unit	0	-		1 Unit	2.500.000.000
01.03.1.03.01.05.008	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah - Layanan Lumpur Tinja	SKPD	Jumlah sarana air limbah (LLT) yang tersedia	1 Paket	200.000.000	-		1 Paket	80.000.000

01.03.1.03.01.05.009	Penyusunan Rencana Induk/Database Air Limbah	SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Induk/Database Air Limbah yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000	-		1 Dokumen	50.000.000
1 3 1	**Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jalan**		**persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40km/jam)**	**40%**	**65.970.563.000**			41%	
01.03.1.03.01.01.001	Pembangunan Jalan		Panjang Jalan dibangun	0 km	0	Pendapatan Daerah		0 km	16.000.000.000
01.03.1.03.01.01.003	Peningkatan Jalan	Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	Panjang Jalan ditingkatkan statusnya	41 km	39.170.865.000	Pendapatan Daerah		47 km	90.000.000.000
01.03.1.03.01.01.004	Pembangunan /Rehabilitasi Jalan (DAK)	Kabupaten	Panjang jalan direhabilitasi secara berkala/ dibangun melalui DAK	61 km	26.049.698.000	APBN (DAK)		69 km	57.500.000.000
01.03.1.03.01.01.005	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Kabupaten	Panjang Jalan direhabilitasi secara rutin	40 km	750.000.000	Pendapatan Daerah		61 km	1.500.000.000
1 3 2	**Program Rehabiltasi/ Pemeliharaan dan pembangunan jembatan**		**Persentasi proporsi jembatan dalam kondisi mantap**	**88%**	**1.650.000.000**			88%	
01.03.1.03.01.02.001	Pembangunan Jembatan	Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata	Jumlah jembatan terbangun	3 Unit	1.400.000.000	Pendapatan Daerah		5 Unit	2.000.000.000
01.03.1.03.01.02.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Kabupaten	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	5 Unit	250.000.000	-		5 Unit	400.000.000
1 3 12	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**		**Persentase jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik**	**100%**	**415.000.000**			100%	
01.03.1.03.01.12.002	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	SKPD	Jumlah alat ukur dan bahan lab. kebinamargaan yang diadakan	1 Set	200.000.000	-		2 Set	200.000.000
01.03.1.03.01.12.003	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	SKPD	Jumlah Alat berat direhabilitasi	8 Unit	185.000.000	-		8 Unit	200.000.000
01.03.1.03.01.12.004	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	SKPD	Jumlah alat laboratorium yang dipelihara	5 Unit	30.000.000	-		5 Unit	30.000.000
1 3 13	**Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan**		**Persentase cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi**	**100%**	**80.000.000**			100%	
01.03.1.03.01.13.001	Pemutakhiran Data Kondisi Jalan dan Jembatan	Kabupaten	Jumlah dokumen database jalan dan jembatan yang tersusun	1 Dokumen	80.000.000	-		1 Dokumen	50.000.000
1 3 14	**Program Pengaturan Jasa Konstruksi**		**Persentase jumlah rekomendasi izin jaza konstruksi dengan waktu penertiban paling lama 7 (tujuh) hari kerja stelah persyaratan lengkap**	**100%**	**70.000.000**			100%	
01.03.1.03.01.14.001	Penerbitan Rekomendasi IUJK	SKPD	Jumlah rekomendasi IUJK yang direkomendasikan	35 Rekomendasi	10.000.000	-		35 Rekomendasi	10.000.000
01.03.1.03.01.14.002	Pembinaan Jasa Konstruksi	SKPD	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang dibina	80 Orang	60.000.000	-		30 Orang	10.000.000
1 3 6	**Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong**		**Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat**	**30%**	**1.360.000.000**			40%	
01.03.1.03.01.06.001	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja	Panjang drainase yang terbangun	2 km	1.310.000.000	Pendapatan Daerah		4 km	2.400.000.000
01.03.1.03.01.06.002	Penyusunan Rencana Induk/Database Saluran Drainase/Gorong-gorong	SKPD	Jumlah dokumen Rencana Induk/Database saluran drainase/gorong-gorong yang tersusun	1 Dokumen	50.000.000	-		1 Dokumen	50.000.000
1 3 7	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**		**Persentase ketaatan RTRW**	**39%**	**25.000.000**			40%	
01.03.1.03.01.07.005	Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	12 kali	25.000.000	-		12 kali	25.000.000

1 3 9	**Program Perencanaan Tata Ruang**		**Rencana tata ruang yang di perdakan**	**40%**	**700.000.000**			50%	
01.03.1.03.01.09.001	Penyusunan rencana tata ruang wilayah	Kabupaten, SKPD	Jumlah dokumen ranperda/perda RTRW yang direview/direvisi/disusun	1 Dokumen	300.000.000	-		0 Dokumen	0
01.03.1.03.01.09.008	Penyusunan Database Tata Ruang	SKPD	Jumlah dokumen database tata ruang yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	-		1 Dokumen	200.000.000
01.03.1.03.01.09.009	Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Kabupaten, SKPD	Jumlah dokumen KLHS terkait produk tata ruang yang tersusun	1 Dokumen	300.000.000	-		1 Dokumen	200.000.000
1 3 10	**Program pemeliharaan bantaran, Tanggul dan Normalisasi sungai**		**Panjang turap/talud/bronjong yang di bangun**	**3,004 M**	**2.050.000.000**			3,004 M	
01.03.1.03.01.10.001	Pembangunan turap/talud/bronjong	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Panjang turap/talud/bronjong yang terbangun	700 m	1.400.000.000	Pendapatan Daerah		1.620 m	2.500.000.000
01.03.1.03.01.10.002	Pengerukan/Normalisasi Sungai	Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Lilirilau	Panjang sungai yang dinormalisasi	2 km	400.000.000	Pendapatan Daerah		3 km	1.000.000.000
01.03.1.03.01.10.003	Pembangunan Tanggul Sungai	Kecamatan Marioriwawo	Panjang tanggul sungai yang terbangun	300 meter	200.000.000	Pendapatan Daerah		50 meter	425.000.000
01.03.1.03.01.10.004	Penyusunan Sistem Informasi / Database Sungai	SKPD	Jumlah dokumen database yang tersusun	1 dokumen	50.000.000	-		1 dokumen	50.000.000
1 3 15	**Program Penataan Bangunan dan Lingkungan**		**Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik**	**65%**	**4.984.000.000**			67%	
01.03.1.03.01.15.001	Pembangunan Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah Jabatan	Kecamatan Lalabata	Jumlah bangunan gedung/ rumah dinas/ rumah jabatan yang terbangun	1 Unit	500.000.000	-		2 Unit	1.000.000.000
01.03.1.03.01.15.002	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Rumah Dinas/ Rumah Jabatan	Kecamatan Lalabata	Jumlah bangunan yang direhabilitasi	2 Unit	900.000.000	Pendapatan Daerah		10 Unit	3.600.000.000
01.03.1.03.01.15.003	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan yang tersusun	1 Dokumen	100.000.000	-		1 Dokumen	200.000.000
01.03.1.03.01.15.004	Pembangunan prasarana bangunan gedung	Kabupaten	Jumlah Prasarana Bangunan Gedung yang dibangun	1 Unit	500.000.000	-		10 Unit	3.600.000.000
01.03.1.03.01.15.005	Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Panjang jalan lingkungan yang dibangun/direhabilitasi	12 Ruas	2.954.000.000	-		10 Ruas	6.500.000.000
01.03.1.03.01.15.006	Penyusunan RPI2JM Keciptakaryaan	SKPD	Jumlah dokumen RPI2JM yang tersusun	1 Dokumen	10.000.000	-		1 Dokumen	10.000.000
01.03.1.03.01.15.007	Perizinan dan Pengawasan Bangunan	SKPD	Jumlah rekomendasi IMB yang ditertibkan	100 Rekomendasi	20.000.000	-		200 Rekomendasi	50.000.000
1 3 3	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya**		**Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik**	**92%**	**24.758.436.000**			94%	
01.03.1.03.01.03.002	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah irigasi yang terpelihara	5 buah	13.398.492.000	Pendapatan Daerah		3 buah	15.000.000.000
			Panjang saluran yang terpelihara	5.192 meter				5.050 meter	
01.03.1.03.01.03.003	Pembangunan jaringan Irigasi	Kecamatan Marioriwawo	Panjang saluran yang dibangun	1.250 meter	750.000.000	Pendapatan Daerah		6.208 meter	1.500.000.000
01.03.1.03.01.03.006	Pengelolaan Irigasi Secara Partisipatif	Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah DI yang terehabilitasi secara partisipatif	5 Daerah Irigasi	10.129.944.000	-		5 Daerah Irigasi	500.000.000
01.03.1.03.01.03.007	Pengadaan Peralatan Penunjang Operasi	SKPD	Jumalah peralatan OP yang diadakan	1 Paket	30.000.000	-		1 Paket	50.000.000
01.03.1.03.01.03.008	Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan	Kabupaten	Panjang saluran yang dipelihara	500 m	300.000.000	-		700 m	400.000.000
01.03.1.03.01.03.009	Pemberdayaan petani pamakai air	Kabupaten	Jumlah P3A yang diberdayakan	15 P3A/GP3A	75.000.000	-		25 P3A/GP3A	100.000.000
01.03.1.03.01.03.010	Penyusunan sistem informasi database irigasi	Kabupaten	Jumlah Dokumen DI yang tersusun	10 Buah	50.000.000	-		20 Buah	50.000.000
01.03.1.03.01.03.011	Pendampingan komisi irigasi	SKPD	Jumlah sekretariat komisi irigasi yang terfasilitasi	1 Paket	25.000.000	-		1 Paket	25.000.000

		TOTAL	116.298.397.563				224.713.215.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran; Persentase Keterpenuhan Saran dan Prasana Aparatur**	**100%**	**862.287.500**			100 %;100 %	
0.00.1.04.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	20.400.000			12 Bulan	19.560.000
0.00.1.04.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	3 Unit	5.000.000	-		3 Unit	10.000.000
0.00.1.04.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah jenis peralatan,bahan pembersih dan kantor yang bersih	2 Orang	17.400.000	-		2 Orang	17.400.000
			Jumlah tenis peralatan,bahan pembersih dan kantor yang bersih	10 Jenis				10 Jenis	
0.00.1.04.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan kantor	9 Jenis	2.000.000	-		9 Jenis	2.000.000
0.00.1.04.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	16 Jenis	15.130.000	-		16 Jenis	1.131.000
0.00.1.04.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah pengisian tabung gas	12 Kali	2.040.000	-		12 Kali	2.040.000
0.00.1.04.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	700 Kali	313.877.500	-		700 Kali	700.000.000
0.00.1.04.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	4 Paket	230.720.000	-		4 Paket	180.195.000
0.00.1.04.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan gedung yang diadakan	15 Unit	127.570.000	-		17 Unit	436.000.000
0.00.1.04.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Luas bangunan yang dipelihara	500 m2	15.000.000	-		500 m2	15.000.000
0.00.1.04.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 Unit	50.000.000	-		2 Unit	50.000.000
			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 Roda				4 Roda	
0.00.1.04.01.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah perlengkapan kantor/rumah tangga yang dipelihara	24 Unit	13.150.000	-		24 Unit	7.250.000
0.00.1.04.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	10 orang	50.000.000	-		10 orang	80.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perecanaan yang disusun tepat waktu; Persentase Pemenuhan Kebutuhan Saran dan Prasana Aparatur; Persentase Peningkatan SDM Aparatur**	**100%**	**278.097.500**			100 %;100 %;100 %	
0.00.1.04.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD	6 Dokumen	65.500.000	-		6 Dokumen	25.700.000
0.00.1.04.01.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	22.350.000	-		1 Dokumen	25.700.000
0.00.1.04.01.06.005	Penyusunan standar operasional prosedur (SOP)	SKPD	Jumlah dokumen SOP yang disusun	1 Dokumen	6.795.000	-		1 Dokumen	10.000.000
0.00.1.04.01.06.006	Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	SKPD	Jumlah dokumen SPM yang disusun	1 Dokumen	15.802.500	-		1 Dokumen	7.000.000
0.00.1.04.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	Jumlah dokumen perencancan dan penganggaran	3 Dokumen	27.250.000	-		3 Dokumen	25.000.000
0.00.1.04.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja	1 Dokumen	17.575.000	-		1 Dokumen	25.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.1.04.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	1 Dokumen	38.400.000	-		1 Dokumen	20.000.000
0.00.1.04.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	Jumlah dokumen E-MONEV yang disusun	1 Dokumen	84.425.000	-		1 Dokumen	23.000.000
1	**Wajib**								
1 4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1 4 1	**Program Pengembangan Perumahan**		**Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni; Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni**	**100%**	**1.577.625.000**			100 %;100 %	
01.04.1.04.01.01.001	Pembangunan/ Perbaikan Rumah Sehat Layak Huni	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Liliriaja, Timusu, Macanre, Lemba, Galung	Jumlah rumah tinggal yang dibangun/ direhabilitasi	100 Rumah	1.384.375.000	-		100 Rumah	4.100.000.000
01.04.1.04.01.01.002	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Kabupaten	Jumlah rumah tinggal korban bencana yang dibangun/ direhabilitasi	10 Rumah	50.300.000	-		10 Rumah	111.110.000
01.04.1.04.01.01.003	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	111.500.000	-		1 Dokumen	333.300.000
01.04.1.04.01.01.005	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Rumah Layak Huni	Kabupaten, Ganra, Galung, Batu-Batu, Timusu, Macanre, Lemba	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi	100 Orang	31.450.000	-		100 Orang	22.222.000
1 4 2	**Program Pengembangan Kawasan Permukiman**		**Persentase Permukiman yang Tertata**	**70%**	**130.300.000**			80%	
01.04.1.04.01.02.004	Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kabupaten, Kecamatan Marioriawa	Jumlah PSU yang dibangun	10 Unit	130.300.000	APBD + DAK	Pembangunan PSU Bak Sampah	10 Unit	300.000.000
01.04.1.04.01.02.005	Pembuatan Profil Kawasan Kumuh	Kabupaten			0	-			75.000.000
01.04.1.04.01.02.006	Perencanaan Kawasan Perumahan di Sekitar Sungai dan Danau	Kabupaten			0	-			27.000.000
4									
4 4	**Pertanahan**								
4 4 1	**Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**		**Persentase Luas Lahan Bersertifikat**	**68%**	**462.290.000**			68%	
02.04.1.04.01.01.001	Pengadaan Tanah Pemakamanan Umum,Taman dan Tempat Pengelolaan Sampah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Tanah yang diadakan	2 Bidang	303.750.000	-		2 Bidang	1.000.000.000
02.04.1.04.01.01.002	Pengadaan Sertifikat Tanah Bagi Pemakaman Umum,Taman dan Tempat Pengelolaan Sampah		Luas tanah pemakaman umum, taman dan pengelolaan sampah	3 sertifikat	0	-		3 sertifikat	75.000.000
02.04.1.04.01.01.003	Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Luas Tanah Sarana Pemerintah, Pemakaman Umum, Taman, dan Tempat pengelolaan Sampah yang ditata	1 Paket	158.540.000	-		1 Paket	150.000.000
4 4 2	**Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertanahan**		**Penyelesaian kasus tanah Negara**	**100%**	**18.950.000**			100%	
02.04.1.04.01.02.001	Pembinaan/Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Kabupaten	Jumlah penyelesaian konflik-konflik pertanahan	7 Konflik	18.950.000	-		7 Konflik	75.000.000
		TOTAL			**3.329.550.000**				**7.950.608.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran ; Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur; Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur**	**100%**	**1.607.684.375**			100 %;100 %;100 %;100 %	
0.00.1.05.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	36 Kali	98.868.000			36 Kali	125.450.000
0.00.1.05.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	30 Unit	203.899.000	APBD + DAK		35 Unit	276.523.000
0.00.1.05.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	9 Jenis	18.031.000	APBD + DAK		9 Jenis	23.500.000
0.00.1.05.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	15 Jenis	15.204.000	APBD + DAK		15 Jenis	21.420.000
0.00.1.05.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah pengisian gas	108 Kali	17.820.000	APBD + DAK		108 Kali	17.820.000
0.00.1.05.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	350 Kali	100.000.000	APBD + DAK		350 Kali	320.000.000
0.00.1.05.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Jumlah paket pelayanan perkantoran	8 Paket	264.948.000	APBD + DAK		18 Paket	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.1.05.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	30 Berita	0	APBD + DAK		30 Berita	56.000.000
0.00.1.05.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	6 Buah/Unit	178.000.000	APBD + DAK		6 Buah/Unit	35.700.000
0.00.1.05.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Lalabata Rilau	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 Unit	621.064.375	-		41 Unit	643.040.000
0.00.1.05.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	19 Buah/Unit	8.250.000	APBD + DAK		19 Buah/Unit	15.500.000
0.00.1.05.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	7 PNS	81.600.000	APBD + DAK		7 PNS	90.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**% dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; % dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; % dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**10.750.000**			100 %;100 %;100 %	
0.00.1.05.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	3 dokumen	3.100.000	APBD + DAK		3 dokumen	11.740.000
0.00.1.05.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 dokumen	2.650.000	APBD + DAK		5 dokumen	4.550.000
0.00.1.05.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	2 dokumen	5.000.000	APBD + DAK		2 dokumen	17.450.000
0.00.1.05.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	3 dokumen	0	APBD + DAK		3 dokumen	1.450.000
1	**Wajib**								
1 5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**								
1 5 1	**Program Peningkatan dan Kesiagaan serta Pencegahan Bahaya Kebakaran**		**Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**	**100%**	**3.071.596.300**			100%	
01.05.1.05.01.01.002	Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah lokasi penyuluhan	8 Kecamatan	18.974.800	APBD + DAK		8 Kecamatan	40.000.000
01.05.1.05.01.01.003	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan kebakaran	4 Jenis	14.371.500	APBD + DAK		15 Jenis	1.900.000.000
01.05.1.05.01.01.004	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah tenaga pemadam kebakaran	224 Orang	3.038.250.000	APBD + DAK		269 Orang	2.800.000.000
01.05.1.05.01.01.007	Penyelamatan korban kebakaran	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Persentase warga negara korban kebakaran yang memperoleh layanan penyelamatan	100 Orang	0	APBD + DAK		100 Orang	70.000.000
01.05.1.05.01.01.008	Evakuasi korban kebakaran	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Persentase warga negara korban kebakaran yang memperoleh layanan evakuasi	100 Orang	0	APBD + DAK		100 Orang	90.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 5 8	**Program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**		**Jumlah warga negara memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada**	**100%**	**127.104.000**			100%	
01.05.1.05.01.08.001	Pelayanan warga negara yang terkena akibat penegakan hukum Perda dan Perkada	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Persentase pelayanan warga negara yang terkena akibat penegakan perda dan perkada	100 Orang	0	APBD + DAK		100 Orang	200.000.000
01.05.1.05.01.08.002	Penegakan dan pengawasan Perda	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah penegakan dan pengawasan perda	72 Kali	117.104.000	APBD + DAK		72 Kali	200.000.000
01.05.1.05.01.08.004	Kegiatan pelatihan dasar/kesamaptaan Sat. Pol. PP	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sat pol pp yang terbina	309 Orang	10.000.000	APBD + DAK		309 Orang	50.000.000
1 5 2	**Program Peningkatan Kapasitas Keamanan dan Ketertiban**		**Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**	**1%**	**4.297.250.000**			150%	
01.05.1.05.01.02.001	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah anggota sat pol pp	309 Orang	3.723.150.000	-		309 Orang	4.775.000.000
01.05.1.05.01.02.002	Pengendalian keamanan lingkungan	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	Jumlah patroli keamanan yang dilaksanakan	365 Hari	574.100.000	APBD + DAK		365 Hari	750.000.000
01.05.1.05.01.02.003	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah penertiban dan pencegahan kejahatan	48 Kali	0	APBD + DAK		48 Kali	475.000.000
1 5 3	**Program pengembangan dan pembinaan PPNS Kabupaten/ Kota**		**Jumlah PPNS Yang tebina**	**11 Orang**	**18.000.000**			11 Orang	
01.05.1.05.01.03.001	Diklat Khusus PPNS		Jumlah PPNS yang berSKEP	1 Orang	0	APBD + DAK		1 Orang	30.000.000
01.05.1.05.01.03.002	Pembinaan PPNS		Persentase PPNS yang terbina	3 Orang	18.000.000	APBD + DAK		5 Orang	50.000.000
1 5 7	**Program Perlindungan Masyarakat**		**Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas)**	**68,49 Orang**	**504.252.000**			68,49 Orang	
01.05.1.05.01.07.002	Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah anggota linmas yang terbina	1.566 Orang	504.252.000	APBD + DAK		1.566 Orang	50.000.000
01.05.1.05.01.07.003	Pengadaan sarana dan prasarana Linmas	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah jenis sarana dan prasarana perlindungan masyarakat	2 Jenis	0	APBD + DAK		0 Jenis	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		TOTAL			9.636.636.675				14.140.143.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur, Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur**	**100%**	**590.266.350**			100%	
0.00.1.06.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	22.320.000			12 Kali	24.000.000
0.00.1.06.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Riaja	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	22 Unit	16.000.000	-		27 Unit	35.000.000
0.00.1.06.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	3 Jenis	890.150	APBD + DAK		7 Jenis	20.000.000
0.00.1.06.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	5 Jenis	505.700	APBD + DAK		7 Jenis	10.000.000
0.00.1.06.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	5 Jenis	1.085.500	APBD + DAK		5 Jenis	2.000.000
0.00.1.06.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah pengisian tabung gas	12 Kali	1.200.000	APBD + DAK		12 Kali	3.000.000
0.00.1.06.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	350 Kali	179.200.000	-		450 Kali	250.000.000
0.00.1.06.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	5 Paket	176.015.000	-		5 Paket	185.000.000
0.00.1.06.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Buah	15.000.000	APBD + DAK		8 Buah	60.000.000
0.00.1.06.01.05.031	Pengadaan mebeleur	SKPD	Jumlah mebeler yang diadakan	4 Buah	10.000.000	APBD + DAK		3 Buah	100.000.000
0.00.1.06.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Luas gedung kantor / halaman yang dipelihara	1 Paket	5.000.000	APBD + DAK		1 Paket	45.000.000
0.00.1.06.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	22 Unit	135.000.000	APBD + DAK		27 Unit	250.000.000
0.00.1.06.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 Buah	5.050.000	APBD + DAK		15 Buah	15.000.000
0.00.1.06.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah ASN yang mendapatkan tambahan pengetahuan	5 Orang	23.000.000	APBD + DAK		10 Orang	35.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**65.900.000**			100%	
0.00.1.06.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	5 Dokumen	33.150.000	APBD + DAK		3 Dokumen	35.000.000
0.00.1.06.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	3 dokumen	10.750.000	APBD + DAK		5 dokumen	15.000.000
0.00.1.06.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	1 Dokumen	22.000.000	APBD + DAK		1 Dokumen	25.000.000
1	**Wajib**								
1 6	**Sosial**								
1 6 5	**Program Rehabilitasi Sosial**		**Persentase Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis**	**100%**	**264.500.000**			100%	
01.06.1.06.01.05.001	Pemberian bantuan kepada PMKS (Kelompok Usaha Bersama) KUBE	Kabupaten	Jumlah Kelompok yang memperoleh bantuan KUBE	4 Kelompok	89.500.000	APBD + DAK		4 Kelompok	200.000.000
01.06.1.06.01.05.002	Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia	Kabupaten	Jumlah lansia yang dibantu	80 Orang	60.000.000	APBD + DAK		80 Orang	100.000.000

01.06.1.06.01.05.003	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks truma		Jumlah penyandang cacat disabilitas tubuh, tuna wicara, tuna rungu, tuna netra, wanita tuna susila dan eks trauma (kusta) yang dibantu	43 KK	115.000.000	APBD + DAK		43 KK	160.000.000
1 6 1	**Program Perlindungan dan Pemberian Jaminan Sosial**		**Persentase (jumlah) KK Miskin yang terlayani**	**100%**	**808.825.000**			100%	
01.06.1.06.01.01.003	Peningkatan kemapuan (capacity bulding) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin KAT dan PMKS lainnya	Kabupaten	Jumlah Petugas yang mendapatkan Penguatan kapasitas dan melakukan pendampingan sosial (PKH dan UPPKH)	35 Orang	111.490.000	APBD + DAK		55 Orang	120.000.000
01.06.1.06.01.01.004	Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota	Kabupaten	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan	100%	98.750.000	APBD + DAK		100%	135.000.000
01.06.1.06.01.01.007	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Kabupaten	Jumlah Warga Miskin yang terlayani BPJS	100%	56.310.000	APBD + DAK		100%	150.000.000
01.06.1.06.01.01.008	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kabupaten	Jumlah anak panti asuhan dan panti cacat yang mendapatkan bantuan	100%	97.000.000	APBD + DAK		100%	100.000.000
01.06.1.06.01.01.010	Pendataan dan pengelolaan data bagi warga miskin	Kabupaten	Jumlah Warga Miskin yang terdata	100%	135.000.000	APBD + DAK		100%	170.000.000
01.06.1.06.01.01.011	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Kabupaten	Jumlah Warga Miskin yang terlayani	100%	126.000.000	APBD + DAK		100%	285.000.000
01.06.1.06.01.01.012	Pelestarian, kepahlawanan, keperintisan, dan kestiakawanan sosial	Kabupaten	Jumlah TMP yang terpelihara, Jumlah KeluargaVeteran yang dibantu	100%	184.275.000	APBD + DAK		100%	180.000.000
1 6 2	**Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin**		**Persentase RTM yang dibantu dalam pemenuhan hak dasar/ beras sejahtera**	**100%**	**120.000.000**			100 %;0	
01.06.1.06.01.02.001	Pendataan , pengelolaan data , monitoring dan Evaluasi Penerima Raskin	Kabupaten	Jumlah RT Miskin yang di data dan mendapat Raskin	100%	120.000.000	APBD + DAK		100%	156.600.000
1 6 4	**Program Usaha Kemandirian Penduduk Miskin**		**Persentase Penduduk Miskin yang dilatih dan diberi modal usaha**	**100%**	**268.545.776**			100%	
01.06.1.06.01.04.002	Peningkatan kualitas petani tembakau (klp petani miskin)	Kabupaten	Jumlah kelompok tani tembakau yang mendapatkan bantuan	3 Kelompok	246.237.764	APBD + DAK		5 Kelompok	300.000.000
01.06.1.06.01.04.003	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Kabupaten	Jumlah Kelompok Karang Taruna Yang mendapatkan bantuan	3 Kelompok	22.308.012	APBD + DAK		10 Kelompok	30.000.000
		TOTAL			**2.118.037.126**				**3.195.600.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**persentase keterpenuhan administrasi perkantoran,sarana**	**100%**	**489.840.000**			100%	
0.00.2.01.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah pembayaran telepon dan listrik	1 Tahun	22.000.000			1 Tahun	23.217.697
0.00.2.01.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah STNK kendaraan dinas yang diterbitkan	3 Unit	1.900.000	APBD + DAK		3 Unit	1.900.000
0.00.2.01.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	Bahan dan peralatan kebersihan serta jasa clening service	1 Tahun	9.622.000	APBD + DAK		1 Tahun	13.822.000
0.00.2.01.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Tahun	1.326.000	APBD + DAK		1 Tahun	1.326.000
0.00.2.01.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah pengisian tabung gas	1 Tahun	1.200.000	APBD + DAK		1 Tahun	2.400.000
0.00.2.01.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD	Rapat kordinasi dan konsultasi yang dilaksankan	1 Tahun	127.100.000	APBD + DAK		1 Tahun	135.000.000
0.00.2.01.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun	151.192.000	APBD + DAK		1 Tahun	161.283.250
0.00.2.01.01.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas Yang diadakan	2 unit	60.000.000	APBD + DAK		2 unit	0
0.00.2.01.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	100%	0	APBD + DAK		100%	20.000.000
0.00.2.01.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	100%	0	APBD + DAK		100%	20.000.000
0.00.2.01.01.05.031	Pengadaan mebeleur	SKPD	jumlah mubeleur yang diadakan	100%	0	APBD + DAK		100%	0
0.00.2.01.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Luas Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Tahun	10.000.000	APBD + DAK		1 Tahun	20.000.000
0.00.2.01.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara	100%	57.500.000	APBD + DAK		100%	68.810.000
0.00.2.01.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Tahun	21.000.000	APBD + DAK		1 Tahun	22.000.000
0.00.2.01.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK	100%	27.000.000	APBD + DAK		100%	28.800.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan,dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**30.040.000**			100%	
0.00.2.01.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah yang dihasilkan	3 Dok	8.925.000	APBD + DAK		3 Dok	16.595.000
0.00.2.01.01.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	7 Dok	8.925.000	APBD + DAK		7 Dok	10.595.000
0.00.2.01.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	5 Dokumen	8.450.000	APBD + DAK		5 Dokumen	8.710.000
0.00.2.01.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	7 Dok	3.740.000	APBD + DAK		7 Dok	10.000.000
4									
4 1	**Tenaga Kerja**								
4 1 1	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**		**Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat keahlian cukup**	**70%**	**364.900.000**			70%	
02.01.2.01.01.01.001	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	SKPD	Tersusunya Data Base Tenaga Kerja Daerah	65%	195.640.000	APBD + DAK		65%	138.328.178
02.01.2.01.01.01.004	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	SKPD	Terlaksanya pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	75%	169.260.000	APBD + DAK		80%	138.328.178
4 1 2	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**		**Tingkat partisipasi angkatan kerja**	**69%**	**150.000.000**			73%	
02.01.2.01.01.02.001	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	SKPD	Laporan Informasi Pasar Kerja	67%	0	APBD + DAK		67%	21.000.000

02.01.2.01.01.02.002	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	SKPD	jumlah pameran/bursa kerja yang dilaksanakan	1 Event	0	APBD + DAK		1 Event	35.000.000
02.01.2.01.01.02.005	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	SKPD	Jumlah Penganngur dan Setengah Penganggur yang terserap	72%	150.000.000	APBD + DAK		72%	175.610.000
4 1 3	**Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**		**Presentase jumlah perusahaan yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan**	**20%**	**27.375.000**			17%	
02.01.2.01.01.03.001	Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	SKPD	Presentase Penyelesaian perselisihan dilluar pengadilan HI	10%	27.375.000	APBD + DAK		10%	20.000.000
02.01.2.01.01.03.002	Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	SKPD	Presentase kepesertaan dalam program jaminan sosial	30%	0	APBD + DAK		30%	20.708.875
2	**Pilihan**								
2 8	**Transmigrasi**								
2 8 1	**Program Perencanaan, dan Pengembangan kawasan transmigrasi**		**Persentase keterpenuhan sarana dan prasaran sosial ekonomi dikawasan transmigrasi**	**75%**	**266.515.000**			75%	
03.08.2.01.01.01.001	Perencanaankawasan transmigrasi	SKPD	Rencana kawasan transmigrasi (RKT	100%	190.600.000	APBD + DAK		75%	170.000.000
03.08.2.01.01.01.002	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	SKPD	Jumlah sarana dan prasarana sosial ekonomi dikawasan transmigrasi	75%	75.915.000	APBD + DAK		75%	140.000.000
		TOTAL			**1.328.670.000**				**1.423.434.178**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**				**735.715.800**				
0.00.2.02.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	37.760.000	Pendapatan Daerah		12 kali	43.270.000
0.00.2.02.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasiona	4 unit	2.950.000	Pendapatan Daerah		4 unit	4.900.000
0.00.2.02.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah Petugas kebersihan/ Jumlah jenis peralatan kebersihan	1 Orang/ Jenis	10.600.000	Pendapatan Daerah		1 Orang/ Jenis	12.826.000
0.00.2.02.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	2 Jenis	1.858.000	Pendapatan Daerah		3 Jenis	2.282.365
0.00.2.02.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah pengisian gas	12 kali	2.040.000	Pendapatan Daerah		12 kali	2.615.000
0.00.2.02.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	195 kali	281.388.550	Pendapatan Daerah		200 kali	392.497.000
0.00.2.02.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Jumlah paket pelayanan perkantoran	15 Paket	271.886.400	Pendapatan Daerah		15 Paket	312.321.100
0.00.2.02.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	SKPD	jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	10 informasi	10.000.000	Pendapatan Daerah		10 informasi	11.000.000
0.00.2.02.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Luas gedung kantor yang dipelihara	400 meter	0	Pendapatan Daerah		0 meter	0
0.00.2.02.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit	62.232.850	Pendapatan Daerah		4 unit	75.301.750
0.00.2.02.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipeliharan	26 unit	15.000.000	Pendapatan Daerah		26 unit	18.755.000
0.00.2.02.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		jumlah aparat yang mengikuti bimbingan teknis	5 orang	40.000.000	Pendapatan Daerah		6 orang	50.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**				**29.986.000**				
0.00.2.02.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Kecamatan Lalabata	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	3 dokumen	10.534.000	Pendapatan Daerah		3 dokumen	12.000.000
0.00.2.02.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 dokumen	6.384.000	Pendapatan Daerah		5 dokumen	17.000.000
0.00.2.02.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	1 dokumen	6.084.000	Pendapatan Daerah		1 dokumen	12.000.000
0.00.2.02.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	3 Dokumen	6.984.000	Pendapatan Daerah		3 Dokumen	12.000.000
4									
4 2	**Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**								
4 2 1	**Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender**				**184.838.200**				
02.02.2.02.01.01.001	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kabupaten	jumlah organisasi perempuan yang dibina	20 Organisasi	13.370.000	Pendapatan Daerah		20 Organisasi	29.221.000
02.02.2.02.01.01.002	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Kabupaten	Jumlah peserta pelatihan	20 Orang	43.341.600	Pendapatan Daerah		40 Orang	86.683.200
02.02.2.02.01.01.003	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Kabupaten	Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bimbingan	50 orang	9.120.000	Pendapatan Daerah		100 orang	19.697.100

02.02.2.02.01.01.005	Sosialsiasi kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Kabupaten, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa	Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	9.120.000	Pendapatan Daerah		200 Orang	35.821.100
02.02.2.02.01.01.008	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Kabupaten, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah peserta workshop	50 Peserta	9.820.000	Pendapatan Daerah		100 Peserta	19.640.000
02.02.2.02.01.01.009	Workshop penyusunan PPRG	Kabupaten, SKPD	Jumlah peserta workshop	75 peserta	20.870.000	Pendapatan Daerah		0 peserta	0
02.02.2.02.01.01.011	Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SKPD	Jumlah profil	2 dokumen	9.500.000	Pendapatan Daerah		2 dokumen	22.064.500
02.02.2.02.01.01.012	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kabupaten, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	jumlah lokus yang dibina	38 lokus	21.270.000	Pendapatan Daerah		38 lokus	29.414.000
02.02.2.02.01.01.013	Penyuluhan ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah keluarga yang dibina	100 keluarga	48.426.600	Pendapatan Daerah		100 keluarga	55.226.600
4 2 2	**Program Peningkatan Kualitas keluarga dan Perlindungan Anak**				**181.860.000**				
02.02.2.02.01.02.003	Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan Anak	Kabupaten	Jumlah peserta forum anak	165 Peserta	30.265.000	Pendapatan Daerah		165 Peserta	52.771.200
02.02.2.02.01.02.004	Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak Anak	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	jumlah kecamatan ramah anak yang dibina	2 kecamatan	24.440.000	Pendapatan Daerah		8 kecamatan	26.042.200
02.02.2.02.01.02.005	Sosialisasi Partisipasi Anak dalam Pembangunan	Kabupaten	jumlah peserta sosialisasi	100 peserta	13.320.000	Pendapatan Daerah		100 peserta	15.092.000
02.02.2.02.01.02.006	Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan terhadap anak	Kabupaten, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa	jumlah peserta pelatihan	100 Orang	14.420.000	Pendapatan Daerah		200 Orang	39.592.200

02.02.2.02.01.02.008	Sosialsiasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	jumlah peserta yang mengikuti sosialisai	100 peserta	13.320.000	Pendapatan Daerah		400 peserta	57.755.500
02.02.2.02.01.02.009	Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan Anak	Kabupaten	jumlah peserta sosialisasi	200 peserta	22.520.000	Pendapatan Daerah		400 peserta	52.240.000
02.02.2.02.01.02.010	Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan	Kabupaten	jumlah peserta pelatihan	30 orang	19.420.000	Pendapatan Daerah		30 orang	19.896.100
02.02.2.02.01.02.011	Penguatan dan pengembangan kelembagaan P2TP2A	Kabupaten	jumlah lembaga yang terlibat dalam pengutan p2tp2a	5 lembaga	14.420.000	Pendapatan Daerah		5 lembaga	15.000.000
02.02.2.02.01.02.012	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	Kabupaten	jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	8.720.000	Pendapatan Daerah		50 peserta	14.621.000
02.02.2.02.01.02.013	Pembinaan lembaga dan penyedia layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	jumlah lembaga yg berkebutuhan khusus dibina	4 lembaga	6.595.000	Pendapatan Daerah		4 lembaga	6.990.000
02.02.2.02.01.02.014	Penguatan Kota Layak Anak (KLA)	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah lokus yang di bina	10 lokasi	14.420.000	Pendapatan Daerah		40 lokasi	49.990.800
		TOTAL			**1.132.400.000**				**1.626.526.715**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur; Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur**	**100 Persen**	**781.042.250**			100 Persen	
0.00.2.03.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	61.200.000			12 Kali	80.000.000
0.00.2.03.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	44 Unit	20.000.000	-		44 Unit	20.000.000
0.00.2.03.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	8 Jenis	12.500.000	-		8 Jenis	15.000.000
			Jumlah Petugas Kebersihan	2 Orang				2 Orang	
0.00.2.03.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah Alat-Alat Listrik/Penerangan Bangunan	1 Jenis	500.000	-		1 Jenis	4.000.000
0.00.2.03.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	1.500.000	-		5 Jenis	5.000.000
0.00.2.03.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah Pengisian Gas	8 Kali	1.280.000	-		12 Kali	1.920.000
0.00.2.03.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	489 Kali	293.193.600	-		500 Kali	350.000.000
0.00.2.03.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	17 Paket	194.618.650	-		17 Paket	320.000.000
0.00.2.03.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	1 Buah/ Unit	20.000.000	-		4 Buah/ Unit	35.000.000
0.00.2.03.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Luas Gedung Kantor/halaman yang dipelihara	525 Meter Persegi	21.000.000	-		3.850 Meter Persegi	45.000.000
0.00.2.03.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara	44 Unit	91.050.000	-		44 Unit	159.000.000
0.00.2.03.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	4 Jenis	13.500.000	-		4 Jenis	70.000.000
0.00.2.03.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek Peraturan-Perundang-undangan	5 Orang	50.700.000	-		5 Orang	120.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100 Persen**	**49.429.100**			100 Persen	
0.00.2.03.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA)	6 Dokumen	18.722.100	-		6 Dokumen	15.000.000
0.00.2.03.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LPPD, LKPJ, Lakip, Perjanjian Kinerja, Tepra)	5 Dokumen	9.212.500	-		5 Dokumen	25.000.000
0.00.2.03.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan Keuangan (Laporan Keuangan)	6 Dokumen	10.404.500	-		6 Dokumen	10.000.000
0.00.2.03.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	Jumlah Dokumen pengendalian dan evaluasi (Evaluasi renja, monitoring realisasi fisik dan keuangan, Evaluasi renstra)	4 Dokumen	11.090.000	-		4 Dokumen	20.000.000
4									
4 3	**Pangan**								

4 3 1	**Program Penyelenggaraan Ketahanan Pangan**		**Ketersediaan Pangan Utama (Ton)**	**267.558,58 Ton**	**899.387.100**			275.585,33 Ton	
02.03.2.03.01.01.001	Laporan Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Laporan Dewan Ketahanan Pangan Tk. Desa Kecamatan dan Kabupaten	1 Dokumen	85.000.000	-		1 Dokumen	99.500.000
02.03.2.03.01.01.002	Pemetaan Daerah Rawan Pangan	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Laporan Kondisi Daerah Rawan Pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	30.137.500	-		1 Dokumen	89.500.000
02.03.2.03.01.01.003	Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Laporan Analisis Ratio Jumlah Penduduk terhadap Kebutuhan Pangan	1 Dokumen	16.424.900	-		1 Dokumen	84.500.000
02.03.2.03.01.01.004	Koordinasi Kebijakan Perberasan	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Perberasan	9 Kali	80.000.000	-		9 Kali	138.500.000
02.03.2.03.01.01.005	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Watu Toa, Watu, TettikenraraE, GoariE, Congko, BaraE	Jumlah Desa Mandiri Pangan yang di bina	0 Desa	0	-		0 Desa	59.500.000
02.03.2.03.01.01.006	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Enrekeng	Jumlah ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah dalam mengatasi Kerawanan Pangan	12 Ton	100.000.000	-		12 Ton	128.500.000
02.03.2.03.01.01.007	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibina	1 unit	500.000.000	-		1 unit	134.500.000
02.03.2.03.01.01.008	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Laporan Akses Pangan Masyarakat	1 Dokumen	30.649.900	-		1 Dokumen	64.500.000

02.03.2.03.01.01.009	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Pembinaan dan Evaluasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia	9 Gapoktan dan Pedagang Pasar	34.049.900	-		9 Gapoktan dan Pedagang Pasar	79.500.000
02.03.2.03.01.01.010	Pemantauan dan Harga Pangan Pokok.	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Laporan stabilisasi Harga Pangan Strategis	1 Dokumen	23.124.900	-		1 Dokumen	64.500.000
4 3 2	**Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengawasan Keamanan Pangan**		**Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (%)**	**80 Persen**	**222.500.000**			90 Persen	
02.03.2.03.01.02.001	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan	1 Dokumen	62.650.000	-		1 Dokumen	75.000.000
02.03.2.03.01.02.002	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui P2KP	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Pengembangan Tanaman Pekarangan melalui Model Kawasan Rumah Pangan Lestari	4 Kelompok	27.425.000	-		25 Kelompok	120.000.000
02.03.2.03.01.02.003	Promosi dan Sosialisasi Produk Olahan Pangan Lokal	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Produk Olahan Pangan Lokal yang dipromosikan	12 Jenis	59.350.000	-		12 Jenis	80.000.000
02.03.2.03.01.02.005	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Jumlah Jenis Pangan Segar yang diuji	5 Jenis	41.175.000	-		5 Jenis	75.000.000

02.03.2.03.01.02.006	Pembinaan dan Pemantauan dan Sosialisasi Preferensi Pangan Masyarakat (PPM)	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Frekuensi Pembinaan, Pemantauan dan Sosialisasi Preperensi Pangan Masyarakat	18 Kali	31.900.000	-		18 Kali	95.000.000
2	**Pilihan**								
2 1	**Kelautan dan Perikanan**								
2 1 2	**Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan**		**Jumlah jenis olahan hasil perikanan lokal di pasaran**	**7 Jenis**	**121.449.900**			7 Jenis	
03.01.2.03.01.02.001	Pengembangan Agribisnis Perikanan	Kabupaten	Peningkatan produk hasil olahan perikanan	12 event / produk	94.037.500	-		12 event / produk	90.000.000
03.01.2.03.01.02.002	Pengembangan Daya Saing Produk Perikanan	Kabupaten	Jumlah kelompok yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pengemasan hasil perikanan	20 Kelompok	27.412.400	-		20 Kelompok	30.000.000
2 1 3	**Program Pengembangan Perikanan Budidaya**		**Pengembangan Perikanan Budidaya**	**439,3 Ton**	**384.999.800**			483,2 Ton	
03.01.2.03.01.03.001	Pengembangan Perikanan (Bibit Ikan Unggul Air Tawar)	Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta	Jumlah benih ikan yang dihasilkan	3.500.000 Ekor	300.000.000	-		13.500.000 Ekor	700.000.000
03.01.2.03.01.03.003	Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB) dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-PPHP)	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah anggota yang dibina	50 Orang	15.000.000	-		50 Orang	50.000.000
03.01.2.03.01.03.004	Pengembangan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan	Kabupaten, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang dibina	60 orang	24.999.900	-		60 orang	50.000.000
03.01.2.03.01.03.005	Monitoring dan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Penurunan Kasus Penyakit Ikan	4 Kasus	19.999.900	-		4 Kasus	50.000.000
03.01.2.03.01.03.006	Pengembangan dan Pembinaan Kelompok CPIB dan CBIB	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	Jumlah Kelompok UPR dan Pembudidaya Ikan yang dibina	35 Kelompok	25.000.000	-		35 Kelompok	50.000.000
2 1 4	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**		**Jumlah produksi ikan hasil tangkap/nelayan**	**3.553,7 Ton**	**169.999.900**			3.909 Ton	
03.01.2.03.01.04.001	Pembinaan dan Pengawasan Danau Tempe	Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Marioriawa	Jumlah penanganan kasus penggunaan alat tangkap ilegal	95 Kasus	150.000.000	-		96 Kasus	450.000.000

03.01.2.03.01.04.004	Pengembangan Kelembagaan Usaha Nelayan Kecil	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina	35 Kelompok	19.999.900	-		35 Kelompok	50.000.000
		TOTAL			**2.628.808.050**				**4.202.920.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase pemenuhan Administrasi perkantoran; Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Presentase tingkat kedisiplinan aparatur; Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur**	**0%**	**1.739.044.800**			0%	
0.00.2.05.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Bulan terbayar listrik, telepon dan air	12 Bulan	56.400.000			12 Bulan	62.040.000
0.00.2.05.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah kendaraan yang terbaya jasa KIR, pajak dan STNK	13 Unit	46.805.000	APBD + DAK		13 Unit	51.485.500
0.00.2.05.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan kebersihan yang diadakan	11 Jenis	19.706.000	APBD + DAK		11 Jenis	21.676.600
0.00.2.05.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah komponen listrik yang diadakan	5 Jenis	1.945.500	APBD + DAK		5 Jenis	2.140.050
0.00.2.05.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pebngisian tabung gas elpiji yang diadakan	12 Kali	2.100.000	APBD + DAK		12 Kali	2.310.000
0.00.2.05.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya		Frekuensi perjalanan dinas yang dilakukan	1 tahun	250.000.000	APBD + DAK		1 tahun	275.000.000
0.00.2.05.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah bidang yang dilayani kebutuhan ATK, materai, jasa pengiriman, honorarium, cetak, penggandaan, jilid, makanan dan minuman.	5 Bid & Sek	285.065.300	APBD + DAK		5 Bid & Sek	313.571.830
0.00.2.05.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah unit gedung/halaman yang dipelihara	4 Unit	25.670.000	APBD + DAK		4 Unit	28.237.000
0.00.2.05.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah unit Kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	50 Unit	948.853.000	APBD + DAK		50 Unit	1.043.738.300
0.00.2.05.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	22 Unit	26.500.000	APBD + DAK		22 Unit	29.150.000
0.00.2.05.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	13 Orang	76.000.000	APBD + DAK		13 Orang	83.600.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**0%**	**33.725.000**			0%	
0.00.2.05.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 Dokumen	18.100.000	APBD + DAK		5 Dokumen	19.910.000
0.00.2.05.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	3 Dokumen	15.625.000	APBD + DAK		3 Dokumen	17.187.500
4									
4 5	**Lingkungan Hidup**								
4 5 3	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**		**Presentase Jumlah sampah yang tertangani**	**29,26 %**	**2.883.813.000**			30,52 %	
02.05.2.05.01.03.000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK)		Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	4 Jenis	689.874.000	APBN (DAK)		5 Jenis	758.861.400
02.05.2.05.01.03.001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	35 Jenis	57.264.000	APBD + DAK		40 Jenis	62.990.400

02.05.2.05.01.03.003	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	SKPD	Jumlah Petugas Persampahan	166 Orang	2.104.400.000	-		183 Orang	2.314.840.000
02.05.2.05.01.03.012	Koordinasi penilaian kota sehat/ ADIPURA	Kecamatan Lalabata	Jumlah koordinasi penilaian ADIPURA	6 Kali	32.275.000	APBD + DAK		6 Kali	35.502.500
4 5 4	**Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup**		**Persentase Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup**	**100%**	**587.550.000**			100%	
02.05.2.05.01.04.003	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Kabupaten	Jumlah sungai yang dipantau kualitas airnya	5 Sungai	68.900.000	APBD + DAK		5 Sungai	75.790.000
02.05.2.05.01.04.005	Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Kecamatan Lalabata	Volume kompos	300 Kg	85.050.000	APBD + DAK		320 Kg	93.555.000
02.05.2.05.01.04.011	Pengkajian Dampak Lingkungan	Kabupaten		2	33.600.000	APBD + DAK		2	36.960.000
02.05.2.05.01.04.015	Pengembangan mutu dan kapasitas laboratorium LH	Kabupaten	Jumlah jenis parameter yang terakreditasi	12 Jenis Parameter	400.000.000	APBD + DAK		14 Jenis Parameter	440.000.000
4 5 5	**Program Perlindungan dan konservasi sumber daya alam**		**Luas daerah longsor yang tertangani**	**773,65 Ha**	**15.150.000**			873,65 Ha	
02.05.2.05.01.05.003	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Kabupaten	Jumlah kampung iklim binaan	8 Kampung	15.150.000	APBD + DAK		8 Kampung	16.665.000
4 5 1	**Program Pembangunan, Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota**		**Luas Taman Kota yang dibangun, ditata dan dipelihara**	**1.465 M2**	**70.000.000**			315 M2	
02.05.2.05.01.01.001	Pembangunan / Penataan Taman Tematik Kota	Kabupaten	Jumlah dan Luas Taman Kota yg dipelihara	184 m2	70.000.000	APBD + DAK		315 m2	77.000.000
4 5 7	**Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**		**Jumlah Penyelesaian pengaduan, penegakan hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat**	**100%**	**32.138.000**			100%	
02.05.2.05.01.07.001	Pembinaan sekolah berwawasan lingkungan	Kabupaten	Jumlah sekolah ADIWIYATA yang dibina	48 Sekolah	13.578.000	APBD + DAK		56 Sekolah	14.935.800
02.05.2.05.01.07.003	Sosialisasi/ penyuluhan lingkungan hidup	Kabupaten	Jumlah sosialisasi/penyuluhan LH	5 Sialisasi/Penyuluhan	18.560.000	APBD + DAK		5 Sialisasi/Penyulu	20.416.000
		TOTAL			**5.361.420.800**				**5.897.562.880**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase Penyelesaian kegiatan tepat waktu**	**100%**	**1.037.340.550**			100%	
0.00.2.06.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	tersedianya jasa komunikasi, llistrik dan air	12 bulan	106.800.000			12 bulan	129.228.000
0.00.2.06.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah STNK kendaraan dinas yang diterbitkan	9 unit	10.500.000	Pendapatan Daerah		10 unit	12.705.000
0.00.2.06.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	Bahan dan Peralatan Kebersihan serta Jasa Cleaning Service	12 bulan	10.702.000	Pendapatan Daerah		12 bulan	12.949.200
0.00.2.06.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Komponen Instalasi Listrik yang tersedia	4 jenis	1.947.000	Pendapatan Daerah		5 jenis	2.355.100
0.00.2.06.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	tersedianya peralatan rumah tangga	6 jenis	1.110.000	Pendapatan Daerah		6 jenis	1.331.000
0.00.2.06.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	570 kali	322.308.850	Pendapatan Daerah		590 kali	371.591.000
0.00.2.06.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	18 paket	342.348.950	Pendapatan Daerah		18 paket	442.739.968
0.00.2.06.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Perlengkapan Gedung Kantor	10 jenis	48.297.500	Pendapatan Daerah		12 jenis	30.000.000
0.00.2.06.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor yang dipelihara	1.032 m2	12.000.000	Pendapatan Daerah		1.032 m2	15.000.000
0.00.2.06.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang dipelihara	9 unit	116.500.000	Pendapatan Daerah		10 unit	140.965.000
0.00.2.06.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	5 jenis	19.800.000	Pendapatan Daerah		5 jenis	39.833.200
0.00.2.06.01.05.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	SKPD	Jumlah pakaian petugas pelayanan yang diadakan	52 pegawai	14.560.000	Pendapatan Daerah		52 pegawai	18.876.000
0.00.2.06.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	ASN yang mengikuti Bimtek	7 orang	30.466.250	Pendapatan Daerah		7 orang	41.811.429
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Laporan yang disusun tepat waktu**	**99%**	**23.775.000**			100%	
0.00.2.06.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	Dokumen Perencanaan Anggaran dan Laporan Kinerja SKPD	3 dokumen	7.250.000	Pendapatan Daerah		3 dokumen	7.250.000
0.00.2.06.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	Dokumen Perencanaan Anggaran dan Laporan Kinerja SKPD	5 dokumen	7.000.000	Pendapatan Daerah		5 dokumen	7.000.000
0.00.2.06.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 dokumen	8.300.000	Pendapatan Daerah		3 dokumen	8.300.000
0.00.2.06.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.225.000	Pendapatan Daerah		1 dokumen	1.225.000
4									

4 6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
4 6 1	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**		**Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk**	**99%**	**683.851.050**			99%	
02.06.2.06.01.01.004	Pengembangan Data Base Kependudukan	SKPD	Jumlah KK yang diterbitkan	24.000 KK	539.274.000	APBN (DAK)		25.000 KK	515.000.000
02.06.2.06.01.01.005	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	SKPD	Jumlah Peraturan yang diterbitkan	100%	10.000.000	Pendapatan Daerah		100%	10.000.000
02.06.2.06.01.01.007	Peningkatan Pelayanan Publik pada pelayananPendaftaran Penduduk	SKPD	Jumlah E-KTP berbasis NIK yang diterbitkan	1.820 KTP	129.675.800	Pendapatan Daerah		1.870 KTP	130.000.000
02.06.2.06.01.01.010	Pelayanan pindah datang penduduk	SKPD	Persentase SKPWNI yang diterbitkan	100%	4.901.250	Pendapatan Daerah		100%	55.000.000
4 6 2	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**	**3**	**100.308.000**			3	
02.06.2.06.01.02.001	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	SKPD	Jumlah Software / Hardware Komputer yang dipelihara dan dibangun	9 jenis	29.393.000	Pendapatan Daerah		9 jenis	30.000.000
02.06.2.06.01.02.002	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	SKPD	Profil Kependudukan Kab. Soppeng	1 dokumen	45.525.000	APBN (DAK)		1 dokumen	50.000.000
02.06.2.06.01.02.005	Sosialisasi berbagai kebijakan peraturan peraturan perundang-undangan bidang kependudukan	SKPD	Jumlah peserta sosialisasi	89 orang	25.390.000	APBN (DAK)		89 orang	55.000.000
4 6 3	**Program Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran**	**77,5 %**	**493.452.500**			90%	
02.06.2.06.01.03.001	Peningkatan pelayanan publik dalam pelayanan pencatatan sipil	SKPD	Jumlah Akta Capil yang diterbitkan	6.900 Akta	469.829.000	APBN (DAK)		7.000 Akta	470.000.000
02.06.2.06.01.03.002	Pelayanan penerbitan akta kematian, status anak dan pewarganegaraan	SKPD	Persentase akta kematian yang diterbitkan	100%	10.497.500	Pendapatan Daerah		100%	30.000.000
02.06.2.06.01.03.003	Pelayanan penerbitan akta perkawinan dan perceraian	SKPD	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan	100%	13.126.000	Pendapatan Daerah		100%	30.297.850
		TOTAL			**2.338.727.100**				**2.658.457.747**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.371.327.550**			100%	
0.00.2.07.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah Pembayaran jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	12 kali	42.000.000			12 kali	42.000.000
0.00.2.07.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah STNK Kendaraan dinas operasional	8 unit	2.250.000	-		8 unit	2.750.000
0.00.2.07.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan keberisihan.	11 jenis	3.000.000	-		11 jenis	17.000.000
0.00.2.07.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlahj jenis alat listrik/penerangan bangunan	6 jenis	1.620.000	-		6 jenis	5.000.000
0.00.2.07.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	2 jenis	1.500.000	-		2 jenis	2.500.000
0.00.2.07.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah Pengisian gas.	12 kali	2.100.000	-		12 kali	2.700.000
0.00.2.07.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.	1.855 kali	608.516.975	-		1.864 kali	487.706.700
0.00.2.07.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Jumlah paket pelayanan perkantoran	19 paket	523.340.575	-		20 paket	220.000.000
0.00.2.07.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.	10 buah	50.000.000	-		10 buah	50.000.000
0.00.2.07.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Roda 2 dan Roda 4	1 unit	51.000.000	-		1 unit	77.500.000
0.00.2.07.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara.	34 jenis	6.000.000	-		34 jenis	50.000.000
0.00.2.07.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	90%	80.000.000	-		100%	100.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**32.499.450**			100%	
0.00.2.07.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	3 dokumen	13.999.775	-		3 dokumen	20.000.000
0.00.2.07.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 dokumen	4.000.000	-		5 dokumen	4.500.000
0.00.2.07.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	Jumah dokumen pelaporan keuangan	1 dokumen	6.999.875	-		1 dokumen	9.000.000
0.00.2.07.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	3 dokumen	7.499.800	-		3 dokumen	15.000.000
4									
4 7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
4 7 3	**Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan**		**Persentase Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat.**	**100%**	**37.000.000**			100%	
02.07.2.07.01.03.004	Sosialisasi Posyantekdes (pos pelayanan TTG)	Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah pemahaman aparat kecamatan ttg TTG	8 kec	15.000.000	-		8 kec	89.000.000

02.07.2.07.01.03.006	Monev pengelolaan dan pengembangan bumdes	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Jumlah bumdes yang terbina	49 bumdes	22.000.000	-		49 bumdes	98.000.000
4 7 1	**Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa/ Kelurahan**		**Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat**	**30%**	**197.909.050**			31%	
02.07.2.07.01.01.001	Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah anak sekolah yang diberikan makanan tambahan	300 anak	33.800.000	-		300 anak	36.041.000
02.07.2.07.01.01.003	Penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Jumlah Desa/Keluarahan yang di fasilitasi	10 program pokok pkk	111.999.700	-		10 program pokok pkk	313.459.000
02.07.2.07.01.01.008	Evaluasi Tingkat Partisipasi Masayarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	2 D/K	43.011.875	-		2 D/K	137.000.000
02.07.2.07.01.01.012	Evaluasi dan monitoring lembaga kemasyarakatan	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah lembaga kemasyarakatan	200 orang	9.097.475	-		200 orang	60.000.000
4 7 2	**Program Perencanaan Pembangunan Desa**		**Persentase Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat waktu**	**100%**	**67.904.895**			100%	
02.07.2.07.01.02.002	Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RKPDesa dan APBDesa	Kecamatan Lalabata	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan rkpd/apbdesa	49 Desa	54.614.895	-		49 Desa	118.000.000

02.07.2.07.01.02.003	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel.	Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah desa yang dipasilitasi dalam penyusunan profil Desa/Kel.	70 D/K	13.290.000	-		70 D/K	42.000.000
4 7 4	**Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa**		**Persentase pemerintah desa yang difasilitasi**	**49 Desa**	**316.807.500**			49 Desa	
02.07.2.07.01.04.001	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Kecamatan Lalabata	Jumlah aparatur pemerintah desa dengan pelaksanaan bimtek keuangan desa	294 orang	33.895.000	-		588 orang	115.100.000
02.07.2.07.01.04.002	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lompulle, Panincong, Sering, Congko, Watu, Kampiri, Leworeng, Palangiseng, Rompegading, Citta, Umpungeng, Jampu, Laringgi, Mattabulu, Pising, BuluE, Tottong, GoariE, Masing, Pesse, Belo, Tinco, Gattareng Toa, Lalabata Riaja, Marioritenga, Pattojo, Baringeng, Timusu, Gattareng, Labokong, Mariorilau, Patampanua, Barang, Tetewatu, Ganra, LabaE, Marioriaja, Paroto, BaraE, TellulimpoE, Enrekeng, Kessing, Maccile, Parenring, AbbanuangE, Soga, Donri-Donri, Watu Toa, Kebo	Jumlah Desa yang dievaluasi	49 Desa	19.895.000	-		49 Desa	34.500.000
02.07.2.07.01.04.003	Pembinaan dan Pendampingan penggunaan Dana ADD/DAD	Kecamatan Lalabata	Jumlah yang dipasilitasi pengelolaan dana ADD/DAD	49 Desa	51.675.000	-		49 Desa	65.900.000
02.07.2.07.01.04.004	Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah Kepala Desa dan BPD yang difasilitasi	49 Desa	145.790.000	-		3 Desa	75.000.000
02.07.2.07.01.04.006	Fasilitasi penyusunan peraturan Desa tentang Desa	Kecamatan Lalabata	Jumlah ttg produk hukum ttg Desa	4 Desa	5.450.000	-		4 Desa	15.700.000
02.07.2.07.01.04.010	Penyusunan Produk Hukum terkait dengan desa	Kecamatan Lalabata	Jumlah Produk Hukum ttg desa	1 peraturan bupati	22.882.500	-		1 peraturan bupati	52.975.000
02.07.2.07.01.04.011	Pelatihan sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa (SISKEUDES)	Kecamatan Lalabata	Jumlah peserta pelatihan	147 orang	37.220.000	-		147 orang	90.825.000
		TOTAL			**2.023.448.445**				**2.449.156.700**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran; Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur; Persentase Peningkatan kapasitas SDM Aparatur**	**100 %;100 %;100 %;100 %**	**714.872.400**			100 %;100 %;100 %;100 %	
0.00.2.08.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	28.580.200			12 Kali	32.000.000
0.00.2.08.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	63 Unit	17.000.000	Pendapatan Daerah		63 Unit	21.000.000
0.00.2.08.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah petugas kebersihan	1 Orang	9.200.000	Pendapatan Daerah		1 Orang	19.000.000
			Jumlah jenis peralatan kebersihan	10 Jenis				10 Jenis	
0.00.2.08.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	7 Jenis	3.000.000	Pendapatan Daerah		4 Jenis	4.000.000
0.00.2.08.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	10 Jenis	5.269.100	Pendapatan Daerah		10 Jenis	10.000.000
0.00.2.08.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah pengisian gas	12 Kali	1.980.000	Pendapatan Daerah		12 Kali	2.220.000
0.00.2.08.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten Soppeng	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	118 Kali	189.693.100	Pendapatan Daerah		350 Kali	440.000.000
0.00.2.08.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	10 Paket	300.150.000	Pendapatan Daerah		11 Paket	380.000.000
0.00.2.08.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Luas gedung kantor / halaman yang dipelihara	270 m2	10.000.000	Pendapatan Daerah		270 m2	23.000.000
0.00.2.08.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara Roda 2 dan Roda 4/Roda 6	62 Unit	95.000.000	Pendapatan Daerah		63 Unit	150.000.000
0.00.2.08.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten, SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	24 Unit	5.000.000	Pendapatan Daerah		24 Unit	10.000.000
0.00.2.08.01.05.046	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Paket	15.000.000	Pendapatan Daerah		1 Paket	50.000.000
0.00.2.08.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang	35.000.000	Pendapatan Daerah		17 Orang	135.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dok perencanaan yang disusun tepat waktu; Persentase Dok penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase Dokumen PeLaporan yang disusun tepat waktu**	**100 %;100 %;100 %**	**35.789.000**			100 %;100 %;100 %	
0.00.2.08.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Dok perencanaan dan penganggaran	6 Dok	9.000.000	Pendapatan Daerah		3 Dok	16.000.000
0.00.2.08.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Dok peLap kinerja	5 Dok	9.605.000	Pendapatan Daerah		5 Dok	21.000.000
0.00.2.08.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Dok peLap keuangan	6 Dok	10.734.000	Pendapatan Daerah		1 Dok	12.000.000

0.00.2.08.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Dok pengendalian dan evaluasi	4 Dok	6.450.000	Pendapatan Daerah		3 Dok	16.000.000
4									
4 8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
4 8 1	**Program Pengendalian Penduduk**		**Total Fertility Rate (TFR)**	**2%**	**88.634.400**			2%	
02.08.2.08.01.01.002	Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Peserta sosialisasi	100 Orang	12.721.100	Pendapatan Daerah		100 Orang	14.557.800
02.08.2.08.01.01.004	Pengolahan data dan informasi program KB	SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa	Jumlah Lap	24 Laporan	14.700.000	Pendapatan Daerah		24 Laporan	10.000.000
02.08.2.08.01.01.005	Pelaksanaan rapat kerja daerah program pengendalian penduduk dan KB	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah peserta Rakerda	200 Orang	22.821.100	-		200 Orang	22.821.100
02.08.2.08.01.01.006	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina	100 Orang	12.721.100	Pendapatan Daerah		210 Orang	40.000.000
02.08.2.08.01.01.007	Pemantapan advokasi kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Klp Keg KKBPK	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah lembaga kemasyarakat yang diadvokasi	10 Lembaga	14.021.100	Pendapatan Daerah		10 Lembaga	15.000.000
02.08.2.08.01.01.010	Pelaksanaan updating keluarga melalui pendataan Keluarga	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah Desa/Kelurahan wilayah pendataan	70 D/K	11.650.000	Pendapatan Daerah		70 D/K	24.000.000
4 8 2	**Program KB**		**Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB; Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB; Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB**	**56 %;56 %;53 %**	**3.907.389.700**			57 %;56 %;53 %	
02.08.2.08.01.02.001	Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah peserta KB yang di layani	7.000 Akseptor	108.484.400	Pendapatan Daerah		7.100 Akseptor	135.000.000
02.08.2.08.01.02.002	Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah sarana dan prasana KB	15 Paket	1.713.300.000	APBN (DAK)		10 Paket	1.352.600.000

02.08.2.08.01.02.003	Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa	Jumlah Balai PLKB yang dibiayai	8 Balai	2.060.142.000	APBN (DAK)		8 Balai	1.900.000.000
02.08.2.08.01.02.007	Pembinaan Keluarga Berencana	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Keg pembinaan KB	1 Kegiatan	15.371.100	-		4 Kegiatan	55.000.000
02.08.2.08.01.02.009	Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Klp yang dibina	2 Kelompok	10.092.200	Pendapatan Daerah		5 Kelompok	45.000.000
4 8 3	**Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga**		**Persentase Keluarga Prasejahtera dan sejahtera I yang tertangani**	**9%**	**45.059.400**			8%	
02.08.2.08.01.03.003	Pembinaan dan pengembangan poktan dan UPPKS	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Klp yang dibina	13 Kelompok	14.546.100	Pendapatan Daerah		151 Kelompok	20.621.100
02.08.2.08.01.03.008	Pembinaan Klp Bina Keluarga Balita (BKB)	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Anggota Kelompok yang mengikuti pelatihan	70 Orang	10.171.100	Pendapatan Daerah		70 Orang	30.000.000
02.08.2.08.01.03.009	Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL)	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Anggota Kelompok yang mengikuti pelatihan	70 Orang	10.171.100	Pendapatan Daerah		70 Orang	25.000.000
02.08.2.08.01.03.010	Pembinaan Klp Bina Keluarga Remaja (BKR)	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Anggota Kelompok yang mengikuti pelatihan	70 Orang	10.171.100	Pendapatan Daerah		70 Orang	30.000.000
		TOTAL			**4.791.744.900**				**5.060.820.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**				**855.011.000**				
0.00.2.09.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah pembayaran sumber daya air dan listrik	12 kali	40.600.000			12 kali	40.600.000
0.00.2.09.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional	17 kendaraan	15.000.000	Pendapatan Daerah		20 kendaraan	17.650.000
0.00.2.09.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan	7 Jenis	15.400.000	Pendapatan Daerah		10 Jenis	17.000.000
0.00.2.09.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	2 jenis	500.000	Pendapatan Daerah		4 jenis	500.000
0.00.2.09.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah pengisian tabung gas	15 Kali	2.780.000	Pendapatan Daerah		15 Kali	2.780.000
0.00.2.09.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi	189 Kali	93.000.000	Pendapatan Daerah		189 Kali	234.142.953
0.00.2.09.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah paket pelayanan perkantoran	5 Paket	431.181.000	Pendapatan Daerah		24 Paket	670.000.000
0.00.2.09.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah perlengkapan gedung kantor	2 jenis	10.000.000	Pendapatan Daerah		4 jenis	300.000.000
0.00.2.09.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 Jenis	20.000.000	Pendapatan Daerah		2 Jenis	250.000.000
0.00.2.09.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara	227 M2	10.000.000	Pendapatan Daerah		227 M2	30.000.000
0.00.2.09.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	17 Unit	119.500.000	Pendapatan Daerah		17 Unit	180.000.000
0.00.2.09.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Jenis	11.000.000	Pendapatan Daerah		19 Jenis	250.000.000
0.00.2.09.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	1 Tahun	86.050.000	Pendapatan Daerah		1 Tahun	180.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**				**32.000.000**				
0.00.2.09.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	8 Dokumen	8.000.000	Pendapatan Daerah		8 Dokumen	9.250.000
0.00.2.09.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen Pelaporan kinerja	4 dokumen	8.000.000	Pendapatan Daerah		4 dokumen	9.250.000
0.00.2.09.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	4 dokumen	8.000.000	Pendapatan Daerah		2 dokumen	9.250.000
0.00.2.09.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 dokumen	8.000.000	Pendapatan Daerah		4 dokumen	9.250.000
4									
4 9	**Perhubungan**								
4 9 1	**Program Penerangan Jalan**				**1.712.668.559**				
02.09.2.09.01.01.002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Lampu Jalan	SKPD	Jumlah titik lampu yang dipelihara	1.500 Titik	512.388.559	Pendapatan Daerah		2.000 Titik	970.600.000
02.09.2.09.01.01.003	Pemasangan baru titik lampu jalan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah lampu jalan yang terpasang	200 Set	200.000.000	Pendapatan Daerah		200 Set	300.000.000

02.09.2.09.01.01.005	Pengadaan lampu LED	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah lampu LED yang diadakan	163 Titik	1.000.280.000	Pendapatan Daerah		163 Titik	1.100.280.000
4 9 2	**Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan**				**90.000.000**				
02.09.2.09.01.02.003	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		Jumlah tatralok (Tatanan Transportasi Lokal) yang disusun	1 Paket	90.000.000	-		0 Paket	0
4 9 3	**Program Pelayanan Angkutan**				**717.592.500**				
02.09.2.09.01.03.000	Monitoring dan Evaluasi peningkatan pendapatan retribusi terminal dan perparkiran	SKPD	Jumlah monitoring dan evaluasi retrebusi terminal dan perparkiran	4 Kali	10.250.000	Pendapatan Daerah		4 Kali	20.000.000
02.09.2.09.01.03.000	Peningkatan dan pengendalian pelayanan perijinan angkutan umum dalam trayek	SKPD	Jumlah kendaraan angkutan umum yang wajib memiliki izin trayek maupun bukan dalam trayek	8 Kali	196.972.500	Pendapatan Daerah		48 Kali	196.972.500
02.09.2.09.01.03.001	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Sopir Juru Mudi yang mendapatkan penyuluhan	300 Sopir	16.700.000	APBD + DAK		400 Sopir	16.700.000
02.09.2.09.01.03.002	Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Kecamatan Lalabata	Jumlah pelaksanaan pengawasan disiplin pengendara mobil penumpang/barang	49 kali	363.220.000	APBD + DAK		48 kali	364.975.000
02.09.2.09.01.03.003	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah kendaraan umum yang wajib uji	3.000 Unit	90.900.000	APBD + DAK		3.050 Unit	84.900.000
02.09.2.09.01.03.004	Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah personil LLAJ mengikuti sosialisasi	75 Personil	15.775.000	APBD + DAK		75 Personil	16.775.000
02.09.2.09.01.03.005	Pemilihan dan penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan teladan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah sopir yang lolos seleksi ketingkat provinsi	1 orang	10.000.000	APBD + DAK		1 orang	10.000.000
02.09.2.09.01.03.006	Monitoring dan evaluasi pelayanan angkutan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah monitoring dan evaluasi angkutan	48 kali	1.875.000	APBD + DAK		48 kali	1.875.000
02.09.2.09.01.03.007	Monitoring dan pengawasan bengkel kendaraan bermotor	Kabupaten	jumlah bengkel yang diawasi	40 Bengkel	11.900.000	Pendapatan Daerah		40 Bengkel	30.000.000
4 9 4	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi LLAJ**				**100.000.000**				
02.09.2.09.01.04.001	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah alat kendaraan bermotor yang direhab/dipelihara	8 Jenis	10.000.000	Pendapatan Daerah		8 Jenis	10.000.000
02.09.2.09.01.04.002	Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah terminal yang direhab/dipelihara	2 Terminal	30.000.000	Pendapatan Daerah		2 Terminal	30.000.000
02.09.2.09.01.04.003	Rehabilitasi dan pemeliharaan rambu-rambu	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah rambu-rambu yang direhab/dipelihara	8 Kecamatan	30.000.000	Pendapatan Daerah		8 Kecamatan	105.000.000
02.09.2.09.01.04.004	Pemeliharaan marka jalan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Panjang marka jalan yang dipelihara	150 M2	30.000.000	Pendapatan Daerah		150 M2	40.000.000
4 9 5	**Program Peningkatan dan Pengamanan lalu lintas**				**290.000.000**				
02.09.2.09.01.05.001	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah rambu-rambu yang diadakan	176 Buah	100.000.000	Pendapatan Daerah		176 Buah	194.000.000
02.09.2.09.01.05.004	Pengadaan fasilitas keselamatan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah fasilitas keselamatan yang diadakan	1 Paket	190.000.000	Pendapatan Daerah		1 Paket	200.000.000
		TOTAL			**3.797.272.059**				**5.901.750.453**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**persentase keterpenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**873.156.000**			100%	
0.00.2.10.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten	jumlah pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	24 kali	24.360.000			0 kali	31.020.000
0.00.2.10.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten	jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	3 unit	2.000.000	-		3 unit	4.400.000
0.00.2.10.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kabupaten	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	25 orang/jenis	19.600.000	-		25 orang/jenis	22.000.000
0.00.2.10.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bang kantor	SKPD	jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	6 jenis	2.000.000	-		6 jenis	4.950.000
0.00.2.10.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten	jumlah jenis peralatan rumah tangga	10 jenis	2.000.000	-		10 jenis	2.200.000
0.00.2.10.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten	jumlah pengisian gas	12 kali	2.000.000	-		0 kali	2.200.000
0.00.2.10.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	315 kali	280.983.100	-		0 kali	300.318.000
0.00.2.10.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Jumlah paket pelayanan perkantoran	18 Paket	340.212.900	-		18 Paket	340.304.000
0.00.2.10.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	SKPD	Jumlah informasi yang terupdate dalam setahun	0 berita	0	-		0 berita	11.000.000
0.00.2.10.01.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	3 Unit	0	-		3 Unit	566.000.000
0.00.2.10.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 unit/buah	35.000.000	-		4 unit/buah	27.500.000
0.00.2.10.01.05.031	Pengadaan mebeleur	SKPD	Jumlah mebeleur yang diadakan	15 buah/unit	0	-		15 buah/unit	27.500.000
0.00.2.10.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara	500 m2	10.000.000	-		500 m2	12.100.000
0.00.2.10.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 Unit	60.000.000	-		9 Unit	71.500.000
0.00.2.10.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	60 Buah/Unit	20.000.000	-		60 Buah/Unit	30.000.000
0.00.2.10.01.05.053	Pengadaan mesin/kartu absensi	SKPD	Jumlah absensi sidik jari	1 Unit	0	-		0 Unit	0
0.00.2.10.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten	jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundangan-undangan	19 orang	75.000.000	-		21 orang	82.500.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**% dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**28.266.000**			100%	
0.00.2.10.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kabupaten	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 dokumen	10.000.000	-		6 dokumen	6.000.000
0.00.2.10.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Kabupaten	jumlah dokumen pelaporan kinerja	3 dokumen	4.678.000	-		3 dokumen	5.500.000
0.00.2.10.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kabupaten	jumlah dokumen pelaporan keuangan	6 dokumen	9.588.000	-		6 dokumen	6.000.000
0.00.2.10.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Kabupaten	jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 dokumen	4.000.000	-		4 dokumen	5.500.000
4									
4 10	**Komunikasi dan Informatika**								
4 10 1	**Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**		**Jumlah layanan cakupan IT**	**15 titik**	**1.250.000.000**			18 titik	
2.10.2.10.01.01.001	Pembangunan Sarana jaringan Komunikasi dan Informasi	Kabupaten	Jumlah sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terbangun	20 titik(kelurahan/de	650.000.000	-		20 titik(kelurahan/de	150.000.000
2.10.2.10.01.01.002	Penyediaan akses internet	Kabupaten	jumlah langganan provider internet	1 lite	550.000.000	-		1 lite	150.000.000
2.10.2.10.01.01.003	Pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan Komunikasi dan Informasi	Kabupaten	Persentase sarana jaringan komunikasi dan informasi yang terpelihara	100%	50.000.000	-		100%	60.000.000
4 10 2	**Program pengembangan komunikasi dan informatika**		**Jumlah desa/kelurahan yang terakses informasi**	**70 desa/kel**	**773.100.000**			70 desa/kel	

2.10.2.10.01.02.002	Pengelolaan dan pemutakhiran informasi situs web pemerintah	Kabupaten	jumlah domain dan subdomain pemkab. soppeng yang dikelola	1 dokumen	455.400.000	-		1 dokumen	27.000.000
2.10.2.10.01.02.003	Pengelolaan layanan Soppeng Command Center	Kabupaten	jumlah jenis informasi yang tersaji	5 jenis	294.000.000	-		5 jenis	56.136.000
2.10.2.10.01.02.006	Pengawasan dan Site Audit Menara Telekomunikasi	Kabupaten	jumlah menara yang diawasi	70 menara	19.200.000	-		70 menara	27.000.000
2.10.2.10.01.02.008	Pengembangan dan Penguatan Layanan Media Center	Kabupaten	jumlah media center yang dikelola	1 paket	4.500.000	-		1 paket	27.000.000
4 10 3	**Program Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika**		**Persentase peningkatan SDM bidang komunikasi dan informatika**	**85%**	**102.212.500**			90%	
2.10.2.10.01.03.001	Peningkatan Kapasitas dan Kompentensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kabupaten	jumlah SKPD yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi daerah	34 SKPD	18.385.000	-		34 SKPD	18.385.000
2.10.2.10.01.03.002	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Kabupaten	jumlah pesertra yang mengikuti kegiatan	85 orang	16.200.000	-		95 orang	17.000.000
2.10.2.10.01.03.003	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Kabupaten	jumlah KIM yang terbina	53 kelompok	17.465.000	-		55 kelompok	17.000.000
2.10.2.10.01.03.004	Orientasi Kehumasan	Kabupaten	jumlah peserta orientasi kehumasan	80 orang	32.522.500	-		80 orang	17.000.000
2.10.2.10.01.03.005	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Kabupaten	jumlah SDM di bidang komunikasi dan informatika yang mengikuti pelatihan	110 orang	17.640.000	-		110 orang	17.000.000
4 10 4	**Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**		**Jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi pembangunan daerah**	**30 kali**	**2.729.145.500**			31 kali	
2.10.2.10.01.04.001	Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kabupaten	Jumlah media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	5 Jenis	2.580.941.500	-		5 Jenis	14.500.000
2.10.2.10.01.04.003	Peliputan dan pendokumentasian Penyelengaraan pemerintahan daerah	Kabupaten	Jumlah kegiatan pemerintah yang diliput dan didokumentasikan	25 kegiatan	30.100.000	-		25 kegiatan	10.000.000
2.10.2.10.01.04.005	Penyebarluasan informasi Pembangunan daerah melalui media pameran	Kabupaten	Jumlah kegiatan keikutsertaan dalam pameran	1 kegiatan	12.949.000	-		1 kegiatan	5.000.000
2.10.2.10.01.04.006	Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Kabupaten	Jumlah opini dan aspirasi yang dikelola	60 Pengaduan dan Aspirasi	37.755.000	-		60 Pengaduan dan Aspirasi	20.000.000
2.10.2.10.01.04.007	Visualisasi Profil Kabupaten	Kabupaten	jumlah dokumen visualisasi yang tersusun	2 vidio	57.400.000	-		2 vidio	20.000.000
2.10.2.10.01.04.008	Pelaksanaan forum komunikasi kehumasan	Kabupaten, SKPD	Jumlah kegiatan forum komunikasi kehumasan	1 Kali	10.000.000	-		1 Kali	10.000.000
4 14	**Statistik**								
4 14 1	**Program Pengembangan Statistik Daerah**		**Persentase ketersediaan data/informasi pembangunan daerah**	**1 ada/tidak ada**	**276.000.000**			1 ada/tidak ada	
2.14.2.10.01.01.001	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten	Kabupaten	jumlah dokumen yang dihasilkan	3 dokumen	276.000.000	-		3 dokumen	290.200.000
4 15	**Persandian**								
4 15 1	**Program penyelenggaraan Persandian**		**Persentase informasi yang diamankan**	**30%**	**83.270.000**			35%	
2.15.2.10.01.01.001	Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah daerah kabupaten Soppeng	Kabupaten	jumlah informasi yang diamankan	24 informasi	44.170.000	-		24 informasi	50.000.000
2.15.2.10.01.01.003	Sosialisasi Hubungan Komunikasi Sandi	Kabupaten	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	100 orang	39.100.000	-		100 orang	54.425.000
		TOTAL			**6.115.150.000**				**2.616.138.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**1.255.962.425**			100%	
0.00.2.11.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau, JennaE, Botto	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	63.000.000			12 kali	67.900.000
0.00.2.11.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	14 unit	2.682.000	Pendapatan Daerah		14 unit	10.782.000
0.00.2.11.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	10 orang / jenis	8.200.000	-		10 orang / jenis	8.200.000
0.00.2.11.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah jenis alat listik/penerangan bangunan	9 Jenis	1.000.000	-		9 Jenis	1.000.000
0.00.2.11.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah pengisian tabung gas	10 kali	1.485.000	Pendapatan Daerah		10 kali	1.500.000
0.00.2.11.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	400 kali	579.173.425	APBD + DAK		400 kali	883.468.000
0.00.2.11.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	5 paket	352.022.000	-		5 paket	352.022.000
0.00.2.11.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	3 Jenis	82.000.000	-		9 Jenis	50.000.000
0.00.2.11.01.05.031	Pengadaan mebeleur	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	2 jenis	34.000.000	Pendapatan Daerah		20 jenis	100.000.000
0.00.2.11.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Luas bangunan yang dipelihara	191 meter2	10.000.000	Pendapatan Daerah		191 meter2	10.000.000
0.00.2.11.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 unit	60.000.000	-		17 unit	60.000.000
0.00.2.11.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah jenis peralatan gedung yang dipelihara	4 jenis	12.000.000	-		4 jenis	12.000.000
0.00.2.11.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 PNS	50.400.000	-		10 PNS	96.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**30.500.000**			100 %;100 %;100 %	
0.00.2.11.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 dokumen	3.000.000	-		4 dokumen	3.000.000
0.00.2.11.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 dokumen	14.350.000	-		6 dokumen	16.850.000
0.00.2.11.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 dokumen	10.150.000	-		3 dokumen	11.150.000
0.00.2.11.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	6 dokumen	3.000.000	-		6 dokumen	3.000.000

4								
4 11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**							
4 11 1	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**		**Persentase Koperasi aktif**	**91%**	**101.205.000**		91,91 %	
02.11.2.11.01.01.001	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Jumlah koperasi yang dibina	184 koperasi	10.000.000	-	184 koperasi	10.000.000
02.11.2.11.01.01.002	Monitoring, evaluasi dan peaporan dana perkuatan koperasi	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah koperasi yang dimonitor dan dievaluasi	62 koperasi	7.250.000	-	62 koperasi	10.000.000
02.11.2.11.01.01.003	Pembinaan dan evaluasi kelembagaan koperasi aktif	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Jumlah koperasi yang dibina dan dievaluasi	184 koperasi	2.650.000	-	184 koperasi	15.000.000
02.11.2.11.01.01.004	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Kecamatan Lalabata	Jumlah peserta pelatihan	50 orang	33.900.000	Pendapatan Daerah	60 orang	50.000.000
02.11.2.11.01.01.005	Sosialisasi prinsip- prinsip pemahaman perkoprasian	Kecamatan Lalabata	Jumlah peserta sosialisasi	40 orang	14.980.000	Pendapatan Daerah	40 orang	15.000.000
02.11.2.11.01.01.006	Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah koperasi yang dinilai	50 koperasi	2.650.000	-	55 koperasi	15.000.000
02.11.2.11.01.01.007	Sosialisasi gerakan gemar berkoperasi	Kecamatan Lalabata	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	29.775.000	Pendapatan Daerah	50 orang	41.000.000
4 11 2	**Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**		**Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**	**98,94 %**	**369.720.000**		98,95 %	
02.11.2.11.01.02.003	Penyelenggaraan promosi pruduk usaha mikro kecil menengah	Kabupaten	Jumlah keikutsertaan promosi produk UMKM	5 kali	73.875.000	Pendapatan Daerah	5 kali	150.000.000
02.11.2.11.01.02.007	Pelatihan teknologi peningkatan mutu produk umkm	Kecamatan Ganra, Belo	Jumlah peserta yang dilatih	60 orang	165.245.000	Pendapatan Daerah	35 orang	40.000.000
02.11.2.11.01.02.008	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Kecamatan Marioriwawo, Tottong, Lompulle, GoariE, Gattareng	Jumlah peserta yang dilatih	40 orang	51.600.000	Pendapatan Daerah	45 orang	42.000.000

02.11.2.11.01.02.010	Pendataan usaha lembaga keuangan mikro	Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah LKM/UKM	1.500 LKM/UKM	7.000.000	-		2.000 LKM/UKM	13.000.000
02.11.2.11.01.02.012	Penyelenggaraan pembinaan usaha rumah tangga	Kecamatan Liliriaja, Galung	Jumlah usaha rumah tangga yang dibina	30 orang	35.000.000	Pendapatan Daerah		0 orang	0
02.11.2.11.01.02.013	Monitoring dan evaluasi UMKM	Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah UMKM yang dimonitor dan dievaluasi	91 UMKM	7.000.000	-		91 UMKM	10.000.000
02.11.2.11.01.02.014	Pelatihan manajemen usaha bagi KUEP dan ULP	Kecamatan Donri-Donri, Tottong	Jumlah pelaku KUEP dan ULP yang dilatih	35 pelaku KUEP/ULP	30.000.000	Pendapatan Daerah		35 pelaku KUEP/ULP	30.000.000
2	**Pilihan**								
2 6	**Perdagangan**								
2 6 1	**Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**		**Jumlah pasar Tipe C**	**1 unit**	**4.996.339.000**			1 unit	
03.06.2.11.01.01.001	Pembangunan dan revitalisasi pasar	Tetewatu, Manorang Salo, Gattareng, Barang	Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi	4 unit	4.401.064.000	APBD + DAK		1 unit	4.400.000.000
03.06.2.11.01.01.003	Pengelolaan sarana perdagangan	Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah sarana perdagangan yang dikelola	17 pasar	570.000.000	-		17 pasar	570.000.000
03.06.2.11.01.01.004	Pembinaan kelompok pedagang	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, TettikenraraE, Pajalesang, Manorang Salo	Jumlah kelompok pedagang yang dibina	3 kelompok	25.275.000	Pendapatan Daerah	Kelompok pedagang Pasar Batu-Batu, Pasar Cabenge dan Pasar Takalala	3 kelompok	30.000.000
2 6 2	**Program Peningkatan Pelayanan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Barang**		**Persentase tingkat kestabilan harga barang**	**98%**	**14.000.000**			99%	
03.06.2.11.01.02.002	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah dokumen	1 dokumen	7.000.000	-		1 dokumen	12.000.000
03.06.2.11.01.02.003	Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di tingkat pasar	Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah dokumen	1 dokumen	7.000.000	-		1 dokumen	13.000.000

2 6 3	**Program Perlindungan Konsumen**		**Peningkatan jumlah barang beredar yang diawasi dan peralatan yang digunakan**	**9.000 jenis /alat**	**71.610.000**			10.000 jenis /alat	
03.06.2.11.01.03.001	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah barang yang diawasi	5.040 barang	4.000.000	-		6.020 barang	30.000.000
03.06.2.11.01.03.002	Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	jumlah alat yang ditera ulang	3.960 alat	31.410.000	-		3.980 alat	920.000.000
03.06.2.11.01.03.003	Fasilitasi penyelesaian permaslahan-permasalahan pengaduan konsumen	Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah konsumen dan pelaku usaha cerdas	160 orang	36.200.000	-		160 orang	50.000.000
2 7	**Perindustrian**								
2 7 1	**Program Pengembangan dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah**		**Cakupan bina kelompok penrajin**	**50%**	**141.900.000**			50%	
03.07.2.11.01.01.003	Pelatihan kerajinan souvenir/ kerajinan tangan	Kecamatan Citta	Jumlah peserta yang dilatih	50 orang	52.175.000	Pendapatan Daerah		50 orang	47.675.000
03.07.2.11.01.01.004	Penguatan sentra dan kelompok penrajin	Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Jumlah IKM yang dibina	20 iKM	30.875.000	-		20 iKM	27.875.000
03.07.2.11.01.01.019	Pelatihan pengembangan usaha industri (sertifikasi mutu produk, PKP, HAKI, HALAL)	Kecamatan Lalabata	Jumlah IKM yang dilatih	30 IKM	58.850.000	Pendapatan Daerah		20 IKM	150.000.000
		TOTAL			**6.981.236.425**				**8.378.422.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran; Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur; Peningkatan kapasitas SDM Aparatur**	**100%**	**561.551.000**			100 %;100 %;100 %;100 %	
0.00.2.12.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 kali	100.000.000			12 kali	120.000.000
0.00.2.12.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah STNK kendaraan dinas operasional	7 unit	4.000.000	APBD + DAK		7 unit	4.000.000
0.00.2.12.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah petugas kebersihan	2 orang	15.000.000	APBD + DAK		2 orang	25.000.000
			Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7 jenis				7 jenis	
0.00.2.12.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	3 buah/unit	1.500.000	APBD + DAK		3 buah/unit	2.000.000
0.00.2.12.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan rumah tangga	5 jenis	750.000	APBD + DAK		5 jenis	1.500.000
0.00.2.12.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pengisian gas	3 isi tabung gas	600.000	APBD + DAK		3 isi tabung gas	800.000
0.00.2.12.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	400 kali	105.201.000	APBD + DAK		400 kali	150.000.000
0.00.2.12.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah paket pelayanan perkantoran	1 paket	245.000.000	APBD + DAK		1 paket	265.000.000
0.00.2.12.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit	23.000.000	APBD + DAK		7 unit	65.000.000
0.00.2.12.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan gedung yang dipelihara	1 tahun	4.500.000	-		1 tahun	15.000.000
0.00.2.12.01.05.050	Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah peralatan aplikasi yang terpelihara	2 jenis	42.000.000	APBD + DAK		2 jenis	85.000.000
0.00.2.12.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	20 orang	20.000.000	-		20 orang	35.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan yang disun tepat waktu; Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**6.242.000**			100 %;100 %;100 %;100 %	
0.00.2.12.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pelaporan kinerja SKPD	5 dokumen	2.924.000	APBD + DAK		5 dokumen	7.500.000
0.00.2.12.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	2 dokumen	3.318.000	APBD + DAK		2 dokumen	12.500.000
4									
4 12	**Penanaman Modal**								
4 12 1	**Program Peningkatan Iklim dan Promosi Investasi**		**Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)**	**25 investor**	**163.225.000**			30 investor	

2.12.2.12.01.01.002	Penyelenggaraan Pameran Investasi	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah kegiatan	4 kali kegiatan	102.725.000	APBD + DAK		4 kali kegiatan	231.000.000
2.12.2.12.01.01.003	Pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen	1 dokumen	50.500.000	APBD + DAK		1 dokumen	90.000.000
2.12.2.12.01.01.004	Pemantauan dan evaluasi pelaporan penanaman modal	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah perusahaan	20 perusahaan	10.000.000	APBD + DAK		20 perusahaan	159.000.000
			Jumlah laporan	4 dokumen				4 dokumen	
3									
3 8	**KPT**								
3 8 1	**Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**		**Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi tehnis**	**100%**	**281.625.000**			100%	
4.08.2.12.01.01.001	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedür pelayanan publik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen regulasi	1 dokumen	9.625.000	APBD + DAK		1 dokumen	17.500.000
4.08.2.12.01.01.002	Pengelolaan perizinan dan non perizinan dan penanaman modal	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti	2.500 rekomendasi	66.500.000	APBD + DAK		2.500 rekomendasi	100.000.000
4.08.2.12.01.01.003	Penyusunan dan pengolahan data dan informasi pelayanan periziano dan non perizinan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2.500 izin	126.500.000	APBD + DAK		2.500 izin	150.000.000
4.08.2.12.01.01.004	Survey kepuasan masyarakat	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah dokumen	1 dokumen	0	APBD + DAK		1 dokumen	70.000.000
4.08.2.12.01.01.007	Pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pelayanan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah sarana komunikasi dan informasi pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang up to date	1 paket	60.000.000	APBD + DAK		1 paket	120.000.000
4.08.2.12.01.01.009	Monitoring dan evaluasi	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi	4 dokumen	4.000.000	APBD + DAK		4 dokumen	20.000.000
4.08.2.12.01.01.010	Sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelayanan publik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah pelaksanaan sosialisasi informasi pelayanan publik	1 kali	15.000.000	APBD + DAK		1 kali	30.000.000
		TOTAL			**1.012.643.000**				**1.775.800.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur; Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur**	**100%**	**835.529.550**			100%	
0.00.2.13.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	jumlah pembnyaran jasa komunikasi Internet,sumber daya Air dan Listrik	1 Tahun	2.800.000		DAU	1 Tahun	5.400.000
0.00.2.13.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	6 unit	2.750.000	APBD + DAK		6 unit	3.500.000
0.00.2.13.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	8 jenis	11.000.000	APBD + DAK	DAU	8 jenis	20.000.000
0.00.2.13.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan yang disediakan	5 jenis	3.000.000	APBD + DAK	DAU	5 jenis	3.500.000
0.00.2.13.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	1 jenis	3.894.300	APBD + DAK	DAU	3 jenis	7.500.000
0.00.2.13.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah Pengisian Tabung Gas	1 Tahun	2.100.000	APBD + DAK	DAU	1 Tahun	2.560.000
0.00.2.13.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultansi serta kedinasan lainnya yang di laksanakan	180 kali	180.000.000	APBD + DAK	DAU	180 kali	200.000.000
0.00.2.13.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	jumlah paket pelayanan perkantoran	8 paket	349.326.150	APBD + DAK	DAU	8 paket	349.326.150
0.00.2.13.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	3 unit	20.409.200	APBD + DAK	DAU	3 unit	80.000.000
0.00.2.13.01.05.031	Pengadaan mebeleur	SKPD	Jumlah jenis moubeleur yang diadakan	2 Jenis	10.250.000	APBD + DAK	DAU	2 Jenis	35.000.000
0.00.2.13.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	jumlah kendaraan yang dipelihara (roda dua dan roda 4)	6 unit	138.000.000	APBD + DAK	DAU	6 unit	150.000.000
0.00.2.13.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	jumlah peralatan yang dipelihara	10 jenis	6.500.000	APBD + DAK	DAU	10 jenis	7.000.000
0.00.2.13.01.05.059	Pembinaan Kepegawaian	SKPD	Jumlah kegiatan pembinaan Kepegawaian	1 Kegiatan	5.499.900	APBD + DAK	DAU	1 Kegiatan	5.499.900
0.00.2.13.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten, SKPD	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	10 orang	100.000.000	APBD + DAK	DAU	10 orang	100.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**% Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; % Dokumen penganggaran yang doisusun tepat waktu; % Dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**27.750.100**			100%	
0.00.2.13.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 Dokumen	13.000.000	APBD + DAK	DAU	6 Dokumen	13.000.000
0.00.2.13.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	Jumlah dokumen Pelaporan kinerja	5 Dokumen	4.000.000	APBD + DAK	DAU	5 Dokumen	4.000.000
0.00.2.13.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	6 Dokumen	7.750.000	APBD + DAK	DAU	6 Dokumen	8.000.000
0.00.2.13.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 Dokumen	3.000.100	APBD + DAK	DAU	4 Dokumen	3.000.100
4									
4 13	**Kepemudaan dan Olahraga**								
4 13 1	**Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan**		**Jumlah organisasi pemuda**	**27 OKP**	**591.104.050**			28 OKP	
2.13.2.13.01.01.001	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Kabupaten, SKPD	jumlah pemuda yang meniikut pelatihan kepemimpinan dasar	30 orang	16.457.350	APBD + DAK	DAU	30 orang	30.000.000
2.13.2.13.01.01.003	Pelaksanaan seleksi anggota paskibraka	Kabupaten, SKPD	jumlah hasil lulus seleksi / Kegiatan paskibraka	71 orang	11.000.000	APBD + DAK	DAU	71 orang	12.000.000
2.13.2.13.01.01.004	Pembinaan anggota paskibraka	Kabupaten, SKPD	Jumlah anggota paskibraka yang dibina	71 orang	372.130.900	APBD + DAK	DAU	71 orang	373.130.900
2.13.2.13.01.01.006	Pembinaan Kepramukaan	Kabupaten, SKPD	Jumlah anggota keperamukaan yang di bina	150 orang	129.999.800	APBD + DAK	DAU	150 orang	130.000.000

2.13.2.13.01.01.007	Pembinaan Karang Taruna	Kabupaten, SKPD	Jumlah anggota karang Taruna yang dibinna	25 orang	12.500.000	APBD + DAK	DAU	25 orang	15.000.000
2.13.2.13.01.01.008	Pembinaan Pemuda Pelopor	Kabupaten, SKPD	jumlah anggota pemuda pelopor yang dibina	40 oramg	33.516.000	APBD + DAK	DAU	40 oramg	58.516.000
2.13.2.13.01.01.009	Pembinaan Organisasi-Organisasi Kepemudaan	Kabupaten, SKPD	Jumlah anggota organisasi pemuda yang dibina	25 orang	15.500.000	APBD + DAK	DAU	25 orang	15.500.000
4 13 2	**Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**		**Persentase wirausaha muda**	**40%**	**31.575.000**			40%	
2.13.2.13.01.02.001	Pelatihan usaha kelompok pemuda kreatif	Kabupaten, SKPD	Jumlah anggota kelompok pemuda kreatif yang mengikuti pelatihan	40 orang	31.575.000	APBD + DAK	DAU	40 orang	60.000.000
4 13 3	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga**		**Jumlah atlet berprestasi tingkat nasional ; Jumlah prestasi olahraga tingkat nasional**	**6 Atlet/Orang;16 Cabang olahraga**	**583.991.300**			7 Atlet/Orang;17 Cabang olahraga	
2.13.2.13.01.03.002	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Kabupaten, SKPD	Jumlah cabang olahraga prestasi tingkat daerah yang dibina	16 cabang olahraga	69.545.000	APBD + DAK	DAU	17 cabang olahraga	98.600.000
2.13.2.13.01.03.003	Penyelenggaraan kompetensi olahraga	Kabupaten, SKPD	jumlah kegiatan kompetisi cabang olahraga yang dilaksanakan	5 kegiatan	77.670.000	APBD + DAK	DAU	5 kegiatan	97.500.000
2.13.2.13.01.03.004	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga	Kabupaten, SKPD	jumlah pelatih. Peneliti, praktisi, teknisi yang ikut pelatihan	60 orang	38.750.000	APBD + DAK	DAU	60 orang	53.250.000
2.13.2.13.01.03.005	Pembangunan, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana Olahraga	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dibangun, diadakan dan direhab	1 paket	156.000.000	APBD + DAK	DAU	1 paket	252.000.000
2.13.2.13.01.03.006	Pembinaan cabang-cabang olahraga	Kabupaten, SKPD	jumlah cabang olahraga yang dibina	24 cabang olahraga	104.351.300	APBD + DAK	DAU	24 cabang olahraga	237.235.150
2.13.2.13.01.03.007	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	SKPD	Jumlah atlet yang diberi penghargaan	25 05ang	40.000.000	APBD + DAK	DAU	25 05ang	50.000.000
2.13.2.13.01.03.008	Pembinaan cabang olahraga tradisional, olahraga rekreasi dan olahraga khusus	Kabupaten, SKPD	jumlah olahraga tradisional , rekreasi dan Khusus yang dibina	3 cabang olahraga	67.125.000	APBD + DAK	DAU	3 cabang olahraga	80.000.000
2.13.2.13.01.03.009	Pembinaan cabang olahraga unggulan daerah	Kabupaten, SKPD	jumlah cabang olahraga unggulan daerah yang dibina	2 cabang olahraga	30.550.000	APBD + DAK	DAU	2 cabang olahraga	32.150.000
		TOTAL			**2.069.950.000**				**2.592.168.200**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor; Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur; Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur**	**100%**	**850.401.150**			100 %;100 %;100 %;100 %	
0.00.2.16.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48 Kali	107.320.000			48 Kali	97.000.000
0.00.2.16.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit	2.825.000	Pendapatan Daerah		2 Unit	5.000.000
0.00.2.16.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Petugas Kebersihan	2 Orang	15.812.000	Pendapatan Daerah		2 Orang	37.000.000
			dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	10 Jenis				10 Jenis	
0.00.2.16.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Jenis Alat Listrik/ Penerangan bangunan	7 Jenis	10.000.000	Pendapatan Daerah		10 Jenis	20.000.000
0.00.2.16.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Pengisian Tabung gas	12 Kali	2.160.000	Pendapatan Daerah		12 Kali	3.400.000
0.00.2.16.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	200 Kali	180.000.000	Pendapatan Daerah		250 Kali	430.000.000
0.00.2.16.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah paket Pelayanan Perkantoran	5 Paket	397.053.700	Pendapatan Daerah		8 Paket	1.700.000.000
0.00.2.16.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (Roda 2 dan Roda 4)	2 Unit	83.200.000	Pendapatan Daerah		3 Unit	150.000.000
0.00.2.16.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang dipelihara	5 Jenis	9.900.000	Pendapatan Daerah		5 Jenis	7.000.000
0.00.2.16.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Meningkatnya Pengetahuan /Keterampilan PNS	5 PNS	42.130.450	Pendapatan Daerah		27 PNS	200.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Persentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**36.475.800**			100 %;100 %;100 %	
0.00.2.16.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra,Renja,RKA)	6 Dokumen	9.720.000	Pendapatan Daerah		3 Dokumen	20.000.000
0.00.2.16.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan kinerja (LPPD,LKPJ,LKj,Perjanjian Kinerja, TEPRA)	5 Dokumen	9.034.000	Pendapatan Daerah		5 Dokumen	10.000.000
0.00.2.16.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Keuangan)	6 Dokumen	9.999.800	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	10.000.000
0.00.2.16.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi (Evaluasi Renja, Monitoring Realisasi Fisik dan Keuangan, Evaluasi Renstra)	4 Dokumen	7.722.000	Pendapatan Daerah		3 Dokumen	10.000.000
4									

4 16	**Kebudayaan**								
4 16 1	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya**		**Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**	**100%**	**0**			100%	
2.16.2.16.01.01.001	Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Ompo, Mattabulu, Limpomajang, Kaca, Umpungeng, GoariE, Ujung, Citta, Tinco, Paroto, Palangiseng	Jumlah Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya	12 Kegiatan	0	Pendapatan Daerah		12 Kegiatan	150.000.000
2.16.2.16.01.01.002	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Kabupaten, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	1 Paket	0	Pendapatan Daerah		2 Paket	300.000.000
2.16.2.16.01.01.006	Pelaksanaan Festival Budaya Daerah	Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah	2 Paket	0	Pendapatan Daerah		2 Paket	220.000.000
2.16.2.16.01.01.007	Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Ompo	Museum dan Taman Budaya yg dikelola	1 Paket	0	Pendapatan Daerah		2 Paket	200.000.000
2	**Pilihan**								
2 2	**Pariwisata**								
2 2 1	**Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata**		**Jumlah Wisatawan**	**234.126 Orang**	**1.358.136.000**			248.200 Orang	
3.02.2.16.01.01.001	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Didalam dan Diluar Negeri	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Event Promosi	2 Paket	0	Pendapatan Daerah		4 Paket	100.000.000
3.02.2.16.01.01.002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Jasa Pramubakti dan Peserta Pelatihan serta Duta Wisata yang terlatih	20 Duta Wisata	1.358.136.000	Pendapatan Daerah		20 Duta Wisata	855.000.000
3.02.2.16.01.01.003	pengembangan zona kreatif bagi insan kreatif	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata, Ompo, Lalabata Rilau, Botto	Jumlah Lokasi Zona Kreatif	2 Lokasi	0	Pendapatan Daerah		3 Lokasi	100.000.000
2 2 2	**Program Pengembangan Kesenian Daerah**		**Persentase Sanggar Seni yang dibina**	**40 Sanggar Seni**	**377.505.000**			60 Sanggar Seni	
3.02.2.16.01.02.001	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Pementasan Kesenian	8 Pementasan Kesenian	377.505.000	Pendapatan Daerah		8 Pementasan Kesenian	320.000.000
			Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat	2 Pesta Rakyat				2 Pesta Rakyat	
3.02.2.16.01.02.003	Peningkatan Kapasitas Sanggar Seni	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Umpungeng, Lapajung, Lalabata Rilau, Bila	Jumlah Sanggar Seni	4 Sanggar Seni	0	Pendapatan Daerah		6 Sanggar Seni	120.000.000
3.02.2.16.01.02.004	Pengelolaan Karya cetak dan Karya Rekam	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Peserta Pelatihan	50 Orang	0	Pendapatan Daerah		100 Orang	60.000.000
2 2 3	**Program Pengelolaan Objek Wisata**		**Persentase Objek Wisata yang dikelola**	**100%**	**2.176.577.400**			100%	
3.02.2.16.01.03.001	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta, BuluE, Botto, Ujung, Citta	Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara	6 Objek	112.410.400	Pendapatan Daerah		5 Objek	100.000.000
3.02.2.16.01.03.003	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Kabupaten, Kecamatan Citta	Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan	1 Objek	0	Pendapatan Daerah		1 Objek	450.000.000

3.02.2.16.01.03.004	Pemantauan dan Evaluasi Objek Wisata pada Waktu Tertentu	Kabupaten, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Lalabata, Ompo, Citta, Botto	Jumlah Objek Wisata yang dipantau dan dievaluasi	4 Objek	0	Pendapatan Daerah		4 Objek	150.000.000
3.02.2.16.01.03.005	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Citta, Botto, Ompo, Citta	Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan	2 Objek	2.064.167.000	APBN (DAK)		1 Objek	800.000.000
		TOTAL			**4.799.095.350**				**6.624.400.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**838.222.540**			100%	
0.00.2.17.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	47.625.340			12 Kali	81.250.000
0.00.2.17.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah SNTK Kendaraan Dinas/Operasional	10 Unit	5.270.000	Pendapatan Daerah		11 Unit	7.300.000
0.00.2.17.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Peralatan Kebersihan	14 Jenis-1 Orang	12.500.000	Pendapatan Daerah		14 Jenis-1 Orang	11.000.000
0.00.2.17.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Alat Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	2.428.500	Pendapatan Daerah		9 Jenis	3.250.000
0.00.2.17.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	12 Jenis	5.596.000	Pendapatan Daerah		13 Jenis	10.000.000
0.00.2.17.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Pengisian Gas	12 Kali	1.980.000	-		12 Kali	1.980.000
0.00.2.17.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	280 Kali	359.635.000	Pendapatan Daerah		285 Kali	220.000.000
0.00.2.17.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	12 Paket	265.607.700	Pendapatan Daerah		12 Paket	195.000.000
0.00.2.17.01.05.031	Pengadaan mebeleur	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Mebeleur yang Diadakan	3 Buah	9.000.000	Pendapatan Daerah		0 Buah	0
0.00.2.17.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Luas Gedung Kantor / Halaman yang Dipelhara	1 m2	8.450.000	Pendapatan Daerah		1 m2	17.000.000
0.00.2.17.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	10 Unit	104.110.000	Pendapatan Daerah		11 Unit	123.000.000
0.00.2.17.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	18 Unit	16.020.000	Pendapatan Daerah		19 Unit	10.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**% Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu**	**100%**	**49.350.000**			100%	
0.00.2.17.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	12.715.000	Pendapatan Daerah		6 Dokumen	10.000.000
0.00.2.17.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	5 Dokumen	12.265.000	Pendapatan Daerah		5 Dokumen	9.000.000
0.00.2.17.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	7 Dokumen	12.540.000	Pendapatan Daerah		7 Dokumen	2.500.000
0.00.2.17.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	3 Dokumen	11.830.000	Pendapatan Daerah		3 Dokumen	4.000.000
4									
4 17	**Perpustakaan**								
4 17 1	**Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan**		**Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan / Tahun**	**8.730 Pengunjung**	**147.094.000**			8.924 Pengunjung	
2.17.2.17.01.01.002	Pengembangan Minat dan Budaya Baca;	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Ceria	900 Orang	72.375.000	Pendapatan Daerah		1.450 Orang	25.000.000

2.17.2.17.01.01.003	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat;	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Mengikuti Supervisi	70 Orang	13.439.000	Pendapatan Daerah		70 Orang	30.000.000
2.17.2.17.01.01.006	Pengembangan Potensi dan Bakat Pidato bagi Siswa Sekolah;	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Peserta Lomba Pidato	16 Orang	21.040.000	Pendapatan Daerah		16 Orang	28.500.000
2.17.2.17.01.01.007	Pengembangan Minat dan Bakat pada Bidang Pengetahuan Umum;	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Peserta Cerdas Cermat	24 Orang	28.710.000	Pendapatan Daerah		24 Orang	36.000.000
2.17.2.17.01.01.008	Lomba Perpustakaan Desa / Kelurahan;	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan yang Mengikuti Lomba	8 Desa/Kelurahan	11.530.000	Pendapatan Daerah		8 Desa/Kelurahan	35.000.000
4 17 2	**Program Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Pustaka**		**Persentase Bahan Pustaka yang Diadakan**	**3.023 Persen**	**330.182.400**			3.075 Persen	
2.17.2.17.01.02.001	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Peserta Lomba Bercerita	16 Orang	20.935.000	Pendapatan Daerah		16 Orang	23.000.000
2.17.2.17.01.02.002	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Bahan Pustaka yang Diadakan	250 Judul	290.535.000	Pendapatan Daerah		625 Judul	77.000.000
2.17.2.17.01.02.003	Workshop Story Telling	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Peserta Worshop Storytelling	100 Orang	18.712.400	Pendapatan Daerah		100 Orang	35.000.000
4 18	**Kearsipan**								
4 18 1	**Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/ arsip daerah**		**Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Daerah**	**25 SKPD**	**82.108.400**			31 SKPD	
2.18.2.17.01.01.001	Pendatan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Arsip yang Didata dan Ditata	1.800 Lembar	25.250.000	Pendapatan Daerah		2.000 Lembar	53.484.000
2.18.2.17.01.01.002	Penyimpanan dan Penataan Arsip	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah SKPD yang Dibina	6 SKPD	26.800.000	Pendapatan Daerah		6 SKPD	64.141.000
2.18.2.17.01.01.003	Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Peserta Sosialisasi	70 Orang	22.378.400	Pendapatan Daerah		70 Orang	55.000.000
2.18.2.17.01.01.005	Pembuatan Regulasi Kearsipan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lemba	Jumlah Regulasi Kearsipan yang Diterbitkan	1 Dokumen	7.680.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	27.000.000
		TOTAL			**1.446.957.340**				**1.194.405.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERTANIAN TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran; Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur; Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur; Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur**	**100%**	**2.777.289.200**			100%	
0.00.3.03.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Kali	141.484.000			12 Kali	170.000.000
0.00.3.03.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	162 Unit	25.000.000	-		162 Unit	30.000.000
0.00.3.03.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah Petugas Kebersihan	4 Orang	35.000.000	-		4 Orang	40.000.000
			Jumlah Jenis Peralatan/Bahan Kebersihan	2 Jenis				2 Jenis	
0.00.3.03.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	20 Unit	1.100.000	-		20 Unit	1.200.000
0.00.3.03.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah Tabung Gas	30 Kali	5.100.000	-		30 Kali	5.100.000
0.00.3.03.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi serta kedinasan lainnya	850 Kali	1.090.605.200	-		1.000 Kali	910.000.000
0.00.3.03.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Jumlah Paket Pelayanan Administrasi Perkantoran	5 Paket	800.000.000	-		5 Paket	1.050.000.000
0.00.3.03.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	SKPD	Jumlah Informasi yang Terupdate dalam Setahun	40 Berita	4.000.000	-		65 Berita	6.500.000
0.00.3.03.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan	8 Jenis	170.000.000	-		5 Jenis	120.000.000
0.00.3.03.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Luas Gedung Kantor/Halaman yang Dipelihara	500 Meter Persegi	15.000.000	-		500 Meter Persegi	18.000.000
0.00.3.03.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara	162 Unit	400.000.000	-		162 Unit	650.000.000
0.00.3.03.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	30 Unit	10.000.000	-		30 Unit	20.000.000
0.00.3.03.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	15 Orang	80.000.000	-		35 Orang	165.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan yang Disusun Tepat Waktu; Persentase Dokumen Penganggaran yang Disusun Tepat Waktu; Persentase Dokumen Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu**	**100%**	**36.000.000**			100 %;100 %;100 %	
0.00.3.03.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	8.000.000	-		6 Dokumen	27.500.000
0.00.3.03.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	7 Dokumen	10.000.000	-		7 Dokumen	22.000.000
0.00.3.03.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	4 Dokumen	10.000.000	-		4 Dokumen	20.000.000
0.00.3.03.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	5 Dokumen	8.000.000	-		5 Dokumen	15.000.000
2	**Pilihan**								

2 3	**Pertanian**								
2 3 13	**Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Hortikultura**		**Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura**	**20,82 %**	**915.000.000**			23,77 %	
03.03.3.03.01.13.001	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran	Kabupaten	Luas areal pengmbangan tanaman sayuran unggulan dan tanaman sayuran lainnya	35 Hektar	100.000.000	-		57 Hektar	220.500.000
03.03.3.03.01.13.002	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah	Kabupaten	Jumlah Pohon tanman buah unggulan dan tanaman buah lainnya yang dikembangkan	2.300 Pohon	120.000.000	-		5.000 Pohon	261.843.750
03.03.3.03.01.13.005	Pengembangan bibit unggul pertanian	Kabupaten	Jumlah bibit unggul yang dikembangkan	820 Kilogram	60.000.000	-		1.000 Kilogram	100.000.000
03.03.3.03.01.13.006	Pengembangan diversifikasi tanaman	Kabupaten	Jumlah pengembangan komoditi hortikultura yang diusahakan	4 Komoditi	50.000.000	-		3 Komoditi	150.000.000
03.03.3.03.01.13.007	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Kabupaten	Jumlah komoditi hortikultura yang dikembangkan melalui pola pekarangan	6 Komoditi	15.000.000	-		5 Komoditi	35.000.000
03.03.3.03.01.13.008	Penyediaan Sarana dan Prasaran Tanaman Hortikultura	Kabupaten	Jumlah sarana dan Prasarana Tanaman Hortikultura yang Diadakan	4 Paket	492.000.000	-	DAK Pertanian	5 Paket	800.000.000
03.03.3.03.01.13.009	Pengembangan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Kabupaten	Jumlah peserta pelatihan pengendalianOPT Hortikultura	30 Orang	70.000.000	-		30 Orang	100.000.000
			Jumlah Bahan OPT Hortikultura yang diadakan	1 Paket				1 Paket	
03.03.3.03.01.13.010	Penyusunan Data Base Hortikultura	Kabupaten	Jumlah data base hortikultura yang dihasilkan	1 Dokumen	8.000.000	-		1 Dokumen	16.000.000
2 3 1	**Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu hasil tanaman pangan**		**Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan**	**32,29 %**	**554.285.000**			33,55 %	
03.03.3.03.01.01.003	Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian	Kabupaten, Kecamatan Liliriaja, Timusu	Luas areal penangkaran benih unggul tanaman pangan	20 Hektar	140.000.000	-		25 Hektar	199.750.950
03.03.3.03.01.01.004	Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan (RDKK) Pupuk Bersubsidi	Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah RDKK pupuk bersubsidi yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	45.000.000	-		1 Dokumen	54.154.800
03.03.3.03.01.01.008	Pembinaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang terbina	52 Orang	25.000.000	-		52 Orang	25.000.000
03.03.3.03.01.01.009	Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Serealia	Kabupaten	Luas areal pengembangan tanaman serealia melalui peningkatan produktivitas	45 Hektar	85.000.000	-		55 Hektar	98.133.525
03.03.3.03.01.01.010	Peningkatan produksi dan produktivitas Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	JennaE, TellulimpoE, Limpomajang, Lalabata Riaja, Kebo	Luas areal pengembangan tanaman aneka kacang dan umbi melalui peningkatan produktivitas	21 Hektar	52.000.000	-		29 Hektar	58.939.100
03.03.3.03.01.01.011	Pengembangan pertanian pada lahan kering	Lalabata Rilau	Luas areal pengembangan padi ladang	25 Hektar	35.000.000	-		25 Hektar	40.712.644
03.03.3.03.01.01.013	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari gangguan OPT dan DPI	Kabupaten, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Peta daerah rawan banjir dan kekeringan	1 Dokumen	75.000.000	-		0 Dokumen	60.000.000

			Pelaksanaan SL PHT gerakan pengendalian OPT	8 Kali				5 Kali	
03.03.3.03.01.01.014	Perlindungan tanaman untuk peningkatan pengamanan produksi tanaman pangan	Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah pestisida/bahan perlindungan tanaman yang diadakan	3 Jenis	70.000.000	-		3 Jenis	125.000.000
03.03.3.03.01.01.015	Penyusunan data base potensi produk pangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah data base potensi produk pangan yang tersusun	2 Dokumen	27.285.000	-		2 Dokumen	27.182.138
2 3 2	**Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**		**Peningkatan Jumlah Populasi Ternak Sapi; Peningkatan Jumlah Populasi Ternak Kambing; Peningkatan Jumlah Populasi Ternak Unggas**	**55.000 Ekor;33.500 Ekor;2.250.000 Ekor**	**342.400.000**			57.000 Ekor;35.000 Ekor;2.365.000 Ekor	
03.03.3.03.01.02.001	Pembibitan dan perawatan ternak	Kabupaten	Jumlah IB Sapi	1.200 Dosis	300.000.000	-		1.200 Dosis	1.000.000.000
			Jumlah Bibit Kambing yang diadakan	0 Ekor				100 Ekor	
			Jumlah Bibit Sapi yang diadakan	0 Ekor				20 Ekor	
			Jumlah Bibit Unggas	0 Ekor				0 Ekor	
			Jumlah Paket Perawatan ternak	2 Paket				2 Paket	
03.03.3.03.01.02.004	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana bergulir	Kabupaten	Jumlah Laporan yang Tersusun	1 Laporan	2.400.000	-		1 Laporan	17.000.000
03.03.3.03.01.02.005	Pengembangan Agribisnis Peternakan	Kabupaten	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengmbangan Usaha Agribisnis Peternakan	2 Kegiatan	30.000.000	-		1 Kegiatan	37.000.000
03.03.3.03.01.02.006	Penyusunan Data Base Peternakan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah data base peternakan yang dihasilkan	2 Dokumen	10.000.000	-		2 Dokumen	35.000.000
2 3 3	**program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian/ perkebunan**		**Persentase Peningkatan Luas Areal Tanam Komoditi Tanaman Pangan**	**45,14 %**	**2.448.000.000**			47,59 %	
03.03.3.03.01.03.001	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Kabupaten	Panjang jaringan irigasi yang terbangun/terehabilitasi JITUT/JIDES	350 Meter	150.000.000	-		3.196 Meter	1.678.000.000
03.03.3.03.01.03.002	Peningkatan Pengelolaan Lahan	Kabupaten	Panjang jalan usaha tani yang dikembangkan/direhabilitasi	1 Kilo Meter	200.000.000	-		22,2 Kilo Meter	4.550.000.000
03.03.3.03.01.03.003	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	Kabupaten	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian yang Tersedia	13 Unit	65.000.000	-		44 Unit	1.090.000.000
03.03.3.03.01.03.005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Kabupaten	Jumlah Peserta Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Tepat Guna	60 Orang	20.000.000	-		80 Orang	35.000.000
03.03.3.03.01.03.006	Pengelolaan sumber-sumber air untuk pertanian	Kabupaten	Jumlah Sumber-Sumber Air untuk Pertanian yang Dibangun/Direhabilitasi	20 Unit	1.958.000.000	-	DAK Pertanian	29 Unit	2.830.000.000
03.03.3.03.01.03.007	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Pertanian yang Dibangun	1 Paket	30.000.000	-		1 Paket	201.978.000
			Kegiatan Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Pertanian	2 Kegiatan				2 Kegiatan	
03.03.3.03.01.03.009	Pembinaan dan pengembangan Kelembagaan P3A/GP3A	Kabupaten	Jumlah Kelembagaan P3A dan GP3A yang Dibina	10 Kelompok	25.000.000	-		20 Kelompok	50.000.000
2 3 4	**Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu dan Pemasaran Hasil Pertanian**		**Jumlah Jenis Komoditi yang Diolah dan Dipasarkan**	**6 Komoditi**	**378.000.000**			6 Komoditi	
03.03.3.03.01.04.001	Penanganan Pengolahan Hasil Pertanian	Kabupaten	Jumlah Jenis Usaha Pengolahan Hasil Pertanian	3 Jenis	65.000.000	-		3 Jenis	70.000.000
03.03.3.03.01.04.002	Pengembangan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Kabupaten	Jumlah Alat Mesin Pengolahan Hasil Pertanian yang Dikembangkan/Diadakan	6 Unit	120.000.000	-		8 Unit	140.000.000
03.03.3.03.01.04.003	Promosi atas hasil produksi pertanian unggulan daerah	Kabupaten	Jumlah Keikutsertaan dalam Pelaksanaan Pameran Promosi Tingkat Kab, Prop dan Nasional	5 Kali	126.750.000	-		6 Kali	96.000.000
03.03.3.03.01.04.011	Penyuluhan dan bimbingan pengelolaan sumber daya petani melalui bantuan pemerintah	Kabupaten	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Bimbingan Pengelolaan Sumber Daya Petani Melaui Bantuan Pemerintah	30 Orang	36.250.000	-		30 Orang	25.000.000
03.03.3.03.01.04.012	Pelatihan dan bimbingan kewirausahaan bagi kelompok tani	Kabupaten	Jumlah Petani yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	50 Orang	30.000.000	-		60 Orang	40.000.000
2 3 5	**Program penguatan Kelembagaan Pelaku Utama**		**Cakupan Bina Kelompok Petani**	**98,6 %**	**295.000.000**			98,7 %	
03.03.3.03.01.05.001	Pendidikan Petani dan Pelaku Agribisnis	Kabupaten	Jumlah Petani yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	240 Orang	75.000.000	-		280 Orang	77.000.000

03.03.3.03.01.05.002	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Kabupaten	Pendampingan Kemitraan Usaha Gapoktan dalam Beragribisnis	70 Gapoktan	25.000.000	-		70 Gapoktan	30.000.000
03.03.3.03.01.05.003	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani dan KTNA	Kabupaten	Jumlah Kelembagaan Pelaku Utama yang dibina	957 Poktan	180.000.000	-		953 Poktan	110.000.000
03.03.3.03.01.05.004	Pekan Nasional Kelompok Tani Andalan		Jumlah Petani yang mengikuti PENAS	20 Orang	15.000.000	-		0 Orang	0
2 3 6	**Program Peningkatan Produksi, produktifitas dan mutu Hasil Perkebunan**		**Produksi Kakao; Produksi Tembakau; Produksi Tanaman Perkebunan Lainnya**	**12.051,7 Ton;94,11 Ton;4.100 Ton**	**1.457.500.000**			12.386,47 Ton;106,99 Ton;4.150 Ton	
03.03.3.03.01.06.002	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Kecamatan Lilirilau	Jumlah bibit sambung pucuk kakao	41.100 Pohon	400.000.000	-		70.000 Pohon	665.000.000
03.03.3.03.01.06.003	Pengembangan Tanaman Alternatif Perkebunan	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah bibit tanaman alternatif perkebunan yang diadakan	13.000 Pohon	119.600.000	-		15.000 Pohon	179.542.125
03.03.3.03.01.06.004	Peningkatan Produksi dan Kualitas Tembakau	Kabupaten	Tersedianya sarana dan prasaranapada kelompok tani pembudidaya tanaman tembakau	10 Kelompok	500.000.000	-	DBH CHT	8 Kelompok	500.000.000
03.03.3.03.01.06.006	Pengadaan Sarana Produksi	Kecamatan Citta	Tersedianya sarana produksi	46 Ha	117.900.000	-		100 Ha	200.000.000
03.03.3.03.01.06.007	Pelatihan petani SL-PHT	Kabupaten	Jumlah kelompok lokasi pelaksanaan SL-PHT	2 Kelompok	50.000.000	-		3 Kelompok	90.000.000
03.03.3.03.01.06.010	Pengembangan Jalan Produksi	Kecamatan Lilirilau	Tersedianya prasarana pertanian berupa jalan produksi	1 km	200.000.000	-		18 km	2.450.000.000
03.03.3.03.01.06.011	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Kecamatan Lilirilau	Jumlah alat transportasi perkebunan	2 Unit	60.000.000	-		5 Unit	150.000.000
03.03.3.03.01.06.012	Penyusunan Data Base Perkebunan	Kabupaten	Jumlah database perkebunan yang dihasilkan	1 Dokumen	10.000.000	-		1 Dokumen	25.000.000
2 3 7	**Program Peningkatan Pasca Panen, Pemasaran dan promosi Hasil Perkebunan**		**Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan**	**32 Unit**	**20.000.000**			36 Unit	
03.03.3.03.01.07.004	Pelatihan Pengolahan Pasca Panen	Kabupaten	Jumlah peserta pelatihan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	30 Orang	20.000.000	-		30 Orang	22.000.000
2 3 8	**Program Pengembangan Sutra Alam**		**Produksi Kokon**	**15.521 Kg**	**500.000.000**			17.721 Kg	
03.03.3.03.01.08.001	Pengembangan sutera alam	Kecamatan Donri-Donri	Tersedianya areal pengembangan sutera alam	37 Ha	475.000.000	-		20 Ha	500.000.000
			Jumlah bibit ulat yang diadakan	500 Box				500 Box	
03.03.3.03.01.08.002	Pelatihan petani sutera alam	Kabupaten	Jumlah peserta pelatihan pengembangan sutera alam	50 Orang	25.000.000	-		50 Orang	30.000.000
2 3 9	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak**		**Persentase Jenis Kasus Penyakit Ternak**	**10%**	**320.000.000**			0%	
03.03.3.03.01.09.001	Pendataan masalah peternakan	Kabupaten	Dokumen Pendataan Masalah Peternakan	1 Dokumen	20.000.000	-		1 Dokumen	100.000.000
			Jumlah Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel Darah Sapi	0 Sampel				400 Sampel	
03.03.3.03.01.09.002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Kabupaten	Jumlah Vaksin dan Pengobatan Ternak	12.000 Dosis	280.000.000	-		12.000 Dosis	370.000.000
03.03.3.03.01.09.005	Pembinaan Kesmavet pada Usaha Peternakan	Kabupaten	Jumlah Pemeriksaan Sampel Daging dan uji Sampel Produk Peternakan	60 Sampel	20.000.000	-		0 Sampel	15.000.000
			Jumlah Pertemuan Pembinaan Kesmavet	0 Kali				2 Kali	
2 3 11	**Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan**		**Peningkatan Jumlah Kelompok yang Menerapkan Teknologi Tepat Guna**	**3 Kelompok**	**130.000.000**			3 Kelompok	
03.03.3.03.01.11.001	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Donri-Donri	Jumlah sarana dan prasarana peternakan tepat guna yang diadakan	6 Unit	100.000.000	-		10 Unit	220.000.000
03.03.3.03.01.11.002	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Kabupaten	Jumlah pelatihan pasca panen	1 Kali	30.000.000	-		1 Kali	50.000.000
			Jumlah pelatihan pembuatan pakan	2 Kali				4 Kali	
			Jumlah pelatihan sosialisasi inseminasi buatan	2 Kali				5 Kali	
2 3 12	**Program Pengembangan dan Pengelolaan Perlindungan Lahan Pertanian**		**Persentase Lahan Pertanian Organik**	**0,08 %**	**145.000.000**			0,08 %	
03.03.3.03.01.12.001	Pengembangan pertanian organik	Gattareng Toa, Gattareng	Luas areal pengembangan usaha tani organik	25 Hektar	120.000.000	-		27 Hektar	250.000.000
03.03.3.03.01.12.004	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (TP)	Kabupaten	Jumlah dokumen SID (Survey, Investigasi, Desain) mendukung perluasan dan pengolahan lahan pertanian melalui APBN/TP	2 Dokumen	25.000.000	-		2 Dokumen	35.000.000

2 3 14	**Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh**		**Persentase Efektifitas Penyelenggaraan Penyuluh**	**95%**	**2.099.232.000**			96%	
03.03.3.03.01.14.003	Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian perkebunan	Kabupaten	Penyusunan program penyuluhan dan rencana kerja penyuluhan	79 Dokumen	89.800.000	-		79 Dokumen	100.000.000
03.03.3.03.01.14.004	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tenaga Penyuluhan	Kabupaten	Jumlah sarana danprasarana penyuluhan yang diadakan	14 Jenis	778.516.000	-	DAK Pertanian	10 Jenis	900.000.000
03.03.3.03.01.14.005	Penyuluhan Diseminasi Teknologi Pertanian/Perkebunan Spesifik Lokasi	Kabupaten	Frekuensi penyuluhan informasi teknologi spesifikasi lokasi yang telah direkomendasikan	8 Kali	45.000.000	-		8 Kali	60.000.000
03.03.3.03.01.14.007	Penyuluhan dan Pendampingan Penyusunan RDK/RDKK	Kabupaten	Frekuensi pendampingan dan pengawalan peningkatan produksi	70 Kali	36.500.000	-		70 Kali	45.000.000
03.03.3.03.01.14.016	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	Kabupaten	Jumlah Daerah Irigasi yang terbina melalui IPDMIP	5 Daerah Irigasi	951.416.000	-		5 Daerah Irigasi	1.521.506.000
03.03.3.03.01.14.017	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian	Kabupaten, SKPD	Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	97 Orang	150.000.000	-		105 Orang	165.000.000
03.03.3.03.01.14.018	Penyediaan dukungan operasional penyuluh pertanian	Kabupaten, SKPD	Jumlah Penyuluh yang Memperoleh Dukungan Operasional	32 Orang	48.000.000	-		32 Orang	48.000.000
		TOTAL			**12.417.706.200**				**26.445.543.032**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor**	**100%**	**1.668.841.567**			**100%**	
0.00.4.01.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	112.000.000		-	12 Bulan	135.000.000
0.00.4.01.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	15 buah	4.700.000	APBD + DAK		15 buah	6.000.000
0.00.4.01.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	1 org	200.000.000	APBD + DAK		1 org	200.000.000
0.00.4.01.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah alat listrik/ penerangan bangunan	1 paket	13.974.000	APBD + DAK		1 paket	15.000.000
0.00.4.01.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD	Jumlah peralatan rumah tangga	10 unit	10.180.000	-		10 unit	15.000.000
0.00.4.01.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah pengisian gas	12 buah	1.400.000	-		12 buah	3.600.000
0.00.4.01.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1.240 kali	549.222.567	-		1.240 kali	950.000.000
0.00.4.01.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Jumlah paket pelayanan perkantoran	4 paket	413.265.000	APBD + DAK		4 paket	370.000.000
0.00.4.01.01.05.026	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan Dinas Roda 2	2 unit	75.500.000	APBD + DAK		2 unit	325.000.000
0.00.4.01.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor		Laptop	1 Unit	16.000.000	-		1 Unit	126.000.000
			Printer	1 unit				1 unit	
0.00.4.01.01.05.031	Pengadaan mebeleur	SKPD	Kursi tunggu 4 seat/dudukan	2 buah	26.000.000	APBD + DAK		2 buah	0
			Lemari arsip 2 Pintu (Besi)	2 Buah				2 Buah	
0.00.4.01.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Jumlah gedung kantor	1 buah	100.000.000	APBD + DAK		1 Buah	120.000.000
0.00.4.01.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaran dinas/operasional yang dipelihara	18 Unit	97.000.000	APBD + DAK		18 Unit	150.000.000
0.00.4.01.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Personal Komputer	12 Unit	49.600.000	APBD + DAK		12 Unit	82.000.000
			Notebook	19 Unit				19 Unit	
			Printer	18 unit				18 unit	
			Pemeliharaan AC	21 Unit				21 Unit	
			Pemeliharaan Meubeleur	1 Paket				1 Paket	
			Pemeliharaan LCD	2 Unit				2 Unit	
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**% Dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**41.050.000**			**100%**	
0.00.4.01.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	jumlah dokumen perencanaan dan penganggara	6 dokumen	10.000.000	APBD + DAK		6 dokumen	10.000.000
0.00.4.01.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	1 dokumen	4.090.000	APBD + DAK		1 dokumen	8.000.000
0.00.4.01.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	2 dokumen	15.000.000	APBD + DAK		2 dokumen	15.000.000
0.00.4.01.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	jumlah dokumen	1 dokumen	11.960.000	APBD + DAK		1 dokumen	10.000.000
3									
3 1	**Perencanaan Pembangunan daerah**								
3 1 1	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**		**% ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD yang sesuai dengan regulasi**	**100%**	**1.453.800.000**			**100%**	

4.01.4.01.01.01.002	Penyusunan RKPD	SKPD	jumlah dokumen RKPD dan RKPD Perubahan	2 dokumen	120.000.000	APBD + DAK		2 dokumen	57.500.000
4.01.4.01.01.01.003	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	SKPD	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	163.500.000	APBD + DAK		5 dokumen	250.000.000
4.01.4.01.01.01.004	Penyusunan KUA-PPAS	SKPD	Jumlah dokumen KUS-PPAS, Pokok dan perubahan	2 dokumen	50.000.000	APBD + DAK		2 dokumen	58.500.000
4.01.4.01.01.01.005	Asistensi Penyusunan RAPBD	SKPD	Jumlah SKPD yang di asistensi	38 OPD	156.250.000	APBD + DAK		38 OPD	120.000.000
4.01.4.01.01.01.009	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	SKPD	Jumlah Peserta Sosialisas	80 org	223.000.000	APBD + DAK		80 org	100.000.000
4.01.4.01.01.01.011	Koordinasi Pembinaan Kabupaten Sehat	SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan hasil koordinasi	1 dokumen	40.000.000	APBD + DAK		1 dokumen	50.500.000
4.01.4.01.01.01.012	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi	2 dokumen	30.000.000	APBD + DAK		2 dokumen	38.700.000
4.01.4.01.01.01.013	Koordinasi Perencanaan Responsif Gender	SKPD	Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG	37 SKPD	40.000.000	APBD + DAK		37 SKPD	30.000.000
4.01.4.01.01.01.014	Koordinasi Perencanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Koordinasi	1 dokumen	85.050.000	APBD + DAK		1 dokumen	21.700.000
4.01.4.01.01.01.015	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah Peserta Sosialisas	400 Orang	50.000.000	APBD + DAK		400 Orang	120.000.000
4.01.4.01.01.01.016	Pendampingan Penyusunan RPJM Desa	SKPD	umlah desa yang didampingi	8 Desa	50.000.000	APBD + DAK		8 Desa	55.000.000
4.01.4.01.01.01.018	Koordinasi penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak	SKPD	Jumlah dokumen Hasil pelaksanaan koordinasi	1 dokumen	50.000.000	APBD + DAK		1 dokumen	45.000.000
4.01.4.01.01.01.019	Pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan	SKPD	Jumlah Aplikasi/Software	1 buah	30.000.000	APBD + DAK		1 buah	50.000.000
4.01.4.01.01.01.020	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	13.000.000	APBD + DAK		1 dokumen	15.200.000
4.01.4.01.01.01.021	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Sosial Budaya	SKPD	Jumlah Dokumen	1 dokumen	15.000.000	APBD + DAK		1 dokumen	13.200.000
4.01.4.01.01.01.022	Penyusunan, Pengumpulan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana	SKPD	Jumlah dokumen	1 dokumen	13.000.000	APBD + DAK		1 dokumen	18.500.000
4.01.4.01.01.01.023	Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	SKPD	Jumlah dokumen perjanjian Kinerja	1 dokumen	20.000.000	APBD + DAK		1 dokumen	25.000.000
4.01.4.01.01.01.025	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	SKPD	Jumlah dokumen SIPD	1 dokumen	25.000.000	APBD + DAK		1 dokumen	25.000.000
4.01.4.01.01.01.028	Penyusunan indikator ekonomi	SKPD	Jumlah dokumen indikator ekonomi	1 dokumen	20.000.000	APBD + DAK		1 dokumen	50.000.000
4.01.4.01.01.01.030	Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Kabupaten	jumlah renja SKPD yang diverifikasi	37 SKPD	60.000.000	-		37 SKPD	70.000.000
4.01.4.01.01.01.031	Penyusunan Dokumen Teknokratif RPJMD Kab. Soppeng	SKPD	Dokumen	1	150.000.000	-		1	200.000.000
4.01.4.01.01.01.032	Penyusunan KLHS RPJMD		JUMLAH DOKUMEN KLHS RPJMD	1 dokumen	50.000.000	-		1 dokumen	0
3 1 2	**Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan**		**% Program RPJMD yang di jabarkan dalam RKP**	**100%**	**284.187.900**			**100%**	
4.01.4.01.01.02.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah Dokumen hasil Monev pelaksanaan APBD dan APBN Rencana pembangunan Daerah pemerintah kabupaten soppeng	2 dokumen	41.688.000	APBD + DAK		2 dokumen	85.000.000
4.01.4.01.01.02.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	SKPD	Jumlah dokumen LKPD Kabupaten	1 dokumen	27.500.000	APBD + DAK		1 dokumen	55.000.000
4.01.4.01.01.02.006	Pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	SKPD	Jumlah Dokumen hasil evaluasi	1 dokumen	34.999.900	APBD + DAK		1 dokumen	40.000.000
4.01.4.01.01.02.007	Evaluasi Mandiri Kepala Daerah Berbasis Key Performance Indicator (KPI)	SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi	2 dokumen	130.000.000	APBD + DAK		2 dokumen	180.000.000
4.01.4.01.01.02.008	Pembangunan sistem informasi monitoring dan evaluasi	SKPD	Jumlah aplikasi/software	1 paket	50.000.000	APBD + DAK		1 paket	50.000.000
3 1 3	**Program Peningkatan Kapasitas SDM Perencanaan Pembangunan Daerah**		**Persentase ASN yang meningkat kompetensinya dalam hal perencanaan**	**100%**	**187.050.000**			**100%**	
4.01.4.01.01.03.001	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	SKPD	Jumlah tenaga perencana yang lulus bersertifikat dan yang mengikuti diklat/bintek	30 orang	130.500.000	APBD + DAK		30 orang	130.500.000
4.01.4.01.01.03.002	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	SKPD	Jumlah peserta Workshop	100 orang	56.550.000	APBD + DAK		100 orang	100.500.000
3 1 4	**Program Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah**		**Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan; Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah**	**100 %;0**	**430.435.000**			**100 %;0**	
4.01.4.01.01.04.001	Penyusunan penelitian dan pengembangan daerah pembangunan daerah	SKPD	Jumlah dokumen penelitian & Pengembangan	4 dokumen	350.000.000	APBD + DAK		4 dokumen	350.000.000
4.01.4.01.01.04.002	Inovasi pelayanan publik	SKPD	Jumlah SKPD yang difasilitasi	6 SKPD	80.435.000	APBD + DAK		6 SKPD	350.000.000
		TOTAL			**4.065.364.467**				**5.295.400.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**				**10.341.656.903**				
0.00.4.02.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Kali	6.521.100.000			60 Kali	7.267.260.000
0.00.4.02.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	335 Unit	45.000.000	-		335 Unit	47.916.000
0.00.4.02.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	3 Gedung	427.600.000	-		3 Gedung	98.820.700
0.00.4.02.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Jenis alat Listrik/Penerangan Bangunan	100%	15.569.200	-		100%	15.972.000
0.00.4.02.01.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis	13.105.100	-		4 Jenis	14.641.000
0.00.4.02.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Pengisian Gas	33 Kali	5.940.000	-		33 Kali	7.986.000
0.00.4.02.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	250 Kali	735.652.500	-		250 Kali	659.775.000
0.00.4.02.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	14 Paket	967.507.725	-		14 Paket	916.423.232
0.00.4.02.01.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Informasi yang Terupdate dalam setahun	100%	25.000.000	-		100%	35.000.000
0.00.4.02.01.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	1 Jenis	200.000.000	-		1 Jenis	404.238.619
0.00.4.02.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	4 Jenis	186.000.000	-		4 Jenis	191.650.600
0.00.4.02.01.05.031	Pengadaan mebeleur	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Mebeleur yang diadakan	2 Jenis	38.200.000	-		2 Jenis	46.704.600
0.00.4.02.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Luas Gedung Kantor / Halaman yang dipelihara	7 Unit	45.000.000	-		7 Unit	60.451.200
0.00.4.02.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara Roda 2 dan Roda 4	335 Unit	157.000.000	-		335 Unit	178.887.000
0.00.4.02.01.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	100%	30.000.000	-		100%	33.000.000
0.00.4.02.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100%	29.282.378	-		100%	32.210.200
0.00.4.02.01.05.046	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Gedung yang direhabilitasi	225 m2	214.000.000	-		225 m2	505.725.200
0.00.4.02.01.05.050	Pemeliharaan Rutin / Berkala Aplikasi	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya aplikasi yang layak fungsi	4 Aplikasi	150.000.000	-		4 Aplikasi	155.000.000
0.00.4.02.01.05.053	Pengadaan mesin/kartu absensi	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Absensi Sidik Jari	3 Unit	33.000.000	-		3 Unit	36.300.000
0.00.4.02.01.05.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	200 Stell	70.000.000	-		200 Stell	85.000.000

0.00.4.02.01.05.059	Pembinaan Kepegawaian	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya data - data kepegawaian	7 Dokumen	27.000.000	-		7 Dokumen	32.800.000
0.00.4.02.01.05.062	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Meningkatnya pengetahuan / keterampilan peserta sosialisasi	400 Orang	55.700.000	-		400 Orang	64.420.400
0.00.4.02.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Meningkatnya pengetahuan / keterampilan PNS	50 Orang	350.000.000	-		50 Orang	355.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**				**67.500.000**				
0.00.4.02.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	15.000.000	-		6 Dokumen	18.000.000
0.00.4.02.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	5 Dokumen	17.000.000	-		5 Dokumen	20.000.000
0.00.4.02.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	6 Dokumen	20.000.000	-		6 Dokumen	22.000.000
0.00.4.02.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	4 Dokumen	15.500.000	-		4 Dokumen	19.000.000
3									
3 2	**Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**								
3 2 1	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.**				**3.294.085.000**				
4.02.4.02.01.01.001	Penyusunan standar Satuan Harga.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Buku Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	1 Buku	128.350.000	-		1 Buku	162.212.000
4.02.4.02.01.01.002	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang APBD TA. 2019	1 Rancangan Perda	655.375.000	-		1 Rancangan Perda	450.000.000
4.02.4.02.01.01.003	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2019	1 Rancangan Perbup	61.950.000	-		1 Rancangan Perbup	80.852.500
4.02.4.02.01.01.004	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA. 2018	1 Rancangan Perda	629.500.000	-		1 Rancangan Perda	451.000.000
4.02.4.02.01.01.005	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018	1 Rancangan Perbup	64.000.000	-		1 Rancangan Perbup	45.792.000
4.02.4.02.01.01.006	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018	1 Rancangan Perda	165.700.000	-		1 Rancangan Perda	188.092.000
4.02.4.02.01.01.007	Penyusunan rancangan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2018	1 Rancangan Perbup	134.600.000	-		1 Rancangan Perbup	197.492.000
4.02.4.02.01.01.008	Sinkronisasi dan rekonsiliasi pengelolaan dana perimbangan dengan instansi terkait.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Data Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Transfer	1 Laporan	146.500.000	-		1 Laporan	140.000.000
4.02.4.02.01.01.009	Peningkatan manajemen tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Terselesaikannya Kasus Kerugian Negara / Daerah	4 Kali	194.100.000	-		4 Kali	213.000.000
4.02.4.02.01.01.011	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Terciptanya Pelayanan Keuangan yang Efektif dan Efisien	100%	362.000.000	-		100%	388.990.500
4.02.4.02.01.01.012	Sosialisasi APBD pokok dan perubahan.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Terciptanya Pemahaman Masyarakat tentang APBD	2 Kali	115.400.000	-		2 Kali	127.886.000
4.02.4.02.01.01.013	Penyusunan standar biaya umum	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Standar Biaya Umum	1 Dokumen	35.900.000	-		1 Dokumen	40.000.000
4.02.4.02.01.01.014	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Laporan Keuangan yang Akuntabel	37 SKPD	75.550.000	-		37 SKPD	60.000.000
4.02.4.02.01.01.015	Pembinaan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tesedianya Laporan Keuangan Desa yang Akuntabel	49 Desa	62.160.000	-		49 Desa	40.000.000
4.02.4.02.01.01.016	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	109.570.000	-		1 Laporan	130.000.000
4.02.4.02.01.01.017	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Kabupaten	2 Laporan	91.600.000	-		2 Laporan	123.000.000
4.02.4.02.01.01.018	Pengelolaan Gaji dan Tunjangan PNSD	SKPD, Kecamatan Lalabata	Terkelolanya Gaji PNSD secara Tepat Jumlah, Tepat Waktu, dan Tepat Orang	100%	128.350.000	-		100%	122.425.000
4.02.4.02.01.01.019	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Kas Daerah	SKPD, Kecamatan Lalabata	Terkelolanya Kas Daerah secara Proporsional dan Terkendali	5 Dokumen	133.480.000	-		5 Dokumen	133.480.000

3 2 2	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah.**				**1.655.811.000**				
4.02.4.02.01.02.001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	264.471.000	-		1 Dokumen	383.275.400
4.02.4.02.01.02.003	Penyusunan Laporan Kebutuhan dan Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Laporan RKBU dan RPBMD	2 Dokumen	9.050.000	-		2 Dokumen	167.119.800
4.02.4.02.01.02.004	Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Data Laporan BMD yang akan dijual dan dihapuskan	4 Dokumen	115.700.000	-		4 Dokumen	240.398.800
4.02.4.02.01.02.005	Penilaian Aset Daerah.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Data Nilai Aset Daerah	1 Dokumen	37.000.000	-		1 Dokumen	188.961.900
4.02.4.02.01.02.007	Pengamanan aset-aset pemerintah daerah	SKPD, Kecamatan Lalabata	Terciptanya Keamanan Aset - Aset Pemerintah Daerah	1 Titik/Jenis	1.122.940.000	-		1 Titik/Jenis	188.961.900
4.02.4.02.01.02.008	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SKPD, Kecamatan Lalabata	Terciptanya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	2 SKPD	106.650.000	-		2 SKPD	150.000.000
3 2 3	**Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**				**1.523.665.221**				
4.02.4.02.01.03.001	Penyediaan barang cetakan/ benda berharga.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Barang Cetakan / Benda Berharga	256 Jenis	350.065.221	-		256 Jenis	368.243.116
4.02.4.02.01.03.002	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	100%	693.200.000	-		100%	816.887.294
4.02.4.02.01.03.003	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	100%	252.300.000	-		100%	855.264.295
4.02.4.02.01.03.004	Pembentukan dan pemutakhiran Basis data obyek pajak daerah dan retribusi daerah.	SKPD, Kecamatan Lalabata	Tersedianya Data Bangunan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	100%	228.100.000	-		100%	459.605.295
		TOTAL			**16.882.718.124**				**18.237.121.551**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran; Persentase Pemunuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur; Persentase Peningkatan Kedisiplinan Aparatur; Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur**	**100 %;100 %;100 5;100 %**	**1.725.055.770**			100 %;100 %;100 5;100 %	
0.00.4.03.01.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Kali	200.400.000			36 Kali	200.400.000
0.00.4.03.01.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit	4.780.000	APBD + DAK		4 Unit	4.780.000
0.00.4.03.01.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Petugas Kebersihan, Peralatan Kebersihan	6 Orang	49.430.000	APBD + DAK		6 Orang	49.430.000
0.00.4.03.01.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Alat Listrik/Penerangan Bangunan	6 Item	3.071.000	APBD + DAK		6 Item	3.071.000
0.00.4.03.01.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Pengisian Tabung Gas	16 Kali	2.640.000	APBD + DAK		16 Kali	2.640.000
0.00.4.03.01.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya		Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	424 Kali	551.895.000	APBD + DAK		424 Kali	503.370.000
0.00.4.03.01.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	11 Paket	304.048.500	APBD + DAK		20 Paket	397.838.500
0.00.4.03.01.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Diadakan	6 Jenis	221.410.000	APBD + DAK		4 Jenis	30.025.000
0.00.4.03.01.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Gedung kantor Yang Dipelihara	2 Unit	136.271.270	APBD + DAK		2 Unit	30.000.000
0.00.4.03.01.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	4 Unit	76.410.000	APBD + DAK		4 Unit	76.410.000
0.00.4.03.01.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten, SKPD	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipeliara	71 Unit	54.700.000	-		71 Unit	54.700.000
0.00.4.03.01.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Aparatur BKPSDM Yang Dikirim Ke Lembaga Diklat	10 Orang	120.000.000	APBD + DAK		10 Orang	120.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu; Persentase Dokumen Penganggaran Yang Disusun Tepat Waktu; Persentase Dokumen Pelaporan Yang Disusun Tepat Waktu**	**100 %;100 %;100 %**	**140.000.000**			100 %;100 %;100 %	
0.00.4.03.01.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	3 Dokumen	25.000.000	APBD + DAK		3 Dokumen	25.000.000
0.00.4.03.01.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	5 Dokumen	45.000.000	APBD + DAK		5 Dokumen	45.000.000
0.00.4.03.01.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pelaporan keuangan	1 Dokumen	25.000.000	APBD + DAK		1 Dokumen	25.000.000
0.00.4.03.01.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	3 Dokumen	45.000.000	APBD + DAK		3 Dokumen	45.000.000
3									
3 3	**Kepegawaian dan Diklat**								

3 3 1	**Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur**		**Tingkat Kedisiplinan ASN**	**10%**	**127.820.000**			100%	
4.03.4.03.01.01.001	Pemberian Penghargaan ASN Berprestasi	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah PNS Yang Diberikan Penghargaan Karena Prestasi dan Pengabdiannya	400 Orang	120.870.000	APBD + DAK		400 Orang	120.870.000
4.03.4.03.01.01.002	Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Pelaksanaan Pengelolaan Absensi PNS dan Penegakan Disiplin PNS Secara Berkala, Pengadaan Mesin Absensi	1 Dokumen	6.950.000	APBD + DAK		1 Dokumen	6.950.000
3 3 2	**Program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Dalam Jabatan**		**Persentase ASN Yang Mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Dalam Jabatan Pada BKD Kabupaten Soppeng Sesuai Dengan Analisis Kebutuhan Diklat**	**620%**	**1.508.743.000**			1%	
4.03.4.03.01.02.002	Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan dan Diklat dalam Jabatan		Jumlah Pengiriman Peserta Diklat Ke Lembaga Diklat Yang Tidak Tercover Dalam Pelaksanaan Kelas Di BKD Soppeng	3 Orang	90.783.000	APBD + DAK		3 Orang	90.783.000
4.03.4.03.01.02.003	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III		Jumlah Kelas Diklat Prajabatan Golongan III	2 Kelas	1.005.200.000	-		1 Kelas	665.400.000
4.03.4.03.01.02.007	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi	Kabupaten	Jumlah Kelas Diklat Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	1 Kelas	100.690.000	-		0 Kelas	0
4.03.4.03.01.02.008	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Pendidikan	Kabupaten	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Pendidik	1 Kelas	110.690.000	-		1 Kelas	99.890.000
4.03.4.03.01.02.009	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Kesehatan	Kabupaten	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Kesehatan	1 Kelas	100.690.000	APBD + DAK		2 Kelas	150.000.000
4.03.4.03.01.02.010	Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Penyuluh	Kabupaten	Jumlah Kelas Diklat Untuk Tenaga Penyuluh	1 Kelas	100.690.000	APBD + DAK		2 Kelas	89.890.000
3 3 3	**Program Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara**		**Persentase Pemenuhan ASN**	**9%**	**817.594.995**			9%	
4.03.4.03.01.03.001	Perencanaan, penyeleksian dan pengangkatan ASN	Kabupaten	Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan ASN Melalui Seleksi CPNS	100%	350.000.000	APBD + DAK		100%	350.000.000
4.03.4.03.01.03.002	Penempatan ASN	Kabupaten	Persentase Penempatan PNS Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dimiliki	100%	76.765.000	APBD + DAK		100%	76.765.000
4.03.4.03.01.03.003	Pemberhentian ASN	Kabupaten	Persentase Realisasi Pengusulan PNS Yang Memasuki Usia Pensiun Berdasarkan PNS Yang Memenuhi Syarat	100%	19.185.000	-		100%	19.185.000
4.03.4.03.01.03.004	Penilaian kompetensi ASN	Kabupaten	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator	1 Kali	202.554.995	-		2 Kali	405.112.265
4.03.4.03.01.03.005	Mutasi kepangkatan ASN	Kabupaten	Persentase Terbitnya SK Kenaikan Pangkat PNS Yang Bersyarat	100%	48.115.000	-		100%	48.115.000
4.03.4.03.01.03.007	Pemberian tugas belajar kepada ASN	Kabupaten	Jumlah PNS Yang Lulus Seleksi Tugas Belajar	1 Orang	55.975.000	-		1 Orang	40.975.000
4.03.4.03.01.03.009	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian	Kabupaten, SKPD	Jumlah Sosialisasi/Rapat Koordinasi Kepegawaian Yang Dilaksanakan	1 kali	65.000.000	-		1 kali	65.000.000
3 3 4	**Program Penyelenggaraan Pelayanan Kepegawaian**		**Persentase Pelayanan Kepegawaian Secara Tepat Waktu**	**100%**	**266.127.200**			100%	
4.03.4.03.01.04.001	Pelayanan Pengadministrasian Berkas-Berkas Kepegawaian	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase Realisasi Cuti PNS, LP2P, KPE, Karis Karsu dan Taspen Berdasarkan Pengusulan Yang Memenuhi Syarat	100%	25.977.200	-		100%	25.977.200
4.03.4.03.01.04.002	Pelayanan Kartu Identitas dan Atribut Pegawai	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Persentase Penertiban Tanda Pengenal Bagi PNS Berdasarkan Usulan	100%	6.500.000	-		100%	6.500.000
4.03.4.03.01.04.003	Pengembangan dan pengelolaan Data Base Kepegawaian	SKPD, Kecamatan Lalabata, Lalabata Rilau	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian Yang Digunakan	3 Sistem	200.000.000	-		3 Sistem	50.000.000
4.03.4.03.01.04.005	Pelayanan izin belajar dan seleksi calon mahasiswa ke perguruan tinggi berikatan dinas	Kabupaten	Persentase PNS Yang Mendapatkan Izin Belajar Berdasarkan Hasil Seleksi, Jumlah Calon Mahasiswa Yang Diperoses Berdasarkan Yang Memenuhi Syarat	100%	33.650.000	-		100%	17.000.000
		TOTAL			**4.585.340.965**				**3.941.076.965**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran**	**100%**	**10.984.064.113**			100%	
0.00.4.04.03.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	1.089.175.000			12 kali	1.293.701.750
0.00.4.04.03.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	77 Unit	210.000.000	Pendapatan Daerah		79 Unit	80.964.730
0.00.4.04.03.05.004	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	jumlah paket Administrasi Keuangan Tepat Waktu	12 Paket	484.100.000	Pendapatan Daerah		12 Paket	545.234.470
0.00.4.04.03.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	38 Orang/Jenis	334.125.000	Pendapatan Daerah		19 Orang/Jenis	398.967.250
0.00.4.04.03.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan	15 Jenis	70.000.000	Pendapatan Daerah		12 Jenis	121.000.000
0.00.4.04.03.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	2 Jenis	32.000.000	Pendapatan Daerah		2 Jenis	357.244.939
0.00.4.04.03.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah pengisian gas	335 kali	40.000.000	Pendapatan Daerah		347 kali	48.400.000
0.00.4.04.03.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Semua Bagian)	257 Kali	1.615.295.578	Pendapatan Daerah		283 Kali	1.391.714.743
0.00.4.04.03.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Lalabata	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran (Semua Bagian)	5 Paket	2.619.277.535	Pendapatan Daerah		5 Paket	2.357.719.366
0.00.4.04.03.05.014	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH/WKDH	Kabupaten	Makan dan minum rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	1 Tahun	990.000.000	Pendapatan Daerah		1 Tahun	1.234.200.000
0.00.4.04.03.05.015	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH	Kabupaten	Pelayanan kesehatan Bupati dan wakil Bupati	1 Tahun	75.000.000	Pendapatan Daerah		1 Tahun	90.750.000
0.00.4.04.03.05.017	Penyediaan Operasional Mess Pemda Jakarta		Jumalah petugas operasional Mess Pemda yang terlayani	8 Orang	456.625.500	Pendapatan Daerah		9 Orang	327.087.200
0.00.4.04.03.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7 Unit	101.272.000	Pendapatan Daerah		7 Unit	87.812.120
0.00.4.04.03.05.031	Pengadaan mebeleur	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah mebeler yang diadakan	7 Unit	0	Pendapatan Daerah		7 Unit	439.230.000
0.00.4.04.03.05.032	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Kabupaten	Jumlah sarana dan prasarana Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang Terpelihara	2 Unit	100.000.000	Pendapatan Daerah		2 Unit	121.000.000
0.00.4.04.03.05.033	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah sarana dan prasarana Rumah dinas yang terpelihara	3 Unit	70.000.000	Pendapatan Daerah		3 Unit	24.200.000
0.00.4.04.03.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Luas gedung kantor/halaman yang terpelihara	1.500 m2	141.300.000	Pendapatan Daerah		1.500 m2	183.072.999

0.00.4.04.03.05.035	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah mobil jabatan Bupati dan Wakil Bupati	2 Unit	299.000.000	Pendapatan Daerah		2 Unit	398.090.000
0.00.4.04.03.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	66 Unit	1.635.040.000	Pendapatan Daerah		66 Unit	2.057.000.000
0.00.4.04.03.05.039	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipelihara	8 Unit	45.000.000	Pendapatan Daerah		2 Unit	78.650.000
0.00.4.04.03.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	9 Unit	30.000.000	Pendapatan Daerah		3 Unit	48.400.000
0.00.4.04.03.05.042	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Studio dan Komunikasi	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan studio dan komunikasi yang dipelihara	10 Unit	9.000.000	Pendapatan Daerah		10 Unit	9.680.000
0.00.4.04.03.05.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Pakaian Bupati dan Wakil Bupati	37 Set	100.000.000	Pendapatan Daerah		37 Set	121.000.000
0.00.4.04.03.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	Jumlah orang yang ikut Bimtek	31 Kali	437.853.500	Pendapatan Daerah		18 Kali	47.190.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**106.727.500**			100%	
0.00.4.04.03.06.008	Peningkatan manajemen aset	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah pengelola Manajemen Aset/Barang Daerah Setda yang dibayarkan honornya	13 Paket	46.765.000	Pendapatan Daerah		13 Paket	78.758.900
0.00.4.04.03.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen perencanaan dan pengangguran	6 Dokumen	22.500.000	Pendapatan Daerah		6 Dokumen	36.300.000
0.00.4.04.03.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 Dokumen	11.287.500	Pendapatan Daerah		5 Dokumen	36.300.000
0.00.4.04.03.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	6 Dokumen	13.900.000	Pendapatan Daerah		6 Dokumen	51.304.000
0.00.4.04.03.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 Dokumen	12.275.000	Pendapatan Daerah		4 Dokumen	78.758.900
1	**Wajib**								
1 6	**Sosial**								
1 6 3	**Program Pemberian pertimbangan, pendapat dan pendampingan Hukum keluarga miskin**				**56.749.300**				
1.06.4.04.03.03.001	Kegiatan Layanan Bantuan Hukum Magi Masyarakat Miskin	SKPD, Kecamatan Lalabata	Warga miskin yang mendapat bantuan hukum	100%	56.749.300	Pendapatan Daerah		100%	10.000.000
3									
3 4	**Sekretariat Daerah**								
3 4 1	**Program Peningkatan Kedinesan KDH dan WKDH**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100%**	**2.483.497.081**			100%	
4.04.4.04.03.01.001	Dialog/Audiense dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati yang dilayani	29 Kali	728.816.375	Pendapatan Daerah		29 Kali	800.000.000
4.04.4.04.03.01.002	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	jumlah kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri yang dilayani	25 Kali	1.076.825.270	Pendapatan Daerah		26 Kali	1.500.500.000
4.04.4.04.03.01.003	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	umlah Koordinasi dan Konsultasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya yang dilaksanakan	116 Kali	523.055.436	Pendapatan Daerah		121 Kali	852.000.000
4.04.4.04.03.01.004	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati dan Wakil Bupati yang terlayani	195 Kali	154.800.000	Pendapatan Daerah		202 Kali	757.379.000
3 4 2	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Cakupan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun tepat waktu**	**100%**	**103.193.300**			100%	
4.04.4.04.03.02.002	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	buku laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Soppeng	1 Dokumen	22.900.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	33.000.000
4.04.4.04.03.02.003	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	buku laporan penyelenggaraan pemerintahan Kab. Soppeng	1 Dokumen	73.543.300	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	99.000.000
4.04.4.04.03.02.004	Koordinasi Penyelenggaraan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Dokumen koordinasi SPM	1 Dokumen	6.750.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	38.000.000
3 4 9	**Program Pembinaan dan Pengembangan Keprotokoleran**		**terlaksananya aktifitas keprotokolan daerah**	**0%**	**62.559.775**			0%	

4.04.4.04.03.09.001	Orientasi Keprotokoleran	SKPD	Jumlah Peserta Orientasi	60 Orang	47.610.000	-		65 Orang	75.575.000
4.04.4.04.03.09.002	Peningkatan Kegiatan Keprotokoleran	SKPD	Persentase kegiatan Keprotokoleran yang dilayani	100%	14.949.775	Pendapatan Daerah		100%	157.100.000
3 4 13	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah**		**Cakupan Administrasi bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang dikoordinasikan**	**100 100**	**79.965.200**			100 100	
4.04.4.04.03.13.001	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Liliriau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan	8 Kali	21.400.000	Pendapatan Daerah		8 Kali	77.000.000
4.04.4.04.03.13.002	Pendampingan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan	Kabupaten, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah PATEN yang terlaksana di Kecamatan	2 Kali	28.245.200	Pendapatan Daerah		2 Kali	99.000.000
4.04.4.04.03.13.003	Kegiatan Koordinasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Kerjasama di Kabupaten Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Data koordinasi kependudukan, catatan sipil dan kerjasama di Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	7.995.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	132.000.000
4.04.4.04.03.13.004	Pelaksanaan Koordinasi Wilayah Perbatasan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Dokumen wilayah perbatasan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Di Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	5.400.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	165.000.000
4.04.4.04.03.13.005	Koordinasi Pembakuan Unsur Rupabumi Kabupaten Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	Dokumen pembakuan unsur rupabumi di setiap Kecamatan	1 Dokumen	14.150.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	44.000.000
4.04.4.04.03.13.006	Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Dokumen pelaksanaan Administrasi KDH/WKDH dan DPRD	1 Dokumen	2.775.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	33.000.000
3 4 14	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-Undangan**		**Cakupan Administrasi bidang hukum dan perundang-undangan yang dikoordinasikan**	**100 N/A**	**416.356.753**			100 N/A	
4.04.4.04.03.14.001	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kabupaten	Proses Tindak Lanjut Hasil Temuan	85 LHP	13.799.950	Pendapatan Daerah		97 LHP	44.000.000
4.04.4.04.03.14.002	Pendampingan Hukum bagi Pemerintah Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	jumlah kasus di lingkup Pemerintah Daerah yang ditangani	2 kasus	69.245.000	Pendapatan Daerah		2 kasus	77.000.000
4.04.4.04.03.14.004	Kegiatan Pengelolaan Data LHKPN	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Data LHKPN di Kabupaten Soppeng	37 orang	14.849.750	Pendapatan Daerah		37 orang	22.000.000
4.04.4.04.03.14.005	Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah Rancangan PERDA	100 PHD	158.277.775	Pendapatan Daerah		100 PHD	126.500.000

4.04.4.04.03.14.006	Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	jumlah Kelompok Kadarkum	8 Kelompok	74.000.000	Pendapatan Daerah		8 Kelompok	82.500.000
4.04.4.04.03.14.007	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan yang Lebih Tinggi dan Keserasian antara Peraturan Perundang-undangan Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	jumlah produk hukum daerah yang terpublikasi	15 Produk Hukum	32.299.800	Pendapatan Daerah		15 Produk Hukum	44.000.000
4.04.4.04.03.14.008	Publikasi Peraturan Perundang-undangan berupa Sosialisasi Peraturan tentang Rokok/Pajak Tembakau	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	jumlah yang tersosialisasi publikasi perundang-undangan tentang rokok	320 Orang	49.884.578	Pendapatan Daerah		320 Orang	38.500.000
4.04.4.04.03.14.009	Penyusunan dan Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Data Pelaksanaan HAM di Kabupaten Soppeng	1 Dokumen	3.999.900	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	22.000.000
3 4 15	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Tata laksana**		**Cakupan Administrasi bidang organisasi dan tatalaksana yang dikoordinasikan**	**100 N/A**	**366.525.100**			100 N/A	
4.04.4.04.03.15.003	Evaluasi Kelembagaan serta Tugas dan Fungsi	Kecamatan Lalabata	Dokumen hasil evaluasi Kelembagaan dan fungsi.	2 Dokumen	49.930.000	Pendapatan Daerah		2 Dokumen	47.000.000
4.04.4.04.03.15.004	Proses Pelaksanaan Ketatalaksanaan	Kecamatan Lalabata	Pedoman tata naskah, pakaian dinas, mekanisme dan produksi kerja.	1 Dokumen	35.895.300	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	38.000.000
4.04.4.04.03.15.005	Penyususnan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Kecamatan Lalabata	Dokumen hasil perumusan, pengolahan revisi jabatan dan beban kerja & evaluasi	1 Dokumen	63.004.300	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	55.000.000
4.04.4.04.03.15.006	Penyususnan Road Map Program Reformasi Birokrasi	Kecamatan Lalabata	Laporan pelaksanaan reformasi birokrasi dan PMPRB	1 Dokumen	30.849.800	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	33.000.000
4.04.4.04.03.15.007	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Lalabata	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti	6 Kali	42.900.000	Pendapatan Daerah		10 Kali	70.000.000
4.04.4.04.03.15.008	Peningkatan Disiplin Aparatur	Kecamatan Lalabata	Jumlah Aparatur yang meningkat kedisiplinannya	350 org	27.230.200	Pendapatan Daerah		152 org	44.000.000
4.04.4.04.03.15.009	Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Lalabata	Data Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	31.701.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	65.000.000
4.04.4.04.03.15.010	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Kecamatan Lalabata	Dokumen Standar operasional prosedur	1 Dokumen	17.005.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	105.000.000
4.04.4.04.03.15.011	Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Publik	Kecamatan Lalabata	dokumen Standar Pelayanan dan Kepuasan Masyarakat.	1 Dokumen	18.755.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	55.000.000
4.04.4.04.03.15.012	Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	Kecamatan Lalabata	UKPP yang bersyarat untuk di nilai	2 SKPD	17.749.900	Pendapatan Daerah		2 SKPD	55.000.000
4.04.4.04.03.15.013	Pendampingan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Kecamatan Lalabata	Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11 kali	31.504.600	Pendapatan Daerah		24 kali	48.000.000
3 4 16	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam**		**Cakupan Administrasi bidang perekonomian, pembangunan dan sumber daya alam yang dikoordinasikan**	**100 N/A**	**149.213.575**			100 N/A	
4.04.4.04.03.16.001	Pengendalian dan Peningkatan Data Pembangunan Se-Kabupaten Soppeng	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Dokumen laporan dan capaian realisasi fisik proyek/kegiatan pembangunan	1 Dokumen	27.375.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	65.000.000
4.04.4.04.03.16.003	Koordinasi Pembinaan dan pengumpulan Informasi hasil Tembakau Ilegal	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Data Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Monitoring Kebijakan DBHCHT dan tersusunnya Data Tembakau Ilegal	4 Dokumen	44.055.500	Pendapatan Daerah		4 Dokumen	140.000.000
4.04.4.04.03.16.004	Pembinaan Agen/Pangkalan BBM dan LPG Bersubsidi	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Penertiban dan Pengawasan Harga, distribusi BBm dan LPG Bersubsidi	1 Dokumen	23.999.750	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	60.000.000
4.04.4.04.03.16.005	Koordinsi Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Data pembinaan dan pengawasan BUMD	1 Dokumen	0	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	120.000.000
4.04.4.04.03.16.006	Koordinasi Penguatan dan pengendalian Stabilitas Perekonomian Daerah	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Data Koordinasi Stabilitas perekonomian daerah	1 Dokumen	22.103.700	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	100.000.000
4.04.4.04.03.16.007	Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Mineral	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Data pengendalian Sumber daya Alam dan mineral	1 Dokumen	27.599.925	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	80.000.000
4.04.4.04.03.16.008	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Pembangunan	Kabupaten, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Data Koordinasi pengendalian pembangunan	1 Dokumen	4.079.700	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	35.000.000

3 4 17	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pengadaan Barang/Jasa**		**Cakupan Administrasi bidang pengadaan barang/jasa yang dikoordinasikan**	**100 N/A**	**261.815.000**			100 N/A	
4.04.4.04.03.17.001	Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Dokumen data evaluasi pelaksanaan tender	1 Dokumen	4.500.000	Pendapatan Daerah		1 Dokumen	11.000.000
4.04.4.04.03.17.002	Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilayani secara elektronik	100%	34.915.000	Pendapatan Daerah		100%	544.500.000
4.04.4.04.03.17.003	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa yang ditender	120 Paket	177.800.000	Pendapatan Daerah		120 Paket	434.500.000
4.04.4.04.03.17.004	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah pembinaan/ advokasi pengadaan barang/jasa	20 Kali	44.600.000	Pendapatan Daerah		20 Kali	110.000.000
3 4 18	**Program Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat**		**Cakupan Administrasi bidang kesejahteraan rakyat yang dikoordinasikan**	**100 N/A**	**1.389.675.000**			100 N/A	
4.04.4.04.03.18.001	Pembinaan Pelaksanaan Sekolah Sehat	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	jumlah lomba sekolah sehat	3 kali	56.250.000	Pendapatan Daerah		3 kali	90.000.000
4.04.4.04.03.18.002	Pelaksanaan Pemberangkatan/Pemulangan Jamaah Haji	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	jumlah jamaah haji yang diberangkatkan/dipulangkan	285 orang	390.450.000	Pendapatan Daerah		285 orang	300.000.000
4.04.4.04.03.18.003	Pelaksanaan Perayaan hari-hari besar Keagamaan	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	jumlah perayaan hari besar islam yang dilaksanakan	7 kali	240.150.000	Pendapatan Daerah		7 kali	100.000.000
4.04.4.04.03.18.004	Pelaksanaan/Keikutsertaan MTQ & STQ	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	jumlah pelaksanaan MTQ & STQ	2 kali	385.055.000	Pendapatan Daerah		2 kali	162.000.000
4.04.4.04.03.18.005	Pelaksanaan Festival Anak Saleh	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	jumlah Festival anak Saleh	1 kali	102.970.000	Pendapatan Daerah		1 kali	55.000.000
4.04.4.04.03.18.006	Pengembangan Nilai Budaya LASQI	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	jumlah Festifal LASQI	2 kali	74.400.000	Pendapatan Daerah		2 kali	50.000.000

4.04.4.04.03.18.007	peningkatan Nilai-nilai Keagamaan	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	jumlah Kajian Agama untuk peningkatan nilai-nilai keagamaan	12 kali	140.400.000	Pendapatan Daerah		12 kali	88.000.000
		TOTAL			**16.460.341.697**				**20.632.785.367**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Presentase keterpenuhan administrasi perkantoran; Presentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Presentase tingkat kedisiplinan aparatur; Presentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur**	**100 %;100 %;98 %;100 %**	**7.345.694.500**			100 %;100 %;98 %;100 %	
0.00.4.04.04.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lalabata	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 kali	475.800.000			48 kali	475.800.000
0.00.4.04.04.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lalabata	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	41 unit	14.000.000	APBD + DAK		41 unit	14.000.000
0.00.4.04.04.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah petugas kebersihan	18 orang	146.400.000	APBD + DAK		18 orang	146.400.000
			Jumlah peralatan kebersihan	12 jenis				12 jenis	
0.00.4.04.04.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	17 jenis	25.000.000	APBD + DAK		17 jenis	25.000.000
0.00.4.04.04.05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan rumah tangga	4 jenis	23.000.000	APBD + DAK		4 jenis	38.000.000
0.00.4.04.04.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah pengisian tabung gas	36 kali	6.840.000	APBD + DAK		36 kali	6.840.000
0.00.4.04.04.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1.225 kali	565.000.000	APBD + DAK		1.225 kali	550.000.000
0.00.4.04.04.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Lalabata	Jumlah paket pelayanan perkantoran	22 paket	1.752.060.000	APBD + DAK		22 paket	1.762.660.000
0.00.4.04.04.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah sistem informasi yang dilaksanakan	4 sistem informasi	75.560.000	APBD + DAK		4 sistem informasi	65.560.000
0.00.4.04.04.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	8 set	253.700.000	APBD + DAK		8 set	56.200.000
0.00.4.04.04.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	10 set	75.500.000	APBD + DAK		8 set	142.500.000
0.00.4.04.04.05.031	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan meubeleur yang diadakan	35 buah	149.100.000	APBD + DAK		40 buah	116.000.000
0.00.4.04.04.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1.000 m2	226.000.000	APBD + DAK		1.000 m2	380.000.000
0.00.4.04.04.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lalabata	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	38 unit	139.500.000	APBD + DAK		38 unit	138.500.000
0.00.4.04.04.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	62 buah/unit	25.000.000	APBD + DAK		9 buah/unit	25.000.000
0.00.4.04.04.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Lalabata	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	35 buah/unit	20.000.000	APBD + DAK		11 buah/unit	20.000.000
0.00.4.04.04.05.053	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kecamatan Lalabata	Jumlah mesin absensi	3 buah/unit	21.110.000	APBD + DAK		2 buah/unit	20.550.000
0.00.4.04.04.05.058	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Lalabata	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	9 set	7.200.000	APBD + DAK		9 set	7.200.000
0.00.4.04.04.05.062	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Lalabata	Jumlah aparat yang mengikuti sosialisasi	50 Orang	11.900.000	APBD + DAK		50 Orang	11.900.000
0.00.4.04.04.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten	Jumlah aparatur yang dikirim ke lembaga diklat	21 OK	179.440.000	APBD + DAK		28 OK	180.000.000
0.00.4.04.04.05.073	Penyediaan kebutuhan pimpinan dan anggota RPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah kebutuhan yang disediakan	22 jenis	3.153.584.500	APBD + DAK		22 jenis	3.164.480.000

0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Presentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu; Presentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu; Presentase dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100 %;100 %;100 %**	**168.145.500**			100 %;100 %;100 %	
0.00.4.04.04.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	3 dokumen	40.905.000	-		3 dokumen	44.425.000
0.00.4.04.04.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 dokumen	24.165.000	Pendapatan Daerah		5 dokumen	25.175.000
0.00.4.04.04.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Lalabata	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	3 dokumen	51.900.000	APBD + DAK		3 dokumen	55.750.000
0.00.4.04.04.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Kecamatan Lalabata	Jumlah pengendalian dan evaluasi	4 dokumen	51.175.500	APBD + DAK		4 dokumen	31.900.000
3									
3 5	**Sekretariat Dewan**								
3 5 2	**Program Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah DPRD**		**Presentase fungsi pembentukan perda dalam rencana kerja DPRD yang terfasilitasi**	**100%**	**4.546.525.000**			100%	
4.05.4.04.04.02.001	Penyelenggaraan pembahasan ranperda	Kecamatan Lalabata	Jumlah kegiatan pembahasan ranperda	10 kegiatan	42.050.000	APBD + DAK		10 kegiatan	39.250.000
4.05.4.04.04.02.002	Pengkajian produk-produk hukum penyusunan ranperda inisiatif	Kecamatan Lalabata	Jumlah naskah akademik ranperda inisiatif DPRD	2 naskah	90.000.000	APBD + DAK		2 naskah	90.000.000
4.05.4.04.04.02.003	Pelaksanaan rapat paripurna DPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan	15 keputusan	175.250.000	APBD + DAK		15 keputusan	175.250.000
4.05.4.04.04.02.004	Sosialisasi ranperda	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	Jumlah pelaksanaan sosialisasi ranperda inisiatif DPRD	8 kegiatan	99.160.000	APBD + DAK		8 kegiatan	108.160.000
4.05.4.04.04.02.005	Penyusunan produk-produk hukum DPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah produk hukum yang dihasilkan	5 produk hukum	70.275.000	APBD + DAK		5 produk hukum	75.375.000
4.05.4.04.04.02.006	Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokoleran pimpinan dan anggota DPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah fasilitasi kehumasan dan keprotokoleran	12 kali	13.990.000	APBD + DAK		12 kali	14.000.000
4.05.4.04.04.02.007	Pelaksanaan koordinasi, konsultasi,kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah perjalanan pelaksanaan koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, orientasi dan pendalaman tugas oleh tiap-tiap pimpinan dan anggota DPRD	1.690 orang kali	4.055.800.000	APBD + DAK		1.690 orang kali	4.055.800.000
3 5 3	**Program Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD**		**Presentase fungsi penganggaran dan pengawasan dalam Rencana Kerja DPRD yang terfasilitasi**	**100%**	**1.059.135.000**			100%	
4.05.4.04.04.03.001	Pembahasan APBD	Kecamatan Lalabata	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	3 kegiatan	52.954.000	APBD + DAK		3 kegiatan	50.300.000
4.05.4.04.04.03.002	Pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah	Kecamatan Lalabata	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 kegiatan	17.806.000	APBD + DAK		1 kegiatan	17.800.000
4.05.4.04.04.03.003	Pelaksanaan reses	Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta	Jumlah pelaksanaan reses	3 kegiatan	828.750.000	APBD + DAK		3 kegiatan	896.250.000
4.05.4.04.04.03.004	Dengar pendapat dengan pejabat pemerintah dan masyarakat	Kecamatan Lalabata	Jumlah kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	10 kegiatan	28.525.000	APBD + DAK		10 kegiatan	28.525.000
4.05.4.04.04.03.005	Pelaksanaan rapat-rapat internal DPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah rapat yang dilaksanakan	10 kegiatan	28.350.000	APBD + DAK		10 kegiatan	77.225.000

4.05.4.04.04.03.006	Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah	Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	Jumlah kegiatan peninjauan lapangan yang dilaksanakan	4 kegiatan	16.800.000	APBD + DAK		4 kegiatan	16.800.000
4.05.4.04.04.03.007	Monitoring dan evaluasi kinerja DPRD	Kecamatan Lalabata	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	1 kegiatan	85.950.000	APBD + DAK		1 kegiatan	85.950.000
		TOTAL			**13.119.500.000**				**13.234.525.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur; Persentase Keterpenuhan Administrasi Perkantoran; Persentase Peningkatan kedisiplinan aparatur; Persentase peningkatan kapasitas SDM Aparatur**	**0 %;0 %;0 %;0 %**	**2.010.629.047**			0 %;0 %;0 %;0 %	
0.00.4.04.05.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Kali	54.299.200			12 Kali	50.000.000
0.00.4.04.05.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	27 Roda Empat 1 unit, Roda dua 26 unit	8.070.000	Pendapatan Daerah		27 Roda Empat 1 unit, Roda dua 26 unit	9.000.000
0.00.4.04.05.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan	8 Jenis, Orang	16.900.000	Pendapatan Daerah		8 Jenis, Orang	12.000.000
0.00.4.04.05.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan	5 Jenis	1.825.000	Pendapatan Daerah		5 Jenis	2.000.000
0.00.4.04.05.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Pengisian Gas	12 Kali	2.160.000	Pendapatan Daerah		24 Kali	4.000.000
0.00.4.04.05.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	95 Kali	420.000.000	Pendapatan Daerah		100 Kali	400.000.000
0.00.4.04.05.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	15 Paket	377.744.847	Pendapatan Daerah		15 Paket	250.000.000
0.00.4.04.05.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah perlengkapan gedung kantor	47 unit	246.900.000	Pendapatan Daerah		50 unit	75.000.000
0.00.4.04.05.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Luas gedung kantor/halaman yang dipelihara	248 M2	23.560.000	Pendapatan Daerah		248 M2	30.000.000
0.00.4.04.05.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	27 Unit	88.000.000	Pendapatan Daerah		27 Unit	130.000.000
0.00.4.04.05.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	33 unit	16.290.000	Pendapatan Daerah		40 unit	55.000.000
0.00.4.04.05.05.061	Pendidikan dan pelatihan formal	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan, diklat formal	51 orang	484.880.000	Pendapatan Daerah		51 orang	500.000.000
0.00.4.04.05.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	51 Orang	270.000.000	Pendapatan Daerah		51 Orang	360.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**% Dokumen Perencanaan yang disusun tepat Waktu; % Dokumen Penggangaran yang disusun Tepat Waktu; % Dokumen Pelaporan yang disusun tepat Waktu**	**0 ;0 ;0**	**58.400.000**			0 ;0 ;0	

0.00.4.04.05.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	14.900.000	Pendapatan Daerah		6 Dokumen	30.000.000
0.00.4.04.05.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja	5 Dokumen	14.000.000	Pendapatan Daerah		5 Dokumen	30.000.000
0.00.4.04.05.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	6 Dokumen	15.500.000	Pendapatan Daerah		6 Dokumen	17.000.000
0.00.4.04.05.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD, Kecamatan Lalabata, Botto	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	4 Dokumen	14.000.000	Pendapatan Daerah		4 Dokumen	20.000.000
3									
3 6	**Inspektorat**								
3 6 1	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Profesionalisme Pengawas**		**Menurunnya Jumlah Temuan dalam LHP; Persentase Tindaklanjut Temuan**	**0 LHP;100 %**	**3.294.380.000**			0 LHP;100 %	
4.06.4.04.05.01.001	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler yang Terbit	520 LHP	1.704.000.000	Pendapatan Daerah		550 LHP	1.400.000.000
4.06.4.04.05.01.003	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan (Pemutakhiran DAta)	Kabupaten, SKPD, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo	Terlaksananya Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	2 Kali	62.460.000	Pendapatan Daerah		2 Kali	70.000.000
4.06.4.04.05.01.006	Evaluasi LAKIP	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Lakip SKPD yang tepat Sasaran	35 SKPD	103.000.000	Pendapatan Daerah		35 SKPD	140.000.000
4.06.4.04.05.01.008	Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penyerapan Anggaran Belanja Barang/Jasa	SKPD, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata	Jumlah SKPD yang Review Dokumen Perencanaannya	35 SKPD	470.000.000	Pendapatan Daerah		35 SKPD	250.000.000
4.06.4.04.05.01.009	Pelatihan Teknis Pengawasan, Pengadaan Barang/Jasa, Penilaian Akuntabiltas Kinerja Pemerintah	SKPD	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	51 Orang	217.770.000	Pendapatan Daerah		51 Orang	200.000.000
4.06.4.04.05.01.010	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	SKPD, Kecamatan Ganra, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Barang, BaraE, Attang Salo, Batu-Batu, Baringeng	Jumlah Desa yang di evaluasi	49 Desa	201.150.000	Pendapatan Daerah		49 Desa	150.000.000

4.06.4.04.05.01.012	Pelaksanaan Pengawasan/Pemeriksaan Tujuan Tertentu	SKPD, Kecamatan Liliriaja, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu yang terbit	65 Kasus	322.000.000	Pendapatan Daerah		70 Kasus	260.000.000
4.06.4.04.05.01.013	Monitoring & Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan APIP & Pemeriksaan BPK	SKPD, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan APIP & Pemeriksaan BPK	4 Kali	214.000.000	Pendapatan Daerah		4 Kali	150.000.000
		TOTAL			**5.363.409.047**				**4.594.000.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan kedisiplinan peningkatan kapasitas SDM aparatur**	**100%**	**1.100.818.965**			100%	
0.00.1.05.02.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jasa listrik, air dan telepon/internet	1	40.950.000			1	42.997.500
0.00.1.05.02.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1 Tahun	11.550.000	-		1 Tahun	12.127.500
0.00.1.05.02.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan kebersihan	1 Paket	27.857.025	-		1 Paket	29.249.876
0.00.1.05.02.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Alat listrik	1 Tahun	3.150.000	-		1 Tahun	3.307.500
0.00.1.05.02.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Pengisian tabung gas	1 Tahun	3.570.000	-		1 Tahun	3.748.500
0.00.1.05.02.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kabupaten, SKPD	Rapa-rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	1 Tahun	255.081.545	-		1 Tahun	390.891.375
0.00.1.05.02.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	Honor PA/KPA, Honor PPK-SKPD, Honor Non PNS, ATK, Materai, Penggandaan, Cetak dan Makan minum	1 Tahun	446.260.395	-		1 Tahun	469.946.000
0.00.1.05.02.05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah perlengkapan gedung kantor	4 unit	30.000.000	-		1 unit	136.710.000
0.00.1.05.02.05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	SKPD	Gedung kantor yang dipelihara	1 Tahun	10.500.000	-		1 Tahun	11.025.000
0.00.1.05.02.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Kendaraan dinas yang dipelihara	1 Tahun	223.000.000	-		1 Tahun	465.403.948
0.00.1.05.02.05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	SKPD	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Tahun	18.900.000	-		1 Tahun	19.845.000
0.00.1.05.02.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten, SKPD	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	1 Tahun	30.000.000	-		1 Tahun	124.404.998
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**85.000.000**			100%	
0.00.1.05.02.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi kinerja SKPD	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	3 Dokumen	15.000.000	-		3 Dokumen	15.000.000
0.00.1.05.02.06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	7 Dokumen	20.000.000	-		7 Dokumen	20.000.000
0.00.1.05.02.06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	5 Dokumen	30.000.000	-		5 Dokumen	30.000.000
0.00.1.05.02.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	Jumklah dokumen yang dihasilkan	7 Dokumen	20.000.000	-		7 Dokumen	20.000.000
1	**Wajib**								
1 5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**								
1 5 4	**Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan**		**Meningkatnya kemampuan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana**	**100%**	**20.000.000**			100%	
1.05.1.05.02.04.002	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	70 desa/kelurahan	Tersusunnya laporan rawan/potensi bencana	1 Tahun	20.000.000	-		1 Tahun	204.513.750
1 5 5	**Program tanggap darurat dan logistik**		**Cakupan persentase kebutuhan bencana yang ditangani**	**100%**	**732.581.035**			100%	
1.05.1.05.02.05.002	Penyediaan Peralatan dan Logistik Bencana	70 desa/kelurahan	Jumlah peralatan dan logistik	1 Paket	150.300.000	-		1 Paket	372.093.750
1.05.1.05.02.05.004	Penanganan Darurat Bencana	70 desa/kelurahan	Tertanganinya penanganan darurat	1 Tahun	100.030.000	-		1 Tahun	207.931.500
1.05.1.05.02.05.006	Pemberdayaan TRC	70 desa/kelurahan	Meningkatnya kinerja TRC	1 Tahun	482.251.035	-		1 Tahun	506.363.587
1 5 6	**Program rehabilitasi/ rekonstruksi pasca bencana**		**Cakupan persentase kebutuhan bencana yang telah direhabilitasi/rekonstruksi pasca bencana**	**100%**	**15.750.000**			100%	

1.05.1.05.02.06.001	Kegiatan pendataan dan pelaporan kerusakan akibat bencana	70 desa/kelurahan	Tersedianya laporan kerusakan bencana	1 Tahun	15.750.000	-		1 Tahun	16.537.500
	TOTAL				**1.954.150.000**				**3.102.097.284**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan admnistrasi perkantoran**	**100%**	**671.038.000**			100%	
0.00.4.04.14.05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Jumlah pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listik	12 kali	22.500.000			12 kali	25.300.000
0.00.4.04.14.05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah STNK kendaraan dinas / Operasional	4 Unit	2.000.000	APBD + DAK		4 Unit	2.640.000
0.00.4.04.14.05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	SKPD	jumlah petugas kebersihan	2 orang	17.510.000	APBD + DAK		2 orang	20.900.000
			Jumlah jenis peralatan kebersihan	12 jenis				15 jenis	
0.00.4.04.14.05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD	Jumlah jenis alat listrik / penerangan bangunan	13 jenis	2.000.000	APBD + DAK		15 jenis	2.530.000
0.00.4.04.14.05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	SKPD	Jumlah pengisian tabung gas	8 kali	1.320.000	APBD + DAK		9 kali	2.750.000
0.00.4.04.14.05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	SKPD	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi	128 kali	142.906.450	APBD + DAK		158 kali	198.000.000
0.00.4.04.14.05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	SKPD	jumlah paket pelayanan perkantoran	20 jenis	288.071.550	APBD + DAK		20 jenis	352.000.000
0.00.4.04.14.05.018	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	SKPD	jumlah formasi yang ter update dalam setahun	10 berita	10.000.000	APBD + DAK		15 berita	33.000.000
0.00.4.04.14.05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	SKPD	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	4 Unit	23.460.000	APBD + DAK		8 Unit	77.000.000
0.00.4.04.14.05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipliahara	4 unit	55.000.000	APBD + DAK		4 unit	44.000.000
			jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara	1 unit				1 unit	
0.00.4.04.14.05.038	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	SKPD	jumlah perlengkapan gedung kantor yang diplihara	21 Unit	6.270.000	APBD + DAK		21 Unit	88.000.000
0.00.4.04.14.05.051	Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK)	SKPD	jumlah kendaraan dinas roda 2	1 Unit	35.000.000	APBD + DAK		1 Unit	495.000.000
			Jumlah kendaraan dinas roda 4	0 Unit				1 Unit	
0.00.4.04.14.05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	SKPD	jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	7 orang	65.000.000	APBD + DAK		10 orang	133.100.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Peresentase dokumen perencanaan yang diisusun tepat waktu**	**100%**	**35.499.600**			100%	
0.00.4.04.14.06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	SKPD	jumlah dokumen pelaporan kinerja	5 dokumen	17.500.000	APBD + DAK		5 dokumen	18.000.000
0.00.4.04.14.06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	SKPD	jumlah dokumen pelaporan keuangan	6 dokumen	1.599.800	APBD + DAK		6 dokumen	2.200.000
0.00.4.04.14.06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	SKPD	jumlha dokumen pengendalian dan evaluasi	4 dokumen	16.399.800	APBD + DAK		4 dokumen	19.800.000
3									
3 7	**Kesatuan Bangsa dan Politik**								
3 7 1	**Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**		**Terciptanya situasi konduusif**	**100%**	**842.888.000**			100%	
4.07.4.04.14.01.001	Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	SKPD	jumlah pertemuan anggota FKDM	2 kali	80.359.800	APBD + DAK		4 kali	70.000.000
4.07.4.04.14.01.002	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai - nilai luhur budaya bangsa	SKPD	jumlah peserta sarah sehan	70 orang	10.900.000	APBD + DAK		150 orang	11.000.000
4.07.4.04.14.01.004	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	SKPD	jumlah pertemuan FPK	2 kali	21.209.900	APBD + DAK		2 kali	14.000.000
4.07.4.04.14.01.005	Pencapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wasbang	SKPD	jumlah pertemuan FKUB	2 kali	22.159.800	APBD + DAK		2 kali	14.000.000
4.07.4.04.14.01.006	Pelatihan seminar, Talk Show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Kabupaten, SKPD	jumlah pelaksanaan sosialisasi / talk show	30 orang	86.485.200	APBD + DAK		80 orang	180.000.000

4.07.4.04.14.01.007	Penyelenggaraan Unit Layanan Pemberantasan Pungli (UPP)		jumlah pertemuan saber pungli	12 bulan	165.000.000	APBD + DAK		12 bulan	180.000.000
4.07.4.04.14.01.009	Penguatan Kewasapadaan dini dan penanganan terorisme, radikalisme, konflik sosial dan penyakit sosial masyarakat	SKPD	Jumlah pertemuan / rekomendasi	12 Kali	301.773.300	APBD + DAK		12 Kali	180.000.000
4.07.4.04.14.01.011	Penanganan narkoba melalui sistem pencegahan, penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika	Kabupaten, Kecamatan Lalabata, Kecamatan Ganra, Kecamatan Donri-Donri, Kecamatan Citta, Kecamatan Marioriwawo, Kecamatan Marioriawa, Kecamatan Lilirilau, Kecamatan Liliriaja	Jumlah pertemuan lintas sektor dan penyuluhan di delapan kecamatan	8 Kali	80.000.000	APBD + DAK		8 Kali	80.000.000
4.07.4.04.14.01.012	Penyusunan Rancangan Perda Narkoba	SKPD	Jumlah penysunan rancangan perda narkoba	1 kali	75.000.000	APBD + DAK		1 kali	80.000.000
3 7 2	**Program Pendidikan Politik Masyarakat**		**Tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi**	**82%**	**91.900.990**			83%	
4.07.4.04.14.02.001	Penyuluhan Kepada Masyarakat	SKPD	Jumlah peserta sosialisasi	50 Orang	12.410.000	APBD + DAK		50 Orang	20.000.000
4.07.4.04.14.02.002	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Kabupaten	Jumlah parpol	7 Parpol	47.582.500	APBD + DAK		10 Parpol	20.000.000
4.07.4.04.14.02.003	Pembinaan Ormas/LSM dalam Bidang Kesbangpol	SKPD	Jumlah pembinaan ormas / LSM	60 Orang	10.179.800	-		70 Orang	10.000.000
4.07.4.04.14.02.005	Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik	SKPD	terlaksananya pemantauan dan evaluasi perkembangan politik	10 Orang	21.728.690	APBD + DAK		40 Orang	22.200.000
		TOTAL			**1.641.326.590**				**2.395.420.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KECAMATAN MARIORIWAWO TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM APARATUR**	**100%**	**709.068.626**			100%	
0.00..05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 kali	63.600.000			12 kali	46.001.148
0.00..05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	5 unit	1.800.000	-		11 unit	5.000.000
0.00..05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	Jumlah petugas kebersihan	3 orang	23.026.000	-		4 orang	22.000.000
			Jumlah peralatan kebersihan	28 jenis				46 jenis	
0.00..05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	9 jenis	4.600.000	-		136 jenis	6.000.000
0.00..05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah peralatan rumah tangga	1 paket	43.800.000	-		8 paket	6.834.500
0.00..05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	Jumlah pengisian gas	48 kali	7.920.000	-		48 kali	5.400.000
0.00..05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	635 kali	77.183.100	-		635 kali	130.000.000
0.00..05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	41 paket	364.038.502	-		32 paket	224.231.000
0.00..05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah peralatan gedung kantor	1 unit	12.000.000	-		9 unit	104.000.000
0.00..05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	Jumlah kendaraan dinas/operasional	10 unit	53.521.024	-		12 unit	93.500.000
0.00..05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Marioriwawo, TettikenraraE, Labessi	Jumlah peralatan gedung kantor	16 unit	7.580.000	-		33 unit	8.500.000
0.00..05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek	3 ASN	50.000.000	-		4 ASN	30.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**42.770.000**			100%	
0.00..06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 dokumen	19.040.000	-		3 dokumen	15.000.000
0.00..06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	3 dokumen	1.500.000	-		5 dokumen	25.000.000
0.00..06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	6 dokumen	9.030.000	-		1 dokumen	7.000.000
0.00..06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 dokumen	13.200.000	-		3 dokumen	15.000.000
3									
3 9	**Kecamatan**								

3 9 4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	**100%**	**428.845.000**			100%	
04.09..04.001	Bupati menyapa	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	50.000.000	-		2 kali	50.000.000
04.09..04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	240 orang	14.700.000	-		240 orang	15.000.000
04.09..04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah desa yang difasilitasi	11 desa	11.780.000	-		11 desa	28.200.000
04.09..04.004	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	TettikenraraE, Labessi	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	51 orang	130.800.000	-		51 orang	180.600.000
04.09..04.005	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	TettikenraraE, Labessi	Jumlah RT, RW dan LPMK yang diberi insentif	53 orang	101.640.000	-		53 orang	184.120.000
04.09..04.006	Pembinaan kader posyandu kelurahan	TettikenraraE, Labessi	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	55 orang	82.500.000	-		55 orang	165.000.000
04.09..04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	2 kali	23.425.000	-		2 kali	15.000.000
04.09..04.008	Penyusunan Profil kelurahan	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 dokumen	14.000.000	-		2 dokumen	14.000.000
3 9 5	**Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan**		**Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana**	**100%**	**1.859.800.000**			100%	
04.09..05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kecamatan Marioriwawo	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	250 buah	16.800.000	-		250 buah	27.000.000
04.09..05.002	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	TettikenraraE, Labessi	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	10 paket	694.000.000	-		2 paket	650.000.000
04.09..05.003	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	TettikenraraE, Labessi	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun, dikembangkan, dan dipelihara	4 paket	325.000.000	-		2 paket	650.000.000
04.09..05.004	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	TettikenraraE, Labessi	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	3 paket	270.000.000	-		2 paket	650.000.000
04.09..05.005	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Labessi, TettikenraraE	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	5 paket	524.000.000	-		2 paket	650.000.000
04.09..05.007	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	TettikenraraE	Jumlah orang	40 orang	15.000.000	-		40 orang	40.000.000
04.09..05.008	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	TettikenraraE	Jumlah orang	40 orang	5.000.000	-		40 orang	40.000.000
04.09..05.010	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	TettikenraraE, Labessi	Jumlah orang/Jumlah pos	40 orang	10.000.000	-		40 orang	40.000.000
		TOTAL			**3.040.483.626**				**4.142.386.648**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KECAMATAN LALABATA TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur**	**100%**	**1.157.416.765**			100%	
0.00..05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila	Jumlah pembayaran jasa telepon, air, dan listrik	12 kali	79.125.425			12 kali	63.459.759
0.00..05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lalabata	Jumlah perpanjangan STNK (roda 4 dan roda 2)	2 unit	1.000.000	APBD + DAK	-	2 unit	2.000.000
0.00..05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila	Jumlah alat pembersih	20 jenis	26.716.200	APBD + DAK	-	20 jenis	11.551.976
0.00..05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto	Jumlah alat listrik	10 unit	2.500.000	APBD + DAK		10 unit	9.574.048
0.00..05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Botto, Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau	Jumlah pengisian BBG	12 kali	8.590.000	APBD + DAK		12 kali	11.264.136
0.00..05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung	Jumlah perjalanan dinas	140 kali	148.461.500	APBD + DAK		150 kali	325.284.138
0.00..05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba	Jumlah/bulan paket pelayanan perkantoran	12 paket	587.602.550	APBD + DAK		12 paket	438.573.054
0.00..05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja, Ompo	Jumlah perlengkapan gedung kantor	20 unit	132.550.000	-		20 unit	166.500.649
0.00..05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja	Jumlah gedung kantor	120 Unit 120m"	32.055.000	-		120 Unit 120m"	35.774.581
0.00..05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila	Jumlah kendaraan yang dipelihara	2 unit	79.610.000	-		2 unit	130.000.000
0.00..05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 unit	25.516.200	-		50 unit	12.181.181
0.00..05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Lalabata	Jumlah diklat yang diikuti	3 jenis	33.689.890	-		3 jenis	40.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah**	**100%**	**13.470.000**			100%	
0.00..06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran		Jumlah dokumen yang dihasilkan	5 dokumen	13.470.000	APBD + DAK		5 dokumen	20.000.000
3									
3 9	**Kecamatan**								

3 9 4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	**100%**	**1.546.140.000**			100%	
04.09..04.001	Bupati menyapa	Kecamatan Lalabata	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	50.000.000	APBD + DAK		2 kali	50.000.000
04.09..04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Kecamatan Lalabata	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	120 orang	12.120.000	APBD + DAK		120 orang	12.110.000
04.09..04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Kecamatan Lalabata	Jumlah desa yang difasilitasi	3 desa	4.620.000	APBD + DAK		3 desa	6.700.000
04.09..04.004	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	276 orang	718.200.000	-		276 orang	543.600.000
04.09..04.005	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto	Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	191 orang	367.200.000	APBD + DAK		191 orang	252.600.000
04.09..04.006	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Botto, Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	220 orang	330.000.000	APBD + DAK		220 orang	193.500.000
04.09..04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Kecamatan Lalabata	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	2 kali	15.000.000	APBD + DAK		2 kali	15.000.000
04.09..04.008	Penyusunan Profil kelurahan	Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto	Jumlah dokumen yang dihasilkan	7 dokumen	49.000.000	APBD + DAK		7 dokumen	49.000.000
3 9 5	**Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan**		**Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana**	**100%**	**6.187.964.812**			100%	
04.09..05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kecamatan Lalabata	jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	250 buah	27.000.000	APBD + DAK		250 buah	27.000.000
04.09..05.002	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang dibangun	7 paket	1.672.134.232	-		7 paket	1.000.000.000
04.09..05.003	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto	Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang dibangun	7 paket	467.600.000	-		7 paket	1.000.000.000
04.09..05.004	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila	Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang dibangun	7 paket	440.357.116	-		7 paket	1.000.000.000
04.09..05.005	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja	Jumlah sarana dan prasarana transportasi yang dibangun, dikembangkan dan dipelihara	7 paket	3.125.294.232	-		7 paket	3.700.000.000
04.09..05.006	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba	Jumlah orang	40 Orang	92.300.000	APBD + DAK		40 Orang	150.000.000
04.09..05.007	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	Ompo, Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja	Jumlah orang	40 Orang	30.450.000	APBD + DAK		40 Orang	100.000.000
04.09..05.008	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja, Ompo	Jumlah orang	40 Orang	75.392.116	APBD + DAK		40 Orang	150.000.000
04.09..05.009	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Lemba, Lapajung, Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja, Ompo	Jumlah orang	40 orang	179.662.116	APBD + DAK		40 orang	180.000.000
04.09..05.010	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Lalabata Rilau, Botto, Bila, Salokaraja, Ompo, Lemba, Lapajung	Jumlah orang/jumlah pos	40 Orang	77.775.000	APBD + DAK		0 Orang	150.000.000
		TOTAL			**8.904.991.577**				**9.845.673.522**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KECAMATAN DONRI-DONRI TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM aparatur**	**100%**	**412.313.653**			100%	
0.00..05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali	25.080.000			12 Kali	30.000.000
0.00..05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah STNK Kendaraan Dinas Operasional	3 Unit	1.000.000	-		3 Unit	2.000.000
0.00..05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Petugas Kebersihan	1 Orang	7.000.000	-		2 Orang	13.000.000
			Jumlah Peralatan Kebersihan	3 Jenis				3 Jenis	
0.00..05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Alat Listrik	2 Jenis	1.500.000	-		2 Jenis	1.500.000
0.00..05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Pengisian Gas	12 Kali	2.160.000	-		12 Kali	2.160.000
0.00..05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	424 Kali	86.600.000	-		450 Kali	90.000.000
0.00..05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran	5 Paket	177.063.053	-		5 Paket	180.000.000
0.00..05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Diadakan	3 Jenis	19.594.600	-		4 Jenis	50.000.000
0.00..05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Gedung Kantor	2 Unit	10.000.000	-		2 Unit	10.000.000
0.00..05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	3 Unit	51.616.000	-		3 Unit	60.000.000
0.00..05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	3 Jenis	3.000.000	-		3 Jenis	3.000.000
0.00..05.055	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Pakaian Dinas	22 Set	7.700.000	-		28 Set	9.800.000
0.00..05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Orang Yang Mengikuti Diklat / Bimtek	2 PNS	20.000.000	-		4 PNS	40.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**15.003.500**			100%	
0.00..06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	3 Dokumen	4.999.000	-		3 Dokumen	5.000.000
0.00..06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	4 Dokumen	2.400.000	-		4 Dokumen	5.000.000
0.00..06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	19 Dokumen	5.027.000	-		19 Dokumen	7.000.000
0.00..06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Dokumen Yang Dihasilkan	3 Dokumen	2.577.500	-		3 Dokumen	5.000.000
3									
3 9	**Kecamatan**								
3 9 4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa / kelurahan yang dilaksanakan**	**100%**	**99.800.000**			100%	
04.09..04.001	Bupati menyapa	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Tatap Muka Yang Dilaksanakan	2 Kali	50.000.000	-		2 Kali	50.000.000
04.09..04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Penyuluhan	300 Orang	15.000.000	-		300 Orang	15.000.000
04.09..04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	9 Desa	15.600.000	-		9 Desa	27.000.000

04.09..04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	2 Kali	19.200.000	-		2 Kali	20.000.000
3 9 5	**Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan**		**Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana**	**100%**	**24.000.000**			100%	
04.09..05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kecamatan Donri-Donri	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Diterbitkan	300 Buah	24.000.000	-		300 Buah	26.400.000
		TOTAL			**551.117.153**				**651.860.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KECAMATAN LILIRIAJA TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan pegawai dan SDM aparatur**	**100%**	**701.076.765**			100%	
0.00..05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Liliriaja, JennaE, Galung, Appanang	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 Kali	46.262.560			12 Kali	65.181.197
0.00..05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Liliriaja	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	4 STNK	1.511.000	-		4 STNK	1.665.878
0.00..05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kecamatan Liliriaja, Galung, Appanang, JennaE	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	6,16 Orang dan jenis	23.448.500	-		6,2 Orang dan jenis	26.760.762
0.00..05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Liliriaja, JennaE, Galung, Appanang	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	27 Jenis	6.799.200	-		27 Jenis	12.180.518
0.00..05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Liliriaja, Galung, Appanang, JennaE	Jumlah pengisian gas	42 Kali	7.040.000	-		42 Kali	7.408.800
0.00..05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kecamatan Liliriaja, Galung, Appanang, JennaE	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	750 Kali	84.657.698	-		750 Kali	101.882.687
0.00..05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Liliriaja, JennaE, Galung, Appanang	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	47 Paket	352.721.765	-		50 Paket	439.203.713
0.00..05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Liliriaja, Galung, Appanang, JennaE	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	25 Jenis	68.206.500	-		25 Jenis	267.310.827
0.00..05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Liliriaja, JennaE, Galung, Appanang	Jumlah/luas bangunan yang dipelihara	870 m2	28.544.225	-		870 m2	38.230.207
0.00..05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Liliriaja, Galung, Appanang, JennaE	Jumlah kendaraan yang dipelihara	15 Unit	58.595.317	-		15 Unit	72.035.917
0.00..05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Liliriaja, JennaE, Galung, Appanang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	38 Unit	13.290.000	-		38 Unit	17.254.125
0.00..05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Liliriaja	Jumlah kegiatan dan PNS yang mengikuti bimtek	3 Kegiatan/PNS	10.000.000	-		3 Kegiatan/PNS	74.602.500
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**2.500.000**			100%	
0.00..06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kecamatan Liliriaja	Jumlah dokumen yang tersusun	2 Dokumen	1.000.000	-		3 Dokumen	12.500.000
0.00..06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Liliriaja	Jumlah dokumen yang tersusun	3 Dokumen	1.500.000	-		3 Dokumen	8.000.000

3									
3	9	**Kecamatan**							
3	9	4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**		**Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan**	**100%**	**625.890.000**			100%	
		04.09..04.001	Bupati menyapa	Kecamatan Liliriaja	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 Kali	50.000.000	-		2 Kali	65.180.125
		04.09..04.002	Penyuluhan Kamtibmas		Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	120 Orang	12.000.000	-		120 Orang	15.274.035
		04.09..04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Kecamatan Liliriaja, Barang, Timusu, Rompegading, Pattojo, Jampu	Jumlah desa yang difasilitasi	5 Desa	6.250.000	-		5 Desa	7.890.625
		04.09..04.004	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	JennaE, Galung, Appanang	Jumlah guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	95 Orang	225.000.000	-		95 Orang	204.403.500
		04.09..04.005	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	JennaE, Galung, Appanang	Jumlah RT/RW/LPMK yang diberi insentif	90 Orang	176.640.000	-		90 Orang	130.580.100
		04.09..04.006	Pembinaan kader posyandu kelurahan	JennaE, Galung, Appanang	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	80 Orang	120.000.000	-		80 Orang	79.380.000
		04.09..04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Kecamatan Liliriaja	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	2 Kali	15.000.000	-		2 Kali	16.537.500
		04.09..04.008	Penyusunan Profil kelurahan	JennaE, Galung, Appanang	Jumlah dokumen yang dihasilkan	3 Dokumen	21.000.000	-		3 Dokumen	26.025.290
3	9	5	**Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan**		**Persentase Pelimpahan Kewenangan yang terlaksana**	**1.471.755.527 %**	**2.759.316.348**			1.545.343.304 %	
		04.09..05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kecamatan Liliriaja	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tepat waktu	150 Buah	28.800.000	-		150 Buah	29.814.000
		04.09..05.002	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	JennaE, Galung, Appanang	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	5 Meter/Paket	1.405.000.000	-	Dana Kelurahan	5 Meter/Paket	486.000.000
		04.09..05.003	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Galung, Appanang	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	1 Meter/Paket	199.000.000	-	Dana Kelurahan	1 Meter/Paket	336.570.023
		04.09..05.004	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	Appanang	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	1 Meter/Paket	160.000.000	-	Dana Kelurahan	1 Meter/Paket	213.234.572
		04.09..05.005	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Galung	Jumlah volume pengadaan/pembangunan/pengembangan/pemeliharaan sarana prasarana transportasi	5 Meter/Paket	523.152.116	-	Dana Kelurahan	5 Meter/Paket	330.750.000
		04.09..05.006	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	JennaE	Jumlah orang	40 Orang	55.000.000	-	Dana Kelurahan	40 Orang	40.000.000
		04.09..05.007	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan	JennaE	Jumlah orang	40 Orang	20.000.000	-	Dana Kelurahan	40 Orang	40.000.000
		04.09..05.008	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	JennaE	Jumlah orang	40 Orang	30.000.000	-	Dana Kelurahan	40 Orang	40.000.000
		04.09..05.009	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	JennaE, Galung, Appanang	Jumlah orang	40 Orang	338.364.232	-	Dana Kelurahan	40 Orang	40.000.000
				TOTAL			**4.088.783.113**				**3.245.856.901**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KECAMATAN LILIRILAU TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan admnistrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dn peningkatan kapasitas SDM aparatur**	**100%**	**863.122.146**			100%	
0.00..05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Lilirilau, Cabenge, Ujung, Pajalesang, Macanre	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 kali	43.330.831			12 kali	46.001.148
0.00..05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lilirilau	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional (3 unit)	3 unit	1.124.250	APBD + DAK		3 unit	5.000.000
0.00..05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	Jumlah petugas kebersihan & jumlah peralatan kebersihan	36 jenis	26.136.240	APBD + DAK		36 jenis	22.000.000
0.00..05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	21 jenis	6.717.600	APBD + DAK		21 jenis	6.000.000
0.00..05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	Jumlah pengisian gas	12 bulan	5.120.000	APBD + DAK		12 bulan	5.400.000
0.00..05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kecamatan Lilirilau, Macanre, Cabenge, Ujung, Pajalesang	Jumlah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi	450 kali	148.192.500	-		450 kali	130.000.000
0.00..05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	15 paket	364.215.875	-		15 paket	224.231.000
0.00..05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	Jumlah perlengkapan gedung kantor diadakan	5 unit	95.804.000	-		5 unit	29.500.000
0.00..05.031	Pengadaan mebeleur	Pajalesang, Macanre, Cabenge, Ujung	Jumlah meubeleur yang diadakan	5 unit	35.500.000	-		5 unit	43.800.000
0.00..05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pajalesang, Cabenge	Jumlah/luas gedung kantor	6 unit/M2	21.200.000	-		6 unit/M2	27.180.000
0.00..05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	jumlah kendaraan yang dipelihara	16 unit	90.401.850	-		16 unit	93.500.000
0.00..05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pajalesang, Macanre, Cabenge	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	19 unit	9.379.000	-		19 unit	8.379.000
0.00..05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Lilirilau	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	2 PNS	16.000.000	-		2 PNS	8.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**11.000.000**			100 %;100	
0.00..06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kecamatan Lilirilau	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	3 dokumen	6.000.000	-		3 dokumen	15.000.000
0.00..06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Kecamatan Lilirilau	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	4 dokumen	3.000.000	-		4 dokumen	25.000.000
0.00..06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Lilirilau	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	1 dokumen	2.000.000	-		1 dokumen	7.000.000
3									

3	9		**Kecamatan**							
3	9	4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	**100%**	**857.151.300**			100%	
	04.09..04.001	Bupati menyapa	Kecamatan Lilirilau	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	50.000.000	APBD + DAK		2 kali	50.000.000
	04.09..04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Kecamatan Lilirilau	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	50 orang	14.000.000	-		50 orang	15.000.000
	04.09..04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Kecamatan Lilirilau	Jumlah desa yang difasilitasi	8 desa	13.851.300	APBD + DAK		8 desa	27.200.000
	04.09..04.004	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	Jumlah guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	123 orang	300.600.000	APBD + DAK		123 orang	300.600.000
	04.09..04.005	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Kecamatan Lilirilau, Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	jumlah RTRW/LPMK yang diberi insentif	123 orang	232.200.000	APBD + DAK		123 orang	232.200.000
	04.09..04.006	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	Jumlah kader Posyandu yang diberi insentif	135 orang	202.500.000	APBD + DAK		135 orang	202.500.000
	04.09..04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Kecamatan Lilirilau	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kecamatan Sehat	2 kali	16.000.000	APBD + DAK		2 kali	15.000.000
	04.09..04.008	Penyusunan Profil kelurahan	Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	Jumlah dokumen yang dihasilkan	4 dokumen	28.000.000	APBD + DAK		4 dokumen	28.000.000
3	9	5	**Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan**		**Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana**	**0%**	**3.622.508.464**			0%	
	04.09..05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kecamatan Lilirilau	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	200 rekomendasi	21.600.000	APBD + DAK		200 rekomendasi	27.000.000
	04.09..05.002	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	19 paket	1.222.052.116	-		4 paket	650.000.000
	04.09..05.003	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Ujung, Macanre, Cabenge	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan pendidikan dan kebudayaan	4 paket	273.819.000	-		4 paket	650.000.000
	04.09..05.004	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	Macanre, Ujung, Pajalesang	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	3 paket	211.274.116	-		4 paket	650.000.000
	04.09..05.005	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Ujung, Pajalesang, Macanre	Tersedianya ketersediaan sarana dan prasarana Transportasi di kelurahan	8 paket	1.514.211.116	-		4 paket	650.000.000
	04.09..05.006	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat	Macanre	Jumlah orang	80 orang	129.600.000	APBD + DAK		80 orang	40.000.000
	04.09..05.008	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	Ujung, Cabenge	Jumlah orang	30 orang	60.500.000	APBD + DAK		80 orang	40.000.000
	04.09..05.009	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	jumlah orang	20 orang/kelompok	139.452.116	APBD + DAK		80 orang/kelompok	40.000.000
	04.09..05.011	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	Ujung, Pajalesang, Macanre, Cabenge	jumlah orang	40 orang	50.000.000	-		40 orang	40.000.000
			TOTAL			**5.353.781.910**				**4.353.491.148**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KECAMATAN MARIORIAWA TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM**	**100%**	**1.100.120.854**			100%	
0.00..05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batu-Batu, Attang Salo, Manorang Salo, Limpomajang, Kaca	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	123.576.000			12 kali	124.000.000
0.00..05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Marioriawa, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo, Manorang Salo	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	3 unit	1.000.000	-		3 unit	2.000.000
0.00..05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo	Jumlah petugas kebersihan dan peralatan kebersihan	8 orang	39.090.000	-		8 orang	41.000.000
0.00..05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	20 jenis	5.832.500	-		20 jenis	6.500.300
0.00..05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Marioriawa, Batu-Batu, Attang Salo, Manorang Salo, Limpomajang, Kaca	Jumlah pengisian tabung gas	73 kali	12.410.000	Pendapatan Daerah		73 kali	13.000.000
0.00..05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kecamatan Marioriawa, Batu-Batu, Attang Salo, Manorang Salo, Limpomajang, Kaca	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	760 kali	245.365.200	-		850 kali	250.000.000
0.00..05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Marioriawa, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo, Manorang Salo	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	5 paket	398.839.054	Pendapatan Daerah		5 paket	335.204.200
0.00..05.030	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Marioriawa, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo, Manorang Salo	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	105.650.000	-		7 jenis	110.000.000
0.00..05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Marioriawa, Attang Salo, Manorang Salo, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu	Luas gedung kantor yang dipelihara	2.500 m2	19.625.000	-		2.500 m2	20.000.000
0.00..05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Marioriawa, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo, Manorang Salo, Limpomajang	Jumlah kendaraan yang dipelihara	17 unit	114.533.100	-		17 unit	115.000.000
0.00..05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Marioriawa, Manorang Salo, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo	Jumlah peraltan gedung kantor yang dipelihara	33 unit	22.200.000	-		33 unit	23.000.000

0.00..05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Marioriawa	Jumlah PNS yang mengikuti bintek	3 PNS	12.000.000	-		4 PNS	15.000.000
3									
3 9	**Kecamatan**								
3 9 4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahn desa/ kelurahan yang dilaksanakan**	**100%**	**702.230.000**			100%	
04.09..04.001	Bupati menyapa		Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	50.000.000	-		2 kali	50.000.000
04.09..04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Kecamatan Marioriawa	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	120 orang	15.600.000	-		120 orang	15.000.000
04.09..04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	TellulimpoE, Patampanua, Panincong, Laringgi, BuluE	Jumlah deas yang difasilitasi	5 Desa	8.200.000	-		5 Desa	9.500.000
04.09..04.004	Pembinaan guru mengaji, imam masjid kelurahan dan penghulu syara	Manorang Salo, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo	Jumlah guru mengaji, imam mesjid kelurahan dan penghulu syara yang diberi insentif	112 orang	280.200.000	-		112 orang	285.000.000
04.09..04.005	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan	Kaca, Batu-Batu, Attang Salo, Manorang Salo, Limpomajang	JUmlah RT,RW/LPMK yang diberi insentif	88 orang	169.680.000	-		88 orang	170.000.000
04.09..04.006	Pembinaan kader posyandu kelurahan	Manorang Salo, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo	Jumlah kader posyandu yang diberi insentif	85 orang	127.500.000	-		85 orang	128.500.000
04.09..04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Kecamatan Marioriawa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	2 kali	16.050.000	-		2 kali	17.000.000
04.09..04.008	Penyusunan Profil kelurahan	Attang Salo, Manorang Salo, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	35.000.000	-		1 Dokumen	35.000.000
3 9 5	**Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan**		**Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana**	**100%**	**4.870.604.680**			100%	
04.09..05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan		JUmlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	200 Buah	21.600.000	-		200 Buah	21.600.000
04.09..05.002	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo, Manorang Salo	Jumlah pengadaan,pembangunan,pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang direhab/dibangun	5 Paket	1.428.000.000	-		5 Paket	1.450.000.000
04.09..05.003	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	Manorang Salo, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan yang direhab/dibangun	5 Paket	150.000.000	-		5 Paket	155.000.000
04.09..05.004	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehataan	Batu-Batu, Attang Salo, Manorang Salo, Limpomajang, Kaca	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang direhab/dibangun	5 paket	455.000.000	-		5 paket	500.000.000
04.09..05.005	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi	Manorang Salo, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo	Jumlah pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang direhab/dibangun	5 paket	2.627.100.448	-		5 paket	2.663.000.000
04.09..05.009	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam pengelolaan lembaga kemasyarakatan	Manorang Salo, Limpomajang, Kaca, Batu-Batu, Attang Salo	Jumlah orang	40 orang	188.904.232	-		40 orang	190.000.000
		TOTAL			**6.672.955.534**				**6.744.304.500**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KECAMATAN GANRA TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM**	**100%**	**294.461.938**			100%	
0.00..05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Ganra	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	1 Tahun	17.681.438			1 Tahun	25.500.000
0.00..05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Ganra	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	3 unit	850.000	-		4 unit	1.250.000
0.00..05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kecamatan Ganra	Jumlah petugas kebersihan	2 orang	9.021.000	-		2 orang	10.000.000
			Jumlah peralatan kebersihan	8 jenis				8 jenis	
0.00..05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Ganra	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan	5 jenis	1.550.500	-		7 jenis	3.500.000
0.00..05.007	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kecamatan Ganra	Jumlah peralatan rumah tangga	5 jenis	1.685.000	-		6 jenis	3.000.000
0.00..05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Ganra	Jumlah pengisian tabung gas	1 Tahun	1.750.000	-		12 Tahun	2.500.000
0.00..05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	Kecamatan Ganra	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	398 kali	67.674.000	-		470 kali	114.000.000
0.00..05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Ganra	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	15 paket	98.721.000	-		15 paket	120.800.000
0.00..05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Ganra	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	2 jenis	9.254.000	-		5 jenis	25.000.000
0.00..05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Ganra	Jumlah/Luas gedung kantor	3.732 M2	5.985.000	-		3.732 M2	25.000.000
0.00..05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Ganra	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 unit	51.540.000	-		4 unit	70.500.000
0.00..05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Ganra	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	22 unit	8.750.000	-		22 unit	9.500.000
0.00..05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Ganra	jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	2 PNS	20.000.000	-		4 PNS	40.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**19.000.000**			100%	
0.00..06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kecamatan Ganra	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	6 dokumen	7.000.000	-		6 dokumen	10.000.000
0.00..06.011	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Kecamatan Ganra	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	5 dokumen	4.000.000	-		5 dokumen	6.000.000
0.00..06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Ganra	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang disusun	6 dokumen	5.000.000	-		6 dokumen	10.000.000
0.00..06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Kecamatan Ganra	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi yang disusun	4 dokumen	3.000.000	-		4 dokumen	5.000.000
3									
3 9	**Kecamatan**								
3 9 4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**		**Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan**	**100%**	**87.390.000**			100%	
04.09..04.001	Bupati menyapa	Kecamatan Ganra	Jumlah tatap muka yang dilaksanakan	2 kali	50.000.000	-		2 kali	50.000.000
04.09..04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Kecamatan Ganra	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	264 orang	14.640.000	-		264 orang	14.640.000
04.09..04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Kecamatan Ganra	Jumlah desa yang difasilitasi	4 desa	7.750.000	-		4 desa	7.750.000
04.09..04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Kecamatan Ganra	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	2 kali	15.000.000	-		2 kali	15.000.000
3 9 5	**Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Diimpahkan**		**Persentase pelimpahan kewenangan yang terlaksana**	**100%**	**21.600.000**			100%	

04.09..05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kecamatan Ganra	Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	250 buah	21.600.000	-		250 buah	21.600.000
		TOTAL			**422.451.938**				**590.540.000**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KECAMATAN CITTA TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN SOPPENG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 (N+1)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0	**Non Urusan**								
0 0	**Non Urusan**								
0 0 5	**Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaran Urusan**		**Persentase Keterpenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, kedisiplinan aparatur dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur**	**100%**	**354.336.865**			100%	
0.00..05.001	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Citta	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan listrik	12 kali	42.000.000			12 kali	46.305.000
0.00..05.003	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Citta	Roda 2	9 unit	2.400.000	-		9 unit	3.570.000
			Roda 4	2 unit				2 unit	
0.00..05.005	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Kecamatan Citta	Jumlah Petugas Kebersihan	4 orang	10.500.000	-		4 orang	11.025.000
			Jumlah Peralatan Kebersihan	25 jenis				25 jenis	
0.00..05.006	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kecamatan Citta	jumlah alat listrik/penerangan bangunan	20 unit	2.000.000	-		20 unit	3.000.000
0.00..05.009	Penyediaan bahan logistik kantor	Kecamatan Citta	Jumlah Pengisian Tabung Gas	12 kali	2.040.000	-		12 kali	2.500.000
0.00..05.010	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya		Jumlah Rapat-Rapat koordinasi & konsultasi	300 kali	50.501.565	-		300 kali	105.000.000
0.00..05.011	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Citta	jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	6 paket	134.740.300	-		6 paket	115.500.000
0.00..05.028	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kecamatan Citta	jumlah perlengkapan gedung kantor	3 unit	9.000.000	-		3 unit	45.251.470
0.00..05.031	Pengadaan mebeleur	Kecamatan Citta	Jumlah Pengadaan Mebeleur	3 Unit	6.000.000	-		3 Unit	42.505.837
0.00..05.034	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Citta	jumlah/luas gedung kantor	868 m2	8.955.000	-	-	868 m2	55.500.000
0.00..05.036	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Citta	Roda 4	2 unit	57.200.000	-		2 unit	123.427.500
			Roda 2	9 unit				10 unit	
0.00..05.040	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kecamatan Citta	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	25 unit	9.000.000	-		25 unit	15.750.000
0.00..05.063	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Citta	Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek	2 PNS	20.000.000	-		2 PNS	18.000.000
0 0 6	**Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen pelaporan yang disusun tepat waktu**	**100%**	**14.699.900**			100%	
0.00..06.010	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Kecamatan Citta	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	6 Dokumen	4.699.900	-		6 Dokumen	15.750.000
0.00..06.012	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Citta	Jumlah Dokume Pelaporan Keuangan	6 Dokumen	5.000.000	-		6 Dokumen	15.750.000
0.00..06.013	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Kecamatan Citta	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	4 Dokumen	5.000.000	-		4 Dokumen	10.500.000
3									
3 9	**Kecamatan**								
3 9 4	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Koordinasi Kegiatan, Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan**		**Persentase Penyelenggaraan pemerintahan umum,koordinasi kegiatan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang di laksanakan**	**100 Kali**	**85.990.000**			100 Kali	
04.09..04.001	Bupati menyapa	Kecamatan Citta	Jumlah Tatap Muka yang dilaksanakan	2 kali	50.000.000	-		2 kali	50.000.000
04.09..04.002	Penyuluhan Kamtibmas	Kecamatan Citta	jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan	120 orang	14.500.000	-		120 orang	15.986.250
04.09..04.003	Pendampingan pengelolaan dana ADD desa	Kecamatan Citta	Jumlah Desa yang difasilitasi	4 Desa	6.490.000	-		4 Desa	7.155.225

04.09..04.007	Penyelenggaraan kecamatan sehat	Kecamatan Citta	Jumlah pelaksanaan koordinasi kecamatan sehat	2 kali	15.000.000	-		2 kali	15.750.000
3 9 5	**Program Penyelenggaraan Kewenangan yang Dilimpahkan**		**Persentase Pelimpahan kewenangan yang terlaksana**	**100%**	**21.600.000**			100%	
04.09..05.001	Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kecamatan	Kecamatan Citta	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	100 Buah	21.600.000	-		100 Buah	23.814.000
		TOTAL			**476.626.765**				**742.040.282**

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuanuntuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhir tahun perencanaan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2020. Hal ini ditunjukan dari indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun perencanaan sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2016-2021 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan Indikator kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diuraikan pada tabel berikut ini :

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Soppeng. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator Kionerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD untuk tahun perencanaan Tahun 2020.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Soppeng

No.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2020
1	Peningkatan PDRB dari sektor pertanian/perkebunan (Juta Rupiah)	%	9.65
2	APM SD/ Sederajat	%	100
3	APM SMP/ Sederajat	%	100
4	IKM atas pelayanan dasar berbasis SPM	%	81.75
5	IKM atas layanan PTSP	%	81.75
6	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		1
7	Rasio bayi berakte kelahiran		1
8	Angka Kriminalitas yang tertangani	%	12.14
9	Peningkatan PDRB Sektor Pariwisata	%	2
10	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0.39
11	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	100
12	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	100
13	Nilai akuntabilitas daerah		B
14	Opini Laporan Keuangan		WTP
15	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	%	41.18
16	Persentase balita gizi buruk	%	0
17	Prevalensi balita gizi kurang	%	0
18	Prevelensi Balita Stunting	0	<25%
19	Persentase penyelenggara ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi	%	100

20	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	12.25
21	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100
22	Produksi Beras	Ton	214,219
23	Indeks Kualitas Air		1.00
24	Indeks Kualitas Udara		91.71
25	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		0.48
26	Jumlah nilai Investasi berskala nasional	Juta Rp	22,301
27	Angka kemiskinan	Jiwa	16,941
28	Tingkat pengangguran terbuka	%	2.35667
29	Kontrbusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	15.9
30	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	12.58

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Soppeng

ASPEK/ FOKUS/BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
Pertumbuhan PDRB	%	8.50
Laju inflasi	%	4-5
PDRB per kapita	Ribu Rp	47.476
Indeks Gini		0.330
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68.66
Angka melek huruf	%	99.82
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.92
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.15
Angka usia harapan hidup	Tahun	69.02
Persentase balita gizi buruk	%	0
Prevalensi balita gizi kurang	%	0
Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	89
Tingkat pengangguran terbuka	%	2.36
Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	0.182
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	9
Persentase PAD terhadap pendapatan	%	13%
Opini BPK		WTP
Penguatan cadangan pangan		20 Ton
Penanganan daerah rawan pangan		0
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	30.62
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	12.5
Produksi sektor pertanian	Ton	377.895,32
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	29.05

sektor pertanian/ perkebunan		
Produksi sektor perkebunan		21,412.22
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	6.26
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	4.57
Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	7.37
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	15.9
Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		12.58
Pertumbuhan Industri		0.33
ASPEK DAYA SAING DAERAH		
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	771.948
Nilai tukar petani		104.33
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	39.24
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	6.12
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)		-93,571
Angka kriminalitas yang tertangani	%	12.14
Rasio ketergantungan		0.47
ASPEK PELAYANAN UMUM		
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR		
PENDIDIKAN		
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	100
Angka partisipasi kasar		
Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	%	100
Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	%	88.36
Angka pendidikan yang ditamatkan	%	
Angka Partisipasi Murni		
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	
Angka partisipasi sekolah		
Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100
Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	100
Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C		
Angka Putus Sekolah:		
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	
Angka Kelulusan:		
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	
Angka Melanjutkan (AM):		
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100
Fasilitas Pendidikan:		
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	90.92
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		121.21

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah		52.38
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		20
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah		20
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	100
KESEHATAN		
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup		0
Angka kelangsungan hidup bayi		100
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		0
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		0
Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		0
Rasio posyandu per satuan balita		24.90
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0.28
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0.008
Rasio dokter per satuan penduduk		0.414
Rasio tenaga medis per satuan penduduk		1
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		100
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	100
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	100
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	100
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		0
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100
Penderita diare yang ditangani	%	100
Angka kejadian Malaria		0
Tingkat kematian akibat malaria		0
Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		0
Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir		
Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan		0

komprehensif tentang HIV/AIDS		
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100
Cakupan kunjungan bayi		100
Cakupan puskesmas		212.5
Cakupan pembantu puskesmas	%	62.86
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	100
Cakupan pelayanan nifas	%	100
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100
Cakupan pelayanan anak balita	%	100
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 -24 bulan keluarga miskin	%	100
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
PEKERJAAN UMUM		
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik		0.39
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	39
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	100
Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	0
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	95.4
Persentase penduduk berakses air minum	%	100
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	100
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		15.58
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		1.94
PENATAAN RUANG		
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	38.9
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	1,651.05
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	13.5
Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN		
Rasio rumah layak huni	%	90.02
Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	0.0006
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	68.49
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	74
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100
Persentase Penegakan PERDA	%	100
SOSIAL		
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	100
Persentase PMKS yang tertangani	%	100
Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100
Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100
Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100
Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100
Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	100
LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR		
TENAGA KERJA		
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0
Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	%	100
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	57.60
Keselamatan dan perlindungan	%	4.80
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	2.72
Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	100
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	8.14
Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	100
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	100
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	12.25
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	20
Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	92
Rasio KDRT	%	0
Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	98.12
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	60
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100
Cakupan layanan pemulangan bagi	%	100

perempuan dan anak korban kekerasan		
Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	95.29
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		1.31
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA		1.1
Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi		
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		2.57
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	65.43
PANGAN		
Ketersediaan pangan utama	%	100
Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi per Kpt	191,547.00
	Protein per Kpt	1,303.05
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	60
PERTANAHAN		
Persentase luas lahan bersertifikat	%	67.78
Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100
Penyelesaian izin lokasi	%	100
LINGKUNGAN HIDUP		
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	Ada
Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	ada/tidak ada	Ada
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada/tidak ada	Ada
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air		1
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara		91.71
Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan		0.48
Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		60
Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	ada/tidak ada	ada
Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	ada/tidak ada	ada
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada/tidak ada	ada
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.		100
Timbulan sampah yang ditangani		70
Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	%	97
Persentase cakupan area pelayanan	%	33.33
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	70
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	%	84.65
Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	%	0
Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	%	100
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk		1
Rasio bayi berakte kelahiran		1
Rasio pasangan berakte nikah		0.49
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak ada	Ada
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	100
Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	98.1
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		9
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		0.2
Persentase LSM aktif	%	100
Persentase LPM Berprestasi	%	4
Persentase PKK aktif	%	100
Persentase Posyandu aktif	%	100
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	30.12
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		0.07
Total Fertility Rate (TFR)		2.3
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Pendudu	%	100
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		1
Rata-rata jumlah anak per keluarga		1.21
Ratio Akseptor KB		0.75
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49		0.75
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	13.74
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		26
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	48
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	56
Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	56
Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	53
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	7.75
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	83
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	24.64
Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100
Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100
Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0
Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	83
Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	10.71
Rata-rata usia kawin pertama wanita	tahun	17

PERHUBUNGAN		
Jumlah arus penumpang angkutan umum		1344
Rasio ijin trayek		0.26
Jumlah uji kir angkutan umum		98
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		-
Persentase layanan angkutan darat	%	60
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	0.59
Pemasangan Rambu-rambu	%	90
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		0.02
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum		504,000
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun		504,000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		575
Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	66
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	80
Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	80
Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	60
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		
Persentase koperasi aktif	%	91.36
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	98.94
PENANAMAN MODAL		
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)		25
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Juta Rp	22,300.50
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)		947.7
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100
Cakupan pembinaan olahraga	%	100
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	90
Cakupan pembinaan atlet muda	%	52.73
Jumlah atlet berprestasi		6
Jumlah prestasi olahraga		14
STATISTIK		
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	tersedia
Buku ”kabupaten dalam angka”	ada/tidak ada	Ada
Buku ”PDRB”	ada/tidak ada	Ada
PERSANDIAN		
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	%	13
KEBUDAYAAN		
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	kali	11
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		2
PERPUSTAKAAN		
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	3.58
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	30.99
Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0.18
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun		8.730
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan		14,943
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat		100
KEARSIPAN		
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	64.85
Peningkatan SDM pengelola kearsipan		1

LAYANAN URUSAN PILIHAN		
PARIWISATA		
Kunjungan wisata	%	1.17
Lama kunjungan Wisata	hari	3
PAD sektor pariwisata	%	0.03
PERTANIAN		
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	32.6
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	12.14
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	29.05
Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	%	100
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton/ha	5.89
Cakupan bina kelompok petani	%	98.6
KEHUTANAN		
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	45,98
Persentase pertambangan tanpa ijin	%	0
PERDAGANGAN		
Ekspor Bersih Perdagangan		
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal		
PERINDUSTRIAN		
Cakupan bina kelompok pengrajin	%	98.93
TRANSMIGRASI		
Persentase transmigran swakarsa		17.88
KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Produksi perikanan	%	196.5
Konsumsi ikan	%	100
Cakupan bina kelompok nelayan	%	0
Produksi perikanan kelompok nelayan	%	95.6
Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	
Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	%	0.14
Nilai tukar nelayan		104.43
PENUNJANG URUSAN		
PERENCANAAN PEMBANGUNAN		
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100
KEUANGAN		
Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP
Persentase SILPA	%	6.99
Persentase SILPA terhadap APBD	%	6.91
Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0
Persentase belanja pendidikan (20%)	%	32.7
Persentase belanja kesehatan (10%)	%	26.12
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		49.95
Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		0.28
Penetapan APBD	tepat	Tepat Waktu

	waktu/tidak tepat waktu	
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	JP	14.74
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	11.79
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	62.45
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		37
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		146
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		3277
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100
PENERAPAN SIDa :		
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	0
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	0
PENGAWASAN		
Persentase tindak lanjut temuan	%	100
Persentase pelanggaran pegawai	%	0
Jumlah temuan BPK		8
SEKRETARIAT DEWAN		
Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada/tidak ada	Ada
Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak ada	Ada
Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak ada	Ada

6.3. Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal

Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Tabel 6.3.
Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal

NO	URUSAN/ JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA SPM	SATUAN	TARGET 2020
1	**PENDIDIKAN**			
1:01	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	%	100
1:02	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	100
1:03	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100
2	**KESEHATAN**			
2:01	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
2:02	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
2:03	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
2:04	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
2:05	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
2:06	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
2:07	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
2:08	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
2:09	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
2:10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	100
2:11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
2:12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
3	**PEKRJAAN UMUM**			
3:01	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100
3:02	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100
4	**PERUMAHAN RAKYAT**			
4:01	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
4:02	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
5	**TRANTIBUMLINMAS**			
5:01	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100
5:02	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100
5:03	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100
5:04	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100
5:05	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100
6	**SOSIAL**			
6:01	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
6:02	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
6:03	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100
6:04	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100
6:05	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	100

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan penjabaran dari pelaksanaan tahun ke lima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020. RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yaang akan dilaksanakan Tahun 2020.

Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD) dan jangka menengah (RPJMD). Mekanisme penyusunan RKPD Kabupaten Soppenga Tahun 2020 dimulai dengan dilaksanakannya Musrenbang RKPD pada awal Tahun 2019 mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kabupaten dengan menggunanakan Perencanaan Pembangunan berbasis E Planning .

Melalui proses tersebut diharapkan substansi RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020 nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah baik yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi global beserta dampak-dampak yang ditimbulkanya maupun perkembangan internal yang didorong oleh terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan kepentingan internal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan Tahun 2020.

Daftar program dan kegiatan dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum serta melakukan inovasi dalam mendukung pencapaian kinerja daerah, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan dalam RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya pelaksanaan program dan kegiatan perlu melihat seluruh potensi pembiayaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, sehingga terjadi sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan menyesuaikan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) masing-masing, sebagai dasar dan acuan pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2020.

Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program-program dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD tahun 2020 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing, yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Soppeng.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini disusun agar dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumen – dokumen lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga bias terwujud sinergi diantara dokumen-dokumen yang ada. Namun demikian dokumen akan lebih bermakna apabila adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjadikan dokumen ini sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Soppeng.

BUPATI SOPPENG

H. A. KASWADI RAZAK, SE

BAPPELITBANGDA

KAB. SOPPENG